



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2  
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Rembang Daerah Nomor 112);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 142);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN  
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
  - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH  
memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
  - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH  
memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2016-2021.
  - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.

- f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. BAB IX : PENUTUP memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 2. Ketentuan dalam lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA  
TENGAH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2  
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Rembang. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 belum didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD.

2. Evaluasi hasil RPJMD

a. substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Rembang setiap tahun belum jelas arahnya.

b. diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, yang mengamanatkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan restrukturisasi perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Rembang yang menyebabkan berubahnya jumlah perangkat daerah serta terjadinya perubahan program-program pembangunan beserta indikatornya dikarenakan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang baru.

c. bahwa dalam rangka memberikan ukuran pencapaian tujuan dalam RPJMD 2016-2021 perlu ditambahkan indikator tujuan yang merupakan dasar mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi Bupati, Wakil Bupati.

d. bahwa dari 96 (sebilan puluh enam) indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, 33 (tiga puluh dua) indikator atau 33% (tiga puluh tiga persen) telah mencapai target pada Tahun 2017 sehingga perlu dirumuskan kembali indikator sasaran, target kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

e. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 perlu menambahkan indikator daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- f. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan sasaran, strategi, arah kebijakan maupun indikatornya belum selaras dan berdampak langsung pada keluarga miskin.
3. Terkait akuntabilitas kinerja daerah, saat ini nilai AKIP Kabupaten Rembang Tahun 2017-2018 adalah CC. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan :
    - a. sinkronisasi kebijakan daerah RPJMD dengan kebijakan Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah;
    - b. penjabaran (*cascading*) kinerja dituangkan secara berjenjang dalam indikator kinerja RPJMD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk Tahun 2020-2021.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup Jelas.

### Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
REMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN  
2016-2021

**PERUBAHAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**(PERUBAHAN RPJMD)**  
**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini merupakan bagian dari keluaran atas pentahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Sesuai dengan substansi yang melatarbelakangi perubahan, maka di dalamnya memberikan penambahan porsi atas :

1. *Pengaturan Kinerja Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.*

Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, terdapat point penting terkait Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 belum berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD.

2. *Belum memuat indikator Daya Saing Daerah.*

BAB IX RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, belum memuat indikator Daya Saing Daerah sebagaimana dimanakan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. *Belum memuat Strategi Baru dalam Penanggulangan Kemiskinan.*

Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menetapkan Strategi Baru dalam Penanggulangan Kemiskinan yang belum tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

4. *Masih rendahnya hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).*

Saat ini, Pemerintah Pusat telah menempatkan hasil evaluasi AKIP sebagai salah satu bagian dalam penghitungan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Dalam penilaian tersebut, komponen perencanaan mempunyai bobot terbanyak di antara 4 (empat) komponen lainnya, yaitu sebesar 30%. Oleh karena itu, konstruksi perencanaan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan Kementerian PAN dan RB menjadi kebutuhan bagi setiap Daerah.

Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dan 2018 nilai SAKIP masing-masing 56,87 dan 58,64 (CC). Dalam penilaian tersebut komponen perencanaan dengan nilai 2017 sebesar 19,59 dan 2018 sebesar 19,91. Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten Rembang sampai saat ini belum mendapatkan DID karena nilainya masih CC.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Namun demikian, terdapat hal-hal pokok yang akan tetap menjadi komitmen bersama untuk dijaga, yaitu : Visi dan Misi yang merupakan penterjemahan atas janji yang telah disampaikan pada saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Secara umum, Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2016 – 2021 ini disusun dalam 9 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III membahas tentang Gambaran Keuangan Daerah, Bab IV membahas Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, Bab V membahas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Bab VI membahas Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, Bab VII akan membahas Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Bab VIII akan membahas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bab IX Penutup.

Harapan kami, Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Tak lupa kami mohon masukan kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Rembang, April 2019

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	iii
DAFTAR GAMBAR -----	vi
DAFTAR TABEL -----	vii
DAFTAR GRAFIK -----	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN -----</b>	<b>I.1</b>
1.1. Latar Belakang -----	I.1
1.2. Dasar Hukum -----	I.3
1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Rembang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya -----	I.6
1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2015-2019 -----	I.7
1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 -----	I.8
1.3.3. Amanat RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 -----	I.10
1.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang --	I.10
1.3.5. Hubungan Antar Dokumen -----	I.16
1.4. Maksud dan Tujuan -----	I.18
1.5. Sistematika Penulisan -----	I.18
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH -----</b>	<b>II.1</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi -----	II.1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah -----	II.1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah -----	II.9
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana -----	II.15
2.1.4. Aspek Demografi -----	II.16
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat -----	II.19
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi -----	II.19
2.2.2. Struktur Ekonomi -----	II.21
2.2.3. Inflasi -----	II.28
2.2.4. Indeks Gini -----	II.30
2.2.5. Kemiskinan -----	II.30
2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia -----	II.33
2.3. Aspek Pelayanan Umum -----	II.39
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar -----	II.39
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar -----	II.51
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan -----	II.76
2.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan -----	II.85
2.4. Aspek Daya Saing Daerah -----	II.91
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah -----	II.91
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah -----	II.92
2.4.3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah -----	II.97
2.4.4. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah -----	II.97
2.4.5. Inovasi Pelayanan Publik -----	II.98
2.4.6. Inovasi Daerah Lainnya -----	II.99
2.4.7. Daya Dukung Inovasi Daerah -----	II.99
2.5. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018 -----	II.100
2.5.1. Capaian target Kinerja SPM -----	II.100
<b>BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH -----</b>	<b>III.1</b>
3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2013-2018 -----	III.1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD -----	III.1
3.1.2. Neraca Daerah -----	III.17
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2018 -----	III.22

3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran -----	III.22
3.2.2.	Analisis Pembiayaan -----	III.25
<b>BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH -----</b>		<b>IV.1</b>
4.1.	Permasalahan Pembangunan -----	IV.1
4.1.1.	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar -----	IV.1
4.1.2.	Urusan Pemerintah Wajib Bukan Pelayanan Dasar -----	IV.4
4.1.3.	Urusan Pemerintah Pilihan -----	IV.8
4.1.4.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan -----	IV.9
4.1.5.	Fungsi Lain -----	IV.10
4.2.	Permasalahan Pokok Pembangunan -----	IV.9
4.2.1.	Tingginya Angka Kemiskinan -----	IV.11
4.2.2.	Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan -----	IV.11
4.2.3.	Rendahnya Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian -----	IV.12
4.2.4.	Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar -----	IV.13
4.2.5.	Rendahnya kualitas sumber daya manusia -----	IV.15
4.3.	Isu Strategis Pembangunan Daerah -----	IV.16
4.3.1.	Lingkungan Strategis -----	IV.16
4.3.2.	Isu Strategis Kabupaten Rembang -----	IV.22
<b>BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN -----</b>		<b>V.1</b>
5.1.	Visi -----	V.1
5.1.1.	Masyarakat Sejahtera -----	V.1
5.1.2.	Semangat Kebersamaan -----	V.1
5.1.3.	Pemberdayaan Masyarakat -----	V.2
5.1.4.	Kewirausahaan -----	V.2
5.2.	Misi -----	V.3
5.3.	Program Unggulan -----	V.5
<b>BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRA PEMBANGUNAN DAERAH -----</b>		<b>VI.1</b>
6.1.	Strategi -----	VI.1
6.2.	Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah -----	VI.13
6.3.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Rembang -----	VI.15
6.3.1.	Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Rembang -----	VI.18
6.3.2.	Arah Pengembangan Wilayah Banglor -----	VI.18
6.4.	Program Pembangunan Daerah -----	VI.20
<b>BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH -----</b>		<b>VII.1</b>
7.1.	Kerangka Pendanaan -----	VII.1
7.2.	Program Perangkat Daerah -----	VII.8
<b>BAB. VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH -----</b>		<b>VIII.1</b>
<b>BAB. IX PENUTUP -----</b>		<b>IX.1</b>
9.1.	Pedoman Transisi -----	IX.1
9.2.	Kaidah Pelaksanaan -----	IX.1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya -----	I.7
Gambar 2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang -----	II.2
Gambar 2.2	Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang -----	II.3
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Rembang -----	II.4
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Rembang -----	II.8
Gambar 2.5	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Rembang -----	II.9
Gambar 2.6	Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rembang -----	II.13
Gambar 2.7	Peta Rawan Bencana Kabupaten Rembang -----	II.16
Gambar 2.8	Ilustrasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang ----	II.34
Gambar 2.9	Ilustrasi APK PAUD Tahun 2018 -----	II.39
Gambar 4.1	Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Rembang -----	IV.10
Gambar 5.1	Kerangka Logis Pencapaian Visi -----	V.8
Gambar 6.1	Skema Strategi Pencapaian Misi 1 -----	VI.2
Gambar 6.2	Skema Strategi Pencapaian Misi 2 Tujuan 1 -----	VI.4
Gambar 6.3	Skema Strategi Pencapaian Misi 2 Tujuan 2 -----	VI.5
Gambar 6.4	Skema Strategi Pencapaian Misi 3 -----	VI.6
Gambar 6.5	Skema Strategi Pencapaian Misi 4 -----	VI.7
Gambar 6.6	Skema Strategi Pencapaian Misi 5 -----	VI.8
Gambar 6.7	Skema Strategi Pencapaian Misi 6 Tujuan 1 -----	VI.9
Gambar 6.8	Skema Strategi Pencapaian Misi 6 Tujuan 2 -----	VI.9
Gambar 6.9	Skema Strategi Pencapaian Misi 7 -----	VI.10
Gambar 6.10	Peta Pengembangan Kawasan Banglor -----	VI.19

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 -----	I.11
Tabel 1.2	Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 -----	I.12
Tabel 1.3	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Rembang Tahun 2011-2031 -----	I.13
Tabel 1.4	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 -----	I.14
Tabel 2.1	Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.1
Tabel 2.2	Daerah Aliran Sungai dalam WS Jratunseluna di Kabupaten Rembang -----	II.5
Tabel 2.3	Hidrogeologi Kabupaten Rembang -----	II.6
Tabel 2.4	Pemanfaatan Sumber-Sumber Mata Air di Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.7
Tabel 2.5	Curah Hujan Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.8
Tabel 2.6	Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 -----	II.9
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.16
Tabel 2.8	Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.17
Tabel 2.9	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2017 -----	II.19
Tabel 2.10	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 – 2017 (%) -----	II.20
Tabel 2.11	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 (%) -----	II.21
Tabel 2.12	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 – 2017 -----	II.23
Tabel 2.13	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 – 2017 -----	II.24
Tabel 2.14	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Rembang Tahun 2013 – 2017 -----	II.25
Tabel 2.15	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Rembang Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah) -----	II.27
Tabel 2.16	Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 – 2017 (%) -----	II.29
Tabel 2.17	Indeks Gini Kabupaten Rembang Tahun 2013 – 2017 -----	II.30
Tabel 2.18	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.31
Tabel 2.19	Data Kemiskinan Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karisidenan Pati Tahun 2018 -----	II.31
Tabel 2.20	Data IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Eks Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 -----	II.33
Tabel 2.21	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018	II.34

Tabel 2.22	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018 -----	II.35
Tabel 2.23	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018 -----	II.36
Tabel 2.24	Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Guru Bersertifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2014 – 2018 -----	II.41
Tabel 2.25	Jumlah Kasus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan 2018 -----	II.42
Tabel 2.26	Jumlah Kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.43
Tabel 2.27	Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.43
Tabel 2.28	Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.44
Tabel 2.29	Neraca Air Kabupaten Rembang -----	II.45
Tabel 2.30	Perkembangan Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.47
Tabel 2.31	Data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2018 -----	II.47
Tabel 2.32	Luas Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Rembang Tahun 2017-2018 -----	II.48
Tabel 2.33	Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Rembang -----	II.49
Tabel 2.34	Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Remban Tahun 2014-2018 -----	II.50
Tabel 2.35	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.51
Tabel 2.36	Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.52
Tabel 2.37	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Kabupaten Rembang, Tahun 2013-2017 -----	II.53
Tabel 2.38	Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pppt Semai “Rwc3” Rembang -----	II.54
Tabel 2.39	Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.55
Tabel 2.40	Data Timbulan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 -----	II.56
Tabel 2.41	Perbandingan Volume Sampah Terangkut dengan Total Timbulan Sampah Kabupaten Rembang -----	II.57
Tabel 2.42	Perkembangan Banyaknya Sarana Pengumpulan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.58
Tabel 2.43	Pengukuran Kualitas Udara Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.58
Tabel 2.44	Pengukuran Kualitas Air Kabupaten Rembang Tahun 2018	II.59
Tabel 2.45	Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Rembang -----	II. 59
Tabel 2.46	Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.61
Tabel 2.47	Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018-----	II.61
Tabel 2.48	Perkembangan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2018 -----	II.62
Tabel 2.49	Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 -----	II.64
Tabel 2.50	Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 -----	II.65
Tabel 2.51	Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 -----	II.66

Tabel 2.52	Perkembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.68
Tabel 2.53	Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.69
Tabel 2.54	Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018-----	II.70
Tabel 2.55	Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.71
Tabel 2.56	Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.761
Tabel 2.57	Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 -----	II.71
Tabel 2.58	Data Kelompok Kesenian Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.73
Tabel 2.59	Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.74
Tabel 2.60	Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.74
Tabel 2.61	Perkembangan Pelaksanaan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.75
Tabel 2.62	Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kearsipan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.76
Tabel 2.63	Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.77
Tabel 2.64	Perkembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.78
Tabel 2.65	Perkembangan Urusan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.79
Tabel 2.66	Perkembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.80
Tabel 2.67	Perkembangan Produksi Hortikultura di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.81
Tabel 2.68	Perkembangan Produksi Perkebunan di Kabupaten Rembang Tahun 2013- 2018 -----	II.81
Tabel 2.69	PerkembanganProosi Hasil Produksi Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.81
Tabel 2.70	Perkembangan Urusan Pertanian dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.82
Tabel 2.71	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.82
Tabel 2.72	Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.82
Tabel 2.73	Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.83
Tabel 2.74	Perkembangan Sektor Perdagangan Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 -----	II.84
Tabel 2.75	Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 -----	II.85
Tabel 2.76	Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 -----	II.86
Tabel 2.77	Perkembangan Urusan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Rembang Tahun 2013–2017 -----	II.88
Tabel 2.78	Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 -----	II.89
Tabel 2.79	Nilai AKIP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2018 -----	II.90
Tabel 2.80	Perkembangan Pelaksanaan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten RembangTahun 2013-2018 -----	II.91

Tabel 2.81	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 -----	II.91
Tabel 2.82	Jumlah Kendaraan diKabupaten Rembang Tahun 2014-2018 -----	II.92
Tabel 2.83	Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 -----	II. 94
Tabel 2.84	Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 -----	II. 95
Tabel 2.85	Jenis Fasilitas Pelayanan Perijinan Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Rembang -----	II.95
Tabel 2.86	Kondisi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II. 98
Tabel 2.87	Kondisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.98
Tabel 2.88	Kondisi Inovasi Daerah Lainnya Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.99
Tabel 2.89	Daya Dukung Inovasi Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.100
Tabel 2.90	Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.100
Tabel 2.91	Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2018 -----	II.102
Tabel 2.92	Hasil pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Rembang tahun 2018 -----	II.104
Tabel 2.93	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 -----	II.106
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	III.4
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	III.9
Tabel 3.3	Rata-Rata Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	III.13
Tabel 3.4	Neraca Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ---	III.18
Tabel 3.5	Perkembangan Penghitungan Neraca Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	III.21
Tabel 3.6	Perkembangan Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur -----	III.23
Tabel 3.7	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	III.26
Tabel 3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	III.26
Tabel 3.9	Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	III.27
Tabel 4.1	Rumusan Permasalahan Tingginya Angka Kemiskinan ----	IV.11
Tabel 4.2	Rumusan Permasalahan Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan -----	IV.12
Tabel 4.3	Rumusan Permasalahan Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan -----	IV.13
Tabel 4.4	Rumusan Permasalahan Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar -----	IV.14
Tabel 4.5	Rumusan Permasalahan Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia -----	IV.15
Tabel 4.6	Isu-isu Pembangunan Global, Nasional dan Daerah -----	IV.20
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 Tahun 2020-2021	V.9
Tabel 5.2	Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 -----	V.15

Tabel 6.1	Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tahun 2016-2021 -----	VI.10
Tabel 6.2	Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2020-2021 -----	VI.21
Tabel 7.1	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 -----	VII.2
Tabel 7.2	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2021 -----	VII-6
Tabel 7.3	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2021 -----	VII-7
Tabel 7.4	Realisasi dan Penetapan Program Prioritas dan Pendanaan (Tahun 2016-2019) -----	VII.12
Tabel 7.5	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan (Tahun 2020-2021) -----	VII.58
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 -----	VIII.1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021 -----	VIII.2
Tabel 8.3	Penetapan Formulai Indikator Kinerja Daerah -----	VIII.10

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Piramida Penduduk Kabupaten Rembang Tahun 2018 -----	II.18
Grafik 2.2.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 --	II.19
Grafik 2.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2017 (%) -----	II.20
Grafik 2.4.	Perkembangan PDRB Per-Kapita Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 (000 Rupiah) -----	II.21
Grafik 2.5.	Laju Inflasi (%) Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 -----	II.29
Grafik 2.6.	Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2017 (%) ----	II.29
Grafik 2.7.	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 -----	II.30
Grafik 2.8.	Posisi Relatif Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (%) -----	II.32
Grafik 2.9.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 -----	II.32
Grafik 2.10.	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 -----	II.33
Grafik 2.11.	UHH Kabupaten Rembang Tahun 2011-2017 -----	II.35
Grafik 2.12.	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rembang -----	II.36
Grafik 2.13.	Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Balita di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.37
Grafik 2.14.	Perkembangan Presentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.37
Grafik 2.15.	Perkembangan Peresentase Stunting di Kabupaten Rembang Tahun 2015-2018 -----	II.38
Grafik 2.16.	Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -----	II.39
Grafik 2.17.	APS Pendidikan Dasar Tahun 2018 -----	II.40
Grafik 2.18.	Angka Putus Sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 -----	II.41
Grafik 2.19.	Bantuan dan Pelindungan Sosial di Kabupaten Rembang Tahun 2017 -----	II.51
Grafik 2.20.	Perkembangan IPG Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 -----	II.53
Grafik 2.21.	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017 -----	II.92
Grafik 3.1.	Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2012-2107 -----	III.1
Grafik 3.2.	Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018 -----	III.2
Grafik 3.3.	Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2013-2018 (%) -----	III.3
Grafik 3.4.	Perkembangan Proporsi Masing-Masing Unsur Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018 (%) -----	III.5
Grafik 3.5.	Proporsi Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2013-2018 (%)	III.6
Grafik 3.6.	Pertumbuhan Masing-Masing Komponen PAD Tahun	III.7

	2013-2018 (%) -----	
Grafik 3.7.	Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (Rupiah)	III.8
Grafik 3.8.	Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (Rupiah) -----	III.10
Grafik 3.9.	Perkembangan Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Rembang terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (%) -----	III.11
Grafik 3.10.	Selisih Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (Rp.) -----	III.14
Grafik 3.11.	Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2013-2018 (Rp) -----	III.15
Grafik 3.12.	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Tahun 2013-2018 (%) -----	III.16
Grafik 3.13.	Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (%) -----	III.17
Grafik 3.14.	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (%) -----	III.22
Grafik 3.15.	Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (%) -----	III.24
Grafik 3.16.	Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Rembang Tahun 2013- 2018 (%) -----	III.25

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dokumen perencanaan pembangunan kabupaten merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu harus mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten pada saat pergantian kepala daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap tahun, selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Setelah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 selama 2 tahun anggaran (Tahun 2016-2017), telah dilaksanakan kajian dan evaluasi terhadap dokumen tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Perumusan terhadap kebijakan RPJMD  
Substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan, sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Rembang setiap tahunnya sebagai pedoman penyusunan RKPD belum jelas arahnya.
- b. Pelaksanaan RPJMD
  - 1) Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 belum berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD;
- c. Evaluasi hasil RPJMD  
Target indikator sasaran yang ditetapkan pada tahun 2017, dari 96 indikator sasaran terdapat 32 indikator atau 33 persennya telah mencapai target.

- d. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menetapkan Strategi Baru dalam Penanggulangan Kemiskinan yang belum tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.  
Strategi tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dilakukan dengan cara:
- 1) mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;
  - 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
  - 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
  - 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- e. Dinamika pembangunan di Kabupaten Rembang dihadapkan pada rencana proyek nasional, yaitu pengaktifan ulang perkeretaapian jalur Jawa Tengah melalui Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang. Pembangunan jalur kereta api tersebut akan berdampak positif terhadap fasilitas transportasi massal di jalur Pantura sebagai salah satu alternatif moda transportasi untuk mengurangi kemacetan. Dampak atas pelaksanaan proyek nasional tersebut secara substansi belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
- f. BAB IX RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, belum memuat indikator Daya Saing Daerah sebagaimana dimanakan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g. Penentuan indikator akuntabilitas kinerja daerah, RPJMD Tahun 2016-2021 belum menggambarkan ketentuan sesuai komponen penilaian SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), padahal saat ini pemerintah pusat telah menempatkan hasil evaluasi AKIP sebagai salah satu bagian dalam penghitungan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dan 2018 nilai SAKIP masing-masing 56,87 dan 58,64 (CC). Dalam penilaian tersebut komponen perencanaan mempunyai bobot terbanyak diantara empat komponen lainnya yaitu 30%, dengan nilai 2017 sebesar 19,59 dan 2018 sebesar 19,91. Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten Rembang sampai saat ini belum mendapatkan DID karena nilainya masih CC. Oleh karena itu, konstruksi perencanaan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) menjadi kebutuhan bagi setiap daerah, sehingga perlu dilakukan:
- 1) Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan Perangkat Daerah (Renstra-PD);
  - 2) Sinkronisasi antar bab dalam RPJMD;
  - 3) Sinkronisasi kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan tahunan daerah.
- h. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kota untuk merevisi RPJMD Tahun 2016-2021 sesuai

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Disamping hal-hal sebagaimana tersebut diatas, pada pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021. Perubahan dokumen RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun 2019 dimana masih tersisa dua periode RKPD di dalamnya, salah satu fokus perubahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode RKPD 2020-2021 sebagai landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rembang pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Rembang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

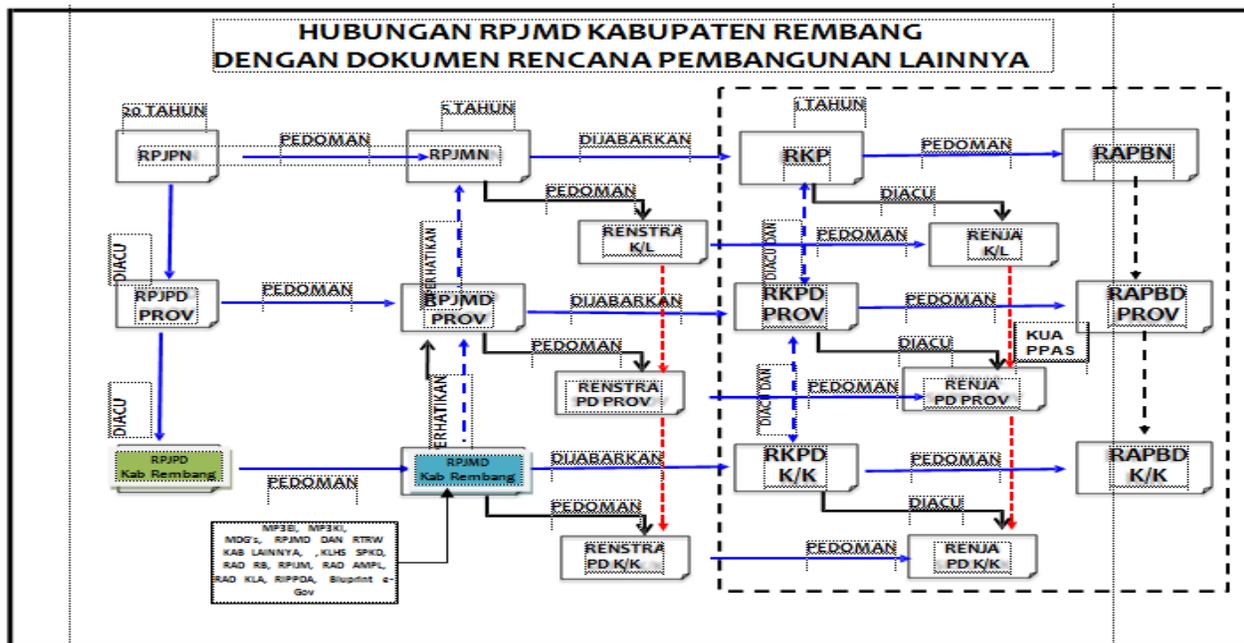
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
37. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang tahun 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

### **1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Rembang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, disamping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 serta hasil evaluasi RPJMD tahun 2010-2014.

Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana kerja Perangkat Daerah. Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut:



**Gambar 1.1.**  
**Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

**1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2015-2019**

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, yang meliputi antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5-5%;
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217.000;
4. Indeks Gini sebesar 0,36;
5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0%;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0-5,0%.

### 1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai berikut :

#### 1. **Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religious dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi objektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka acuan kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong-royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik SARA, dan terciptanya kohesi sosial masyarakat yang baik.

#### 2. **Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota**

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsive. *Open government* dilakukan dengan penguatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serap aspirasi publik.

Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam repon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terjawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

### **3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.**

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada Pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

### **4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan**

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat

menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

### 1.3.3. Amanat RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025

Berdasarkan data kondisi umum daerah Kabupaten Rembang, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan, dan potensi serta peluang yang ada, dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rembang tahun 2005-2025 sebagai berikut : **“REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”**. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditempuh melalui 5 (lima) cara atau misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Mewujudkan pengembangan infrastruktur yang memadai.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

### 1.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang

Salah satu pedoman dalam pembangunan daerah secara spasial adalah rencana tata ruang. rencana tata ruang ini secara umum berisi struktur ruang yang merupakan pedoman hierarki perkotaan serta penyediaan jaringan prasarana wilayah serta pola ruang yang merupakan perwujudan dari tata guna lahan yang direncanakan ke depan. Berdasarkan kebijakan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010), Perkotaan Rembang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Namun dalam rancangan revisi tata ruang wilayah Propinsi Jawa Tengah, perkotaan rembang diusulkan untuk menjadi Pusat Kegiatan Wilayah. Untuk mewujudkan Rembang sebagai PKW tersebut perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengaruh eksternalitas Kabupaten Rembang secara regional. Salah satu modal utama dalam meningkatkan pengaruh tersebut adalah pengembangan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sebagai Pelabuhan Pengumpul.

Sebagai salah satu pedoman spasial pembangunan wilayah di Kabupaten Rembang, RTRW telah memuat mengenai rencana reaktifasi kereta api ruas Semarang – Kudus – Rembang namun belum dijabarkan secara detail tahun pelaksanaan rencana tersebut. Sehingga rencana pembangunan tersebut belum terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Dinamika pembangunan yang lain yang belum terintegrasi dalam RPJMD salah satunya adalah pengembangan TPA di Kecamatan Sulang, Pembangunan Waduk Randugunting serta Pembangunan Embung Kaliombo di Kecamatan Sulang. Dengan pembangunan waduk dan embung tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kabupaten Rembang sekaligus dapat meningkatkan luas lahan beririgasi sehingga target luasan LP2B dapat terwujud. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang ideal.

Karakteristik wilayah Kabupaten Rembang terbagi menjadi tiga yaitu kawasan pesisir di sebelah utara yang diarahkan untuk budidaya perikanan, kawasan perbukitan di bagian selatan diarahkan untuk pertambangan dan wilayah tengah yang banyak dibudidayakan sebagai kawasan pertanian. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Rembang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031**

No	Kebijakan	Strategi
1.	Pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian selatan	a. mengembangkan kawasan produksi pertanian; b. mengembangkan kawasan agropolitan; c. mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan d. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
2.	Pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara	a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya; c. mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu; d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan; e. mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum; f. mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai pantai unggulan; g. menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan; h. mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan; i. mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan j. mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi.
3.	Pengembangan potensi sektor pertambangan	a. mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan; b. mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; c. merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan d. mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
4.	Pengembangan potensi sektor industri	a. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan; b. membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan c. mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
5.	Pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah	a. mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan; b. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi; c. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; d. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan; e. mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan f. mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
6.	Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	a. melestarikan kawasan hutan lindung; b. melestarikan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; c. melestarikan kawasan perlindungan setempat; dan d. mengelola kawasan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
7.	Peningkatan fungsi kawasan	a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;

No	Kebijakan	Strategi
	pertahanan dan keamanan Negara	b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Rembang serta jaringan pendukung wilayah diwujudkan dalam struktur ruang wilayah. Kabupaten Rembang pada konstelasi wilayah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Rembang sebagaimana Perda No. 14 Tahun 2011 meliputi :

**Tabel 1.2**  
**Sistem Pusat Kegiatan**  
**Di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031**

No	Sistem Pusat kegiatan		Lokasi
1	Perkotaan	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Rembang
		Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	a. Lasem b. Kragan c. Pamotan
		Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	a. Sulang b. Sluke c. Kaliori d. Pancur e. Sumber f. Bulu g. Gunem h. Sedan i. Sale j. Sarang
2	Perdesaan	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	a. PPL Desa Padaran Kecamatan Rembang; b. PPL Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori; c. PPL Desa Landoh Kecamatan Sulang; d. PPL Desa Sudo Kecamatan Sulang; e. PPL Desa Krikilan Kecamatan Sumber; f. PPL Desa Kedungasem Kecamatan Sumber; g. PPL Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber; h. PPL Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu; i. PPL Desa Kajar Kecamatan Lasem; j. PPL Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur; k. PPL Desa Japerejo Kecamatan Pamotan; l. PPL Desa Kepohagung Kecamatan Pamotan; m. PPL Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; n. PPL Desa Tahunan Kecamatan Sale; o. PPL Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem; p. PPL Desa Pandangan Wetan

			Kecamatan Kragan; q. PPL Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan; r. PPL Desa Lodan Wetan Kecamatan Sarang; dan s. PPL Desa Gandrirejo Kecamatan Sedan.
--	--	--	--

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Untuk menjamin keterhubungan antara sistem pelayanan kawasan tersebut direncanakan sistem prasarana. Sistem prasarana terbagi menjadi sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Rembang meliputi prasarana transportasi darat dan prasarana transportasi laut. Sementara itu sistem jaringan prasarana lainnya terbagi menjadi jaringan energi/ kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lingkungan.

Pengembangan wilayah harus mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga untuk menjamin keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya ditetapkan pola ruang wilayah. Pola ruang wilayah merupakan arahan alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah dan menjadi dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. Pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya wilayah Kabupaten Rembang selengkapnya di bawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031**

No	Pola Ruang	Lokasi
1.	Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; dan Kecamatan Sluke.
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan
3.	Kawasan perlindungan setempat	a. Kawasan sempadan pantai meliputi: Kecamatan Kaliiori; Kecamatan Rembang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan; dan Kecamatan Sarang. b. Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi terletak di setiap kecamatan yang dilewati sungai. c. Kawasan sekitar waduk/embung/bendung meliputi: Kecamatan Rembang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Sarang; Kecamatan Sluke. d. Kawasan sekitar mata air meliputi : Kecamatan Kaliiori; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sarang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; dan Kecamatan Sluke.
4.	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eks Gereja Portugis di kompleks Taman Rekreasi Pantai Kartini, Museum R.A Kartini, Pendopo Kabupaten Rembang, Masjid Agung Rembang, Klenteng Tjoe Hwie Kiong, Peninggalan Kapal Kuno Desa Punjulharjo di Kecamatan Rembang;</li> <li>2. Makam dan Pasujudan Sunan Bonang, Masjid Agung Lasem, Klenteng Thian Siang Sing Bo, Vihara Ratanavana Arama di</li> </ol>

No	Pola Ruang	Lokasi
		<p>Kecamatan Lasem;</p> <p>3. situs Plawangan dan situs Selodiri Terjan di Kecamatan Kragan.</p> <p>b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya meliputi:</p> <p>1. kawasan perairan Pulau Gede; dan</p> <p>2. kawasan perairan Pulau Marongan.</p> <p>c. Kawasan hutan bakau seluas kurang lebih 330 Ha meliputi:</p> <p>1. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 166,73 Ha (seratus enam puluh enam hektar) dengan panjang kurang lebih 3 km (tiga kilometer);</p> <p>2. Kecamatan Kaliori seluas kurang lebih 106,98 Ha (seratus enam hektar) dengan panjang kurang lebih 2 km (dua kilometer); dan</p> <p>3. Kecamatan Lasem seluas kurang lebih 56,29 Ha (lima puluh enam hektar) dengan panjang kurang lebih 2,8 km (dua kilometer).</p>
5.	Kawasan rawan bencana alam	<p>a. Kawasan rawan banjir meliputi: Kecamatan Kragan; Kecamatan Rembang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Kaliori.</p> <p>b. Kawasan rawan gerakan tanah/ longsor meliputi: Kecamatan Kragan; Kecamatan Sarang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke.</p> <p>c. Kawasan rawan gelombang pasang/abrasi meliputi: Kecamatan Sarang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Sluke; Kecamatan Lasem; Kecamatan Rembang; dan Kecamatan Kaliori.</p> <p>d. Kawasan rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Kaliori; Kecamatan Sarang; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; Kecamatan Rembang.</p>
6.	Kawasan lindung geologi	Cekungan Watuputih dan Cekungan Lasem
7.	Kawasan lindung lainnya	Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma-nutfah yaitu kawasan perlindungan terumbu karang yang tersebar dalam 17 gugusan seluas kurang lebih 145 Ha

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

**Tabel 1.4**  
**Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031**

No	Pola Ruang	Lokasi
1.	Kawasan peruntukan hutan produksi	<p>1. kawasan hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale.</p> <p>2. kawasan hutan produksi tetap meliputi Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sarang.</p>
2.	Kawasan peruntukan hutan rakyat	Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sluke dan Kecamatan Pamotan.
3.	Kawasan peruntukan	a. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas kurang

No	Pola Ruang	Lokasi
	pertanian	<p>lebih 69.516 Ha</p> <p>b. Kawasan peruntukan Holtikultura seluas kurang lebih 1.804 Ha ditetapkan menjadi cadangan LP2B</p> <p>c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 3.983 ha</p> <p>d. Kawasan Peruntukan Peternakan seluas kurang lebih 318 ha</p>
4.	Kawasan peruntukan perikanan	<p>a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi : Perairan Kecamatan Kaliori, Perairan Kecamatan Rembang, Perairan Kecamatan Lasem; Perairan Kecamatan Sluke, Perairan Kecamatan Kragan dan Perairan Kecamatan Sarang.</p> <p>b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan perikanan budidaya air tawar seluas kurang lebih 538 Ha yang meliputi: Kecamatan Pamotan, Sale, Rembang, Bulu, Kragan dan Sulang</li> <li>2. Kawasan perikanan budidaya air payau seluas kurang lebih 2.452 Ha</li> <li>3. Kawasan perikanan budidaya air laut</li> </ol> <p>c. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sentra pengolahan ikan</li> <li>2. Sentra pemasaran ikan berupa pasar ikan di Tempat Pelelangan Ikan tasikagung seluas 10 Ha.</li> </ol> <p>d. Sarana dan prasarana perikanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit pembenihan rakyat Kabupaten Rembang;</li> <li>2. Balai benih ikan yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan;</li> <li>3. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kecamatan Rembang menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai sentra kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang; dan</li> <li>4. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan</li> </ol>
5.	Kawasan peruntukan pertambangan	<p>a. Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kawasan peruntukan pertambangan pasir kuarsa meliputi: Kecamatan Sedan, Bulu, Sarang, Sale dan Gunem</li> <li>b) kawasan peruntukan pertambangan pospat, meliputi: Kecamatan pamotan, Gunem dan Sale</li> <li>c) kawasan peruntukan pertambangan ball clay meliputi: Kecamatan Sarang, Sedan, Gunem, Bulu dan Sale.</li> <li>d) kawasan peruntukan pertambangan dolomite berada di Kecamatan Gunem;</li> <li>e) kawasan peruntukan pertambangan gypsum meliputi: Kecamatan Sedan, Gunem, Lasem dan Sarang.</li> <li>f) kawasan peruntukan pertambangan kalsit meliputi: Kecamatan Pamotan, Sale, Gunem, Sumber dan Bulu.</li> <li>g) kawasan peruntukan pertambangan batu gamping meliputi: Kecamatan Sarang, Sedan, Pamotan, Sale, Gunem, Bulu dan Sumber.</li> </ol> </li> <li>2. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kawasan peruntukan pertambangan tras meliputi Kecamatan Sluke, Kecamatan Pancur, Kragan, Gunem dan Sale.</li> <li>b) kawasan peruntukan pertambangan tanah liat meliputi: Kecamatan Sluke, Sedan, Kragan, Lasem,</li> </ol> </li> </ol>

No	Pola Ruang	Lokasi
		<p>Bulu, Sulang, Sumber, Gunem dan Sale.</p> <p>c) kawasan peruntukan pertambangan andesit meliputi: Kecamatan Sluke, Sedan, Lasem, Kragan, Pancur, Gunem dan Sale.</p> <p>d) Kawasan peruntukan pertambangan batubara dan lignit meliputi: Kecamatan Gunem, Pamotan, Sarang, Sale, Lasem dan Kecamatan Sedan.</p> <p>b. kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi: Kecamatan Sumber, Gunem, Sale, Bulu, Sulang, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang, Kaliore, Sedan, Pamotan dan Pancur</p>
6.	Kawasan peruntukan industri	<p>a. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 Ha berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang;</li> <li>2. kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 Ha berada di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 Ha di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; dan</li> <li>3. kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha berada di wilayah Kecamatan Gunem.</li> </ol> <p>b. Peruntukan industri menengah</p> <p>c. Peruntukan industri kecil</p>
7.	Kawasan peruntukan pariwisata	<p>a. Pengembangan Wisata alam</p> <p>b. Pengembangan wisata budaya</p> <p>c. Pengembangan wisata buatan/ binaan manusia</p>
8.	Kawasan peruntukan permukiman	<p>a. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.090 Ha berada di kawasan perdesaan</p> <p>b. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 3.214 Ha berada di perkotaan kabupaten dan perkotaan kecamatan di Kabupaten Rembang</p>
9.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<p>a. Pulau Gede</p> <p>b. Pulau Marongan</p>
10.	Kawasan peruntukan lainnya	<p>a. kawasan pertahanan dan keamanan</p> <p>b. kawasan bumi perkemahan</p>

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pengembangan wilayah ditetapkan kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut ditetapkan berdasarkan pengaruhnya dalam lingkup wilayah dan mempunyai nilai eksternalitas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis tersebut juga harus memperhatikan penetapan kawasan strategis nasional maupun propinsi. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi :
  1. Kawasan strategis propinsi berupa Kawasan Koridor Perbatasan Blora - Tuban - Rembang – Bojonegoro.
  2. Kawasan strategis kabupaten berupa Kawasan Bahari Terpadu, Kawasan Bonang-Binangun-Sluke Zona I dan Zona II, Kawasan Pertanian Terpadu, Kawasan Agropolitan, Kawasan Pelabuhan dan sekitarnya, Kawasan Tumbuh Cepat Koridor Jalur Pantura, Kawasan Kota Pantai Unggulan, Kawasan Minapolitan, PKLp Lasem, PKLp Pamotan, dan PKLp Kragan.
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang berupa kawasan strategis kabupaten yaitu Kawasan Lindung Gunung Lasem dan Kawasan Mangrove Pasarbanggi.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan strategis propinsi yaitu Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Rembang.

### 1.3.5. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan gambaran berbagai dokumen perencanaan tersebut, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional, maka hubungan antara dokumen perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Rembang tahap III, “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”, akan sejalan dengan upaya Percepatan Reformasi Birokrasi yang dinamis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan indeks reformasi birokrasi sebesar 83 pada akhir tahun 2023.
2. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Rembang tahap III, “Menurunkan Angka Kemiskinan”, akan sejalan dengan upaya memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan yang diharapkan ikut mendorong penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 7,48 pada tahun 2023, adapun target yang lain sebagai berikut :
  - a. PDRB per kapita sebesar Rp. 30.000.000;
  - b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,00%;
3. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Rembang tahap III, “Meningkatkan Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi pada Sektor Perekonomian”, akan sejalan dengan upaya menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Rembang memiliki potensi unggulan berupa industri kerajinan batik tulis, dan perikanan. Dalam perkembangannya, industri kerajinan batik tulis Lasem di Kabupaten Rembang memiliki keunikan, ciri yang berbeda dengan daerah lain dan ditengah muncul tehnologi batik *printing*, *batik tulis Lasem* hanya memproduksi batik tulis. Pemerintah Daerah telah melakukan perlindungan terhadap batik tulis Lasem melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 tahun 2017 tentang Pelestarian Batik tulis Lasem. Pada sisi perikanan, Kabupaten Rembang memiliki sejarah panjang berupa munculnya industri pengolahan perikanan dengan skala yang relatif besar (ekspor). Dalam catatan statistik, yaitu berdasarkan perkembangan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur ekonomi Kabupaten Rembang juga terus ditopang oleh sektor Industri Pengolahan serta Jasa dan Perdagangan. Dengan berbagai upaya yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut, maka diharapkan akan berkontribusi secara maksimal bagi pencapaian indikator pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2023, berupa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,7%.
4. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap III berupa “Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang”, akan sejalan dengan upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah.
5. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap III berupa “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”, akan sejalan dengan upaya Peningkatan kualitas dan tingkat Pendidikan serta peningkatan derajat kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup atau beban pengeluaran masyarakat miskin serta sekaligus akan meningkatkan kualitas SDM. Secara berantai, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh penduduk miskin dengan jumlah yang sangat terbatas diharapkan akan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi. Di sisi lain, kualitas SDM yang ditopang

oleh kualitas pendidikan, diharapkan akan menjadi pijakan bagi penduduk miskin untuk mampu mengakses sumber ekonomi yang ada. Sehingga akan berdampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah menjadi 73 pada tahun 2023.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan. Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah:

1. Memberikan landasan dan pedoman pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2016-2021;
2. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2021 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

Secara lebih khusus, maksud dari penyusunan perubahan RPJMD 2016-2021 yaitu menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RPJMD 2016-2021, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan perubahan Perangkat Daerah, dan penyesuaian permasalahan/isu strategis pembangunan Kabupaten Rembang. Tujuan penyusunan perubahan yaitu melakukan perbaikan substansi RPJMD Kabupaten Rembang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sedikit berbeda dengan sebelumnya karena sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Rembang, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan perubahan kebijakan RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Pada bab ini juga diuraikan tentang hasil evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2016.

**BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

**BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah.

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana pengembangan kawasan strategis.

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPD tahun berkenaan.

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode masa jabatan.

**BAB IX PENUTUP**

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum Kondisi Daerah pada dokumen Perubahan RPJMD ini guna lebih mendekati pada kondisi riil dan paling akhir, maka dilakukan penambahan berupa data dan informasi tahun terakhir (2018). Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota). Luas wilayah Kabupaten Rembang 3,1% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa bagian timur Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Timur. Letak tersebut merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa. Kabupaten Rembang dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya dan aksesibilitas semakin meningkat dengan akandilakukannya reaktifasi jalur rel kereta api lintas bagian utara Pulau Jawa (Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang).

Secara kewilayahan, Kabupaten Rembang memiliki kecenderungan berkembang ke arah Barat dan Timur. Hal ini menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier Kabupaten Rembang juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kabupaten Rembang dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Tuban, Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Secara umum, gambaran umum kondisi Kabupaten Rembang dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 2.1. Aspek Geografis dan Demografis

##### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Jawa Tengah dan terletak di Pantai Utara Jawa Tengah. Kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Blora
Sebelah Barat	: Kabupaten Pati
Sebelah Timur	: Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.715 ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.759 ha). Data wilayah administratif menurut kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Wilayah Administratif Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Rembang Tahun 2018**

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(ha)	(%) thd total
1.	Sumber	18	7.673	7,57
2.	Bulu	16	10.240	10,10
3.	Gunem	16	8.020	7,91
4.	Sale	15	10.715	10,57
5.	Sarang	23	9.133	9,01
6.	Sedan	21	7.964	7,85
7.	Pamotan	23	8.156	8,04
8.	Sulang	21	8.454	8,34
9.	Kaliori	23	6.150	6,06

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(ha)	(%) thd total
10.	Rembang	34	5.881	5,80
11.	Pancur	23	4.593	4,53
12.	Kragan	27	6.166	6,08
13.	Sluke	14	3.759	3,71
14.	Lasem	20	4.504	4,44
Kabupaten Rembang		294	101.408	100

Sumber: Rembang Dalam Angka Tahun 2018

Peta batas administrasi Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



**Gambar 2.1**  
**Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang**  
 Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Secara astronomis, Kabupaten Rembang terbentang pada garis koordinat 111o 00'-111o 30' Bujur Timur dan 6o 30'-7o 6' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 101.408 ha yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah selatan.

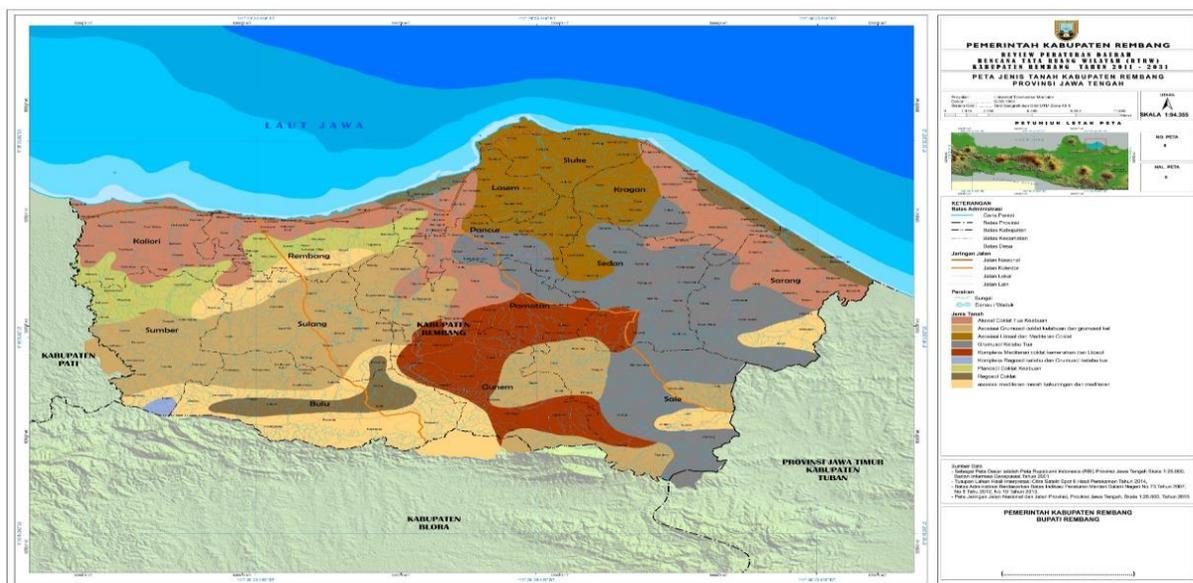
Letak geografis Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, mempunyai nilai strategis sebagai gerbang masuk dari sisi timur Provinsi Jawa Tengah, terutama pada wilayah Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sale. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 mdpl). Sedangkan sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 mdpl). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak dan Kawasan Hutan Lindung Gunung Lasem.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kabupaten Rembang sebagai Kawasan Banglor (Kawasan Rembang-Blora). Arah pengembangan wilayah Banglor difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama. Sedangkan wilayah PKL Banglor meliputi kawasan perkotaan Rembang, Lasem dan Blora. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah kedepan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor adalah "Pengembangan wilayah Banglor berbasis perindustrian dan agroforestry yang

didukung pariwisata terpadu dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan”.

### a. Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 11,81% terletak pada ketinggian 0–7 meter dpl, ketinggian 8 -100 m dpl sebesar 56,83%, ketinggian 101- 500 m dpl sebesar 28,29% dan ketinggian 501–1.000 m dpl sebesar 3,07%.



**Gambar 2.2**  
**Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang**  
*Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031*

Wilayah Kabupaten Rembang seluas 46.367 ha (45,72%) mempunyai kelengkapan sebesar 0-2%. Sedangkan 36.374 ha lainnya (35,84%) mempunyai kelengkapan sebesar 3-15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelengkapan sebesar 16-40% dan > 40% masing-masing seluas 13,78% dan 4,66% dari total wilayah Kabupaten Rembang.

### b. Geologi

Secara menyeluruh wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang relatif subur, kecuali di daerah pegunungan yang terdapat di sebelah timur bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang, dapat dijelaskan dari jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Rembang meliputi:

#### 1) Tanah Alluvial

Yaitu tanah yang beraneka sifatnya, dengan warna kelabu, coklat hitam mempunyai produktivitas yang sangat rendah sampai tinggi, berasal dari sedimentasi sungai di dataran utara tengah dan sedikit di wilayah pantai sebelah timur, meliputi 10 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan permukiman.

#### 2) Tanah Regosol

Yaitu tanah yang netral sampai asam dengan warna putih, coklat kekuning-kuningan, coklat, kelabu, meliputi 5 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang terdapat di sebagian besar pantai utara. Tanah jenis ini berasal dari sedimentasi pasir pantai, digunakan terutama untuk pertanian dan perkebunan.

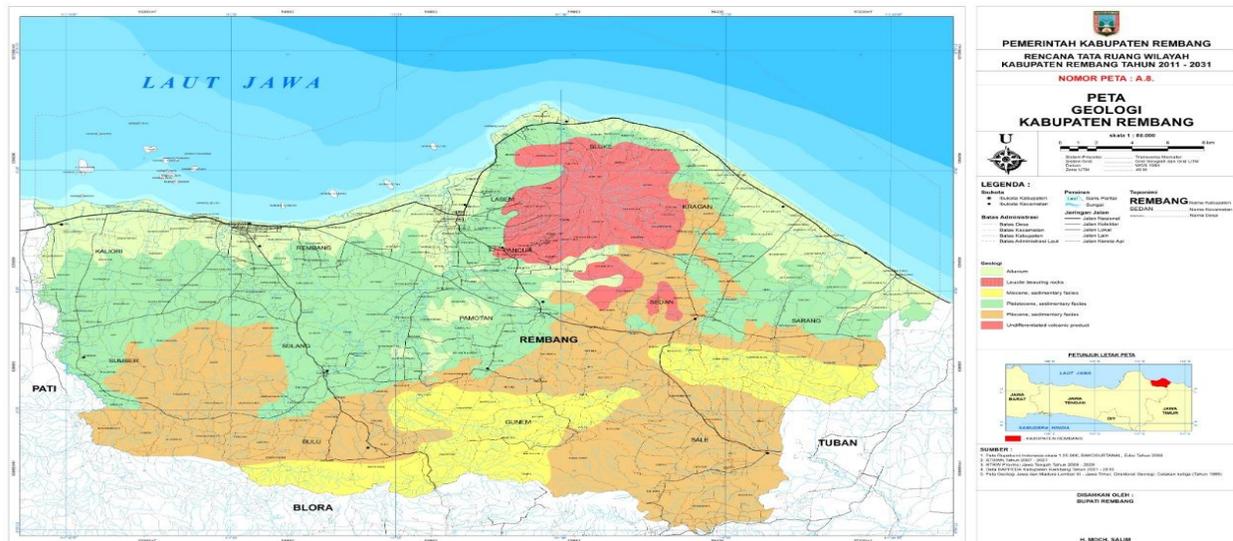
#### 3) Tanah Grumosol

Yaitu tanah yang agak netral berwarna kelabu sampai hitam, produktivitasnya dari rendah sampai sedang. Jenis tanah ini menduduki luas kedua atau sebesar 32% dari luas wilayah Kabupaten Rembang,

terletak di bagian selatan dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan perkebunan.

4) Tanah Mediteran Merah Kuning

Yaitu tanah yang agak netral, berwarna merah sampai coklat dengan produktivitas sedang sampai tinggi, meliputi kurang lebih 45 % dari seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Jenis tanah ini terletak dibagian timur dari pantai sampai masuk ke selatan dan biasanya digunakan untuk tanah sawah, tegalan, kebun buah dan padang rumput.



**Gambar 2.3**  
**Peta Geologi Kabupaten Rembang**  
 Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Kabupaten Rembang memiliki kandungan tanah Andosol dan endapan/deposit bahan tambang antara lain: batu kapur, batu bara muda, Clay, Dolomit, Tras, Pasir Kwarsa, Fosfat dan sebagainya yang jumlahnya berkisar 8% dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang menjadi potensi daerah di bidang pertambangan dan bahan galian. Potensi yang cukup besar tersebut maka pabrik semen Indonesia telah membuka usaha di Kabupaten Rembang.

**c. Hidrologi**

Keadaan hidrologi pada Kabupaten Rembang dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari permukaan (*surface water*) dan air tanah. Kondisi hidrologi di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1) Air Permukaan

Kondisi air permukaan di Kabupaten Rembang sangat bergantung pada curah hujan. Untuk mengurangi run off air dari hulu ke hilir selain mengandalkan sungai, di Kabupaten Rembang juga banyak dibangun embung dan waduk. Embung yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih yaitu: Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Jatimudo dan Embung Grawan. Di samping itu ada embung yang belum dimanfaatkan sebagai sumber air bersih yaitu Embung Panohan. Disamping kelima embung besar tersebut banyak dibangun embung-embung di desa untuk memenuhi kebutuhan air irigasi petani.

Sementara itu, Kabupaten Rembang termasuk dalam dua wilayah sungai yaitu Bengawan Solo dan Jratun Seluna. Wilayah sungai Bengawan Solo hanya mencakup sebagian kecil wilayah di Kabupaten Rembang di sekitar Kecamatan Sale. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Rembang termasuk dalam wilayah sungai Jratun Seluna. Terdapat beberapa sungai besar di WS Jratun Seluna, meliputi : sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan.

Berdasarkan data dari Balai PSDA Seluna, seluruhnya terdapat 26 sungai yang termasuk dalam WS Jratun Seluna selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini. Kondisi debit sungai di Kabupaten Rembang hampir semuanya mengering di saat musim kemarau dan terjadi banjir apabila musim penghujan. Hal tersebut disebabkan pendayagunaan sumber daya air permukaan belum dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Penanganan sungai terbentur pada belum jelasnya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah.

**Tabel 2.2.**  
**Daerah Aliran Sungai dalam WS Jratunseluna di Kabupaten Rembang**

No	Nama DAS	Luas DAS (km <sup>2</sup> )	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Nama Wilayah Sungai	Lokasi Muara	Lokasi Hulu
1	DAS Wangon	52,10	S.Wangon	18,64	Jratunseluna	Ds.Bajingjowo, Kec.Sarang, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Sarang) Rembang
2	DAS Belitung/Ngepang	100,30	S.Ngepang	25,83	Jratunseluna	Ds.Sandangmulyo, Kec.Sarang, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Sedan,Sarang) Rembang
3	DAS Kesambi	60,94	S.Ceper	24,53	Jratunseluna	Ds.Sandangmulyo, Kec.Sarang, Kab.Rembang	G.Lasem
4	DAS Kidul	29,30	S.Kidul	11,66	Jratunseluna	Ds.Tegalmulyo, Kec.Kragan, Kab.Rembang	G.Lasem
5	DAS Kresak	11,65	S.Kresak	8,13	Jratunseluna	Ds.Woro, Kec.Kragan, Kab.Rembang	G.Lasem
6	DAS Kepel	8,39	S.Kepel	7,54	Jratunseluna	Ds.Labuhan Kidul, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
7	DAS Randualas	3,18	S.Randualas	3,10	Jratunseluna	Ds.Sandangmulyo, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
8	DAS Grasak	2,92	S.Grasak	3,38	Jratunseluna	Ds.Blimbing, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
9	DAS Sanduk	2,75	S.Sanduk	4,58	Jratunseluna	Ds.Mangar, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
10	DAS Dalananyar	1,95	S.Dalananyar	5,28	Jratunseluna	Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Kab.Rembang	Rakitan Sluke Rembang
11	DAS Jatisari	1,14	S.Jatisari	2,85	Jratunseluna	Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
12	DAS Banu	1,60	S.Banu	3,38	Jratunseluna	Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
13	DAS Kladen	14,19	S.Klaten	6,71	Jratunseluna	Ds.Sluke, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
14	DAS Bonang / Nyamplung	5,85	S.Malang	5,43	Jratunseluna	Ds.Trahan, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
15	DAS Dukoh	6,16	S.Leran	5,90	Jratunseluna	Ds.Leran, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
16	DAS Bonang	6,17	S.Bonang	7,22	Jratunseluna	Ds.Bonang, Kec.Lasem, Kab.Rembang	G.Lasem
17	DAS Keris	23,80	S.Tasiksono	16,47	Jratunseluna	Ds.Tasiksono, Kec.Lasem, Kab.Rembang	G.Lasem
18	DAS Lasem	229,85	S.Lasem	39,09	Jratunseluna	Ds.Gedungmulyo, Kec.Lasem, Kab.Rembang	G.Lasem & Peg.Kapur Utara (Bulu,Gunem. Sale) Rembang
19	DAS Kiringan	15,94	S.Kiringan	7,76	Jratunseluna	Ds.Kasreman, Kec.Lasem,	Ketangi, Pamotan,

No	Nama DAS	Luas	Nama Sungai	Panjang	Nama Wilayah	Lokasi Muara	Lokasi Hulu
						Kab.Rembang	Rembang
20	DAS Jambangan	17,30	S.Jambangan	7,49	Jratunseluna	Ds.Tritunggal, Kec.Rembang, Kab.Rembang	Kerep, Sulang, Rembang
21	DAS Panggang	12,49	S.Panggang	7,90	Jratunseluna	Ds.Tireman, Kec.Rembang, Kab.Rembang	Kerep, Sulang, Rembang
22	DAS Sambung	10,61	S.Sambung	5,42	Jratunseluna	Ds.Kabongan Lor, Kec.Rembang, Kab.Rembang	Turusgede, Rembang
23	DAS Karanggeng	134,14	S.Karanggeng	48,17	Jratunseluna	Ds.Tanjungsari, Kec.Rembang, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Bulu) Kab.Rembang
24	DAS Babadan	57,04	S.Pujon	17,87	Jratunseluna	Ds.Bogoharjo, Kec.Kaliori, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Bulu)
25	DAS Anyar	37,20	S.Pang	11,50	Jratunseluna	Ds.Tasikharjo, Kec.Kaliori, Kab.Rembang	Bogorejo, Sumber, Rembang
26	DAS Randugunting	136,67	S.Randugunting	47,37	Jratunseluna	Ds.Tunggulsari, Kec.Kaliori, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Japah) Kab.Blora

Sumber : Balai PSDA Seluna, 2018

2) Air Bawah Tanah

Air bawah tanah di Kabupaten Rembang berada di lokasi Akuifer, dimana akuifer adalah formasi geologi atau grup formasi yang mengandung air dan secara signifikan mampu mengalirkan air melalui kondisinya. Akuifer yang ada di Kabupaten Rembang meliputi akuifer dangkal, akuifer produktivitas tinggi, akuifer produktivitas sedang, akuifer produktivitas kecil, akuifer produktivitas setempat dan daerah air tanah langka.

**Tabel 2.3**  
**Hidrogeologi Kabupaten Rembang**

No	Jenis Akuifer	Lokasi
1	Akuifer dangkal dengan produktivitas sedang	Sebagian besar di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, dan Kecamatan Sedan
2	Akuifer dg produktivitas tinggi	Sebagian kecil di Kecamatan Sale
3	Akuifer dg produktivitas sedang	Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Pamotan
5	Akuifer produktif terdapat setempat	Sebagian besar di Kecamatan Sluke, Kragan, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pancur, Kecamatan Lasem
6	Akuifer dg produktivitas kecil	Sebagian besar di Kecamatan Sumber, Sulang, Rembang. Sebagian kecil di Kaliori, Pamotan, Gunem, Bulu, Sale, Pamotan, Pancur, Sedan, Kragan, Sarang
7	Daerah air tanah langka	Sebagian kecil di Kecamatan Sarang

Sumber : Kabupaten Rembang yang diolah, Tahun 2018

Kedalaman air tanah di Kabupaten Rembang sebagian besar berada pada lebih dari 90 cm. Sedangkan untuk kecamatan Sluke, Kecamatan Lasem, dan Kecamatan Kragan cukup bervariasi yaitu berada pada 30 – 60 cm dan 60 – 90 cm. Potensi sumber air tanah di Kabupaten Rembang bila diusahakan dapat bermanfaat untuk sumber air minum maupun pengairan. Di Kabupaten Rembang, terdapat banyak sumber-sumber mata air. Beberapa sumber air tanah dan pemanfaatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Pemanfaatan Sumber-Sumber Mata Air di Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2018**

No.	Nama Sumber Mata Air	Lokasi		Debit (lt/detik)	Penggunaan	Keterangan
		Desa	Kecamatan			
1.	Brubul	Pamotan	Pamotan	5	Irigasi	Berfungsi
2.	Mudal	Pamotan	Pamotan	80	Air minum dan irigasi	50 lt/dtk PDAM & 20 lt/dtk irigasi
3.	Klongko	Bangunrejo	Pamotan	8	Irigasi	Berfungsi
4.	Pragen	Pragen	Pamotan	12	Irigasi	Kering saat kemarau
5.	Dowan	Dowan	Gunem	12	Irigasi	Kering saat kemarau
6.	Nglondro	Suntri	Gunem	11	Irigasi	Berfungsi
7.	Kajar	Kajar	Gunem	6	Air minum	Berfungsi
8.	Suruhan	Trembers	Gunem	8	Irigasi	Berfungsi
9.	Taban	Sidomulyo	Gunem	6	Irigasi	Kering saat kemarau
10.	Pasucen	Pasucen	Gunem	7	Irigasi	Kering saat kemarau
11.	Soco	SendangMulyo	Gunem	7	Air minum	Berfungsi
12.	Pacing	Pacing	Sedan	6	Irigasi	Berfungsi
13.	Kedunglingi	Lemah Putih	Sedan	10	Air minum	Berfungsi
14.	Bendo	Bendo	Sluke	15	Air minum	Kering saat kemarau
15.	Bulan	Sanetan	Sluke	7	Irigasi	Kering saat kemarau
16.	Gebang	Labuhan	Sluke	25	Irigasi	Kering saat kemarau
17.	Mrican	Bendo	Sluke	6	Irigasi	Kering saat kemarau
18.	Macan	Bendo	Sluke	6	Irigasi	Kering saat kemarau
19.	Dur Sumber	Bendo	Sluke	7	Air minum	Kering saat kemarau
20.	Semen	Gading	Sale	557	Air minum & irigasi	80 lt/dtk PDAM & 477 lt/dtk irigasi
21.	Brubulan	Tahunan	Sale	150	Irigasi	Berfungsi
22.	Kemloko Kerep	Tengger	Sale	20	Irigasi	Berfungsi
23.	Watu Lawang	Woro	Kragan	5	Irigasi	Kering saat kemarau
24.	Rambut Bntung	Tawangrejo	Sarang	5	Irigasi	Berfungsi
25.	Kajar	Kajar	Salem	9	Irigasi	Berfungsi
26.	Kajar	Pasedan	Bulu	30	Air minum	Berfungsi
27.	Dong Bulu	Pasedan	Bulu	10	Air minum	Berfungsi
28.	Kalisodo	Pasedan	Bulu	9	Irigasi	Kering saat kemarau
29.	Gondang	Pasedan	Bulu	15	Irigasi	Kering saat kemarau
30.	Taban	Bulu	Bulu	8	Irigasi	Kering saat kemarau
31.	Gayam	Bulu	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
32.	Mudal	Bulu	Bulu	20	Irigasi	Kering saat kemarau
33.	Ngluncan	Bulu	Bulu	5	Irigasi	Kering saat kemarau
34.	Kebon	Mantingan	Bulu	10	Air minum	Berfungsi
35.	Dawe	Mantingan	Bulu	6	Irigasi	Kering saat kemarau
36.	Dokoh	Mantingan	Bulu	5	Irigasi	Kering saat kemarau
37.	Milikerep	Kadiwono	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
38.	Tlogo	Karangasem	Bulu	15	Irigasi	Berfungsi
39.	Gupit	Cabean	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
40.	Senok	Mlatirejo	Bulu	12	Irigasi	Kering saat kemarau
41.	Candra	Pinggan	Bulu	8	Irigasi	Kering saat kemarau
42.	Cadang	Pinggan	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
43.	Pinggan	Pinggan	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
44.	Belik Kembar	Sidowayah	Pancur	5	Air minum	Berfungsi
45.	Ngroto	Ngroto	Pancur	7	Air minum	Berfungsi
46.	Druju	Joho Gunung	Pancur	15	Irigasi	Berfungsi
47.	Soco	Kalitengah	Pancur	10	Irigasi	Kering saat kemarau
48.	Kedung Ruah	Warugunung	Pancur	7	Irigasi	Kering saat kemarau
49.	Sumber Agung	Sumberagung	Pancur	5	-	Belum dimanfaatkan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2018

#### **d. Klimatologi**

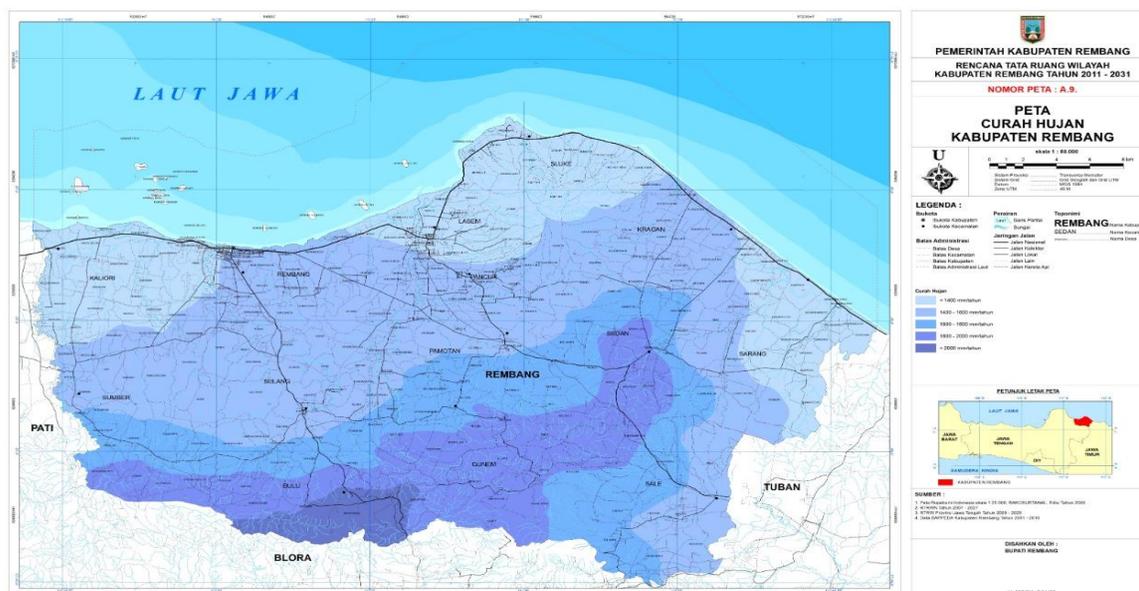
Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis, dengan suhu terendah sebesar 22°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 34°C, sehingga suhu rata-rata di Kabupaten Rembang 27-34°C. di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 550,57 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi

terjadi bulan Februari Tahun 2018 yaitu sebanyak 115,6 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus 0.19 mm/bulan. Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan dan air laut.

**Tabel 2.5**  
**Curah Hujan Kabupaten Rembang Tahun 2018**

No	Kecamatan	Data Curah Hujan ( mm/hr)											
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Sumber	5.55	10.86	7.03	2.37	2.77	0	0	0	0	0	1.9	3.32
2	Bulu	5.65	8.32	9.65	3.43	1.52	0.13	0.13	0.19	0.6	0.13	5.17	11.84
3	Gunem	5.81	9.61	7.52	2.47	1.65	0.13	0	0	0.1	0.39	3.4	8.61
4	Sale	4.48	11.68	8.45	3.33	2.42	0.6	0	0	0.63	0.29	6.53	7.94
5	Sarang	3.06	7	4.68	1	0.81	0.97	0	0	0	0	2.53	10.94
6	Sedan	6.87	6.5	4.58	2.4	0.81	0.97	0	0	0.47	0	5.03	8.39
7	Pamotan	9.16	11.46	5.97	2.57	1.26	1.57	0	0	0.53	0.48	4.83	8.84
8	Sulang	7.1	10.14	8.1	4.63	3.65	0.3	0	0	0.27	0.06	6.5	6.71
9	Kaliori	9.1	5.32	2.77	5.07	2.26	0	0	0	2.77	0	3.3	3.61
10	Rembang	6.74	8.07	6.1	1.6	0.77	0.4	0	0	0	0	6.97	4.71
11	Pancur	5.81	5.64	4.45	3.03	0.84	1.07	0	0	0	0.97	4.03	8.71
12	Kragan	4.16	5.39	4.74	2.13	1.13	0.37	0.32	0	1.17	0.52	4.47	5.61
13	Sluke	2.71	7.18	11.94	1.77	1.32	0.4	0	0	0	0	5.4	10.61
14	Lasem	7.74	8.43	5.77	4.47	2	1.07	0	0	0.27	1.45	7.53	8.65
Jumlah		83.94	115.60	91.75	40.27	23.21	7.98	0.45	0.19	6.81	4.29	67.59	108.49

Sumber : BPS tahun 2018



**Gambar 2.4**  
**Peta Curah Hujan Kabupaten Rembang**  
Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

**e. Penggunaan Lahan**

Berdasarkan tata guna lahan, Kabupaten Rembang terdiri atas lahan sawah sebesar 29.020 hektar (28,62%), lahan bukan sawah sebesar 53.156 hektar (52,42%) dan lahan bukan pertanian sebesar 19.232 hektar (18,96%). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 %, hutan 23,45 % dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 %.

Peta Tutupan Lahan Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



**Gambar 2.5**  
**Peta Tutupan Lahan Kabupaten Rembang**  
*Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031*

### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Rembang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing kecamatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diutamakan dapat memberdayakan masyarakat lokal, berbasis potensi lokal serta difokuskan pada industri serta usaha yang berbasis desa. Selain itu peningkatan minat dan iklim investasi di Kabupaten Rembang juga diperlukan untuk menambah kesempatan kerja bagi masyarakat. Tujuan penataan ruang Kabupaten Rembang pada Tahun 2011-2031 ditujukan untuk mewujudkan kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Perumusan tujuan tersebut tidak lepas dari karakteristik wilayah Kabupaten Rembang yang mempunyai panjang pantai sekitar 63 km. Di samping itu Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur juga merupakan pintu gerbang yang diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian Jawa Tengah bagian timur.

Untuk mewujudkan visi RPJPD maupun RPJMD Kabupaten Rembang tidak lepas dari alokasi rencana pola ruang dalam RTRW. Rencana pola ruang dijabarkan dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang itu merupakan alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun dan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

#### a. Struktur Ruang Wilayah

Perwujudan struktur ruang wilayah meliputi pusat-pusat pelayanan serta jaringan pendukung wilayah. Kabupaten Rembang pada konstelasi wilayah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Rembang ditetapkan di kawasan perkotaan Rembang. Selain PKL, Kabupaten Rembang juga mempunyai tiga Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang kedepan diharapkan dapat melayani kegiatan setara dengan Pusat Kegiatan Lokal. Tiga kawasan perkotaan

yang ditetapkan menjadi PKLp adalah kawasan perkotaan Lasem, Kawasan perkotaan Kragan dan Kawasan perkotaan Pamotan. Keberadaan PKLp tersebut diharapkan juga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Rembang sehingga pemerataan pembangunan dapat diwujudkan.

Untuk menjamin keterhubungan antara sistem pelayanan kawasan tersebut direncanakan sistem prasarana. Sistem prasarana terbagi menjadi sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Rembang meliputi prasarana transportasi darat dan prasarana transportasi laut. Sementara itu sistem jaringan prasarana lainnya terbagi menjadi jaringan energi/ kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lingkungan.

#### **b. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya di Kabupaten Rembang berdasarkan ketentuan pasal 21 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 terbagi menjadi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Kawasan Budidaya mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemanfaatan kawasan budidaya tersebut harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

##### **1) Kawasan peruntukan hutan produksi**

Kawasan hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.801 Ha dan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 19.656 Ha. Kawasan hutan produksi terbatas berlokasi di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale. Sementara itu kawasan hutan produksi tetap berlokasi di Kecamatan Kaliiori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sarang. Pengelolaan kawasan hutan produksi ini terbagi dalam dua KPH yaitu KPH Mantingan dan KPH Kebonharjo.

##### **2) Kawasan peruntukan hutan rakyat**

Kawasan peruntukan hutan rakyat diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial dan ekonomi. Di Kabupaten Rembang terdapat kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 8.837 Ha yang berlokasi di Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sluke dan Kecamatan Pamotan.

##### **3) Kawasan peruntukan pertanian**

Kawasan pertanian terbagi menjadi dua yaitu lahan basah seluas kurang lebih 29.702 Ha dan lahan kering seluas kurang lebih 39.814 Ha yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Untuk menjamin kedaulatan pangan maka seluas kurang lebih 37.339 Ha ditetapkan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Untuk meningkatkan kemandirian sektor pertanian ditetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan agropolitan.

##### **4) Kawasan peruntukan perikanan**

Kondisi Rembang yang berada di pesisir pantai menyebabkan sektor perikanan dan kelautan begitu berkembang pesat. Kawasan peruntukan perikanan sendiri terbagi menjadi kawasan peruntukan perikanan tangkap,

kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap berada di Perairan Kecamatan Kaliori, Perairan Kecamatan Rembang, Perairan Kecamatan Lasem, Perairan Kecamatan Sluke, Perairan Kecamatan Kragan dan Perairan Kecamatan Sarang. Sejak tahun 2014 kewenangan kawasan perikanan tangkap tersebut ada pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi budidaya air tawar, budidaya air payau dan budidaya air laut. Kawasan perikanan budidaya air tawar seluas kurang lebih 538 Ha berada di Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sulang. Untuk menjamin pemasaran dan pengolahan ikan dibangun 13 buah tempat pelelangan ikan yang tersebar di 6 kecamatan pesisir selain itu dibangun juga unit pembenihan rakyat dan balai benih ikan di Kecamatan Pamotan.

**5) Kawasan peruntukan pertambangan**

Kawasan peruntukan pertambangan terbagi menjadi kawasan peruntukan pertambangan minerba dan kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara seluas 27.628 Ha dengan potensi tambang berupa pasir kuarsa, pospat, ball clay, dolomite, gypsum, kalsit, batu gamping, tras, tanah liat, andesit, batubara dan lignit yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Sementara itu kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi juga tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang.

**6) Kawasan peruntukan industri**

Kawasan peruntukan industri terbagi menjadi peruntukan industri besar, peruntukan industri menengah dan peruntukan industri kecil dan mikro. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang, di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke, Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke dan Kecamatan Gunem.

Peruntukan industri menengah berada di sepanjang koridor Jalan Pantura Kabupaten Rembang seluas kurang lebih 8.864 Ha, industri pengolahan perikanan kelautan di wilayah pesisir Kabupaten, kawasan peruntukan agroindustri, kawasan peruntukan industri pertambangan. Sementara itu industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang dengan potensi industri mebel, industri batik, industri kuningan, industri bordir, industri gula tumbu, industri genteng dan batu bata, industri garam, olahan perikanan, peternakan, industri mangga, industri galangan kapal dan industri kecil kawis.

**7) Kawasan peruntukan pariwisata**

Kawasan peruntukan pariwisata terbagi menjadi pengembangan wisata alam, pengembangan wisata budaya dan pengembangan wisata buatan manusia. Potensi wisata alam ada di Pantai Pasir Putih Tasikharjo, Pulau Gede dan Pulau Marongan, Pantai Soka, Wisata Alam Kajar, Watu Layar, Pantai Caruban Gedongmulyo, Wanawisata Mantingan, Embung Lodan, Embung Banyu Kuwung dan Embung Kaliombo, Gua Pasucen dan Embung Panohan, Embung Trenggulan dan Taman Wisata Alam Sumber Semen. Potensi wisata budaya meliputi bangunan pusaka tersebar di Kecamatan Lasem, Kecamatan Rembang, Kecamatan Sluke, kecamatan Bulu dan Kecamatan Kragan. Potensi wisata buatan ada di Kecamatan Remabng, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sulang.

**8) Kawasan peruntukan permukiman**

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.090 Ha berada di kawasan perdesaan. Sedangkan

kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 3.214 Ha berada di perkotaan kabupaten dan perkotaan kecamatan di Kabupaten Rembang.

**9) Kawasan peruntukan budidaya lainnya**

Kawasan peruntukan budidaya lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan bumi perkemahan. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi Komando Distrik Militer di Kecamatan Rembang, Polisi Resort di Kecamatan Rembang, Pos Angkatan Laut Rembang, Koramil dan Polsek yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Kawasan bumi perkemahan seluas kurang lebih 20 Ha adalah Bumi Perkemahan Karangsari Park di Kecamatan Sulang.

**c. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung di Kabupaten Rembang terbagi dalam kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Pengembangan kawasan lindung tersebut diarahkan untuk mempertahankan kawasan hutan lindung, mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan, merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan pesisir dan mengembangkan ekowisata.

**1) Kawasan hutan lindung**

Kawasan hutan seluas kurang lebih 2.451 Ha berada di Kecamatan Sedan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur dan Kecamatan Sluke.

**2) Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya**

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air. Kawasan resapan air seluas kurang lebih 11.314 Ha berada di Kecamatan Lasem, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sedan dan Kecamatan Pancur.

**3) Kawasan perlindungan setempat**

Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar waduk/embung/bendung, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar sempadan jalan dan kawasan RTH. Kawasan sempadan pantai seluas kurang lebih 649 Ha berada di kecamatan pesisir di Kabupaten Rembang. Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi seluas kurang lebih 9.888 Ha terletak di setiap kecamatan yang dilewati sungai. Kawasan sekitar waduk/embung/bendung berada di Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Gunem, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Sluke, Kecamatan Pancur, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Pamotan. Kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan jalan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Kawasan RTH direncanakan seluas kurang lebih 2.720 Ha yang luasnya 32% dari luas perkotaan. Kawasan RTH berupa RTH publik dan RTH Privat. RTH Publik berupa hutan kota, taman kota, jalur hijau jalan dan sungai, tempat pemakaman umum. RTH privat berupa kebun atau pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha dan taman atap bangunan.

**4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya**

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya seluas kurang lebih 392 Ha berupa cagar alam Gunung Butak Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale seluas sebesar kurang lebih 45 Ha, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan suaka alam laut dan

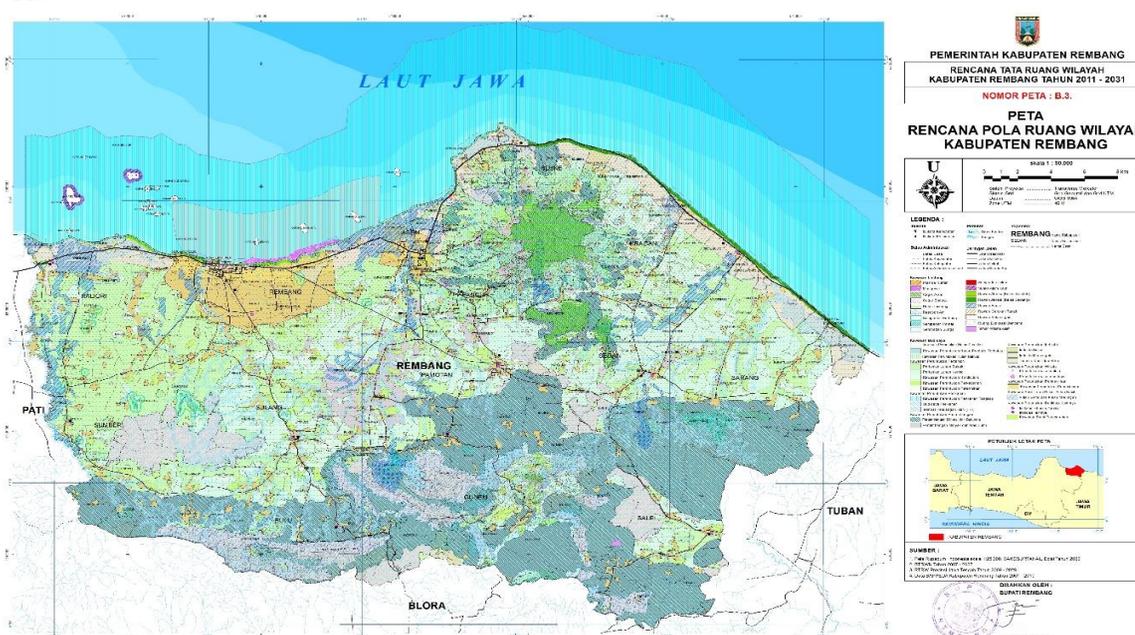
perairan lainnya dan kawasan hutan bakau. Taman wisata alam seluas kurang lebih 17 Ha berupa Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kecamatan Sale. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan bangunan puasak ayang tersebar di Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Kragan. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya berupa kawasan perairan Pulau Gede dan kawasan perairan Pulau Marongan. Kawasan hutan bakau berada di Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 166,73 Ha, Kecamatan Kaliore seluas kurang lebih 106,98 Ha dan Kecamatan Lasem seluas kurang lebih 56,29 Ha.

##### 5) Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi berupa kawasan imbunan air berada di Cekungan Watuputih, Cekungan Lasem dan Cekungan Pati – Rembang.

##### 6) Kawasan lindung lainnya

Kawasan lindung lainnya berupa perlindungan plasma-nutfah berupa terumbu karang yang tersebar dalam 17 gugusan seluas kurang lebih 145 Ha.



**Gambar 2.6**

#### **Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rembang**

Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

##### 7) Kawasan Strategis Kabupaten

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pengembangan wilayah ditetapkan kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut ditetapkan berdasarkan pengaruhnya dalam lingkup wilayah dan mempunyai nilai eksternalitas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis tersebut juga harus memperhatikan penetapan kawasan strategis nasional maupun propinsi. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

- 1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi :
  - a) Kawasan strategis propinsi berupa Kawasan Koridor Perbatasan Blora - Tuban - Rembang – Bojonegoro.
  - b) Kawasan strategis kabupaten berupa Kawasan Bahari Terpadu, Kawasan Bonang-Binangun-Sluke Zona I dan Zona II, Kawasan Pertanian Terpadu, Kawasan Agropolitan, Kawasan Pelabuhan dan sekitarnya, Kawasan Tumbuh Cepat Koridor Jalur Pantura, Kawasan

Kota Pantai Unggulan, Kawasan Minapolitan, PKLp Lasem, PKLp Pamotan, dan PKLp Kragan.

- 2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang berupa kawasan strategis kabupaten yaitu Kawasan Lindung Gunung Lasem dan Kawasan Mangrove Pasarbanggi.
- 3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan strategis propinsi yaitu Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Rembang.

#### **d. Pengembangan Kawasan Perdesaan**

Pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 diarahkan untuk menumbuhkan pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala lingkungan yang diwujudkan dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pusat pelayanan lingkungan tersebut meliputi PPL Desa Padaran Kecamatan Rembang, PPL Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori, PPL Desa Landoh Kecamatan Sulang, PPL Desa Sudo Kecamatan Sulang, PPL Desa Krikilan Kecamatan Sumber, PPL Desa Kedungasem Kecamatan Sumber, PPL Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber, PPL Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu, PPL Desa Kajar Kecamatan Lasem, PPL Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur, PPL Desa Japerejo Kecamatan Pamotan, PPL Desa Kepohagung Kecamatan Pamotan, PPL Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke, PPL Desa Tahunan Kecamatan Sale, PPL Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, PPL Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan, PPL Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan, PPL Desa Lodan Wetan Kecamatan Sarang dan PPL Desa Gandrirejo Kecamatan Sedan.

Dalam upaya pembangunan pedesaan, sebagai salah satu solusi penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Rembang dipandang telah berhasil dalam memfasilitasi program pengembangan kawasan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD). Program ini telah berhasil mengembangkan Kawasan Wisata Batik Lasem yang didukung oleh Pertanian dan Peternakan.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki 3 pengembangan kawasan pedesaanyaitu Kawasan Pedesaan Alas Samudro Welo, Kawasan Simoturun, dan Kawasan Kanung Argosoko. Pengembangan kawasan tersebut membutuhkan keterpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif dalam bentuk menggali potensi sumberdaya baik manusia maupun alam sehingga muncul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun dan meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Alas Samudro Welo merupakan implementasi dari pengembangan kawasan pesisir, yang terdiri dari Desa Pasarbanggi, Desa Tritunggal dan Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang serta Desa Gedongmulyo, Desa Dasun dan Desa Tasiksono Kecamatan Lasem, mengembangkan kawasan pariwisata pantai yang didukung potensi kelautan, perikanan, konservasi mangrove dan potensi lainnya.

Kawasan Simoturun merupakan implementasi dari pengembangan kawasan wisata spiritual, yang terletak di kecamatan Bulu. Kawasan ini merupakan gabungan dari beberapa desa yaitu Desa Lambangan Wetan, Desa Sumber Mulyo, Desa Karangasem, Desa Pasedan. Desa-desa tersebut telah bersepakat mengelola secara bersama dengan membentuk Bumdes bersama “kapalas”.

Kawasan Kanung Argosoko merupakan implementasi dari pengembangan kawasan wisata alam pegunungan Kecamatan Lasem dan Kecamatan Pancur. Diantaranya adalah Desa Gowak, Desa Kajar, Desa Sendangcoyo, Desa Warugunung, Desa Criwik, Desa Banyuurip, dan Desa Johoagung. Potensi yang dimiliki kawasan tersebut adalah keindahan pemandangan alam di pegunungan Lasem dan aneka ragam kebun buah.

### **2.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi : kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor / gerakan tanah, kawasan rawan gelombang tinggi / abrasi dan kawasan rawan bencana kekeringan.

#### **a. Kawasan Rawan Bencana Banjir**

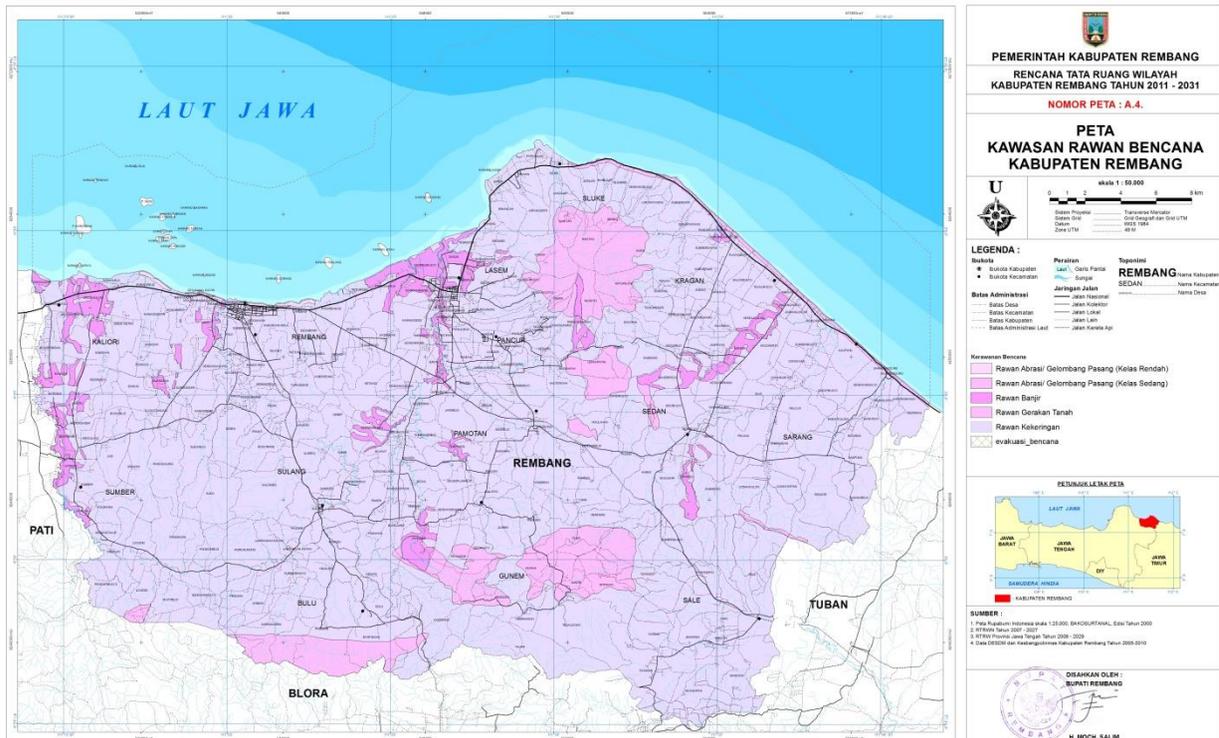
Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Potensi rawan banjir didasarkan pada parameter-parameter yaitu : (1) kelas kemiringan lereng, (2) drainase permukaan, (3) tekstur tanah, (4) kelembaban, (5) air tanah dan (6) curah hujan. Berdasarkan gabungan parameter diatas, Kabupaten Rembang tergolong rawan banjir. Lokasi rawan banjir di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Kaliori, Rembang dan Lasem.

#### **b. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Tanah Longsor**

Kabupaten Rembang mempunyai morfologi dataran rendah di sepanjang pantai utara dengan kelerengan berkisar 00–40. Selain itu morfologi bergelombang lemah sampai kuat yang ada di daerah Kabupaten Rembang bagian selatan sampai perbatasan dengan Kabupaten Blora, kelerengan berkisar 100–600. Bagian timur laut daerah Rembang terdapat pola topografi melingkar sudut lereng berkisar antara 150–600 yang termasuk dalam wilayah Gunung Lasem. Dari morfologi tersebut, lokasi daerah rawan longsor di Kabupaten Rembang terutama di bagian selatan dan timur, Kecamatan Pancur, Pamotan, Kragan, Sarang, Gunem, Sulang dan Sedan.

#### **c. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Rawan Abrasi**

Abrasi menjadi permasalahan utama di kawasan pesisir Rembang di bagian timur meliputi Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang. Ketiga kecamatan tersebut mempunyai resiko abrasi dalam kategori sangat tinggi. Wilayah terdampak abrasi terparah ada di seluruh pesisir Kecamatan Sarang dan pesisir Kecamatan Kragan mulai dari Desa Tegalmulyo hingga Desa Karangharjo. Abrasi ini termasuk abrasi berat, yang berarti : dapat menghilangkan daratan hingga beberapa meter per tahun. Abrasi ini lebih kuat pada musim barat. Selain di wilayah pesisir timur, abrasi pantai juga terjadi di wilayah barat yaitu Kecamatan Kaliori, terutama di Desa Matalan, Wates dan Paloh. Pantai-pantai di daerah tersebut merupakan pantai yang tidak berkarang, sehingga rentan terhadap abrasi. Abrasi yang terjadi di kawasan pesisir barat Kabupaten Rembang tergolong dalam abrasi ringan. Ada 7 prioritas titik rawan abrasi sepanjang Kecamatan Sluke-Sarang, tetapi baru beberapa titik yang mendapatkan penanganan yaitu di Kecamatan Sarang dan Kecamatan Kragan.



**Gambar 2.7**  
**Peta Rawan Bencana Kabupaten Rembang**  
 Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

**2.1.4. Aspek Demografi**

**a. Jumlah Penduduk**

Penduduk Kabupaten Rembang menurut data Dindikcapil Kabupaten Rembang pada tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2016	2017	2018	2010-2018	
<b>No.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Sumber	33 695	34 917	35 014	36338	7,8
2	Bulu	25 731	26 650	26 723	27848	8,2
3	Gunem	22 833	23 948	24 041	23876	4,6
4	Sale	35 902	37 695	37 844	39127	9,0
5	Sarang	60 370	64 407	64 765	60658	0,5
6	Sedan	51 362	54 122	54 359	53556	4,3
7	Pamotan	44 105	45 775	45 908	48788	10,6
8	Sulang	36 914	38 800	38 958	38 737	4,9
9	Kaliori	38 776	40 797	40 969	41726	7,6
10	Rembang	84 381	90 274	90 800	89159	5,7
11	Pancur	27 471	29 098	29 240	30134	9,7
12	Kragan	58 523	62 380	62 721	63880	9,2
13	Sluke	26 721	27 953	28 057	29558	10,6
14	Lasem	47 123	49 320	49 502	50044	6,2
	Rembang	593 907	626 136	628 901	633429	6,6

Sumber : Dindikcapil Kab.Rembang, Tahun 2018

Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan jenis kelamin beserta rasionya dapat dilihat pada tabel berikut:

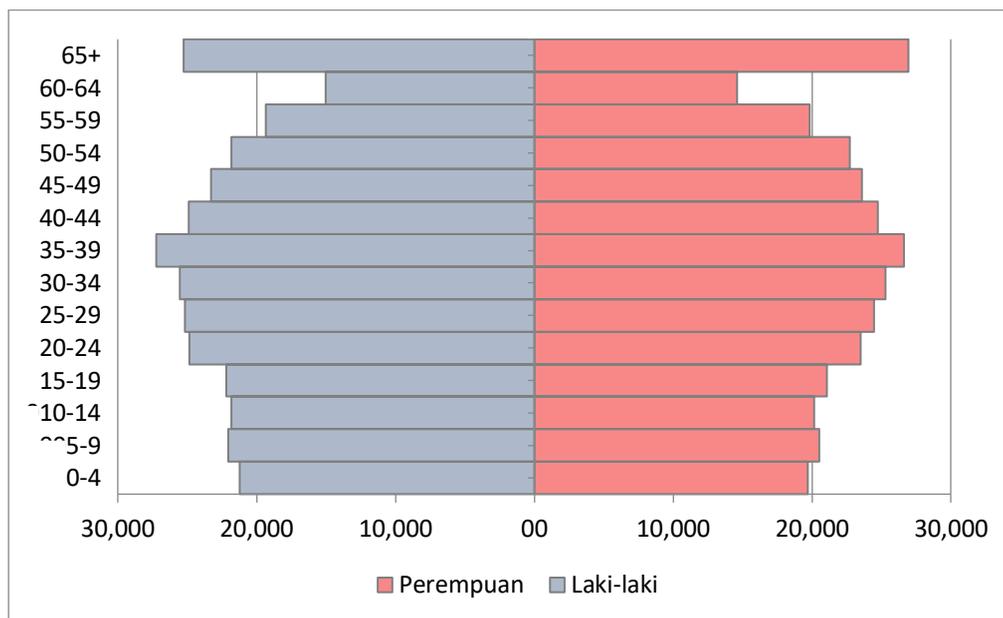
**Tabel 2.8**  
**Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Rembang Tahun 2018**

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1.	Sumber	18.116	49,85	18.222	50,15	36.338	99,42
2.	Bulu	14.086	50,58	13.762	49,42	27.848	102,35
3.	Gunem	12.125	50,78	11.751	49,22	23.876	103,18
4.	Sale	19.762	50,51	19.365	49,49	39.127	102,05
5.	Sarang	30.987	51,08	29.671	48,92	60.658	104,44
6.	Sedan	27.401	51,16	26.155	48,84	53.556	104,76
7.	Pamotan	24.783	50,80	24.005	49,20	48.788	103,24
8.	Sulang	19.472	50,27	19.265	49,73	38.737	101,07
9.	Kaliori	20.812	49,88	20.914	50,12	41.726	99,51
10.	Rembang	44.347	49,74	44.812	50,26	89.159	98,96
11.	Pancur	15.258	50,63	14.876	49,37	30.134	102,57
12.	Kragan	32.346	50,64	31.534	49,36	63.880	102,57
13.	Sluke	14.953	50,59	14.605	49,41	29.558	102,38
14.	Lasem	25.212	50,38	24.832	49,62	50.044	101,53
<b>Jumlah</b>		<b>319.660</b>	<b>50,47</b>	<b>313.769</b>	<b>49,53</b>	<b>633.429</b>	<b>101,88</b>
<b>2017</b>		<b>313.375</b>	<b>49,83</b>	<b>315.526</b>	<b>50,17</b>	<b>628.901</b>	<b>99,32</b>
<b>2016</b>		<b>312.057</b>	<b>49,84</b>	<b>314.079</b>	<b>50,16</b>	<b>626.136</b>	<b>99,36</b>
<b>2015</b>		<b>309.564</b>	<b>49,84</b>	<b>311.570</b>	<b>50,16</b>	<b>621.134</b>	<b>99,36</b>
<b>2014</b>		<b>307.004</b>	<b>49,77</b>	<b>309.897</b>	<b>50,23</b>	<b>616.901</b>	<b>99,07</b>
<b>2013</b>		<b>304.768</b>	<b>49,84</b>	<b>306.727</b>	<b>50,16</b>	<b>611.495</b>	<b>99,36</b>

Sumber : Dindukcapil Kab.Rembang, tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2018 sebanyak 633.429 jiwa terdiri atas 319.660 jiwa (50,47%) penduduk laki-laki dan 313.769 jiwa (49,53%) penduduk perempuan. Perbedaan jumlah penduduk di tiap kecamatan dipengaruhi lingkungan sosial dan fasilitas yang tersedia. Adanya perbedaan fasilitas di tiap kecamatan menyebabkan persebaran penduduk yang berbeda, dimana banyaknya fasilitas yang tersedia akan menarik lebih banyak penduduk. Kebanyakan orang lebih menyukai tempat yang ramai dekat dengan pusat keramaian, dimana tempat tersebut memiliki peluang usaha yang lebih besar. Sehingga orang-orang lebih memilih tinggal di pusat-pusat keramaian dengan fasilitas yang lebih banyak daripada di area pedesaan.

Sementara itu besarnya sex rasio tahun 2018 adalah 101,88%, artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama untuk menyukseskan pembangunan. Partisipasi aktif keduanya dalam proses pembangunan sangatlah penting demi tercapainya program pembangunan. Kurang berperannya salah satu pihak akan menghambat salah satu pihak, bahkan lebih dari itu akan menjadi beban pembangunan. Namun, dalam kenyataannya perempuan belum banyak mengambil peran dalam proses pembangunan dibandingkan dengan laki-laki.



**Grafik 2.1**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Rembang Tahun 2018**

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Rembang tahun 2018 terbanyak pada umur 35-39 sebesar 53.872 jiwa yaitu 27.239 jiwa untuk laki-laki sedangkan perempuan sebesar 26.633 jiwa. Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 455.733 jiwa, sedangkan umur yang tidak produktif yaitu sebesar 52.207 jiwa yaitu usia 0-14 sebesar 125.489 jiwa. Apabila di dibandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 38,99 artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 39 orang usia tidak produktif, dengan kata lain setiap 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh 2-3 orang usia produktif. Banyaknya penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan proporsi lebih dari dua kali lipat disebut dengan bonus demografi. Adanya bonus demografi ini dapat memberikan manfaat bagi daerah, karena dengan lebih banyaknya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan usia non-produktif akan meningkatkan pendapatan suatu daerah. Akan tetapi hal ini dapat terpenuhi dengan salah satu syarat, yaitu masyarakat yang berkualitas. Apabila kualitas masyarakat rendah, maka hal ini malah bisa membalik keadaan dan menghambat proses pembangunan daerah.

Sementara itu, pada piramida penduduk dapat dilihat bahwa populasi lanjut usia semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Pemerintah harus merumuskan pelayanan kesehatan usia lanjut untuk meningkatkan mutu kehidupan demi mencapai masa tua yang bahagia dan berdayaguna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai keberadaannya. Sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan kesehatan kelompok usia lanjut pemerintah mencanangkan pelayanan dalam wujud posyandu lansia.

#### **b. Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang tahun 2017 mencapai 620 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup bervariasi dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rembang dengan kepadatan sebesar 1.544 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Bulu sebesar 261 jiwa/ km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Rembang tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.9**  
**Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2017**

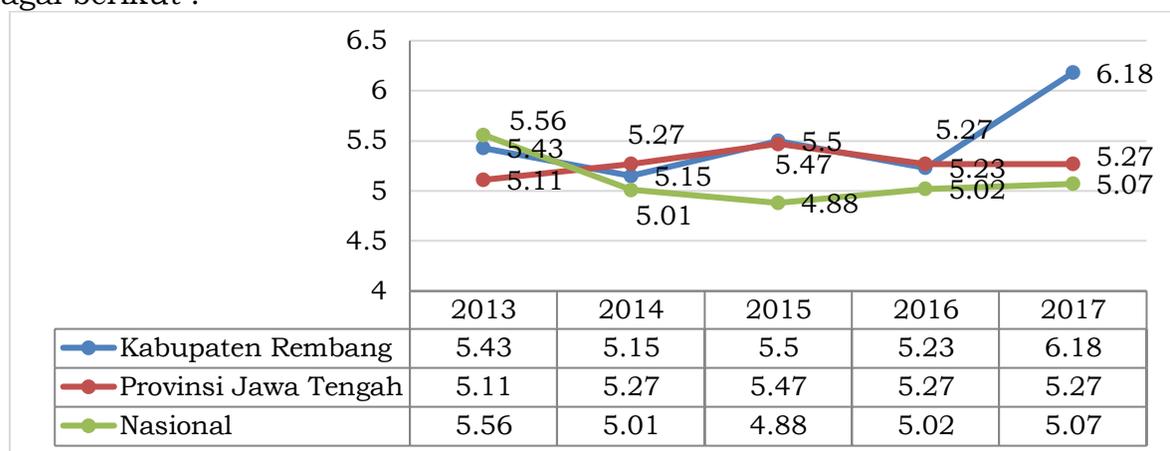
No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	Sumber	7.673	35.014	456
2.	Bulu	10.240	26.723	261
3.	Gunem	8.020	24.041	300
4.	Sale	10.714	37.844	353
5.	Sarang	9.133	64.765	709
6.	Sedan	7.964	54.359	683
7.	Pamotan	8.156	45.908	563
8.	Sulang	8.454	38.958	461
9.	Kaliori	6.150	40.969	666
10.	Rembang	5.881	90.800	1.544
11.	Pancur	4.594	29.240	636
12.	Kragan	6.166	62.721	1.017
13.	Sluke	3.759	28.057	746
14.	Lasem	4.504	49.502	1.099
<b>JUMLAH</b>		<b>101.408</b>	<b>628.901</b>	<b>620</b>
<b>2016</b>		<b>101.408</b>	<b>626.136</b>	<b>617</b>
<b>2015</b>		<b>101.408</b>	<b>621.134</b>	<b>613</b>
<b>2014</b>		<b>101.408</b>	<b>616.901</b>	<b>608</b>
<b>2013</b>		<b>101.408</b>	<b>611.495</b>	<b>603</b>

Sumber: RembRembang Dalam Angka, Tahun 2018

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang tumbuh oleh suatu daerah. Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik 2.2 sebagai berikut :



**Grafik 2.2**

### **Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017**

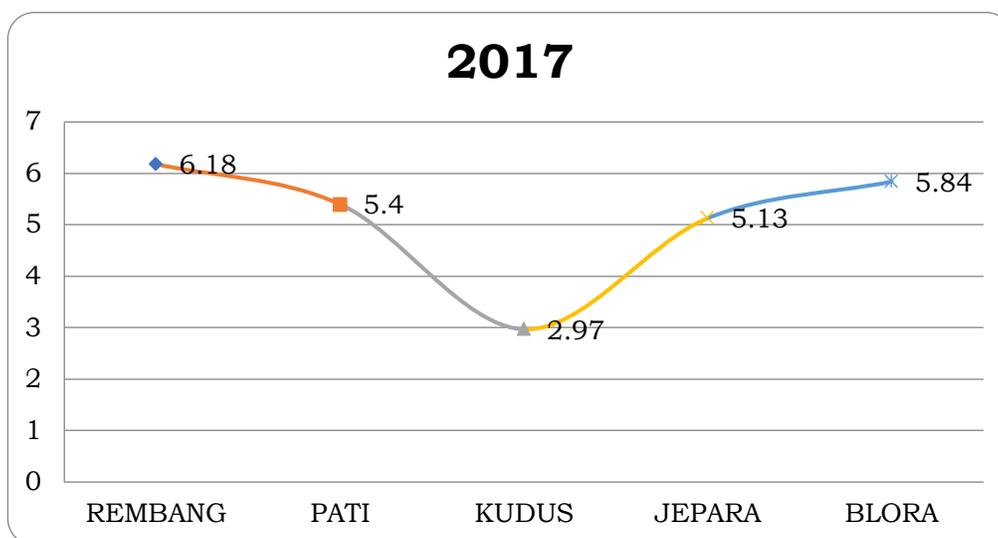
*Sumber: BPS, 2018*

Adapun gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten sekitar wilayah eks karisidenan Pati tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut:

**Tabel 2.10**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar**  
**Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 – 2017 (%)**

NO.	KABUPATEN	PERTUMBUHAN EKONOMI (TAHUN)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	REMBANG	5,43	5,15	5,5	5,22	6,18
2.	PATI	5,97	4,64	6,01	5,46	5,4
3.	KUDUS	4,36	4,43	3,88	2,52	2,97
4.	JEPARA	5,39	4,81	5,1	5,02	5,13
5.	BLORA	5,36	4,39	5,36	5,74	5,84

Sumber : BPS, 2018



**Grafik 2.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar**  
**Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2017 (%)**

Sumber: BPS 2018

Berdasarkan grafik 2. 3 dilihat bahwa persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang lebih tinggi daripada angka Provinsi Jawa Tengah bahkan Nasional pada tahun 2017. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang berada pada angka 5,43%, sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,11%, dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,56%. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 6,18% masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang masing-masing yaitu Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,27% dan dan Nasional sebesar 5,07%. Sepanjang tahun 2013 - 2017 pertumbuhan ekonomi terbaik Kabupaten Rembang terjadi pada tahun 2017 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,18%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013-2017 menunjukkan trend yang fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,18% dan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,15 %. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang lebih baik atau tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di wilayah Eks Karesidenan Pati. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Rembang selama tahun 2013 - 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.11**  
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 (%)**

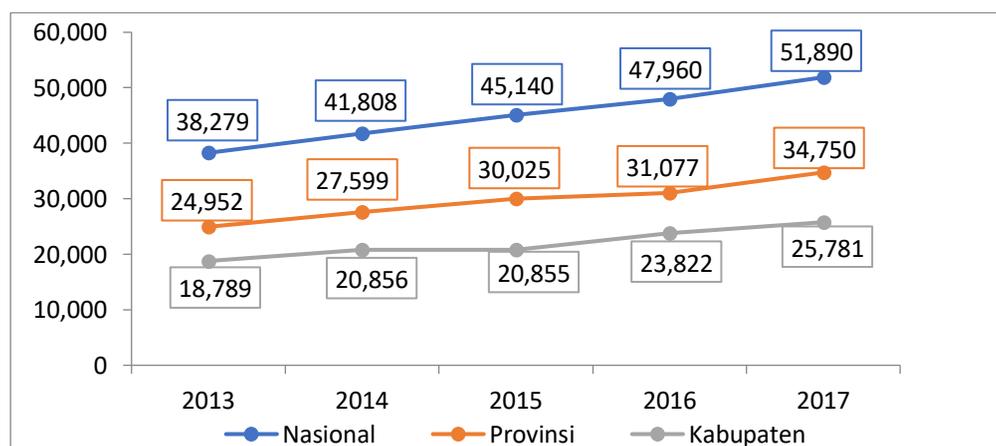
No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,22	(5,62)	4,16	1,63	3,87
B.	Pertambangan dan penggalian	5,58	6,51	4,03	6,30	20,84
C.	Industri pengolahan	9,88	15,20	7,66	7,86	6,34
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,20	5,30	2,59	6,77	7,07
E.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	(0,19)	1,98	1,71	2,98	3,71
F.	Konstruksi	(4,40)	14,65	6,18	7,46	7,52
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rerparasi Mobil dan sepeda Motor	3,14	4,05	4,11	5,28	6,56
H.	Transportasi dan Pergudangan	10,54	10,55	6,78	5,44	6,04
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,47	11,18	6,13	5,63	6,10
J.	Informasi dan Komunikasi	10,09	17,16	7,27	7,81	8,64
K.	Jasa Keuangan dan asuransi	5,63	6,22	4,46	6,77	4,21
L.	Real Estate	4,70	6,38	6,18	5,78	5,05
M,N	Jasa Perusahaan	16,68	7,15	8,84	9,92	8,19
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,99	0,67	4,87	2,78	3,81
P.	Jasa Pendidikan	15,97	14,86	6,81	7,51	7,86
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,42	14,97	9,75	9,83	8,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,86	9,38	4,07	8,30	8,36
	<b>PDRB</b>	5,43	5,15	5,50	5,23	6,18

Sumber: BPS, 2018

Salah satu kontribusi lapangan usaha yang menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang secara signifikan adalah berdasarkan PDRB ADHK, dimana penyumbang terbesar laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2017 adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian karena telah dilakukan penertiban dan pemberlakuan regulasi yang ada. Berdasarkan data di atas, pertumbuhan lapangan usaha yang paling lambat adalah pada pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang yaitu sebesar 3,71. Sehingga perlu dilakukan penegakan regulasi yang lebih jelas dan ketat pada sektor tersebut.

### 2.2.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai peran atau sumbangan sektor-sektor dalam perekonomian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah. Gambaran PDRB tahun 2013-2017 dapat dilihat pada data-data di bawah ini:



**Grafik 2.4**  
**Perkembangan PDRB Per-Kapita Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 (000 Rupiah)**

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018, diolah.

Pada tinjauan makro sektoral perekonomian suatu daerah dapat berstruktur agraris industri atau jasa. Hal ini tergantung pada sektor apa yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah yang bersangkutan. Untuk mengetahui makro sektoral yang mendukung di Kabupaten rembang, dapat dilihat dalam bentuk PDRB ADHK dan ADHB berikut :

**Tabel 2.12**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017**

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%
A.	Pertanian Kehutanan, & Perikanan	3.819.980,24	33,39	3.875.370,82	30,23	4.168.479,14	29,99	4.295.225,24	28,89	4.517.460,32	27,86
B.	Pertambangan & Penggalian	328.421,39	2,87	392.183,09	3,06	433.924,07	3,12	466.388,29	3,14	653.111,67	4,03
C.	Industri Pengolahan	2.154.137,65	18,83	2.669.575,63	20,82	2.939.112,10	21,15	3.226.027,16	21,70	3.486.156,08	21,50
D.	Pengadaan Listrik & Gas	8.238,59	0,07	8.767,36	0,07	9.110,24	0,07	10.351,25	0,07	11.938,14	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	5.623,45	0,05	5.899,50	0,05	6.188,70	0,04	6.412,17	0,04	6.684,05	0,04
F.	Konstruksi	773.793,17	6,76	954.913,45	7,45	1.029.561,92	7,41	1.115.264,32	7,50	1.224.790,03	7,55
G.	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.537.605,99	13,44	1.668.565,36	13,01	1.775.107,00	12,77	1.912.222,96	12,86	2.091.451,69	12,90
H.	Transportasi & Pergudangan	381.769,32	3,34	449.554,14	3,51	499.050,45	3,59	526.759,92	3,54	601.088,05	3,71
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	330.003,77	2,88	389.323,28	3,04	427.554,85	3,08	454.579,75	3,06	491.263,48	3,03
J.	Informasi & Komunikasi	118.564,21	1,04	133.435,07	1,04	142.416,45	1,02	153.980,59	1,04	174.873,40	1,08
K.	Jasa Keuangan & Asuransi	480.379,60	4,20	544.091,27	4,24	586.425,16	4,22	640.708,20	4,31	695.637,09	4,29
L.	Real Estate	101.595,04	0,89	113.966,71	0,89	124.658,42	0,90	133.347,74	0,90	143.554,75	0,89
M,N	Jasa Perusahaan	30.029,04	0,26	33.201,88	0,26	36.898,79	0,27	41.042,09	0,28	45.012,36	0,28
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	461.345,11	4,03	498.372,62	3,89	534.912,82	3,85	567.661,05	3,82	602.561,66	3,72
P.	Jasa Pendidikan	581.266,26	5,08	697.294,29	5,44	760.055,63	5,47	842.605,81	5,67	945.363,37	5,83
Q.	Jasa Kesehatan & Kegtan Sosial	124.397,59	1,09	149.195,02	1,16	169.145,79	1,22	186.707,03	1,26	206.924,67	1,28
R,S, T,U	Jasa Lainnya	203.952,64	1,78	238.006,15	1,86	255.215,06	1,84	287.792,16	1,94	316.154,80	1,95
PDRB ADHB		11.441.103,05	100	12.821.715,64	100	13.897.816,58	100	14.867.075,7	100	16.214.025,61	100

Sumber: BPS, 2018

**Tabel 2.13**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013 - 2017**

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%
A.	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	3.171.162,16	32,42	2.992.910,68	29,10	3.117.527,80	28,73	3.168.229,36	27,75	3.290.989,85	27,15
B.	Pertambangan dan Penggalian	291.765,56	2,98	310.767,69	3,02	323.291,63	2,98	343.653,90	3,01	415.258,93	3,43
C.	Industri Pengolahan	1.860.445,88	19,02	2.143.284,16	20,84	2.307.391,43	21,27	2.488.767,34	21,80	2.646.597,21	21,83
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	8.733,72	0,09	9.196,67	0,09	9.434,85	0,09	10.073,49	0,09	10.785,29	0,09
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.438,49	0,06	5.546,09	0,05	5.640,84	0,05	5.809,15	0,05	6.024,43	0,05
F.	Konstruksi	677.377,74	6,93	776.630,15	7,55	824.642,21	7,60	886.134,34	7,76	952.802,86	7,86
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.351.957,53	13,82	1.406.724,91	13,68	1.464.601,23	13,50	1.541.934,41	13,50	1.643.010,86	13,55
H.	Transportasi dan Pergudangan	375.320,78	3,84	414.922,27	4,03	443.036,47	4,08	467.117,18	4,09	495.336,15	4,09
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	302.419,11	3,09	336.231,73	3,27	356.833,89	3,29	376.930,99	3,30	399.907,68	3,30
J.	Informasi dan Komunikasi	124.069,69	1,27	145.366,04	1,41	155.940,86	1,44	168.123,59	1,47	182.655,76	1,51
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	383.294,92	3,92	407.151,89	3,96	425.297,66	3,92	454.103,43	3,98	473.217,02	3,90
L.	Real Estate	99.192,48	1,01	105.520,70	1,03	112.044,16	1,03	118.520,31	1,04	124.500,64	1,03
M,N	Jasa Perusahaan	26.308,16	0,27	28.188,71	0,27	30.679,79	0,28	33.723,93	0,30	36.484,32	0,30
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	388.453,41	3,97	391.050,95	3,80	410.088,03	3,78	421.480,84	3,69	437.549,12	3,61
P.	Jasa Pendidikan	423.906,11	4,33	486.880,24	4,73	520.048,58	4,79	559.128,80	4,90	603.075,53	4,97
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.304,22	1,05	117.619,36	1,14	129.087,85	1,19	141.779,71	1,24	153.344,22	1,26
R,S,T, U	Jasa Lainnya	188.600,44	1,93	206.282,10	2,01	214.681,91	1,98	232.497,97	2,04	251.928,97	2,08
PDRB ADHK		9.780.750,39	100	10.284.274,36	100	10.850.269,20	100	11.418.008,73	100	12.123.468,84	100

Sumber: Rembang Dalam Angka Tahun 2018

**Tabel 2.14**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013 - 2017**

NO	JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2013		2014		2015		2016*		2017**	
		Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1.	<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption Expenditure</b>	7 976 937,08	69,72	8 782 543,17	68,50	9 731 003,28	70,02	10 422 089,98	70,10	11 400 996,63	70,32
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food and Beverages other than restaurants</i>	3 694 149,53	32,29	4 011 903,70	31,29	4 474 558,63	32,20	4 849 448,23	32,62	5 321 099,80	32,82
	b. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and Footwear</i>	349 806,24	3,06	374 738,09	2,92	404 467,18	2,91	430 756,48	2,90	470 119,34	2,90
	c. Perumahan, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ <i>Housing, Tools, Household and Caretaker Equipment</i>	746 408,59	6,52	838 256,77	6,54	912 053,53	6,56	970 047,53	6,52	1 045 398,44	6,45
	d. Kesehatan dan Pendidikan/ <i>Health and Education</i>	464 430,26	4,06	510 279,06	3,98	555 647,95	4,00	597 851,27	4,02	642 851,04	3,96
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation, and Culture</i>	2 044 562,01	17,87	2 268 679,23	17,69	2 527 915,88	18,19	2 646 148,19	17,80	2 902 315,49	17,90
	f. Hotel dan Restoran/ <i>Restaurants and Hotels</i>	558 542,22	4,88	647 438,57	5,05	710 179,72	5,11	770 045,21	5,18	843 533,18	5,20
	g. Lainnya/ <i>Others</i>	119 038,23	1,04	131 247,75	1,02	146 180,37	1,05	157 793,07	1,06	175 679,34	1,08
2.	<b>Pengeluaran LNPR/ NPISH Consumption Expenditure</b>	167 669,62	1,47	195 427,68	1,52	204 854,77	1,47	218 941,23	1,47	236 350,55	1,46

NO	JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2013		2014		2015		2016*		2017**	
		Rp	(%)								
3.	<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure</b>	1 106 461,25	9,67	1 230 266,31	9,60	1 323 420,73	9,52	1 432 360,72	9,63	1 536 667,59	9,48
4.	<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation</b>	2 479 460,15	21,67	2 748 776,99	21,44	2 984 350,28	21,47	3 223 010,30	21,68	3 640 946,62	22,46
	a. Bangunan/ Building	2 067 005,16	18,07	2 298 364,91	17,93	2 517 412,29	18,11	2 729 620,71	18,36	3 111 940,65	19,19
	b. Non-Bangunan/ non – Building	412 454,99	3,61	450 412,08	3,51	466 937,98	3,36	493 389,58	3,32	529 005,97	3,26
5.	<b>Perubahan Inventori/ Changes in Inventories</b>	548 460,78	4,79	401 740,39	3,13	258 955,60	1,86	205 541,38	1,38	448 179,68	2,76
6.	<b>Ekspor/ Exports</b>	3 829 463,49	33,47	3 805 798,57	29,68	3 695 773,39	26,59	3 953 277,64	26,59	4 468 618,27	27,56
7.	<b>Impor/ Import</b>	4 667 349,32	40,79	4 342 837,47	33,87	4 300 541,46	30,94	4 588 145,50	30,86	5 517 733,72	34,03
8.	<b>Ekspor/ Exports</b>	- 837 885,83	- 7,32	- 537 038,90	- 4,19	- 604 768,07	- 4,35	- 634 867,86	- 4,27	-1 049 115,45	- 6,47
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS</b>	11.441.103,05	100,00	12.821.715,64	100,00	13.897.816,58	100,00	14.867.075,74	100,00	16 214 025,61	100,00

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber : BPS, 2018

**Tabel 2.15**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten**  
**Rembang Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah)**

JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2013	2014	2015	2016*	2017**
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption Expenditure</b>	<b>6.642.628,16</b>	<b>6.902.847,24</b>	<b>7.312.754,27</b>	<b>7.676.837,48</b>	<b>8.144.561,06</b>
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ Food and Beverages other than restaurants	2.896.089,91	2.938.669,49	3.062.039,47	3.209.514,97	3.401.023,87
b. Pakaian & Alas Kaki/ Clothing and Footwear	335.495,20	351.015,63	374.756,49	393.847,64	416.048,26
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RumahTangga/Housing, Tools, Household and Caretaker Equipment	639.668,41	676.291,70	725.175,01	758.865,65	786.493,23
d. Kesehatan dan Pendidikan/ Health and Education	423.655,55	440.504,46	468.381,86	490.507,18	510.488,58
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ Transport, Communication, Recreation, and Culture	1.760.664,40	1.867.955,37	2.005.869,55	2.108.131,08	2.257.913,94
f. Hotel dan Restoran/ Restaurants and Hotels	480.884,45	514.184,65	552.377,44	585.497,97	631.946,94
g. Lainnya/ Others	106.170,24	114.225,93	124.154,46	130.473,00	140.646,25
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption Expenditure</b>	<b>138.975,00</b>	<b>151.264,74</b>	<b>148.876,62</b>	<b>156.950,90</b>	<b>164.194,91</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure</b>	<b>889.423,57</b>	<b>919.516,45</b>	<b>939.212,99</b>	<b>976.867,15</b>	<b>1.003.549,45</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation</b>	<b>2.125.245,17</b>	<b>2.214.727,19</b>	<b>2.345.804,58</b>	<b>2.492.673,90</b>	<b>2.713.089,96</b>
a. Bangunan/ Building	1.753.847,91	1.851.411,46	1.977.562,72	2.118.666,85	2.329.871,63
b. Non-Bangunan/ non – Building	371.397,27	363.315,73	368.241,86	374.007,05	383.218,34
<b>5. Perubahan Inventori/ Changes in Inventories</b>	<b>271.450,61</b>	<b>236.710,77</b>	<b>142.979,18</b>	<b>153.746,02</b>	<b>265.160,84</b>
<b>6. Ekspor/ Exports</b>	<b>3.520.023,81</b>	<b>3.369.200,05</b>	<b>3.523.138,39</b>	<b>3.640.589,73</b>	<b>3.861.435,11</b>
<b>7. Impor/ Import</b>	<b>3.806.995,92</b>	<b>3.509.992,07</b>	<b>3.562.496,83</b>	<b>3.679.656,44</b>	<b>4.028.522,49</b>
<b>8. Ekspor/ Exports</b>	<b>- 286.972,11</b>	<b>- 140.792,02</b>	<b>- 39.358,44</b>	<b>- 39.066,71</b>	<b>- 167.087,38</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS</b>	<b>9.780.750,39</b>	<b>10.284.274,36</b>	<b>10.850.269,20</b>	<b>11.418.008,73</b>	<b>12.123.468,84</b>
* Angka sementara					
** Angka sangat sementara					

Sumber : BPS, 2018

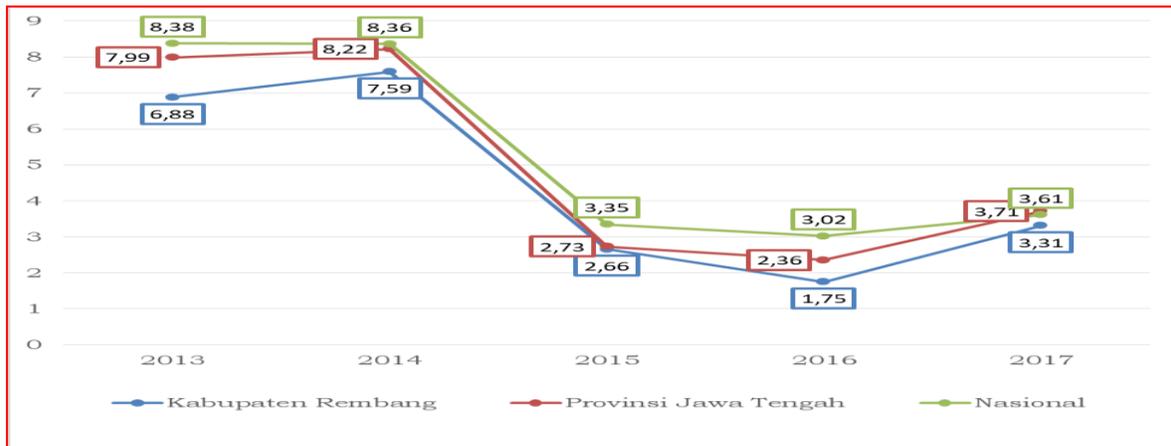
Berdasarkan tabel di atas, didapatkan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai kontribusi PDRB ADHK Tahun 2010 pada Tahun 2013 sebesar Rp. 3,78 Trilyun, kemudian pada Tahun 2014 sebesar Rp. 10,28 Trilyun, terus mengalami kenaikan dan pada Tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp. 12,12 Trilyun. Nilai kontribusi PDRB ADHK tahun 2010 pada tahun 2017 yang tertinggi masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu berasal dari lapangan usaha Pertanian Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,15% sedangkan yang terendah adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,05%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa makro sektoral perekonomian Kabupaten Rembang berstruktur agraris. Sehingga perlu untuk mempertahankan usaha pertanian kehutanan dan perikanan serta mendorong sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang agar meningkatkan PDRB per-kapita.
2. Nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut pengeluaran selama tahun 2013 - 2017 tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Kabupaten Rembang. Seperti pada Tahun 2017 nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Rembang sebesar 70,32%. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 adalah pengeluaran Impor dan Ekspor barang/jasa yaitu sebesar 34,03%, dan 27,56% serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar 22,46%. Agar didapatkan hasil yang stabil, maka perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengatur pola hidupnya agar tidak konsumtif, khususnya untuk kebutuhan makan, minum, dan rokok.

### **2.2.3 Inflasi**

Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Inflasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar 2,53%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 3,31%, dan merupakan inflasi paling tinggi sepanjang selang tahun 2015- 2017. Namun masih dibawah angka inflasi nasional sebesar 3,61% dan inflasi Jawa Tengah sebesar 3,71%. Kondisi tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas ekonomi di Kabupaten Rembang. Puncak kenaikan harga komoditas dalam siklus inflasi bulanan di Kota Rembang selama tahun 2017 terjadi pada bulan Juli. Hal tersebut dipicu oleh kegiatan konsumsi masyarakat selama bulan ramadhan yang mendorong inflasi sebesar 0,77%. Sementara penurunan harga paling besar terjadi pada bulan April (-0,47%). Sepanjang tahun 2017, penyumbang kenaikan harga terbesar berasal dari inflasi kelompok komoditas bahan makanan dan terkecil berasal dari inflasi kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Adapun grafik perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 -2017 sebagaimana gambar berikut :



**Grafik 2.5**  
**Laju Inflasi (%) Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017**

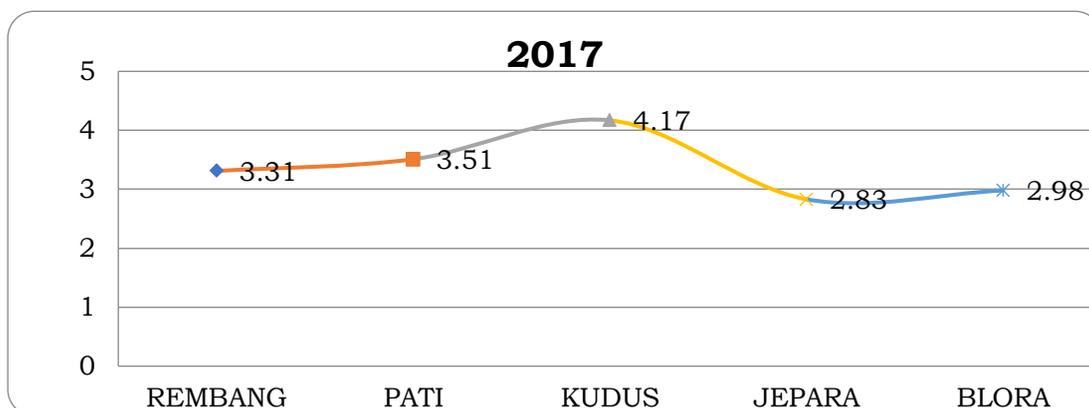
Sumber: BPS, 2018

Tingkat inflasi di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2013–2018 masih terkendali cukup baik, meskipun pada tahun 2013 dan 2014 di angka tertinggi sebesar 6,88% dan 7,59%, namun pada kurun waktu 3 tahun berikutnya pada tahun 2015 s.d. 2018 mengalami tingkat inflasi yang stabil yaitu di kisaran angka sebesar 1% s.d. 3%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Rembang lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar se-Eks Karesidenan Pati. Tingkat inflasi di Kabupaten Rembang rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun juga kondisi daerah memberikan andil pada tingkat inflasi di Kabupaten Rembang. Adapun tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten sekitar wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.16**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 – 2017 (%)**

NO.	KABUPATEN	INFLASI (TAHUN)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	REMBANG	6,88	7,59	2,66	1,75	3,31	2,53
2.	PATI	7,57	8,01	3,23	2,31	3,51	NA
3.	KUDUS	8,31	8,59	3,28	2,32	4,17	NA
4.	JEPARA	7,95	9,87	4,57	3,45	2,83	NA
5.	BLORA	7,94	7,13	2,85	2,14	2,98	NA

Sumber: BPS, 2019



**Grafik 2.6**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2017 (%)**

Sumber: BPS 2018

### 2.2.4 Indeks Gini

Fksjfk

Indeks Gini di Kabupaten Rembang selama tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa tren ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang berada dalam kategori ketimpangan sedang atau menengah. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,33 dan titik timpang terendahnya pada tahun 2015 sebesar 0,3. Adapun perkembangan indeks gini Kabupaen Rembang selama 5 tahun sebagaimana tabel berikut :

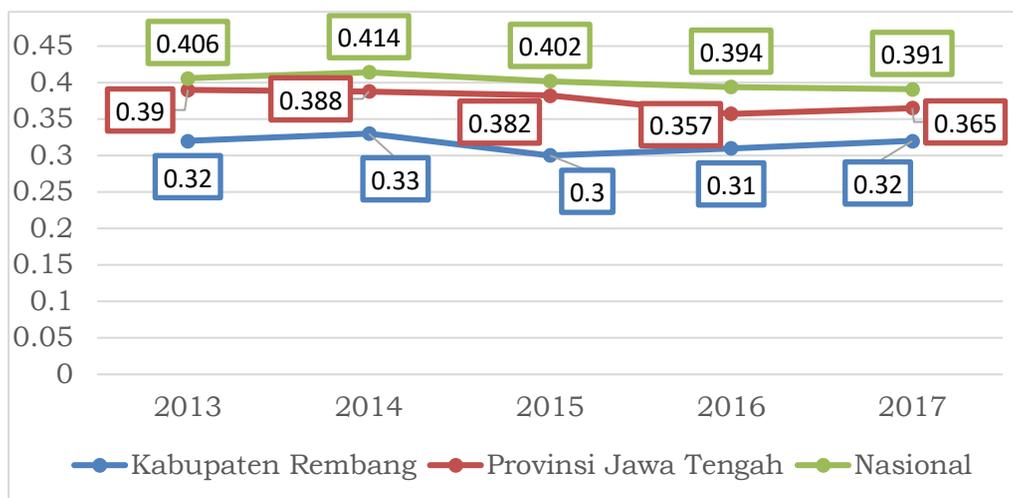
**Tabel 2.17**  
**Indeks Gini Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017**

KABUPATENREMBANG	INDEKS GINI (TAHUN)				
	2013	2014	2015	2016	2017
	0,32	0,33	0,3	0,31	0,32

Sumber : BPS, 2018

Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, posisi angka ketimpangan Kabupaten Rembang mulai Tahun 2013 sampai Tahun 2017 lebih rendah daripada angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang lebih baik karena ketimpangannya lebih sedikit dibandingkan Provinsi dan Nasional.

Adapun perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 tersaji pada grafik berikut.



**Grafik 2.7**

**Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017**

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018, diolah.

### 2.2.5 Kemiskinan

Data kemiskinan dikelompokkan menjadi 2 jenis data, yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro berupa persentase dan perhitungan jumlah penduduk miskin suatu daerah yang di-rilis oleh BPS. Sedangkan data kemiskinan mikro adalah data yang diperoleh melalui mekanisme sensus (bersifat menyeluruh), bersifat kuantitatif, dapat memberikan informasi detail, dan dapat dipergunakan sebagai referensi intervensikegiatan yang tersedia secara *by name by address*. Data tersebut dapat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin**  
**Dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

Indikator Kemiskinan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	128	120	119,11	115,49	115,19	97,44
Persentase Penduduk Miskin (persen)	20,97	19,5	19,28	18,54	18,35	15,41
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	284.160	299.503	314.596	338.986	354.440	365.443

Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2018

Adapun perbandingan data kemiskinan di Kabupaten Rembang dengan kabupaten eks Karesidenan Pati tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.19**  
**Data Kemiskinan Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten**  
**Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2018**

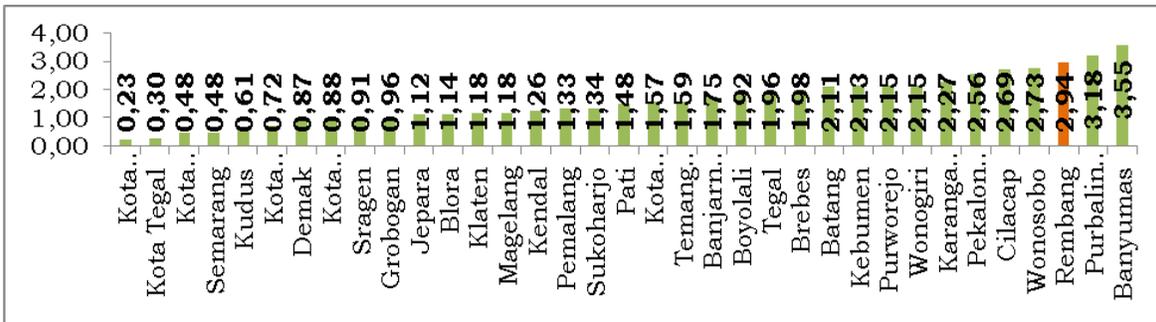
Indikator Kemiskinan	Kabupaten				
	Rembang	Pati	Kudus	Blora	Jepara
Jmlpnddk Miskin (ribu jw)	97,44	123,94	59,99	102,50	86,54
Persentase pddk Miskin (%)	15,41	9,90	6,98	11,90	7,00
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	365.443	414.316	393.078	308.520	371.296
Indeks Kedalaman Kemsikinan	2,86	1,37	0,88	1,62	0,71
Indeks Keparahan kemiskinan	0,78	0,29	0,19	0,37	0,13

Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan di Kabupaten Rembang sebesar 5,56% dari tahun 2013 - 2018. Penurunan paling banyak terdapat pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 2,94%. Penurunan yang banyak ini selaras dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 0,95%. Garis kemiskinan tidak selalu tetap pada setiap tahunnya, hal ini terjadi karena tren kebutuhan hidup manusia akan berubah setiap saat. Mencermati pada tabel di atas, bisa diartikan pada konsumsi/kapita/bln penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2013 maksimal sebesar 284.160 rupiah/kapita/bln, berubah pada tahun 2018 menjadi sebesar 365.443 rupiah/kapita/bln. Jenis pengeluaran yang berkontribusi besar menyumbang tingginya garis kemiskinan adalah dari makanan, minuman, dan rokok sebesar 42% dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga (lihat Tabel 2.14). Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Rembang memiliki pola hidup yang cenderung konsumtif, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola pengeluaran rumah tangga khususnya konsumsi rokok.

Garis kemiskinan tertinggi di Wilayah Eks Karesidenan Pati adalah Kabupaten Pati sebesar 414.316 rupiah/kapita/bln, diikuti Kabupaten Kudus sebesar 393.078 rupiah/kapita/bln, Kabupaten Jepara sebesar 371.296 rupiah/kapita/bln, Kabupaten Rembang sebesar 365.443 rupiah/kapita/bln, menempati posisi diatas Kabupaten Blora.

Secara umum, kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Rembang dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018 cukup baik. Kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



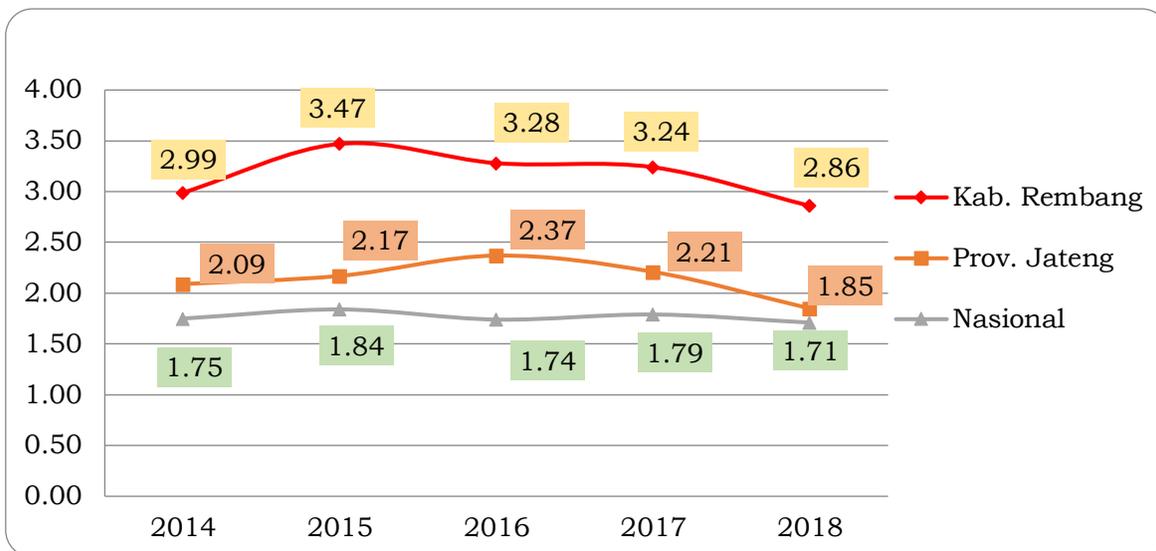
Grafik 2.8

**Posisi Relatif Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (%)**

Sumber: TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-02018 dapat dilihat pada grafik berikut:



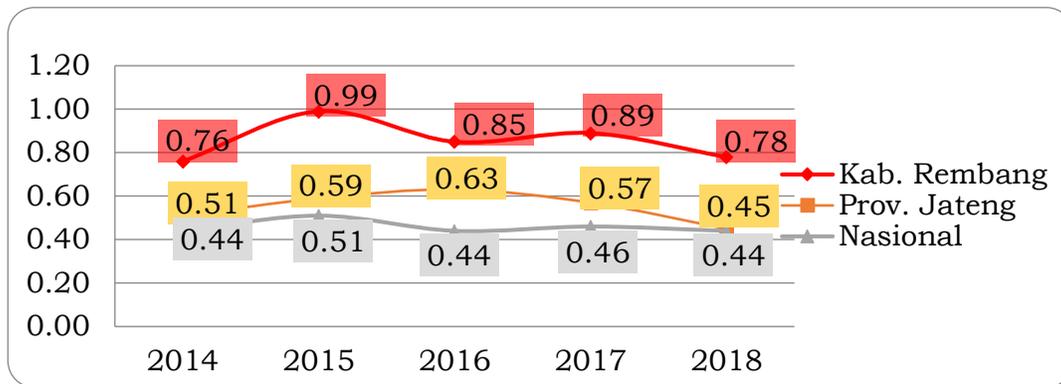
Grafik 2.9

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018**

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2018

Dalam rentan waktu tahun 2015-2018, P1 mengalami penurunan dari 3,47 menjadi 2,86. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2015-2018 cenderung makin mendekati garis kemiskinan, yang berarti terjadi perbaikan pada perekonomian penduduk miskin selama empat tahun terakhir. Hal ini memperlihatkan bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah cukup efektif untuk menurunkan kesenjangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang. Namun demikian penurunan P1 Kabupaten Rembang jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional masih tertinggal.

Perbandingan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.10

**Posisi Relatif Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional Tahun 2018**

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2018

Selama kurun waktu 2014-2018, P2 Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 0,76 pada tahun 2014 menjadi 0,78 pada tahun 2018. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,99. Pada tahun 2018 P2 mengalami penurunan menjadi 0,78. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 semakin menyempit dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan melihat trend penurunan pada Grafik P1 dan P2 di atas, masih perlu perhatian karena kondisi P1 dan P2 mempengaruhi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Rembang. Hingga saat ini telah dilakukan berbagai upaya dalam Program Penanggulangan Kemiskinan. Agar program tersebut tepat sasaran dan strategi penanganan maka dilakukan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) penduduk miskin.

**2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat mengukur peringkat/level pembangunan suatu daerah. IPM dapat diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang, Kabupaten Sekitar Wilayah Eks-Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20

**Data IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Eks Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018**

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Rembang</b>	<b>67,40</b>	<b>68,18</b>	<b>68,60</b>	<b>68,95</b>	<b>69,46</b>
Blora	65,84	66,22	66,61	67,52	67,95
Pati	66,99	68,51	69,03	70,12	70,71
Jejara	69,61	70,02	70,25	70,79	71,38
Kudus	72,00	72,72	72,94	73,84	74,58
<b>JAWA TENGAH</b>	<b>68,78</b>	<b>69,49</b>	<b>69,98</b>	<b>70,52</b>	<b>71,12</b>
<b>NASIONAL</b>	<b>68,90</b>	<b>69,55</b>	<b>70,18</b>	<b>70,81</b>	<b>71,39</b>

Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 2019

Secara umum pada tahun 2018, IPM Kabupaten Rembang cenderung lebih rendah dibanding Kabupaten eks Karesidenan Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selama kurun waktu 5 tahun (2014–2018) kenaikan

IPM di Kabupaten Rembang mencapai 2,06%. Setiap tahunnya terjadi kenaikan IPM dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,51%. Kenaikan IPM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengeluaran perkapita, Rata-rata Lama Sekolah (RLS),Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Usia Harapan Hidup (UHH).

**a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2014 sebesar 6,90 menjadi 6,95 pada tahun 2018 atau tumbuh 0,72%. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di kabupaten Rembang yang lebih baik, karena pendidikan bukan hanya menambah pengetahuan akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Hingga tahun 2018, secara rata-rata penduduk Kabupaten Rembang telah menempuh pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I) atau seperti ilustrasi dibawah ini.



**Gambar 2.8**  
**Ilustrasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang**

*Sumber : data diolah*

Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.21**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018**

Kabupaten / Propinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	6,90	6,92	6,93	6,94	6,95
Blora	6,02	6,04	6,18	6,45	6,46
Pati	6,35	6,71	6,83	7,08	7,18
Kudus	7,83	7,84	7,85	8,31	8,62
Jepara	7,29	7,31	7,32	7,33	7,43
Jawa Tengah	6,93	7,03	7,15	7,27	7,35

*Sumber : Dindikpora*

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah yang paling tinggi di Kabupaten Eks Karesidenan Pati adalah Kabupaten Kudus yaitu selama 8,62 tahun, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Blora yaitu selama 6,46 tahun. Kabupaten Rembang memiliki Angka Rata-rata Lama Sekolah yang cenderung rendah yaitu pada posisi ke-4 dari total 5 Kabupaten Eks Karesidenan Pati, yaitu sebesar 6,95 tahun. Angka ini juga masih rendah jika dibandingkan dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 7,35 tahun.

**b. Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Selama periode 2014 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rembang tumbuh sebesar 1,29% per tahun. Meningkatnya HLS menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Rembang yang bersekolah. Di tahun 2018, HLS telah mencapai 12,05 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan

pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. HLS dipengaruhi oleh perbedaan tingkat sosial, keadan geografis, dan sebaran sekolah.

HLS Kabupaten Rembang pada tahun 2018 berada di bawah HLS Jawa Tengah dan Kabupaten Eks Karesidenan Pati. Perbandingan HLS Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

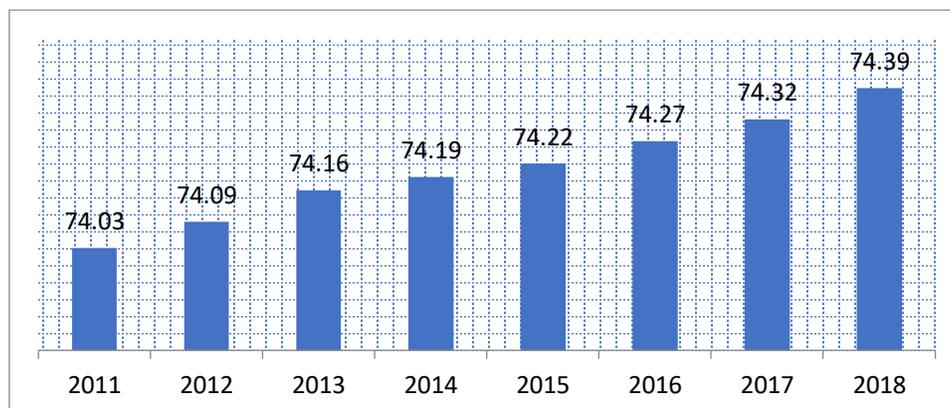
**Tabel 2.22**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018**

Kabupaten / Propinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	11,46	12,02	12,03	12,04	12,05
Blora	11,75	11,91	11,92	12,13	12,14
Pati	11,24	11,79	11,92	12,29	12,30
Kudus	12,54	13,14	13,19	13,20	13,21
Jepara	12,58	12,27	12,28	12,70	12,71
Jawa Tengah	12,17	12,38	12,45	12,57	12,63

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2018

### c. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2018, Kabupaten Rembang telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,36 tahun (sekitar 4-5 bulan). Selama periode tersebut, secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,49 persen per tahun. Pada tahun 2011, UHH saat lahir sebesar 74,03 tahun, dan tujuh tahun kemudian mencapai 74,39 tahun.



**Grafik 2.11**  
**UHH Kabupaten Rembang Tahun 2011-2018**

Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2018, diolah.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Eks Karesidenan Pati, UHH Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2014-2018 lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora. Hal ini menunjukkan keberhasilan Kabupaten Rembang dalam perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat. Semakin maju suatu daerah, semakin banyak penduduknya yang mencapai lanjut usia. Kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk bidang kesehatan dan ekonomi dipercaya merupakan salah satu penyebab meningkatnya usia harapan hidup pada lansia.

Perbandingan UHH Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

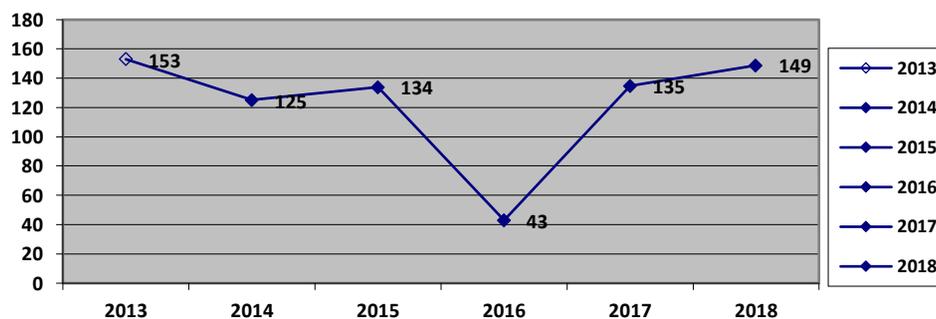
**Tabel 2.23**  
**Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018**

Kabupaten / Propinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	74,19	74,22	74,27	74,32	74,39
Blora	73,84	73,84	73,88	73,99	74,12
Pati	75,43	75,63	75,69	75,80	75,93
Kudus	76,40	76,40	76,43	76,44	76,47
Jepara	75,64	75,64	75,67	75,68	75,71
Jawa Tengah	73,88	73,96	74,02	74,08	74,18

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2018

### 1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) adalah peluang kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun, atau jumlah kematian bayi (0-12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan AKB lima tahun terakhir di Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14 kasus kematian bayi, atau AKB dari 135 kasus di Tahun 2017 menjadi 149 kasus di Tahun 2018. Wilayah yang membutuhkan perhatian khusus karena jumlah AKB tinggi, yaitu di Kecamatan Sumber, Pamotan, Sedan dan Sarang yang kemungkinan besar terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tingkat kemiskinannya tinggi. Tiga kecamatan yang mempunyai AKB tinggi yaitu Kecamatan Pamotan, Sedan dan Sarang merupakan kantong kemiskinan sedangkan Kecamatan Sumber merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin sedang. Grafik Perkembangan AKB kurun waktu tahun 2013-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



**Grafik 2.12**  
**Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rembang**

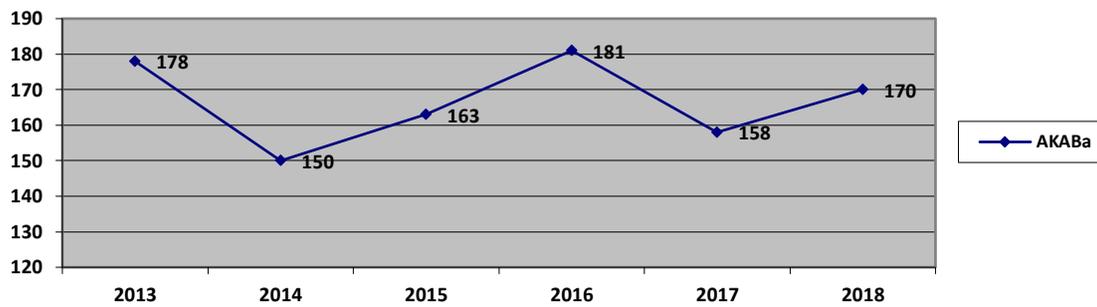
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Pada tahun 2018, posisi kasus kematian bayi Kabupaten Rembang menempati peringkat tertinggi di Jawa Tengah dan masih dibawah capaian Jawa Tengah (10,08). Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar posisi relatif capaian kasus kematian bayi Kabupaten Rembang masih diatas Kabupaten Jepara, Pati dan Blora namun dibawah Kabupaten Kudus.

### 2) Angka Kematian Balita (AKBa)

AKABa di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dari Tahun 2013 sebesar 178 kematian/1.000 kelahiran hidup menjadi sebesar 170 kematian bayi/1.000 kelahiran hidup di Tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menurunkan angka kematian balita sudah cukup berhasil. Untuk itu upaya-upaya preventif perlu dilakukan terutama pada wilayah dengan jumlah kasus kematian balita tinggi seperti di Kecamatan Sumber,

Kragan, dan Lasem. Grafik Perkembangan Kasus Kematian Balita di Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada grafik berikut :



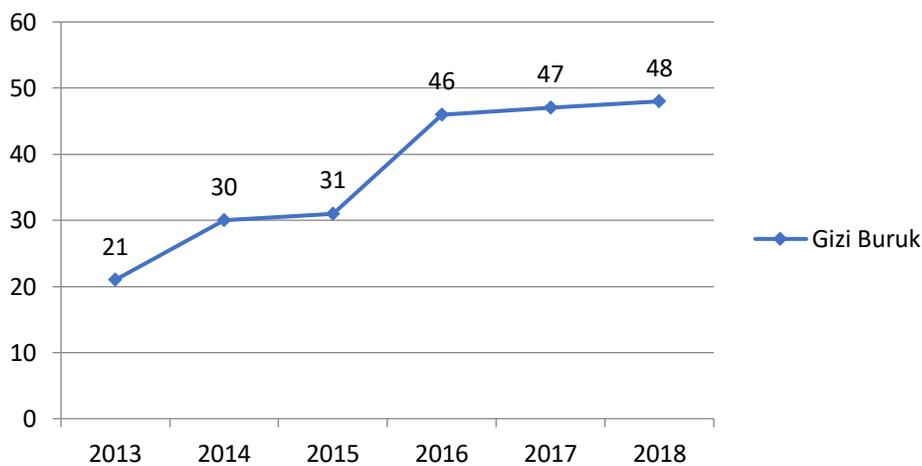
**Grafik 2.13**  
**Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Balita di Kabupaten Rembang tahun 2013–2018**

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018

### 3) Presentase Balita Gizi Buruk

Perkembangan persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang dari tahun 2013 cenderung fluktuatif, jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Rembang sebagian besar disebabkan minimnya pengetahuan ibu dan rendahnya pendapatan rumah tangga sehingga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan gizi balita. Intervensi program yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menurunkan persentase balita gizi buruk sudah cukup baik akan tetapi perlu upaya-upaya lebih keras di wilayah dengan tingkat balita gizi buruk tinggi yaitu diKecamatan Kaliori, Rembang dan Sedan. Selengkapnya Grafik Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar berikut:

### Gizi Buruk



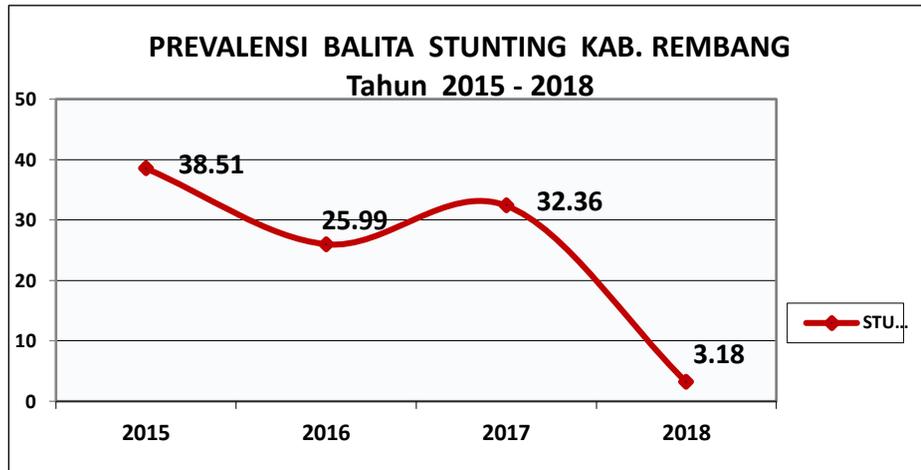
**Grafik 2.14**  
**Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018

### 4) Persentase Stunting

Perkembangan persentase Stunting di Kabupaten Rembang dari tahun 2015 cenderung fluktuatif, dengan persentase 38,51 di tahun 2015 turun menjadi 25,99 pada tahun 2016 dan naik menjadi 32,36 pada tahun 2017. Metode perhitungan yang digunakan adalah metode Pemantauan Status Gizi (PSG). Adapun tahun 2018, balita stunting sebesar 3,18 %. Angka ini

berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebab adanya perbedaan metode yang dipakai.



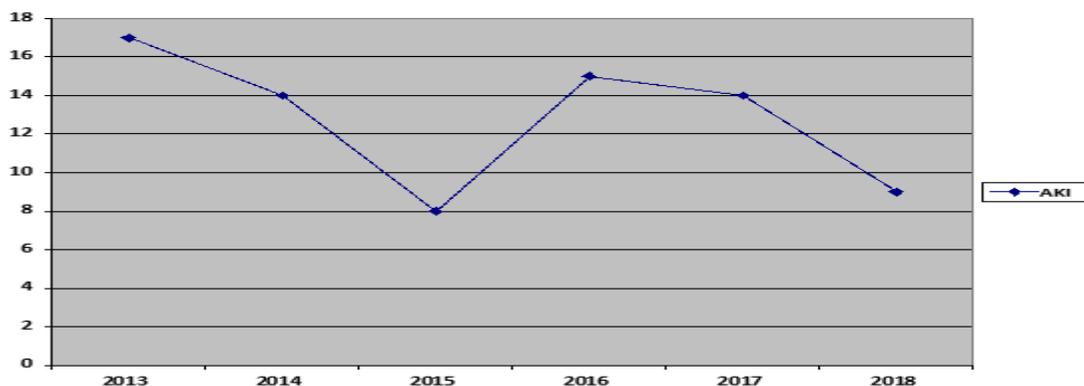
**Grafik 2.15**  
**Perkembangan Persentase Stunting di Kabupaten Rembang Tahun 2015-2018**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018

### 5) Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Jumlah kematian ibu menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tertentu. Angka Kematian ibu dihitung dari Jumlah kasus/100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kabupaten Rembang ditunjukkan dengan jumlah kasus, tidak dapat dihitung/100.000 kelahiran hidup, karena jumlah kelahiran di Kabupaten Rembang tidak melebihi jumlah 100.000 kelahiran hidup.

Kondisi angka kematian ibu di Kabupaten Rembang cenderung mengalami peningkatan namun terjadi penurunan pada tahun 2015 dan 2018. Penyebab kasus kematian ibu paling banyak disebabkan oleh penyakit bawaan (resiko tinggi) ibu hamil. Grafik Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



**Grafik 2.16**  
**Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018

Untuk menekan kasus kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai program dan kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu di antaranya adalah:

- Tindak lanjut penjangkaran Pasangan Usia Subur (PUS) beresiko tinggi dalam penanganan berbagai penyakit kronis dan perencanaan kehamilan.
- Pemeriksaan dan penanganan resiko tinggi pada ibu hamil melalui kelas ibu hamil di tiap-tiap puskesmas.
- Pengoptimalan pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita dalam penanganan kasus gizi buruk dan ibu hamil KEK.
- Pemantapan regulasi tata laksana persalinan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 441.8/739 tahun 2013 tentang Pelayanan Persalinan Tingkat Dasar di Kabupaten Rembang sebagai pedoman pelayanan persalinan tingkat dasar dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB.

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

##### a. Pendidikan

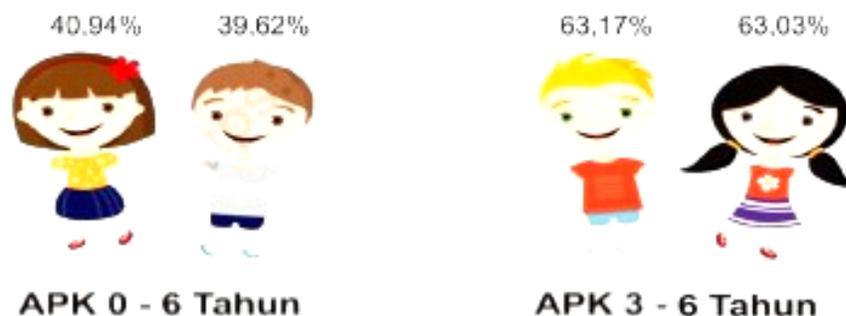
Pendidikan memegang peranan sentral dalam pengembangan sumber daya manusia agar bisa bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi. Pemerintah telah menginstruksikan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar dan pemberantasan buta aksara. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, mulai dari membuka kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan pendidikan hingga meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.

##### 1) Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK-PAUD). APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2018 untuk kelompok umur 3-6 tahun mencapai 104,48persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibanding dengan tahun 2017 sebesar 108,48 persen.

Penurunan APK PAUD saat ini terkendala masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini. Hal ini menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Rembang dan tugas kita bersama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD bagi anak-anak sebagai landasan wajib belajar sembilan tahun.

Untuk mendukung pelaksanaan dan kesuksesan pendidikan anak usia dini, hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana belajar mengajar. Jumlah Sekolah mengalami peningkatan pada kurun lima tahun terakhir, pada tahun 2018 jumlah TK sebanyak 372 sekolah dengan jumlah murid dan guru sebanyak masing masing 16.006 dan 790. Rasio murid dan guru sebesar 20 pada tahun 2018.



**Gambar 2.9**  
**Ilustrasi APK PAUD Tahun 2018**

*Sumber : data diolah*

**2) Pendidikan Dasar**

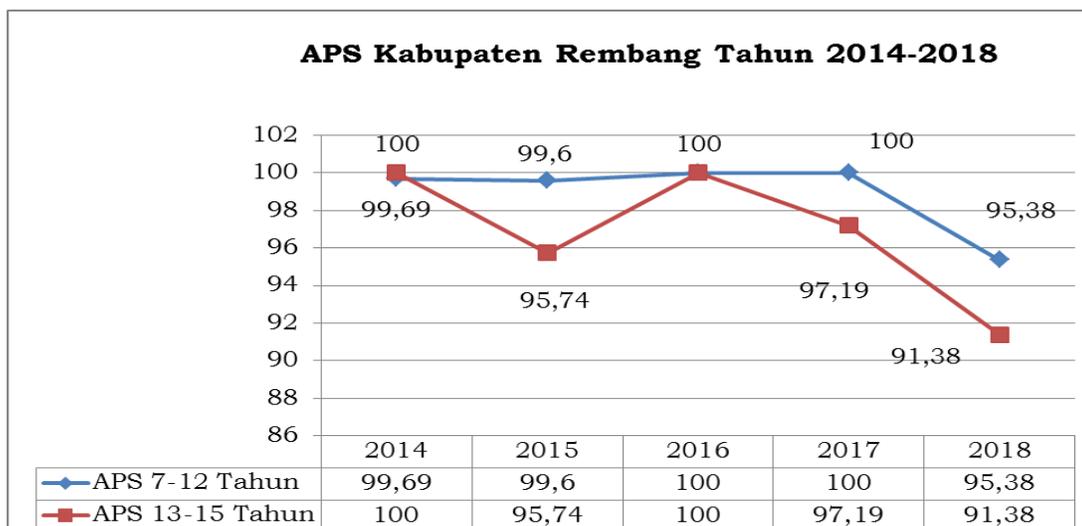
Peran pendidikan dasar di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Keberhasilan peran pendidikan dasar dapat dilihat dari tingkat partisipasi, angka kelulusan, angka putus sekolah, angka melanjutkan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas.

Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Rembang dalam kurun lima tahun (2014-2018) mengalami penurunan. Namun pada tahun 2018, jumlah Sekolah Dasar mengalami kenaikan menjadi 420 dari 418 unit pada tahun 2017. Jumlah tersebut meliputi SD Diknas sebanyak 374 unit dan SD Non Diknas sebanyak 46 unit. Jumlah murid SD juga mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 56.938 orang pada tahun 2017 menjadi 57.089 orang pada tahun 2018 terdiri dari murid SD Diknas sebanyak 50.274 dan Non Diknas sebanyak 6.815. Sedangkan jumlah SMP/MTs (Diknas dan Non Diknas) pada tahun 2018 sebanyak 101 unit mengalami peningkatan dari 96 unit pada tahun 2017. Jumlah murid SMP/MTs mengalami penurunan yaitu dari 28.589 pada tahun 2017 menjadi 28.345 pada tahun 2018.

**3) Angka Partisipasi**

Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah, yang dapat diamati melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia pendidikan yang sedang bersekolah. Adapun APS Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



**Grafik 2.17**  
**APS Pendidikan Dasar Tahun 2018**

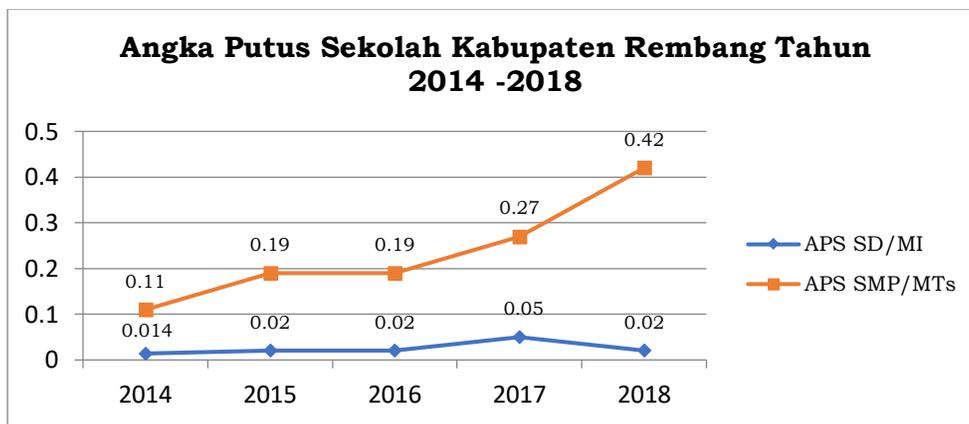
Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa APS tingkat Sekolah Dasar mengalami penurunan yang cukup banyak dari 99,69% pada tahun 2014, turun menjadi 95,38% pada tahun 2018. Begitu pula dengan APS tingkat Sekolah Menengah Pertama yang mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup banyak hingga mencapai angka 91,38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Rembang mengalami penurunan.

Adanya penurunan APS ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Beberapa anak yang telah lulus pendidikan dasar tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama, namun hanya memasuki pondok pesantren.
2. Beberapa anak usia sekolah melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya di luar daerah, sehingga tidak terdata sebagai anak yang bersekolah Kabupaten Rembang.
3. Adanya beberapa anak usia sekolah yang putus sekolah bisa disebabkan karena membantu orang tua bekerja, permasalahan kesehatan, meninggal, dan kejadian pernikahan dini.
4. Data yang digunakan sebagai penyebut adalah data penduduk dari Badan Pusat Statistik.

Adapun grafik Angka putus sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



Grafik 2.18

**Angka Putus Sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018**

Sumber : Dindikpora Kabupaten Rembang 2018

Berdasarkan grafik di atas, dapat diamati bahwa angka putus sekolah anak pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, anak pada jenjang pendidikan SMP/MTs yang putus sekolah sebanyak 0,42%, jumlah ini meningkat cukup banyak dari Tahun 2014 yang berjumlah 0,11%. Peningkatan anak yang putus sekolah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, keluarga, dan sosial budaya masyarakat.

**4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Untuk menilai kualitas tenaga pendidik/guru, indikator yang dipergunakan adalah tingkat kualifikasi akademik guru dan pemenuhan sertifikat guru. Data mengenai indikator tersebut mulai Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.24**  
**Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Guru Bersertifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2018**

No.	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83,68%	86,05%	88,61%	90,89%	91,26%
2.	Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	62,19%	67,17%	68,93%	65,14%	69,69%
3.	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	20,86%	50,71%	54,83%	51,11%	59,12%

No.	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN				
		2014	2015	2016	2017	2018
4.	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	30,90%	36,65%	48,48%	52,61%	56,15%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat pendidik meningkat, meskipun demikian jumlah ini masih perlu ditingkatkan lagi agar kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Rembang semakin baik.

**b. Kesehatan**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perlindungan dan pemeratan pelayanan kesehatan. Dalam mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Rembang diperlukan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mencukupi serta berkualitas. Jumlah dokter umum di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 71 orang, dokter spesialis sebanyak 43 orang dan dokter gigi sebanyak 13 orang.

**1) Penyakit Menular**

Adapun Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.25**  
**Jumlah Kasus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan 2018**

No.	Kecamatan	2017						2018					
		HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sumber	4	-	2	623	15	-	2	-	7	623	32	0
2	Bulu	9	-	-	253	4	3	1	-	0	253	11	0
3	Gunem	1	-	1	401	15	1	5	-	0	401	5	0
4	Sale	2	-	1	566	11	2	3	-	4	566	8	2
5	Sarang	9	-	1	134	21	-	2	-	1	134	40	0
6	Sedan	6	-	1	660	18	1	4	-	4	660	19	16
7	Pamotan	7	-	1	408	11	1	9	-	14	408	34	4
8	Sulang	9	-	2	203	17	1	6	-	2	203	26	3
9	Kaliori	8	-	2	351	35	2	11	-	9	351	19	0
10	Rembang	18	-	2	1584	24	1	13	-	23	1584	148	0
11	Pancur	10	-	-	334	10	1	7	-	1	334	5	0
12	Kragan	9	-	-	894	38	1	16	-	2	894	38	1
13	Sluke	7	-	-	91	10	1	9	-	1	91	16	1
14	Lasem	13	-	2	89	19	-	32	-	6	89	36	0
	Rembang	112	-	15	6591	296	15	120	-	74	6591	437	27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan 2018

Selama sebelas tahun terakhir jumlah kasus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya meningkat dari tahun ke tahun termasuk jumlah kematian karena AIDS.

**2) Penyakit Tidak Menular**

Kasus penyakit tidak menular kini sedang menjadi perhatian baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Hal ini disebabkan karena terjadinya pergeseran tren penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, yang mayoritas merupakan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pola hidup sehari-hari yang buruk. Adapun Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Kasus penyakit tidak menular**  
**di Kabupaten Rembang Tahun 2018**

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Angina Pectoris	67
2	IMA	44
3	Decompensatio Cordis	428
4	Hipertensi Essential	13054
5	Hipertensi lainnya	1629
6	Stroke Haemorrhagie	45
7	Stroke Non Haemorrhagie	232
8	DM Tergantung Insulin	85
9	DM tidak Tergantung Insulin	11095
10	Ca Hati	8
11	Ca Bronchus	11
12	Ca Mamae	88
13	Ca Seriks	30
14	PPOK	102
15	Asma Bronkiale	2402
16	Kecelakaan Lalin	943
17	Psikosis	412
18	Osteoporosis	2581
19	Ginjal Kronik	301
20	Obesitas	297
21	Katarak	451

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 3 besar peringkat kasus penyakit tidak menular terbanyak di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 adalah penyakit Hipertensi Essential, DM tidak tergantung insulin, dan Osteoporosis.

### c. Pekerjaan Umum

#### 1) Prasarana Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan aksesibilitas berbagai sektor pembangunan terutama dalam pengembangan ekonomi daerah. Fasilitasi prasarana jalan terus diupayakan baik jalan poros nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Prasarana jalan di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2018 mempunyai panjang jalan 642,75 Km dengan kondisi jalan baik 67,9%. Sedangkan jumlah jembatan di Kabupaten Rembang sebanyak 126 unit dengan panjang 1.239,9 m sampai tahun 2018 yang dalam kondisi baik sejumlah 92 unit atau 89%. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Rembang terdiri dari jalan Kabupaten sepanjang 642,75 Km, jalan provinsi sepanjang 31,64 Km dan jalan nasional sepanjang 88,04 km. Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.27**  
**Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan**  
**di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	<b>Panjang jalan kabupaten (Km)</b>	<b>642,75</b>	<b>642,75</b>	<b>642,75</b>	<b>642,75</b>	<b>642,75</b>	<b>642,75</b>
	% kondisi jalan baik	55,59	48,98	44,96	48,98	60,6	67,9
	% kondisi sedang (%)	22,50	26,27	30,30	35,43	29,21	26,88
	% kondisi jalan rusak ringan	10,25	13,11	13,11	5,06	7,81	4,62
	% Kondisi jalan rusak berat	11,75	11,64	11,64	11,64	2,4	0,6
	<b>Panjang jalan provinsi (Km)</b>	<b>57,45</b>	<b>58,40</b>	<b>58,40</b>	<b>31,63</b>	<b>31,64</b>	<b>31,64</b>
	<b>Panjang jalan Nasional (Km)</b>	<b>60,81</b>	<b>61,27</b>	<b>61,27</b>	<b>88,04</b>	<b>88,04</b>	<b>88,04</b>
2	Jumlah Jembatan Kewenangan	126	126	126	126	126	126

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Kabupaten						
	% Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	74,6	73,02	73,02	79	88	89

Sumber: DPU TARU Kabupaten Rembang Tahun 2018

Perkembangan pembangunan prasarana jalan dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, dapat dilihat dari persentase kondisi jalan baik pada tahun 2016 mencapai 48 % meningkat menjadi 67,9 % atau sepanjang 424,2km pada tahun 2018. Peningkatan jumlah ruas jalan dalam kondisi baik disebabkan oleh:

- Penanganan jalan sejak tahun 2017 mulai difokuskan pada jalan-jalan yang merupakan kewenangan kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 900/893/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Jalan Poros Desa.
- Optimalisasi sumber pendanaan penanganan jalan diluar APBD salah satunya melalui dana CSR perusahaan.

Kondisi ini masih memerlukan peningkatan terutama untuk mempertahankan kemantapan jalan khususnya pada ruas-ruas jalan yang menjadi jalur angkutan pertambangan. Perlu pengawasan tonase jalan pada ruas-ruas jalan tersebut sehingga dampak kerusakan jalan akibat kelebihan beban muatan kendaraan (tonase) dapat dicegah. Kabupaten Rembang juga belum mempunyai alat dan personil untuk melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas jalan sehingga sering mendapatkan aduan masyarakat tentang kerusakan jalan. Di samping itu sepertiga wilayah Kabupaten Rembang merupakan kawasan hutan sehingga banyak jalan dan jembatan penghubung antar desa maupun kecamatan ada pada lahan aset Kementerian Kehutanan.

## 2) Prasarana Sumber Daya Air

Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan dalam rangka menyediakan pemenuhan air baku untuk air minum, irigasi maupun industri. Luas layanan areal irigasi sebesar 21.193,45 ha tercakup dalam 293 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 1 DI kewenangan pusat, 1 DI kewenangan provinsi, 329 DI kewenangan kabupaten dan 167 DI kewenangan desa. Kondisi jaringan irigasi yang baik pada tahun 2018 sebesar 18.438 Ha dari luas area irigasi 21.193,45 Ha atau 87.00%. Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.28**  
**Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi (Luas Irigasi Kabupaten dlm kondisi baik dari total 21,193.45 hektar)	19,338	19,561	19,561	16,742	17,166	18,438
2	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (embung-m3-dlm ribuan)	8,101,319	8,101,319	8,101,319	7,844,440	9,228,753	10,613,066

Sumber: DPU TARU Kabupaten Rembang, 2018

Pembangunan sumber daya air diarahkan pada upaya meningkatkan jumlah ketersediaan air baku melalui Pembangunan Embungisasi, Program Pengelolaan Sungai Terpadu (PPST), dan Program Konservasi Sumber Daya Air. Kondisi tersebut menyebabkan cakupan

ketersediaan air baku untuk irigasi maupun untuk industri masih relatif kurang.

Neraca ketersediaan air pada studi tentang Penyusunan Rencana Induk Penyediaan Air Baku di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.29**  
**Neraca Air Kabupaten Rembang**

UPT	KECAMATAN	KEB.IRIGASI	KEB.AIR BERSIH	KEB.TOTAL	Q TERSEDIA	HASIL (litr/dtk )	( m3/dtk )
BARAT	Sumber	6009,5	1,16	6010,66	1464,07	-4546,59	-4,54659
	Kaliore	5361,74	3,07	5364,81	6765,07	1400,26	1,40026
	Bulu	3219,84	1,49	3221,33	10268,15	7046,82	7,04682
	Rembang	2626,61	8,59	2635,2	65,5	-2569,7	-2,5697
	Sulang	650,52	5,1	655,62	165,78	-489,84	-0,48984
TENGAH	Pancur	3030,3	3,16	3033,46	349,45	-2684,01	-2,68401
	Lasem	1659,06	8,54	1667,6	148,19	-1519,41	-1,51941
	Pamotan	1935,23	7,63	1942,86	983,2	-959,66	-0,95966
	Gunem	2207,56	1,46	2209,02	1643,12	-565,9	-0,5659
TIMUR	Sale	3195,66	1,27	3196,93	767,43	-2429,5	-2,4295
	Sedan	3260,73	2,69	3263,42	381,5	-2881,92	-2,88192
	Kragan	5928,6	0,92	5929,52	525,45	-5404,07	-5,40407
	Sarang	3511,37	5,19	3516,56	3018,35	-498,21	-0,49821
	Sluke	1747,25	1,12	1748,37	275,92	-1472,45	-1,47245

Sumber: Rencana Induk Penyediaan Air Baku

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air bersih dan semakin menurunnya jumlah ketersediaan air, diperlukan suatu cara untuk melakukan pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut. Salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih tersebut adalah dengan adanya rencana pembangunan embung-embung dan bendung-bendung baru di wilayah Kabupaten Rembang, dan penyelidikan air tanah yang lebih detail khususnya di wilayah yang mengalami kekurangan air sehingga nantinya diharapkan dengan adanya rencana pembangunan tersebut dapat meningkatkan jumlah ketersediaan air khususnya pada wilayah-wilayah kecamatan yang mengalami kekurangan akan ketersediaannya.

Adapun untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada kecamatan-kecamatan yang memiliki nilai neraca air minus, arahan pemenuhan kebutuhannya dilakukan dengan optimalisasi fungsi embung pada masing-masing wilayah tersebut. Berdasarkan Perda Kabupaten Rembang No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang, Rencana pembangunan dan pengelolaan embung di Kabupaten Rembang meliputi sebagai berikut:

- Embung Lodan dengan kapasitas kurang lebih 5.390.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Sarang.
- Embung Banyukuwung dengan kapasitas kurang lebih 2.416.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Sulang.
- Embung Grawan dengan kapasitas kurang lebih 42.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Sumber.
- Embung Panohan dengan kapasitas kurang lebih 1.165.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Gunem.
- Embung Tlogo dengan kapasitas kurang lebih 3.700.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Bulu.
- Embung Gedari dengan kapasitas kurang lebih 166.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Sluke.
- Embung Trenggulan dengan kapasitas kurang lebih 4.000.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Pancur.
- Embung Pasedan dengan kapasitas kurang lebih 64.420.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Bulu.

- i) Embung Gambiran dengan kapasitas kurang lebih 3.090.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Pamotan.
- j) Embung Palemsari dengan kapasitas dengan kapasitas kurang lebih 340.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Sumber.
- k) Embung Sendangmulyo dengan kapasitas kurang lebih 3.270.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Bulu.
- l) Embung Kaliombo dengan kapasitas kurang lebih 2.150.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Sulang.
- m) Embung Sambiroto dengan kapasitas kurang lebih 7.070.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Sedan.
- n) Embung Mojosari dengan kapasitas kurang lebih 2.630.000 m<sup>3</sup> di Kecamatan Sedan.

Rencana embung tersebut telah terealisasi sebanyak 4 unit yaitu Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Grawan dan Embung Panohan. Embung Lodan mempunyai volume tampungan mencapai 4,6 juta m<sup>3</sup> yang dimanfaatkan untuk irigasi dan air baku. Embung Banyukuwung berfungsi sebagai pengendali banjir, irigasi dan air baku dengan kapasitas volume mencapai 2,426 juta m<sup>3</sup>. Embung Grawan mempunyai volume sebesar 0,47 juta m<sup>3</sup> dan Embung Panohan mempunyai volume sebesar 0,82 juta m<sup>3</sup>. Embung / Waduk panohan belum dapat digunakan secara optimal karena masih ada permasalahan terkait proses tukar menukar lahan dengan Perhutani.

Selain empat embung besar yang pengelolaannya dilakukan oleh BBWS Pemali Juawana, terdapat 7 embung mini yang pembangunannya dilakukan oleh Dinas Pusdataru Propinsi Jawa Tengah yaitu Embung Wiroto, Embung Sridadi, Embung Jurangjero, Embung Ronggomulyo, Embung Warugunung, Embung Maguan dan Embung Sekarsari. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pembangunan embung berupa embung pertanian yang realisasinya sejak tahun 2013-2018 mencapai 69 unit yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Mengingat kondisi Kabupaten Rembang yang relatif kering maka perlu penambahan bangunan tampungan air dengan kapasitas yang cukup besar untuk keberlanjutan air baku di Kabupaten Rembang.

Pembangunan tampungan air di Kabupaten Rembang sebagian besar terkendala pengadaan lahan dan relokasi permukiman yang terjadi pada rencana pembangunan Embung Kaliombo dan Embung Tlogo. Sehingga perencanaan anggaran ke depan harus diprioritaskan untuk pengadaan lahan sebagai tampungan-tampungan air agar air permukaan *run off* air menuju hilir dapat diperlambat. Selain itu untuk rencana bangunan penampung air lainnya harus segera dibuat perencanaan yang matang sehingga skenario penyediaan air baku di Kabupaten Rembang dapat berjalan secara optimal.

### **3) Saluran Drainase**

Saluran drainase di Kabupaten Rembang sepanjang 24,95 km. Pada tahun 2018 saluran drainase dalam kondisi baik adalah sepanjang 20,17 km, sedangkan kondisi rusak sepanjang 4,78 km yang berfungsi sebagai saluran untuk pembuangan industri, niaga dan pemukiman penduduk. Panjang drainase ini mengalami perbaikan rata-rata pertahun 1,04%. Hal ini mengindikasikan masih perlu penataan jaringan drainase yang baik di seluruh wilayah Kabupaten, terutama drainase yang berada pada kawasan pemukiman yang bersentuhan langsung dengan penduduk. Adapun pengembangan jaringan drainase harus dilakukan dengan mengikuti kontur tanah dan sungai sebagai muara akhir agar jaringan drainase dapat berfungsi secara sempurna untuk sarana pembuangan. Disisi lain drainase

jalan juga perlu pembangunan dalam rangka pencegahan terjadinya banjir. Perkembangan Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.30**  
**Perkembangan Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013–2018**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Drainase (km)	25,95	25,95	25,95	23.74	24.06	24.95
2	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik (km)	16,00	16,35	16,60	17.74	18.38	20.17
3	Panjang Drainase dalam Kondisi Rusak (km)	9,95	9,60	9,35	6.00	5.68	4.78

Sumber: DPU TARU Kabupaten Rembang, 2018

#### 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan belum diikuti dengan penyediaan rumah oleh pemerintah daerah. Pada saat ini sebagian besar kebutuhan rumah dipenuhi oleh pihak swasta. Pada masa mendatang peran pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam membantu menyediakan lahan dan pembangunan rumah. Hal tersebut dimaksudkan agar harga rumah relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain adanya kekurangan rumah (backlog), rumah yang belum memenuhi standar kelayakan bangunan cukup besar di Kabupaten Rembang menurut data PBDT Tahun 2015 yaitu mencapai 59.453 unit atau sebesar 33,1 % dari jumlah rumah di Kabupaten Rembang. Hingga tahun 2018, RTLH tersebut telah dilakukan peningkatan kualitas rumah sebanyak 4.604 unit. Selengkapannya data Rumah Tidak Layak Huni serta realisasi penanganannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.31**  
**Data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2018**

No	Kecamatan	Data RTLH (PBDT 2015)	Realisasi Rehabilitasi RTLH			Data RTLH 2018
			2016	2017	2018	
1	Sumber	5,115	31	133	54	4,897
2	Bulu	3,735	60	38	83	3,554
3	Gunem	3,054	0	41	68	2,945
4	Sale	3,242	11	197	56	2,978
5	Sarang	5,480	89	138	87	5,166
6	Sedan	6,414	283	221	191	5,719
7	Pamotan	5,840	83	106	494	5,157
8	Sulang	4,603	44	62	95	4,402
9	Kaliori	4,165	0	199	134	3,832
10	Rembang	4,064	105	240	197	3,522
11	Pancur	3,406	231	26	99	3,050
12	Kragan	4,884	66	108	127	4,583
13	Sluke	2,490	20	33	50	2,387
14	Lasem	2,961	51	74	179	2,657
Jumlah		59,453	1,074	1,616	1,914	54,849

Sumber: DPKP Kabupaten Rembang, 2018

Pembangunan perumahan harus memperhatikan peraturan-peraturan serta mengacu pada RTRW untuk menjaga integrasi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang tidak memperhatikan aturan akan

memunculkan masalah-masalah lingkungan permukiman. Salah satu permasalahan pokok sektor permukiman di Kabupaten Rembang adalah kondisi permukiman kumuh, hal tersebut banyak ditemukan pada permukiman pesisir. Kekumuhan itu terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang umumnya rendah, juga adanya ancaman abrasi dan akresi, serta kondisi lahan yang sulit untuk dikembangkan sistem drainase yang memadai. Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Rembang dengan bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor. 050/0960/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Rembang. SK tersebut menetapkan kawasan kumuh perkotaan berada pada 14 desa dengan luas mencapai 114,407 Ha. Luasan kumuh tersebut menjadi target RPJMN kota tanpa kumuh pada tahun 2019.

Mengingat lokasi kawasan kumuh yang dinilai masih sangat terbatas, pada tahun 2016 dilakukan pemutakhiran ulang terhadap SK Kumuh pada tahun 2014. Pemutakhiran data tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan pada tahun 2017 ditetapkan kembali SK Bupati Nomor. 050/787/2017 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang. SK tersebut menetapkan 19 kawasan permukiman kumuh dengan luas kawasan kumuh mencapai 290,45 Ha. Progres pengurangan luas kawasan kumuh di Kabupaten Rembang sangat lambat. Pada Tahun 2018, luas pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Rembang baru mencapai 6,16 Ha. Selengkapnya luas pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.32**  
**Luas Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2017-2018**

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	2017	2018	+/-
1	Rembang	Tanjungsari	20.2 ha	20.2 ha	0 ha
		Pasarbanggi	6.86 ha	4.71 ha	-2.15 ha
		Padaran	36.94 ha	36.94 ha	0 ha
		Gegunungwetan	4.77 ha	4.77 ha	0 ha
		Gegunungkulon	5.02 ha	5.02 ha	0 ha
		Kabongan Lor	3.82 ha	3.82 ha	0 ha
		Sukoharjo	5.83 ha	5.83 ha	0 ha
2	Lasem	Dorokandang	1.98 ha	0.90 ha	-1.08 ha
		Ngemplak	2.93 ha	0 ha	-2.93 ha
		Babagan	15.9 ha	15.9 ha	0 ha
		Soditan	8.38 ha	8.38 ha	0 ha
		Gedongmulyo	33.63 ha	33.63 ha	0 ha
		Sumbergirang	7.25 ha	7.25 ha	0 ha
3	Pamotan	Sidorejo	20.34 ha	20.34 ha	0 ha
		Pamotan	23.61 ha	23.61 ha	0 ha
		Bangunrejo	19.99 ha	19.99 ha	0 ha
4	Kragan	Tegalmulyo	46.32 ha	46.32 ha	0 ha
		Kragan	12.05 ha	12.05 ha	0 ha
		Karangharjo	14.63 ha	14.63 ha	0 ha
<b>TOTAL</b>			<b>290.45 ha</b>	<b>284.29 ha</b>	<b>-6.16 ha</b>

Sumber: DPKP Kabupaten Rembang Tahun 2018

Selain penataan kawasan permukiman kumuh, mengingat sejarah Kabupaten Rembang yang sangat panjang maka banyak terdapat kawasan permukiman tradisional yang perlu ditata dan dikembangkan sebagai destinasi wisata. Pada tahun 2017 telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di kawasan perkotaan Lasem yang merupakan perpaduan

dari budaya Jawa dan Tionghoa. Penyusunan ini selain untuk meningkatkan kualitas permukiman juga bertujuan untuk melindungi bangunan-bangunan pusaka yang ada di wilayah tersebut. Ke depan akan disusun juga masterplan kawasan-kawasan permukiman tradisional dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas perkotaan sebagaimana amanat Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kabupaten Rembang berkomitmen untuk menyediakan minimal 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan. RTH publik perkotaan berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat diwujudkan sebagai kawasan hijau pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan rel KA, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan. Selengkapnya RTH di Kabupaten Rembang pada tabel berikut.

**Tabel 2.33**  
**Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Rembang**

NO	NAMA RTH	LOKASI	TIPOLOGI RTH	JENIS RTH	LUAS (M2)
1	Alun-alun Kota Rembang	Jalan KH. Mas Mansyur Kel Kutoharjo Kec Rembang.	Publik	Taman Kota	12.722
2	Taman Borotugel	Jl Pahlawan (belakang RSUD) ds Kabongan Kidul kec Rembang.	Publik	Taman Kota	10.400
3	RTH Desa Mondoteko	Jalan Mondoteko Desa Mondoteko Kecamatan Rembang.	Publik	Taman Kota	29.000
4.	RTH KBT Tasikagung	Jl Pelabuhan Periknan Pantai Tasikagung ds Tasikagung Kec Rembang.	Publik	Taman Kota	5.200
5.	Taman Tugu Batas Kota Barat	Jalan Gajahmada ds Banyudono Kecamatan Kaliori	Publik	Taman Kota	420,84
6.	Taman Tugu Bataskota Timur	Jalan Sudirman Desa Tireman Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	420,84
7.	Taman Tugu PKK	Jalan Gajah Mada Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	130,38
8.	Taman Tugu Adipura	Jalan Gajah Mada – Diponegoro Kel Kutoharjo kec Rembang	Publik	Taman Kota	147,33
9.	Taman Balai Kartini	Jalan Diponegoro Desa Pandean Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	437,8
10.	Taman Tugu Lilin	Jalan Veteran Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	411
11.	Taman Depan Terminal	Jalan Sudirman Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	269
12.	Pemakaman Krapyak	Jalan Majapahit Kelurahan Sidowayah Kecamatan Rembang.	Publik	Pemakaman	74.135
13.	Pemakaman Turusgede	Jalan Rembang – Blora Desa Turusgede Kecamatan Rembang	Publik	Pemakaman	54.253
14.	Jalur Hijau Jalan Kartini	Jl Kartini Kel Kutoharjo, Kel Leteh, ds Sawahan Kecamatan Rembang.	Publik	Jalur pejalan kaki	677,51
15.	Jalur Hijau Jl Dr. Sutomo	Jl dr. Sutomo Kel Kutoharjo, Kel Leteh Kecamatan Rembang	Publik	Jalur Pejalan Kaki	868,62
16.	Jalur Hijau Jl HOS. Cokroaminoto	Jl HOS. Cokroaminoto Kel Kutoharjo, kel Leteh, kel Sidowayah, ds Sukoarjo, ds Kabngankidul kec Rembng.	Publik	Jalur Pejalan Kaki	1.328,44
17.	Jalur Hijau Jalan Pemuda	Jl Pemuda ds Sumberjo, Kel Leteh, ds Kabongankidul, ds Ngotet, ds Mondoteko Kec Rembang.	Publik	Jalur Pejalan Kaki	4.050,04
18.	Hutan Kota Besi	Jl Rembang–Blora ds Turusgede Kec Rembang	Publik	Hutan Kota	200.000
19.	Hutan Kota Rowosetro	Jl Clangapan ds PasarBanggi Kec Rembang	Publik	Hutan Kota	22.434
20.	Hutan mangrove Desa Tireman	Jalan - Desa Tireman Kecamatan Rembang.	Publik	RTH Sempadan Pantai	280.000
21.	Hutan mangrove ds Pasar Banggi	Jalan-ds Pasar Banggi Kec Rembang	Publik	RTH Sempadan Pantai	485.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, 2018

Sebagian besar RTH sebagaimana tercantum di atas berlokasi di Kecamatan Rembang. Luas Ruang Terbuka Hijau di atas mencapai 118,23 Ha yang terdiri dari taman aktif maupun pasif. Dilihat dari luas kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Rembang yang mencapai 3.214 Ha, maka prosentase RTH Publik di Kabupaten Rembang baru mencapai 3,68 %. Untuk memenuhi amanat Perda Tata Ruang sebesar 20 % dari luas perkotaan atau sekitar 642,8 hektar maka masih terdapat kekurangan luas RTH publik sebesar 524,57 hektar. Sejak Tahun 2018, Pemkab Rembang mulai melakukan penataan RTH di luar Perkotaan Rembang untuk mewujudkan target luasan sebagaimana amanat Perda Tata Ruang. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan luasan RTH publik tersebut antara lain kurangnya lahan di perkotaan. Sehingga upaya perwujudan RTH Publik harus diiringi dengan kesiapan lahan di kawasan perkotaan.

#### d. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di jalur utara Pulau Jawa merupakan wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Rembang ini dilewati jalur utama perekonomian di Jawa Tengah dan juga Pulau Jawa bagian utara sehingga tingkat mobilitas transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan ancaman gangguan ketertiban dan keamanan. Pada tahun 2014 Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun sebanyak 121 kasus, menurun menjadi 67 kasus pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 82 kasus pada Tahun 2018. Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

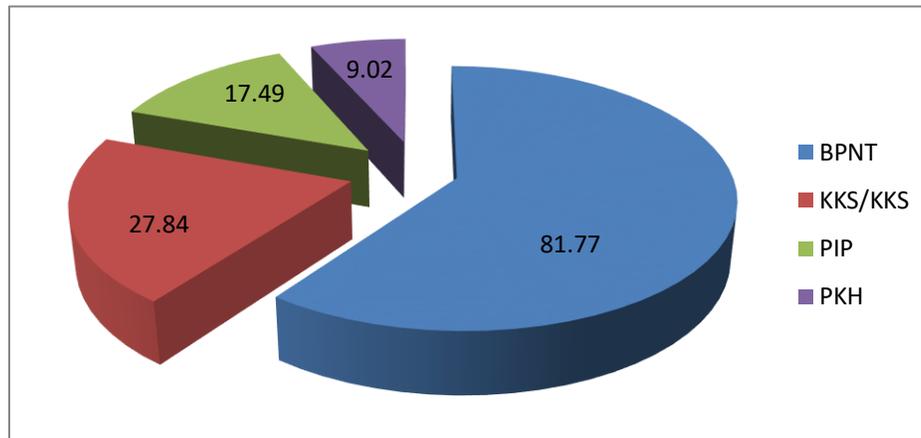
**Tabel 2.34**  
**Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Remban**  
**Tahun 2014-2018**

No.	Jenis Kasus Kriminal	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Narkoba	4	6	19	15	16
2	Pembunuhan	1	0	2	0	1
3	Seksual	18	8	5	3	10
4	Penganiayaan	24	34	16	9	14
5	Pencurian	44	57	36	21	32
6	Penipuan	29	18	12	18	9
7	Pemalsuan Uang	1	0	0	1	0
Jumlah		121	123	90	67	82

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

#### e. Sosial

Bantuan dan perlindungan sosial ditujukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih. Paket ini diwujudkan dalam bentuk Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Pada tahun 2017 instrumen yang paling banyak diterima rumah tanggadi Kabupaten Rembang adalah BPNT (dulunya paket raskin/rastra), yaitu sebanyak 81,77 persen. Berturut-turut adalah instrumen Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 27,84 persen, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar 17,49 persen dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 9,02 persen.



Grafik 2.19

**Bantuan dan Pelindungan Sosial di Kabupaten Rembang Tahun 2017**

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

Fokus penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Rembang adalah pada kelompok lansia terlantar dan disabilitas berat karena kelompok tersebut termasuk kelompok miskin absolut individu. Adapun data pada tahun 2018 untuk lansia terlantar sebanyak 600 orang dan disabilitas berat 300 orang. Sedangkan permasalahan PMKS yang lain sudah ditangani oleh perangkat daerah terkait. Agar supaya bisa menangani permasalahan PMKS kategori tersebut maka dilakukan pemberian bantuan jaminan biaya hidup sebesar garis kemiskinan, sehingga diharapkan biaya hidup tiap bulan bisa tercukupi sesuai ketentaun penanganan kemiskinan, dan masalah tersebut dapat tertangani dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, dunia usaha melalui forum CSR, Baznas maupun personal responsibility.

### 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### a. Tenaga Kerja

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Rembang dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah. Adapun masalah ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia atau antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja, sehingga menyebabkan pengangguran. Disamping itu juga adanya produktivitas dan pendapatan masyarakat yang berkurang, serta pendapatan masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.35**  
**Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tk Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,23	68,13	66,97	56,4	70,78	67,46
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,98	5,23	4,51	4,3	3,19	2,87

Sumber: BPS, 2018

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2018 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 TPAK selalu menurun dibandingkan Tahun 2013, sampai dengan Tahun 2016 menurun menjadi 56,4%. Kemudian pada tahun 2017 angka TPAK meningkat yakni sebesar 70,78% dan turun lagi 67,46% pada tahun 2018. Penurunan TPAK tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Rembang semakin berkurang.

Sedangkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rembang sejak tahun 2013 sampai 2018 menunjukkan kinerja yang baik yaitu mengalami penurunan, dari 5,928% menjadi 2,87%. Persentase TPT yang menurun menunjukkan bahwa terdapat kenaikan angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. TPT pada tahun 2018 menunjukkan 2,87%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebagai angkatan kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, sebanyak 2,87 orang merupakan pengangguran.

Sementara itu, Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.36**  
**Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018
1.	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi	Orang	496
2.	Presentase pelatihan yang bersertifikat	%	80
3.	Presentasi tenaga kerja yang ditempatkan	%	68,1
4.	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,81
5.	Rasio ketergantungan	%	41,28
6.	% lembaga ketenagakerjaan yg memenuhi syarat operasional	%	80
7.	% perselisihan pengusaha-pekerja yg diselesaikan	%	100
8.	Presentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	75

Sumber: DPMPTSPNaker, 2018

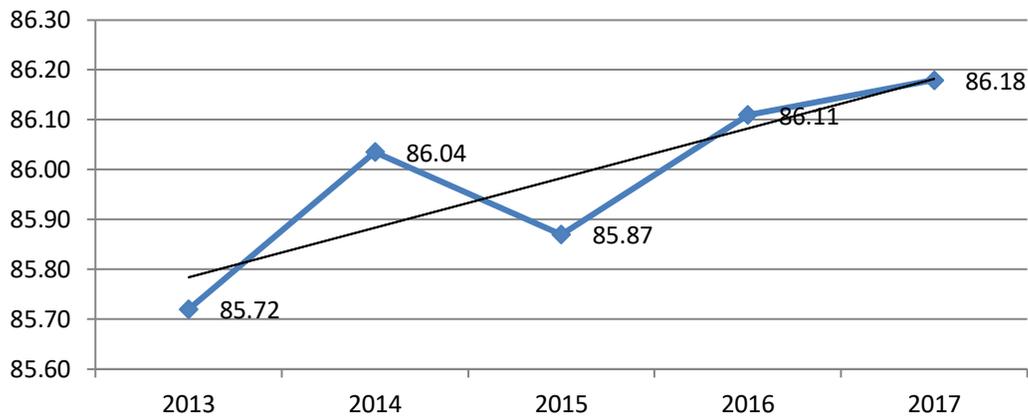
## **b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **1) Pemberdayaan Perempuan**

Perempuan memiliki potensi tinggi untuk berperan pada upaya-upaya pembangunan daerah. Meskipun demikian, pemberdayaan dan pengembangan perempuan masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan, terkait dengan kemampuan perempuan untuk menikmati dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Sebagai contoh, kondisi ini ditunjukkan dengan belum terintegrasinya perspektif gender dalam perencanaan penganggaran.

Gambaran pembangunan manusia berbasis gender dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berdasarkan indeks tersebut, dapat dilihat seberapa besar perkembangan pembangunan gender berdasarkan pencapaian perempuan dalam mengakses pembangunan gender dan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan Gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan persentase IPG di Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



**Grafik 2.20**  
**Perkembangan IPG Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Rembang 2017

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan IPG di Kabupaten Rembang dari tahun dalam 5 tahun (2013-2017) menunjukkan tren yang meningkat, hingga pada Tahun 2017 nilai IPG Kabupaten Rembang mencapai 86,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Rembang semakin mendekati kesetaraan. Meskipun demikian, nilai tersebut masih tergolong rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa masih terjadi ketimpangan dan ketidaksetaraan gender di Kabupaten Rembang. Dalam persepektif gender, hasil pembangunan di Kabupaten Rembang masih belum bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dan Komponen Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.37**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Kabupaten Rembang, Tahun 2013-2017**

Komponen	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	na	17,78	20,00	na	22,22
Perempuan sbg Tenaga Profesional (%)	na	36,82	45,52	na	55,66
Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	na	31,27	31,68	na	31,69
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	na	66,43	70,35	na	72,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Rembang 2017

Peningkatan kualitas hidup perempuan di kabupaten Rembang dapat dilihat dari jumlah perempuan di parlemen. Persentase keterlibatan perempuan di Parlemen terus meningkat dari tahun 2013, hingga mencapai 22,22% pada tahun 2017. Hal ini selaras dengan nilai IDG Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan hingga Tahun 2017 mencapai angka 72,45%.

## 2) Perlindungan Anak

Suatu kabupaten dikatakan sebagai Kabupaten Layak Anak apabila telah memenuhi 5 klaster 31 indikator penilaian Kabupaten Layak Anak yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Th. 2011. Capaian Kabupaten Layak Anak dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Pratama dengan nilai 500-599, Madya dengan nilai 600-699, Nindya dengan nilai 700-799, Utama dengan nilai 800-999, dan Idola dengan nilai 1000. Pada tahun 2015-2017, Kabupaten Rembang menerima penghargaan sebagai

Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya. Kabupaten Rembang mengembangkan penilaian secara mandiri sampai ke tingkat Desa, yang diwujudkan dalam “Desa Ramah Anak”. Beberapa indikator terkait penilaian Desa Ramah Anak tersebut seperti pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Hingga kini pemerintah masih melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Rembang. Adapun data kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.38**  
**Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**  
**Pppt Semai “Rwc3” Rembang**

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS	JENIS KASUS			
			FISIK	SEKSUAL	PSIKOLOG	PENELANTARAN
1	2011	18	16	0	0	2
2	2012	15	10	1	0	4
3	2013	11	9	1	0	1
4	2014	14	11	1	0	1
5	2015	12	10	2	0	0
6	2016	18	12	43	2	4
7	2017	6	3	0	0	4
8	2018	5	3	2	0	0

Sumber : DinsosPPKB Kabupaten Rembang, Tahun 2018

### c. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan). Pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu: (1) Ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan; (2) keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan (3) pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan. Dengan mengacu pada sistem Ketahanan Pangan tersebut, penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Ketersediaan energi dan protein Per Kapita menunjukkan seberapa besar ketersediaan energi dan protein pada tingkat rumah tangga. Semakin tinggi ketersediaan energi dan protein perkapita menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terhadap bahan pangan semakin baik. Ketersediaan energi di Kabupaten Rembang tergolong baik, dengan ketersediaan energi perkapita menunjukkan capaian yang cukup baik yakni 5.044 kkal/kap/hari pada tahun 2016. Capaian ketersediaan energi perkapita telah sesuai dengan standar ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal.

Jumlah ketersediaan yang melebihi standar ini menunjukkan tidak terjadinya kerawanan pangan di Kabupaten Rembang karena kebutuhan bahan pangan terpenuhi dan masyarakat memiliki daya beli masyarakat

terhadap pangan. Ketersediaan energi dan protein ini didorong dengan produksi bahan pangan utama yaitu padi yang surplus. Penguatan cadangan pangan juga menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari dari capaian diatas 100 ton/hari, telah melebihi standar yang ditetapkan pemerintah untuk kabupaten/kota.

Berkaitan dengan konsumsi pangan dan keamanan pangan, dapat diketahui dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Kabupaten Rembang belum mencapai angka ideal, dengan skor tahun 2013 sebesar 86,7% dan Tahun 2014 naik sebesar 86,8%, namun terjadi penurunan di Tahun 2015, dan 2016. Pada tahun 2017 skor PPH Kabupaten Rembang kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 87,58% dan pada tahun 2018 sebesar 86,8%. Nilai PPH yang masih di bawah standar mengindikasikan kurang seimbangya konsumsi kelompok pangan. Untuk menyeimbangkan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan takaran energi diperlukan perubahan perilaku konsumsi dalam masyarakat. Konsumsi makanan tinggi karbohidrat seperti beras sebaiknya diubah menjadi bahan lain dengan kandungan karbohidrat/energi yang lebih rendah seperti ubi atau pangan substitusi lain. Konsumsi pangan hewani, sayur dan buah perlu ditingkatkan sebagai sumber protein dan vitamin. Sayur dan buah terutama sangat penting sebagai sumber vitamin sehingga penyakit kekurangan vitamin dan mineral dapat ditekan.

Tingkat konsumsi energi Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 mencapai 1.983,3 kkal/kapita/hari, dan konsumsi protein sebesar 57 gram/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi mendekati standar konsumsi energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein sesuai dengan standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi rata-rata penduduk sudah cukup baik, namun upaya mengurangi ketergantungan terhadap beras tentunya perlu ditempuh melalui upaya untuk menaikkan pemanfaatan sumber karbohidrat dari bahan lokal seperti jagung, ketela dan ubi sebagai alternatif konsumsi. Guna penganekaragaman bahan pangan, perlu dipilih bahan-bahan lokal yang dapat diolah sebagai pangan alternatif selain beras.

Secara rinci Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.39**  
**Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2018**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	86,7	86,8	85,9	85,4	87,58	86,8
2.	Ketersediaan energi per kapita (kkal/kapita/hari)	5.000	5.000	5.280	5.044	6.515	5.044
3.	Ketersediaan informasi pasokan harga & akses pangandaerah (%)	100	100	100	100	100	100
4.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	100	100	100	100	100	100
5.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	74	92	80	100	100	100
6.	Penanganan daerah rawan pangan (%)	88	21	66,6	100	100	100
7.	% peningkatan kelas penyuluh/tahun (%)	8,12%	8,12%	10%	10%	10%	15,78
8.	Jml diklat formal/non formalyg diikuti penyuluh/th	18	18	20	15	15	16
9.	Jml Pos Penyuluhan desa/th (Posluhdes)	2	2	2	42	55	55
10.	% peningkatan kelas kelompok tani (%)	34,92	34,92	17	17	9,09	10

Sumber: Dintanpan Kabupaten Rembang Tahun 2018

#### d. Pertanian

Kebijakan pada urusan pertanian diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanian dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanian. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan Pertanian adalah dalam penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan,

penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin lokasi, penetapan tanah ulayat, serta mempunyai kewenangan dalam Perencanaan penggunaan tanah.

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terdapat 124 pengaduan kasus pertanahan dan seluruhnya dapat diselesaikan. Sedangkan untuk peningkatan tertib administrasi pertanahan di tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Data Pertanahan di 14 kecamatan

Kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan diarahkan pada upaya fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pengendalian fungsi dan peruntukan tanah, serta fasilitasi dan sinkronisasi program-program pemerintah di bidang pertanahan. Salah satunya dalam upaya reaktifasi kereta api komuter di Kabupaten Rembang. Perlu dilakukan identifikasi terkait lahan-lahan yang merupakan asset PT. KAI sekaligus fasilitasi untuk pengadaan lahan baru untuk mewujudkan program reaktifasi kereta api di Kabupaten Rembang.

#### e. Lingkungan Hidup

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan membawa konsekuensi logis meningkatnya jumlah sampah serta menurunnya kemampuan pengelolaan sampah dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan telah menjadi salah satu penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan. Sementara itu penanganan masalah sampah di Kabupaten Rembang masih belum optimal. Keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang ada belum memenuhi syarat kelayakan yaitu sistem operasional TPA masih dengan sistem control landfill, fasilitas TPA untuk zona penimbunan belum dilengkapi dengan bangunan kedap air, pengendalian gas tidak ada, serta instalasi pengolahan lindi yang kondisinya rusak.

Timbulan sampah di Kabupaten Rembang setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 4 %. Faktor umum yang menyebabkan meningkatnya produksi sampah perkotaan diantaranya yaitu pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat sehingga telah menyebabkan timbulan sampah di daerah perkotaan semakin tinggi, kendaraan pengangkut baik jumlah maupun kondisinya kurang memadai, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan dan belum diterapkannya pendekatan reduce, reuse dan recycle (3R). Selengkapnya data timbulan sampah di Kabupaten Rembang sampai dengan Tahun 2014-2018 tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.40**  
**Data Timbulan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018**

NO	Kecamatan	Jumlah Desa	Total Timbulan Sampah (kg/hari)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Sumber	18	10,389	10,426	10,475	12,221	12,650
2	Bulu	16	7,931	7,958	7,995	9,381	9,653
3	Gunem	16	7,092	7,134	7,184	8,087	8,706
4	Sale	15	11,159	11,227	11,309	13,152	13,706
5	Sarang	23	18,950	19,124	19,322	20,580	23,529
6	Sedan	21	16,001	16,109	16,237	18,492	19,701
7	Pamotan	23	13,611	13,664	13,733	16,926	16,591
8	Sulang	21	11,482	11,554	11,640	13,407	14,112
9	Kaliori	23	12,068	12,146	12,239	14,410	14,844
10	Rembang	34	26,536	26,791	27,082	31,236	33,003
11	Pancur	23	8,585	8,652	8,729	10,485	10,608
12	Kragan	27	18,362	18,526	18,714	22,440	22,782
13	Sluke	14	8,287	8,332	8,386	10,452	10,155
14	Lasem	20	14,618	14,699	14,796	17,828	17,918
JUMLAH		294	185,070	186,340	187,841	219,097	227,956

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 2018

Data timbulan di atas merupakan perhitungan dari timbulan sampah per kapita dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Rembang. Pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang terbagi menjadi empat yaitu pengelolaan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, pengelolaan melalui bank sampah, pengelolaan melalui TPS 3R dan sampah yang diangkut menuju TPA. Besaran sampah yang dikelola dengan 3R di Kabupaten Rembang hanya sebesar 0,5 m<sup>3</sup>/hari atau sekitar 0,03% dari total timbulan sampah Kabupaten Rembang dan sampah yang terkelola dengan 3R hanya di Kecamatan Rembang. Sedangkan besaran sampah yang masuk ke TPA setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.41

**Perbandingan Volume Sampah Terangkut dengan Total Timbulan Sampah Kabupaten Rembang**

No	Nama Kecamatan	3R		Volume sampah yg terangkut ke TPA		Total volume sampah yang terangkut		Total Timbulan Sampah Se Kabupaten
		%	m <sup>3</sup> /hari	%	m <sup>3</sup> /hari	%	m <sup>3</sup> /hari	
1	Sumber	-	-	-	-	-	-	70,35
2	Bulu	-	-	-	-	-	-	81,59
3	Gunem	-	-	-	-	-	-	97,61
4	Sale	-	-	-	-	-	-	136,61
5	Sarang	-	-	0,02%	0,25	0,02%	0,25	162,83
6	Sedan	-	-	-	-	-	-	94,45
7	Pamotan	-	-	1,02%	16	1,02%	16	229,71
8	Sulang	-	-	0,19%	3	0,19%	3	73,59
9	Kaliori	-	-	-	-	-	-	112,28
10	Rembang	0,03%	0,5	9,38%	147,45	9,41%	147,95	124,12
11	Pancur	-	-	-	-	-	-	157,52
12	Kragan	-	-	0,38%	6	0,38%	6	105,13
13	Sluke	-	-	0,58%	9,2	0,58%	9,2	60,29
14	Lasem	-	-	3,18%	50	3,18%	50	66,63
<b>Jumlah</b>		<b>0,03%</b>	<b>0,5</b>	<b>14,75%</b>	<b>231,9</b>	<b>14,78%</b>	<b>232,4</b>	<b>1.572,71</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 2018

Volume sampah yang diangkut ke TPA berasal dari sampah permukiman maupun sampah non permukiman. Pada tahun 2018, volume sampah yang terangkut sebesar 231,90 m<sup>3</sup>/hari dan sebagian besar berasal dari Kecamatan Rembang yaitu 147,45 m<sup>3</sup>/hari (9,41% dari jumlah total volume sampah se-Kabupaten Rembang). Hal ini dikarenakan Kecamatan Rembang merupakan ibukota Kabupaten Rembang. Selain di Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem juga mempunyai volume sampah terangkut yang besar, yaitu 50 m<sup>3</sup>/hari (3,81%). Volume sampah yang terangkut ke TPA juga merepresentasikan tingkat pelayanan eksisting sekarang ini. Untuk semakin meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang sesuai dengan RTRW Kabupaten Rembang akan dilakukan pengembangan TPA di Kecamatan Sulang. Diharapkan pengembangan TPA tersebut dapat semakin meningkatkan umur teknis bangunan serta meningkatkan kondisi lingkungan permukiman di Kabupaten Rembang..

Sarana pengumpulan sampah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 yaitu meliputi truk sampah, truk container, container gerobak sampah, Tempat Pembuangan Sementara, dan Tempat Pembuangan Akhir. Namun truk tinja, transfer depo, dan instalasi pengolah limbah tinja masih belum ada unit yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Secara lebih jelasnya, perkembangan banyaknya sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.42**  
**Perkembangan Banyaknya Sarana Pengumpulan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Jenis Sarana	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Truk Sampah (unit)	5	5	5	4	5	6
2.	Truk Kontainer (Unit)	7	7	7	5	6	8
3.	Kontainer (unit)	56	56	56	56	55	63
4.	Gerobak dan Becak Sampah (unit)	95	98	98	114	114	114
5.	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	36	36	36	46	52	59
6.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1	1	1	1	1	1

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 2018*

Untuk mengukur kondisi lingkungan hidup dilakukan pengukuran indeks kualitas udara dan indeks kualitas air serta tutupan lahan. Indeks atau indikator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana namun makna esensinya masih ada. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat ukur sederhana untuk mengetahui pencapaian dari upaya pemulihan lingkungan serta sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator dan standar yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indeks Kualitas Lingkungan hidup sering digunakan sebagai acuan atau referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan referensi yang ideal.

Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang tak mudah dimengerti masyarakat. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu. Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan Lokasi/titik pengambilan contoh mewakili aktivitas: Transportasi diambil sampel di perempatan jaeni, Industri di PLTU Sluke, Perumahan di desa Sidowayah, Komersial Perkantoran di jalan Pemuda km.2, dalam hal ini pengujian kualitas udara di lakukan oleh DLH Provinsi Jawa Tengah yang sudah terakreditasi oleh KAN. Hasil pengujian udara tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 2.43**  
**Pengukuran Kualitas Udara Kabupaten Rembang Tahun 2018**

No.	Lokasi pengukuran	Lama pengukuran	SO <sub>2</sub>	CO	NO <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	TSP	PM <sub>10</sub>	Hc
			µg/Nm <sup>3</sup>						
1	Perempatan Jaeni	1 jam	65,63	3865,03	117,79	51,86	81,65	0,018	38,41
2	PLTU Sluke	1 jam	64,21	5248,8	135,72	118,72	163,39	0,03	42,89
3	Desa Sidowayah	1 jam	62,12	2879,45	106,53	41,76	52,63	0,012	35,11
4.	Jalan Pemuda Km.2	1 jam	63,37	3456,92	109,87	60,74	78,11	0,02	37,96

Sedangkan untuk pengukuran kualitas atau pencemaran air sungai menggunakan komposisi parameter fisik (bau, warna, jumlah zat padat terlarut, kekeruhan, rasa) kimia (bahan an-organik : besi, seng, alumunium,

kesadahan, klorida, mangan, pH, sulfat, serta tembaga) dan bakteriologis (jumlah kuman dan total coli). Kabupaten Rembang menggunakan sampel pengujian kualitas di tiga sungai yaitu sungai Kalipang kecamatan Sarang, sungai Babagan kecamatan Lasem, sungai Karanggeneng Rembang. Analisis pengujian sampel dilakukan di laboratorium BBTPI Semarang yang sudah terakreditasi oleh KAN. Dimana hasil pengujianya sebagai berikut :

**Tabel 2.44**  
**Pengukuran Kualitas Air Kabupaten Rembang Tahun 2018**

No	parameter	sat	Sungai pengambilan sampel						Baku mutu			
			kalipang		karanggeneng		babagan		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
			Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II				
1.	TSS	mg/l	25	28	34	26	27	44	50	50	400	400
2.	pH		6,7	7,8	7,7	6,5	6,9	7,8	6-9	6-9	6-9	6-9
3.	BOD	mg/l	7,02	7,82	5,75	6,09	4,56	8,67	2	3	6	12
4.	COD	mg/l	10,56	13,42	15,79	17,65	20,65	38,67	10	25	50	100
5.	DO	mg/l	4,01	4,33	3,95	3,56	2,89	4,91	6	4	3	0
6.	Total Coli	jumlah / 100ml	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400				
7.	e Coli	Jumlah /100ml	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400				

Indikator terakhir untuk mengetahui kualitas lingkungan adalah tutupan lahan. Tutupan lahan adalah kenampakan material fisik permukaan bumi. Tutupan lahan menggambarkan keterkaitan antara proses alami dan proses sosial. Informasi tutupan lahan yang akurat merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kinerja dari model-model ekosistem, hidrologi, dan atmosfer sehingga kualitas lingkungan dapat diukur dengan lebih akurat. Tutupan lahan di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari luas lahan dengan kenampakan hutan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 2.45**  
**Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Rembang**

No.	Nama DAS	Kawasan	Kekritisn Lahan (Ha)					Total
			Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	sangat Kritis	
	Capluk	Areal Penggunaan Lain	17,979.86	97.34	82.41	31.20	16.09	18,206.90
		Hutan Produksi	2,374.85	986.86	259.25	2.82	-	3,623.78
	Panggung	Areal Penggunaan Lain	2,679.69	-	-	-	-	2,679.69
	Jambangan	Areal Penggunaan Lain	1,464.50	-	-	-	-	1,464.50
	Kiringan	Areal Penggunaan Lain	1,395.35	-	-	-	-	1,395.35
	Lasem	Areal Penggunaan Lain	14,804.18	1,501.04	906.61	400.83	201.59	17,814.25
		Hutan Konservasi	-	7.63	-	-	-	7.63
		Hutan Lindung	38.43	37.85	324.55	109.89	-	510.72
		Hutan Produksi	1,571.51	1,426.28	293.02	36.27	6.51	3,333.59
		Hutan Produksi Terbatas	121.24	1,066.04	191.65	13.30	4.27	1,396.50
	Tasiksono	Areal Penggunaan Lain	1,104.33	102.94	769.94	131.05	46.29	2,154.55
		Hutan Lindung	-	-	36.66	21.56	24.05	82.27
	Bonang	Areal Penggunaan Lain	377.93	121.40	104.49	6.36	1.37	611.55
		Hutan Lindung	2.02	4.64	68.54	31.97	-	107.17
		Hutan Produksi	0.55	-	-	-	-	0.55
	Leran	Areal Penggunaan Lain	196.36	62.08	104.78	33.18	-	396.40
		Hutan Produksi	32.63	30.45	36.35	32.95	-	132.38
	Malang	Areal Penggunaan Lain	464.27	78.71	140.07	48.83	-	731.88

No.	Nama DAS	Kawasan	Kekritisian Lahan (Ha)					Total
			Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	sangat Kritis	
		Hutan Produksi	1.44	1.08	49.72	7.52	-	59.76
	Klادن	Areal Penggunaan Lain	568.86	8.38	600.16	146.08	-	1,323.48
		Hutan Lindung	13.05	-	305.01	74.07	-	392.13
		Hutan Produksi	-	-	0.71	-	-	0.71
	Sranduk	Areal Penggunaan Lain	92.75	65.73	265.51	93.56	-	517.55
		Hutan Lindung	-	-	0.05	-	-	0.05
	Randualas	Areal Penggunaan Lain	149.07	-	117.00	52.44	-	318.51
	Kepel	Areal Penggunaan Lain	285.69	-	229.64	211.21	-	726.54
		Hutan Lindung	11.81	-	136.99	8.83	-	157.63
	Kresak	Areal Penggunaan Lain	613.53	98.30	246.85	5.31	12.26	976.25
		Hutan Lindung	4.89	-	195.03	2.66	-	202.58
	Anyar	Areal Penggunaan Lain	752.93	30.57	20.67	12.70	4.42	821.29
	Kesambi	Areal Penggunaan Lain	11,433.45	1,616.36	971.12	220.15	26.68	14,267.76
		Hutan Lindung	92.98	259.80	665.51	47.42	-	1,065.71
		Hutan Produksi	1,486.93	963.49	18.13	81.46	-	2,550.01
		Hutan Produksi Terbatas	19.76	107.48	42.56	8.28	-	178.08
	Randugunting	Areal Penggunaan Lain	7,487.40	3.93	3.08	0.52	-	7,494.93
		Hutan Produksi	497.30	326.97	42.72	16.66	-	883.65
	Serang	Areal Penggunaan Lain	373.48	153.55	9.02	-	0.71	536.76
		Hutan Produksi	1,213.13	358.62	3.03	-	-	1,574.78
		Hutan Produksi Terbatas	235.29	147.27	6.37	-	1.10	390.03
	Temperak	Areal Penggunaan Lain	4,447.96	21.21	-	-	-	4,469.17
		Hutan Produksi	509.30	581.04	11.66	-	-	1,102.00
		Blank	-	-	-	-	-	-
	Solo	Areal Penggunaan Lain	719.32	544.32	3,227.20	416.98	-	4,907.82
		Hutan Konservasi	4.07	-	11.80	-	-	15.87
		Hutan Produksi	80.54	1,557.20	3,502.72	68.46	-	5,208.92
		Hutan Produksi Terbatas	3.64	16.65	430.99	40.85	-	492.13
	Total		75,706.27	12,385.21	14,431.57	2,415.37	345.34	105,283.76

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Rembang, 2018

#### f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2) Pelayanan pencatatan sipil;
- 3) Pengumpulan data kependudukan;
- 4) Pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan Kabupaten/ Kota;
- 5) Penyusunan profilkependudukan Kabupaten/Kota.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan di masyarakat, meskipun demikian masih ada beberapa indikator yang capaiannya masih belum sesuai dengan harapan. Misalnya adalah persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk yang kinerjanya justru mengalami mengalami tren menurun dengan capaian tahunan yang fluktuatif. Indikator kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kondisi 5 tahun yang lalu, yakni dari 59,52% pada 2011 menjadi 81% pada tahun 2015. Kedua indikator tersebut

perkembangannya masih dibawah target yang termuat dalam SPM. Sedangkan indikator SPM lainnya yang telah mampu mencapai target 100% adalah kepemilikan kartu keluarga dan kepemilikan akta kematian.

Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.46**  
**Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Capaian Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase penduduk ber KTP per satuan Penduduk (%)	68,25	89,20	87,52	94,00	98,40	98,24
2.	Persentase bayi ber-akte kelahiran (%)	97,92	94,25	96,45	95,6	97,91	98,45
3.	Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)	67,02	59,58	81	45,27	48,14	105
4.	Persentase pasangan berakte nikah (non-muslim) (%)	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase kepemilikan kartu keluarga (%)	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Kepemilikan Akte Kematian (%)	100	100	100	100	100	100
7.	Informasi Administrasi Kependudukan (%)	51,07	71,70	85,50	95,50	99,00	99,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun, 2018

#### g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi, seperti kemampuan untuk berusaha, mencari informasi, dan mengelola kegiatan. Perilaku masyarakat harus didorong agar mampu bekerjasama atau bergotong royong dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tantangan ke depan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan, hak asal usul, dan adat istiadat Desa dan kewenangan lokal skala desa, sehingga dengan adanya Undang-Undang ini sebagian kewenangan Kabupaten akan diserahkan dan dilaksanakan oleh desa.

Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun 2013–2018 mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu banyak. Jumlah Posyandu aktif sejak tahun 2013 sd. 2017 sebanyak 1.225 buah, namun pada tahun 2018 bertambah 8 posyandu menjadi 1.233 posyandu. Data Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 adalah pada tabel berikut:

**Tabel 2.47**  
**Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Kondisi Saat Ini					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	PKK aktif (Unit)	309	309	309	309	309	309
2.	Posyandu aktif (unit)	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.233
3.	Persentase Posyandu Purnama Dan Mandiri (%)	46,85	46,85	47,75	47,75	46,6	59,7
4.	% Lembaga Kemasyarakatan,	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Saat Ini					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Lembaga Adat yang telah diberdayakan (%)						
5.	% Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif(%)	100	100	100	100	100	100
6.	% swadaya masy thd program pemberdayaan masy (%)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7.	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masy (%)	100	100	100	85	85	85
8.	%kadesyg telah mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa (%)	100	100	100	100	100	100
9.	Pembangunan kawasan pedesaan	0	0	1	1	1	2
10.	Badan kerjasama antar desa	13	13	13	13	13	19

Sumber: BPMPKB Kabupaten Rembang 2018

## h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 1) Keluarga Berencana

Kabupaten Rembang dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk turut mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. *Total Fertility Rate* Kabupaten Rembang tahun 2015 berdasarkan hasil susenas sebesar 2,07. Angka tersebut menunjukkan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya.

Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Rembang telah mencapai 100% dari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) tahun 2011 sebesar 8,01%, tahun 2015 menurun menjadi 6,93%. Perkembangan *unmet need* dari tahun 2011–2015, cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Fluktuasi *unmet need* KB ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB khususnya MKJP serta PUS yang tidak ingin memiliki/menunda punya anak namun tidak ber-KB. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi *unmet need* KB antara lain melalui optimalisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), peningkatan SDM PLKB, peningkatan kepesertaan KB Pria, dan kerjasama antar berbagai institusi.

### 2) Keluarga Sejahtera

Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Rembang pada tahun 2013-2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 sebesar 55,96 persen, pada tahun 2014 sebesar 54,96 persen dan pada tahun 2015 sebesar 54,64 persen. Perkembangan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.48**  
**Perkembangan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013–2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Total fertility Rate (TFR)	1,86	1,86	2,07	2,05	2,07	2,07
2.	Rasio akseptor KB /1000 PUS	833,6	827,48	825,23	837,05	841,11	800,2
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	100	100	100	100	120,89	123,04
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 th	3,14	3,46	3,68	3,22	1,56	1,55
5.	Cakupan PUSyg ingin ber-KB tdk terpenuhi (Unmet Need)	7,26	7,83	6,93	6,73	6,94	9,81
6.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 th) per	35	35	35	34	32	32

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1000 perempuan usia 15-19 tahun						
7.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	83,36	82,75	83,57	83,61	84,11	80,02
8.	Angka Drop out KB	12,32	14,19	13,62	12,08	8,72	7,27
9.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100
10.	% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	55,96	54,96	54,64	51,94	50,46	51,13
11.	Ratio PLKB / penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	4,32	4,39	4,52	4,98	4,98	6,12
12.	Ratio PPKBD	100	100	100	100	100	100
13.	% kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	100	100	100	100	100	100
14.	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKSyg berKB	91,99	92,21	91,12	91,64	92,47	90
15.	Cakupan anggota bina keluarga baita (BKB) ber-KB	91,96	91,97	92,12	89,89	89,56	100
16.	Cakupan Peserta KB Aktif MKJP	13,81	15,25	16,61	17,96	19,65	20,81
17.	Cakupan Peserta KB Aktif Pria	1,25	1,14	1,14	1,14	1,21	1,11
18.	Cakupan Tribina	89,86	91,42	83,80			

Sumber: Dinsos PPKB Kabupaten Rembang Tahun 2018

### i. Perhubungan

Kabupaten Rembang merupakan wilayah mempunyai arus lalu lintas yang cukup padat, dilalui jalan arteri primer antara Jakarta-Surabaya yang merupakan jalur perekonomian yang ramai baik angkutan barang maupun penumpang. Kondisi jalur lalu lintas sering menimbulkan kemacetan khususnya di kawasan-kawasan yang dilewati secara langsung oleh jalan utama pantura.

Kebijakan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan umum, meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa perhubungan, meningkatkan peranan swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan, pengembangan infrastruktur perhubungan di kawasan pesisir. Di bidang layanan perhubungan, untuk memperlancar kegiatan transportasi pada simpul-simpul jalur transportasi disediakan fasilitas terminal. Berdasarkan jenis angkutannya maka terminal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Terminal angkutan penumpang
- 2) Terminal angkutan barang

Terminal yang tersedia di Kabupaten Rembang berdasarkan SK Bupati No.551-4/0984/2016 terdiri dari tujuh terminal kelas C yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di Kabupaten Rembang, yaitu Rembang, Lasem, Sulang, Gunem, Sarang, Pamotan, dan Sumber. Dari tujuh terminal tersebut ada dua terminal yang potensial ditingkatkan statusnya menjadi terminal tipe B maupun terminal tipe A sesuai dengan lokasinya yang berada di jalur arteri sehingga fungsinya dapat melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Terminal yang potensial untuk ditingkatkan statusnya sesuai dengan rencana tat ruang wilayah adalah Terminal Rembang menjadi tipe A dan Terminal Lasem menjadi tipe B. Sampai saat ini pelayanan terminal di Kabupaten Rembang sudah berfungsi

sesuai dengan peruntukannya, meskipun masih memerlukan perbaikan. Sejak tahun 2014 belum ada perbaikan yang cukup signifikan untuk merevitalisasi terminal tipe C. Perbaikan hanya berupa pemeliharaan rutin terminal sehingga kinerja terminal dari tahun 2014 tetap dan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

Selain angkutan umum dan kendaraan pribadi, di Kabupaten Rembang juga banyak dilintasi kendaraan angkutan barang. Angkutan barang ini sangat berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan jembatan, serta kemacetan lalu lintas. Selama ini kontrol terhadap angkutan barang masih kurang, masih banyak angkutan barang yang membawa muatan melebihi daya angkut yang ditetapkan, dimana kewenangan dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Banyak pula angkutan barang yang berhenti di pangkalan truk ilegal di Desa Manggar, Sumpersari Kragan, Lasem, Pancur, dan Wuwur. Selain itu banyak pula yang berhenti di sembarang tempat, sehingga menghambat arus lalu lintas jalan raya. Dengan melihat kondisi tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan terhadap angkutan barang dengan melakukan pengontrolan beban muatan angkutan barang, khususnya angkutan barang yang melalui jaringan jalan Kabupaten Rembang kelas II dan kelas III. Selain itu, diperlukan pula pengembangan rest area atau pool truk yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat pengemudi angkutan barang.

Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.49**  
**Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018**

No	Uraian	Tahun					keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase terminal tipe C dalam kondisi baik (%)	71,42	71,42	71,42	71,42	71,42	terminal tipe c dlm kondisi baik jml 5, dr 7 terminal tipe C
2	Persediaan Terminal Angkutan penumpang pd setiap kab/kota yg telah dilayani angkutan umum dlm trayek	70	70	70	70	70	
3	peningkatan fasilitas parkir mobil barang	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
4	%sarpras perhubungan dlm kondisi baik	85	85				
5	jumlah angka kecelakaan di kabupaten rembang (kali)	418	408	470	456	391	data dari Satlantas
6	cakupan ketersediaan halte bus pada jaringan trayek	2	2	2	3	5	2018 tambah 2 unit
7	ketersediaan rambu rambu lalu lintas (%)	67	67	67	67	67	2015-2018 tdk ada penambahan
8	persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan						
	rambu (%)	67	67	67	67	67	2015-2018 tidak ada penambahan
	Marka(%)	63	65	6.3	23	11	terpasang/kebutuhan 10.000 *100 (2016-2018)
	guardrill (%)	35	35	35	35	11,6	terpasang/kebutuhan 1232 *100 (2016-2018)
	LPJU (%)	5	5	5	1.056	5.25	terpasang/kebutuhan 13350 *100 (2016-2018)
	APPIL (%)	19	36	34,7	37,1	42,9	satuan unit Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (IPPL)

No	Uraian	Tahun					keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	
9	kelas akreditasi dari tempat uji sesuai SPM	n.a	n.a	n.a	C	C	
10	tersedianya angkutan umum yg melayani wilayah yg telah tersedia jaringan jln untuk jaringan jalan kab/kota (unit)	925	1014	1014	1102	1105	
11	Jml orang mll terminal/th/org	2.156.071	2.308.680		897.944	875.143	
12	rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 1 th)	64	68	61	69	0	Pindah ke DPMPSTP naker 2018
13	Jumlah uji kendaraan bermotor wajib uji (unit)	6436	6936	7705	8290	8903	
14	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji (unit)	10616	11616	8196	9779	7864	
15	lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	90	90	55	55	55	
16	biaya pengujian kelayakan angkutan umum	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.001	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.002	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.003	Perda No 6 2010, ganti tanda uji berkala Rp 5.000, ganti buku/ dokumen lain uji berkala Rp 8.500, ganti label pemeriksaan emisi gas buang/ uji asap Rp 4.000, stiker samping Rp 12.000
17	% kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi) (%)	90	98	90	95	98	
18	% kendaraan umum yg berada dalam kondisi laik jalan (%)	94	94	99	98	99	

Sumber: Dishub Kabupaten Rembang Tahun 2018

Penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dalam jangka waktu tahun 2014-2018 mengindikasikan kecenderungan perbaikan, yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, meningkatnya aksesibilitas pelayanan angkutan umum, menurunnya angka pelanggaran serta meningkatnya peran swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan. Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.50**  
**Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018**

No	Indikator kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1	pelanggaran ijin trayek (kasus)	33	33	16	1	2
2	pelanggaran uji (kasus)	58	58	38	16	7
3	pelanggaran kendaraan bukan peruntukannya (kss)	0	0	3	3	1
4	kendaraan bermotor wajib uji (unit)	6.436	6.936	7705	8290	8903
5	kendaraan bermotor yang di uji (unit)	10.616	11.616	8196	9779	7864
6	jumlah angkutan darat (unit)	925	1014	1014	1102	1105
7	Jml penumpang angkutan darat (orang)	2.156.071	2.156.071		897.944	875.143

Sumber: Dinhub Kabupaten Rembang, 2018

Kondisi pelayanan perhubungan terkendala dengan fasilitas alat uji yang masih menggunakan sistem analog. Mulai tahun 2018 sudah mulai dilakukan modifikasi alat uji dari sistem analog menjadi sistem digital sehingga mengurangi *human error* pada proses pengujian. Kedepan untuk meningkatkan akreditasi tempat uji perlu ditingkatkan penggunaan teknologi digital sesuai dengan standar yang diperlukan. Termasuk dalam upaya pemantauan lalu lintas mengingat kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi, ke depan akan dikembangkan *automated traffic control system*. Sementara itu, perkembangan penyelenggaraan urusan bidang perhubungan tahun 2018 diantaranya dapat diketahui dari proporsi jumlah angkutan darat sebanyak 1.102 unit dan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 875.143 orang. Sedangkan upaya untuk menurunkan tingkat gangguan lalu lintas dilaksanakan dengan terus meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2014-2018. Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.51**  
**Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2014–2018**

No	Fasilitas Perhubungan	2014	2015	2016	2017	2018	Keterangan
1	Rambu 60 x60 cm	40	40	40	40	40	
2	Rambu 90 x90 cm	90	90	90	90	90	
3	Rambu model F	14	14	14	14	14	
4	RPPJ kecil 1 muka	48	48	48	48	48	
5	RPPJ besar 1 muka	4	4	4	4	4	
6	RPPJ besar 2 muka	1	1	1	1	1	
7	Warning Light Pijar	13	19	0	0	0	Ganti LED
8	Warning Light LED	11	11	0	0	6	
9	Traffic Light Pijar	3	3	0	0	0	
10	Traffic Light LED	1	1	0	1	1	
11	Guardrail (m)	140	140	0	0	144	
12	LPJU LED	62	62	3497	141	702	2016 dari ESDM
13	LPJU Solar Cell	12	12	0	0	0	
14	Marka (m2)	660	234	689	2300	1100	Zebra Cross & marka lkeg
15	Zebra Cross	2	2	0	0	0	
16	Shelter	2	2	2	1	2	
17	Paku Jalan	282	282	0	0	0	blm pernah pngadan

Sumber: Dinhub Kabupaten Rembang, 2018

Program rekatifikasi kereta api lintas Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang telah tertampung dalam revisi Peraturan Menteri Nomor : 43 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, saat ini revisi tersebut masih dalam proses penetapan. Rencana pembangunan trase Kudus – Pati Rembang diperkirakan antara tahun 2021-2030 sedangkan untuk trase Cepu – Rembang diperkirakan antara tahun 2025-2030. Rencana reaktifasi kereta api yang merupakan program strategis pemerintah pusat akan memberikan dampak yang cukup signifikan termasuk dalam tataran transportasi lokal (Tatralok). Perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian trayek angkutan dengan stasiun-stasiun yang ada di Kabupaten Rembang sehingga seluruh angkutan penumpang dan barang dapat terkoneksi dan terintegrasi dengan baik.

Pelabuhan Rembang eksisting merupakan pelabuhan pengumpan regional yang merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah berada di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang, yang secara keruangan lokasinya berdekatan dengan pelabuhan perikanan pantai pada Kawasan Sentra Perikanan Kabupaten Rembang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai Pelabuhan Pengumpul. Sedangkan Pelabuhan Tasik Agung Rembang walaupun berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional hierarkinya sebagai pengumpan regional, namun kondisinya lebih layak sebagai pelabuhan perikanan pantai. Pelabuhan tersebut sudah tidak dapat dikembangkan menjadi pelabuhan umum sehingga diarahkan sebagai pelabuhan perikanan pantai. Sedangkan Pelabuhan Rembang, mengingat berada pada posisi strategis di antara dua pelabuhan besar yaitu Tanjung Mas (Semarang) dan Tanjung Perak (Surabaya), pada tahapan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dikembangkan melalui pembangunan terminal Sluke sebagai pelabuhan pengumpan yang kedepan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan Republik Indonesia diarahkan sebagai Pelabuhan Pengumpul.

Pengembangan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke diharapkan dapat menjadi pemicu bagipertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pintu gerbang akses transportasi laut guna mengangkut arus barang komoditas dan hasil olahan hinterland Kabupaten Rembang dengan peluang kegiatan antara lain:

- 1) Mendorong pengembangan industri berbasis bahan galian tambang dan pengolahan produk pertanian.
- 2) Mengoptimalkan terminal pelabuhan niaga antar pulau dan ekspor impor.
- 3) Penyediaan fasilitas terminal curah cair dalam rangka pengolahan dan distribusi minyak Blok Cepu dan Blok Randugunting Rembang.
- 4) Pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan pembangunan kawasan industri Kabupaten Rembang.

#### **j. Komunikasi dan Informatika**

Pemerintah daerah dalam pelayanan urusan komunikasi dan informatika memiliki kewenangan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan, melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi, pelayanan informasi multi media, serta perluasan jaringan sarana dan prasarana informasi seluruh kecamatan. Pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika adalah operasi dan pemeliharaan website Pemerintah Kabupaten Rembang yakni *rembangkab.go.id* sebagai media untuk terjalannya komunikasi yang harmonis antar pelaku pembangunan, dan dalam mendukung globalisasi informasi di berbagai bidang. Selain website resmi Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagian besar perangkat daerah bahkan sampai level Kecamatan telah memiliki website. Hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah bagaimana SDM yang ada di Perangkat Daerah mampu mengelola dan memanfaatkan media tersebut untuk menyampaikan informasi pembangunan yang dilaksanakan dan juga mampu menyediakan data-data yang valid yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten terus berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten/Kota. Adapun indikator dalam SPM tersebut adalah:

- 1) Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:
  - a) Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
  - b) Media baru seperti website (media online);
  - c) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
  - d) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau
  - e) Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur,spanduk, dan baliho.
- 2) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

Semua indikator SPM yang targetnya harus dicapai oleh Kabupaten Rembang sampai saat ini belum terdata dengan baik. Perkembangan Pelayann Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.52**  
**Perkembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah jaringan komunikasi	29	29	58	62	62	165
2.	Jumlah penyiaran radio	13	13	13	14	14	14
3.	Cakupan layanan SST	5.450	5.500	5.500	6.500	5.000	5.000
4.	Jumlah aplikasi e-goverment di lingkup pemda kab/kota	14	15	20	20	20	22
5.	% PD telah memiliki website (%)	86,97	86,97	86,97	100	100	100
6.	Cakupan pengembangan & pemberdayaan klp informasi masy di tk kec	21	21	22	21	21	21
7.	Jml Pelaksanaan Diseminasi & Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:						
	Media massa(majalah,radio, teve);	2	2	2	2	2	2
	Media baru spt website (media online);	na	Na	11	1	1	1
	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	1	1	1	1	1	1
	Media interpersonal spt sarasehan, ceramah & lokakarya; Media luar ruang spt media buletin, leaflet, booklet, brosur,spanduk, & baliho.	1	1	1	-	-	-
		2	2	2	2	2	2

Sumber: Dinhubkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2018

**k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Kebijakan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan pada upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan

penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM.

Koperasi harus kreatif dalam menghadapi persaingan usaha dan kegiatan ekonomi yang semakin ketat. Kreativitas menjadi konsekuensi yang harus dimiliki koperasi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Persaingan terjadi tidak hanya pada lingkungan internal tetapi juga bersaing dengan skala lebih luas. Untuk maju, koperasi harus menjalin kerja sama dengan banyak pihak. Bekerjasama dengan mitra baik lokal, regional maupun mitra berskala internasional harus dilakukan untuk membawa koperasi terus berkembang. Terdapat empat indikator untuk mengukur kemajuan koperasi, diantaranya (1) sumber daya koperasi baik SDM maupun permodalannya, (2) sarana dan prasarananya (3) peran terhadap lingkungan, dan dampak positifnya baik masyarakat maupun anggota sendiri (4) adanya program strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabelberikut :

**Tabel 2.53**  
**Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKM**  
**di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jml UMKM (unit)	33.900	39.363	39.363	39.173	39.632	39.830
2.	Jml LKM koperasi dan UKM (uniT)	84	275	279	284	286	289
3.	jml UMKM yg tlh mengikuti pameran promosi produk (unit)	4	5	6	NA	NA	NA
4.	% koperasi aktif (%)	78,68	78,68	79,00	53,34	90,28	90,40
5.	% KSP/USP koperasi sehat (%)	31,80	32,00	35,00	22,60	67,57	69,59
6.	Cakupan bina kelompok UMKM	1.695	1.968	1.972	1.152	1.162	1.165
7.	Jml Wirausaha Baru (buah)	7.733	5.463	5.112	140	312	198

Sumber: Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Rembang Tahun 2018

Pada tabel diatas, capaian semua indikatorurusan koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 cenderung meningkat, hanya 1 (satu) indikator yang mengalami penurunan, yakni Jumlah wirausaha baru pada Tahun 2017 sebesar 312 buah, di Tahun 2018 hanya 198 buah, capaian yang kecil tidak menunjukkan kinerja yang buruk, karena jika dihitung total jumlah wirausaha baru dari Tahun 2013 berjumlah 18.958 buah.

### 1. Penanaman Modal Daerah

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, telah mengatur mengenai pelaksanaan sistem OSS (Online Single Submission). Sejak pertengahan April Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melakukan inovasi dengan menindaklanjuti menerapkan sistem OSS untuk pelayanan perijinan. Sistem OSS ini dapat diakses secara daring dan terintegrasi. Dengan OSS, Pemerintah memberi kemudahan bagi investor dalam mengurus usahanya, cukup memilih salah satu PTSP pusat atau daerah. Sebab, dalam sistem ini sudah ada kesatuan antara PTSP pusat dan daerah, ada standar perizinan yang sama untuk

semua daerah, serta tidak ada lagi duplikasi perizinan, dalam satu kegiatan usaha tidak perlu ada lebih izin bisa diurus di satu instansi, baik itu daerah maupun pusat.

Jumlah investasi proyek PMA/PMDN di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 investasi PMA/PMDN sebesar 7,173T, mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun sebelumnya 2017 sebesar 5,722 T. Dengan semakin meningkatnya jumlah investasi dan investor yang ada di Kabupaten Rembang, memberikan *multiplier effect* kepada penyerapan jumlah tenaga kerja. Dimana jumlah tenaga yang terserap pada tahun 2017 sebesar 7.016 orang, mengalami peningkatan menjadi sebesar 10.910 orang pada tahun 2018. Secara rinci Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2018 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.54**  
**Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	1 profil investasi					
2	Terselenggaranya fasilitasi pemdadm rangka kerjasama kemitraan	3	3	3	1	2	0
3	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kab	3	3	3	3	4	2
4	Terselenggara sosialssi kebijakn penanman modal kpd masy dunia usaha.	3	3	3	9	9	1
5	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	10	10	20	28	41	78
6	Nilai investasi	673,7 M	646,8 M	3,478 T	5,172 T	5,28 T	7,71 T
7	Terselenggaranya yan perijinan & nonperijinan bid pennamn modal mllyan Terpadu Satu Pintudi bid Penanaman Modal.	100	100	100	100	100	100
8	Terselenggaranya bim pelksanan Keg Penanman Modal kpd masyarakat dunia usaha (%)	100	100	100	100	100	100
9	Sistem Pelayanan Informasi & Investasi scr Elektronik (SPIPISE) (%)	100	100	100	100	100	100
10	% kerjasama dibidang penanaman modal yg terlaksana (%)	18,51	18,51	37,03	50	90	90
11	% PMA/PMDN diKab Rembang yg taat aturan (%)	40	60	65	55	82,79	82,79
12	Tenaga kerja lokal yang terserap pada penanaman modal (orang)	1.763	2.672	7.742	7.784	7.016	10.910
13	% pengaduan yan perijinan & investasi yg ditindaklanjuti(%)	95	95	95	100	100	100

Sumber: DPMPSTSPNAKER Kabupaten Rembang Tahun 2018

**m. Kepemudaan dan Olahraga**

Kemajuan suatu daerah pada masa mendatang salah satunya bergantung kepada generasi muda yang akan meneruskan estafet pembangunan. Pemuda yang berpendidikan, terampil, mempunyai integritas dan patriotisme akan mampu berperan sebagai motor penggerak pelaksanaan pembangunan. Selama kurun tahun 2011-2015 jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Rembang relatif tetap yaitu AMPI, KOSGORO, Rembang Bangkit Foundation, dan Gerakan Pemuda Nusantara namun ada peningkatan pada Karang Taruna dan PPMI. Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.55**  
**Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2018**

No	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	KNPI	1	1	1	1	1	1
2.	AMPI	1	1	1	1	1	1
3.	Pemuda Ansor	1	1	1	1	1	1
4.	Pemuda Muhammadiyah	1	1	1	1	1	1
5.	Pramuka	1	1	1	1	1	1
6.	KUPP/KWP (klp Wirausaha Pemuda)	22	22	22	22	22	22
7.	KOSGORO	1	1	1	1	1	1
8.	Rembang Bangkit Foundontion	1	1	1	1	1	1
9.	Gerakan Pemuda Nusantara	1	1	1	1	1	1
10.	Puma Prakarya Muda Indonesia	1	1	1	1	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang Tahun 2018

Di bidang keolahragaan, keikutsertaan kontingen Kabupaten Rembang dalam even di tingkat karesidenan, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pada tahun 2018, medali di even tingkat Karesidenan mendapatkan 187 medali, sedangkan di even tingkat Provinsi mendapatkan 46 medali. Untuk tingkat nasional, kontingen dari Kabupaten Rembang belum pernah mendapatkan medali.

Jumlah Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan olahraga di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terdapat sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Rembang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat utamanya untuk berbagai aktifitas olahraga; Sepak Bola, Basket, Volley, Bulu Tangkis dan Renang, sedangkan GOR dapat dimanfaatkan untuk kegiatan serbaguna. Adapun perkembangan jumlah sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Rembang dari tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.56**  
**Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga**  
**di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah (unit)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Lapangan Sepak Bola	252	252	252	252	252	252
2	Lapangan Basket	46	46	46	46	47	47
3	Lapangan Volley	276	276	276	322	322	324
4	Lapangan Bulu Tangkis	38	38	38	38	38	38
5	Kolam Renang	2	2	2	2	2	2
6	Gelanggang/Balai Remaja/Serbaguna	19	19	19	19	19	19

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang, 2018

Selanjutnya Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.57**  
**Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2017**

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pemuda (orang)	149.408	138.863	150.955		
2	Jml anggota pasukan paskibraka (org)	76	76	76	76	76

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3.	Jumlah peserta TUB BB (orang)	20	20	20	20	20
4.	Jmlpst Jambre Pemda Indonesia (org)	14	14	14	14	14
5.	Jml peserta kemah bakti (kontingen)	14	14	14	14	24
6.	Jml pemuda pelopor yg berprestasi di Tingkat provinsi (org)	7	8	10		
7.	Jml Kewirausahaan pemuda yg mandiri (Usaha)	22	22	22	22	22
8.	Jml OKP (organisasi Kepemudaan)	31	31	31	31	31
9.	Jml kasus narkoba di kab Rembang (kss)	1	4	6	19	15
10.	Jml tenaga pelatih yg terlatih (orang)	30	30	30	30	30
	Jml atlet yg terlatih (orang)	30	30	30	30	30
	Jml pengurus cabor yg terlatih (org)	7	10	10	10	10
11	Jml atlet pelajar yg berprestasi di kejur Popda Kab (Atlet)	-	-	200	226	-
	jml atlet pelajar yg berprestasi di kejur Popda tkt Karesidenan (Atlet)	70	59	64	-	-
	jml atlet pelajar yg berprestasi di kejur Popda tingkat Provinsi (Atlet)	15	16	60	-	-
12	Jml club olahraga di tingkat pelajar	169	171	179	-	-
	Jml club olahraga di tk mahasiswa (club)	2	2	3		
	Jml club olahraga di masy (Club)	469	472	485		
13	Jml atlet yg menerima penghargaan prestasi di tk Karesidenan	0	130	130		
	Jml atlet yg menerima penghargaan prestasi di tk provinsi	27	32	35		
	Jml atlet yg menerima penghargaan di tk nasional	1	2	5		
14	Jml lapangang olahraga milik Pemerintah Kabupaten Rembang	4	4	4	4	4
15	Jml gelanggang olahraga milik pemerintah kabupaten Rembang	3	3	3	3	3

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang, Tahun 2017

#### n. Statistik

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional, oleh sebab itu, ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha.

Pasal 5 Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1)statistik dasar; (2)statistik sektoral dan; (3)statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab BPS. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan. Sedangkan

statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Produk berupa buku statistik yang telah dihasilkan dan dipublikasikan selama kurun waktu 2013–2017 antara lain adalah Rembang Dalam Angka (setiap tahun); Buku PDRB (setiap tahun); Kecamatan Dalam Angka; NTP; Profil Kependudukan, Profil Pendidikan, Profil Kesehatan, Profil Ketenagakerjaan

**o. Persandian**

Penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten/daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah untuk Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sampai saat ini pemanfaatan persandian di Kabupaten Rembang baru sebatas pada pelayanan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

**p. Kebudayaan**

Kabupaten Rembang berada pada daerah pesisir dengan panjang pantai sekitar 65 km, dan dipengaruhi juga oleh sejarah sehingga kesenian dan kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Rembang banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur sejarah dan budaya, seperti pengaruh budaya Jawa, Islam, Cina/Tionghoa, dan budaya daerah pesisir.

Kelompok kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Rembang antara lain Kesenian Musik Tradisional dan Kesenian/ Teater Tradisional. Kesenian Musik Tradisional terdiri dari Karawitan, Suarawati, Gadon, Cokek’an, Thong Thong Lek, Keroncong. Sedangkan kesenian/Teater Tradisional yaitu terdiri dari : Wayang Kulit, Wayang Orang, Wayang Krucil, Kethoprak, Emprak, Gondorio, Ande - Ande Lumut, Laisan, Orek – Orek, Pathol Sarang, Barongan/ Reog. Kesenian tersebut merupakan Aset Budaya dan Kekayaan Kabupaten Rembang.

Kelompok kesenian di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 sebanyak 252 kelompok. Data kelompok kesenian di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.58**  
**Data Kelompok Kesenian Kabupaten Rembang Tahun 2018**

No.	KELOMPOK KESENIAN	JUMLAH (KELOMPOK)
1.	Kelompok Sanggar Seni Tari	12
2.	Musik tradisional	104
3.	Sanggar Seni Lukis	5
4.	Teater Tradisional	19
5.	Tari Tradisional/tayub	5
6.	Musik Modern	92
7.	Barongan	5
8.	Wayang Kulit	10

Sumber : DINBUDPAR Kabupaten Rembang, 2018

Pada tahun 2018Kelompok Kesenian Tradisional yang paling banyak adalah musik tradisional sebanyak 104 kelompok. Banyaknya Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang memang merupakan salah satu potensi daerah, namun demikian pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni tersebut

secara keseluruhan masih belum maksimal dan ketersediaan gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya masih terbatas.

Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan mulai Tahun 2013-2018 Kabupaten Rembang terdiri dari beberapa Indikator yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini

**Tabel 2.59**  
**Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jml kegiatan penyelenggaraan seni tradisi & budaya (keg)	16	16	18	9	9	10
2	Jmlklp kesnian trdisional (klp)	285	311	311	134	137	137
3	Jml cagar budaya yg dilestarikan (cagar budaya)	3	3	3	3	3	3
4	Jumlah Cagar budaya	47	47	47	47	47	107
5	Jumlah seniman (orang)	1.243	1.251	1.252	3.034	3.034	3.039
6	Jumlah jenis seni tradisi yang dilestarikan (kesenian)	18	18	18	20	20	11
7	Jumlah Museum	1	1	3	1	1	1
8	Jumlah Sanggar Budaya	2	2	2	1	1	1
9	Jml organisasi penghayat kepercayaan thd Tuhan Yang Maha Esa (organisasasi)	13	13	13	11	11	10

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Rembang tahun 2018

Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.60**  
**Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018**

Kecamatan	Tarian Modern	Tarian Klasik	Tarian Rakyat		
			Reog	Tayuban	Lain-lain
Sumber	3	3	1	1	1
Bulu	2	2	-	-	1
Gunem	-	1	3	-	-
Sale	1	1	1	-	-
Sarang	-	1	-	-	1
Sedan	-	-	-	-	-
Pamotan	1	1	-	-	-
Sulang	2	3	-	-	-
Kaliori	3	3	-	-	1
Rembang	2	5	-	-	1
Pancur	5	-	-	-	-
Kragan	1	2	-	-	-
Sluke	1	1	1	-	-
Lasem	5	3	1	-	1
<b>2018</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>2017</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	-
<b>2016</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	-
<b>2015</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	-
<b>2014</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>11</b>

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Rembang Tahun 2018

#### q. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat untuk memperoleh informasi sangat penting kedudukannya dalam rangka mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal. Perpustakaan berfungsi

antara lain, (1) menyimpan koleksi (informasi), (2) menyediakan informasi bagi masyarakat, (3) sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun non formal, (4) mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya dan (5) menjadi tempat untuk rekreasi.

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir terutama dialami pada perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat. Pada tahun 2013 jumlah perpustakaan desa sebesar 59 meningkat menjadi 65 pada tahun 2017. Jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Rembang juga mengalami peningkatan fluktuatif, yaitu pada tahun 2013 sebesar 16.563 orang pengunjung menjadi 22.120 orang pengunjung di Tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya minat baca pada masyarakat Kabupaten Rembang. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2013 sebesar 25.401 eksemplar meningkat menjadi sebesar 43.004 eksemplar pada tahun 2018.

Upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah sudah dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui berbagai promosi minat baca, penambahan fasilitas perpustakaan, dan penambahan jumlah koleksi perpustakaan. Perpustakaan daerah juga menyelenggarakan perpustakaan keliling dan pameran buku dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, namun hasilnya belum terlihat signifikan dalam meningkatkan jumlah pengunjung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan belum tinggi. Kemajuan teknologi juga semakin pesat, masyarakat semakin dimudahkan dalam mengakses internet hanya menggunakan handphone maupun tablet. Perpustakaan digital juga sudah berkembang, sehingga masyarakat tidak perlu berkunjung ke perpustakaan, mereka cukup mengakses melalui internet.

Perkembangan pelaksanaan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.61**  
**Perkembangan Pelaksanaan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jml perpustakaan						
	-Daerah (unit)	1	1	1	1	1	1
	-Kecamatan (unit)	1	1	2	2	3	14
	-Desa (unit)	59	61	61	61	65	94
	-Masyarakat (unit)	17	19	21	30	40	45
	-Keliling (unit)	1	1	1	1	1	1
2.	% gedung perpustakaan dlm kondisi baik (%)	76,92	76,83	82,35	82,53	82,85	82,85
	3.	Angka kunjungan perpustakaan/th (org)	16.563	16.672	16.819	21.813	22.120
4.	Cakupan naskah kuno yg dilstarikan (naskah)	237	270	270	275	277	278
5.	Jml Koleksi buku yg tersedia di perpusda (buku)	25.401	26.582	30.182	34.697	41.045	43,004

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rembang tahun 2018

**r. Kearsipan**

Di Kabupaten Rembang, pelaksanaan urusan kearsipan masih sangat kurang. Arsip yang ada, harus dialihmediakan supaya mempermudah pengguna dan juga berfungsi sebagai *back up* data. Dalam pengelolaan dan

penanganan arsip mempunyai tenaga arsiparis yang memiliki kompetensi hanya memiliki 2 arsiparis. sarana dan prasarana kearsipan cukup baik. Dari keseluruhan peralatan kearsipan 80% dalam kondisi baik, begitu pula jumlah gedung dan jumlah ruangan sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya

Dalam hal pengelolaan, pengelolaan arsip secara baku baru dilakukan 53,4% pada tahun 2018. Pengelolaan arsip juga dilakukan secara menyeluruh sampai pada tingkat desa/kelurahan. Terkait dengan persentase, sampai pada tahun 2018, tercatat ada 82% desa/kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku.

Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kearsipan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.62**  
**Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kearsipan Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	% arsip yang dialih mediakan (%)	9 %	10 %	15 %	20%	25%	30%
2.	Persentase arsip yang dimusnahkan (%)	2,3	2,4	2,5	30%	40%	50%
3.	Jml arsiparis yang memiliki kompetensi	2	2	2	2	2	2
4.	Jumlah pengguna arsip (PD)	32	34	34			
5.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	29,7	29,7	31,9	38,29	46,3%	53,4%
6.	Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya (%)	13	14,5	15	16	17	18
7.	Persentase Desa/Kelur yg telah mengelola arsip secara baku (%)	32,7	43,5	52	54	70	82
8.	% sarpras kearsipan dlm kondisi baik						
	Gedung (%)	60	65	70	70	80	80
	Ruangan (%)	60	65	70	70	80	90
	Peralatan (%)	45	50	60	60	70	80

Keterangan: PD = Perangkat Daerah

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018

### 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

#### a. Perikanan Budidaya

Potensi perikanan budidaya belum dimanfaatkan secara optimal baik budidaya perikanan darat maupun budidaya perikanan laut, oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari semua pihak untuk pengembangan perikanan budidaya tersebut. Perikananbudidaya merupakan salah satu potensi yang dimiliki dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Adapun potensi perikanan budidaya darat meliputi budidaya air tawar dan air payau. Namun demikian budidaya perikanan air laut secara geografis kurang memungkinkan karena berada pada Laut Jawa dan bukan merupakan wilayah kepulauan dengan air tenang. Salah satu yang menjadi komoditas unggulan budidaya air payau adalah bandeng dan udang vaname, sedangkan komoditas air tawar adalah lele, nila, wader. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Rembang mengalami perkembangan fluktuatif setiap tahunnya dari 2013-2018 dengan produksi pada tahun 2018 adalah 5.519.057 kg walaupun mengalami peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1.714.023 kg, tetapi perkembangan tahun terakhir mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi perikanan budidaya tahun 2017 yakni sebesar 6.318.110 kg.

### b. Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang, mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama kurun waktu 2013–2018, pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap sebesar 42.452.505 kg. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 65.523.652 kg, tetapi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 36.243.036 kg. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain cuaca yang tidak mendukung, yakni sering adanya ombak yang tinggi, serta kebijakan pelarangan nelayan cantrang untuk melaut, hal tersebut berpengaruh besar pada hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang.

TPI yang terdapat di Kabupaten Rembang tersebar di berbagai desa yaitu Tunggulsari, Tanjungsari, Tasikagung I, Tasikagung II, Pasar Banggi, Pangkalan, Pandangan, Karanglincak, Karanganyar, dan Sarang.

### c. Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kabupaten Rembang memiliki potensi hasil kelautan dan perikanan yang cukup besar, baik dari hasil produksi perikanan tangkap maupun budidaya. Dapat ditunjukkan dengan produksi hasil olahan ikan beberapa tahun terakhir (2013-2018) yang sangat besar yaitu pada tahun 2013 sebanyak 210.180.200 kg walaupun mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi sebanyak 193.908.500 kg, kemudian mengalami sedikit peningkatan di Tahun 2018 sebesar 193.908.600 kg.

Jumlah pedagang (bakul) ikan di Kabupaten Rembang berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang selama beberapa tahun terakhir (2013-2018) mengalami peningkatan, pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.049 orang menjadi 1.570 orang pada tahun 2017 dan 2018. Peningkatan jumlah bakul ikan ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat. Dimana konsumsi perkapita Kabupaten Rembang 29 kg/kapita/tahun, masih di bawah target nasional yaitu 35 kg per kapita per tahun. Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.63**  
**Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan**  
**di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi perikanan budidaya (kg)	1.714.023	4.017.500	7.477.000	7.190.232	6.318.110	5.519.057
2	Rata-rata pendapatan Pembudidaya ikan (Rupiah/bulan)	2.002.864	11.152.686	23.703.783	23.514.295	20.242.123	17.629.829
3	tk Cakupan binan klp pmbudidaya ikan(%)	32	32	32	33	33	34
	tk Cakupnbinaan klp pembedidaya ikan (klp)	127	134	141	142	142	146
4	tk Ckupan bntuan klp pembudidaya ikan(%)	37	38	41	42	43	44
	tk Ckupan bntuan klp pembudidaya ikan (Kelompok)	15	14	14	15	15	17
5	jml usaha pngolhn ikan (unit)	2.779	2.762	2.769	2.749	2.740	2.740
6	jml produksi hsl olahan ikan (kg)	210.180.200	210.024.000	212.035.000	203.957.400	193.908.500	193.908.600

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7.	Produksi perikanan tangkap (kg)	57.369.913	60.772.646	60.904.207	65.523.652	36.243.036	42.452.505
8.	Rata-2 pendapatan nelayan (rp/bln)	1.618.892	1.593.728	1.657.150	1.627.373	1.375.931	1.357.307
9.	Cakupan klp nelayan yg dibina (%)	62	66	68	71	71	74
	Ckupan klp nelayn yg dibina (klp)	22	23	24	25	25	26
10.	tk cakupn bantuan klp tngkp ikan (%)	62	66	68	71	71	74
	tk ckupan bantuan klp tngkp ikan (klp)	22	23	24	25	25	26
11.	Cakupan TPI dlm kondisi baik (unit)	10	10	10	10	10	10

Sumber: Dinlutkan Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan diperoleh dari nilai total perikanan budidaya (kolam dan tambak) dalam satu tahun dibagi jumlah pembudidaya ikan dibagi 12 bulan sehingga diperoleh rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Kontribusi pendapatan pembudidaya terbesar diperoleh dari budidaya udang panamae. Untuk rata-rata pendapatan nelayan diperoleh dari nilai produksi hasil tangkapan nelayan dalam satu tahun baik yang dilelang lewat TPI maupun yang dijual diluar TPI dibagi jumlah nelayan dibagi 12 bulan

#### d. Usaha Garam Rakyat

Pada Tahun 2010 Kabupaten Rembang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Minapolitan Garam. Kabupaten Rembang memiliki potensi untuk pengembangan garam rakyat sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Kaliore, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem. Adapun Perkembangan usaha garam rakyat di Kabupaten Rembang selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:.

**Tabel 2.64**  
**Perkembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2018**

No	Tahun	Luas lhn Produksi (Ha)	Jml Pekerja (Orang)		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. 000)
			Pemilik	Pekerja		
1.	2013	1.584,42	1.058	4.120	107.121,1	32.136.327,-
2.	2014	1.543,22	1.058	4.210	141.943,1	57.480.253,-
3.	2015	1.568,66	1.088	4.212	219.477,5	65.843.250,-
4.	2016	1.564,66	1.239	1.850	1.464,40	1.225.330,-
5.	2017	1.579,89	1.144	3.160	93.490,56	161.592.370,-
6.	2018	1.573,90	1.144	3.160	165.467	285.999.162,-

Sumber: Dinlutkan Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Perkembangan produksi garam cenderung fluktuatif, tetapi perkembangan di tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, peningkatan jumlah produksi di tahun 2018 dikarenakan sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca yang mengalami kemarau panjang dan penerapan teknologi pembuatan garam (bio isolator), harga garam juga mengalami peningkatan, sehingga nilai produksi di Tahun 2018 mencapai Rp. 286 M. Pemerintah harus mencari solusi produksi garam rakyat agar tidak terpengaruh musim sehingga produksi garam tetap bisa dilaksanakan walaupun pada musim hujan.

### e. Pariwisata

Kabupaten Rembang memiliki destinasi wisata yang beragam, diantaranya yaitu wisata religi, wisata budaya dan wisata alam. Jumlah obyek wisata di Kabupaten Rembang tercatat sejumlah 8 buah obyek wisata unggulan, yaitu Taman Rekreasi Pantai Kartini, Museum RA Kartini, Makam RA Kartini, Pantai Pasir Putih Wates, Pantai Karangjahe, Pantai Binangun, Pasujudan Sunan Bonang, dan Old Town Heritage.

Kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tren peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisata sebanyak 1.270.268 orang dan menjadi 1.460.808 orang pada tahun 2017 lalu kembali meningkat menjadi 1.810.369 di Tahun 2018. Tujuan wisata bagi wisatawan adalah Taman Rekreasi Pantai Kartini. Naiknya kunjungan wisata pada tahun terakhir dikarenakan semakin banyaknya obyek wisata baru yang dikelola desa dan semakin berkembang menjadi destinasi wisata di Kabupaten Rembang. Pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.459.662.385,00 Dengan pendapatan sebesar itu memberikan kontribusi sebesar 2,12% terhadap PAD tahun 2018.

Terdapat sejumlah kewenangan urusan pariwisata yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu (1) pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota ; (2) pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (3) pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota; (4) penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota; (5) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (6) penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota; dan (7) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Pengembangan kepariwisataan semakin penting karena memperluas kesempatan kerja dan pertumbuhan pusat perekonomian. Secara rinci Perkembangan Urusan pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.65**  
**Perkembangan Urusan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Total Kunjungan Wisman & Wisnus (orang)	2.345.107	993.363	727.453	1.270.268	1.460.808	1.810.369
2.	Persentase obyek wisata yg dipromosikan (%)	4	5	5	13,3	14,3	18,1
3.	Rata-rata lama menginap (hari)	1	1	1	1,28	1,21	1,3
4.	Dokumen RIPARDA kab Rembang (dokumen)	1	1	1	1	1	2
5.	Jumlah obyek wisata unggulan (obyek)	3	3	3	3	3	3
6.	jumlah restoran (unit)	25	25	29	29	29	29
7.	Jumlah hotel Berbintang & Non bintang (unit)	19	20	21	21	21	22
8.	Persentase pramuwisata bersertifikat						
	Muda (%)	4	4	4	na	na	4

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Perkembangan total kunjungan wisman dan wisnus pada tahun 2013 s/d 2018 mengalami kenaikan secara drastis karena mulai bermunculan obyek-obyek wisata desa sesuai potensi yang dimiliki dan seringnya digelar

acara-acara hiburan di obyek wisata sehingga menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Destinasi pariwisata tersebut dikelola oleh masyarakat desa, belum dikenai retribusi kecuali biaya parkir dan pengelolaannya masih bersifat tradisional.

#### f. Pertanian

Kabupaten Rembang memiliki luas 101.408 hektar, yang terdiri atas lahan sawah sebesar 28,63% atau seluas 29.021 hektar, lahan bukan sawah sebesar 51,85% atau seluas 52.561 hektar dan lahan bukan pertanian sebesar 19,52% atau seluas 19.826 hektar. Lahan sawah masih terbagi menjadi 28,12% atau seluas 8.160 Ha untuk lahan sawah irigasi dan 71,88% atau 20.861 Ha untuk sawah tadah hujan. Daya dukung pertanian di Kabupaten Rembang salah satunya adalah adanya aliran sungai. Sampai saat ini sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyon. Wilayah yang masuk pada daerah irigasi pertanian terdapat 25 daerah irigasi.

Pada tahun 2018, luas lahan pertanian yang teraliri irigasi adalah 16.935 Ha dan telah memiliki embung sejumlah 194 embung meningkat dari Tahun 2016 sebesar 189 embung. Hal ini dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Rembang disebabkan wilayah Rembang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan intensitas curah hujan rendah. Apabila dikaitkan dengan target LP2B Kabupaten Rembang seluas 37.339 Ha maka luasan sawah beririgasi tersebut baru mencapai 45,35 % dari target LP2B. Mengingat kondisi air di Kabupaten Rembang yang masih mengandalkan curah hujan maka target LP2B tersebut sangat sulit terwujud.

Hasil produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Rembang meliputi tanaman pangan utama, tanaman hortikultura, dan komoditas perkebunan utama. Tanaman pangan utama terdiri dari padi, jagung dan kedelai. Produksi tanaman utama jenis padi pada tahun 2018 sebesar 220.440 ton, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2017 sebesar 240.374ton. Produksi jagung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif, tetapi perkembangan tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2017sebesar 143.692ton menjadi sebesar 110.912 ton pada tahun 2018. Sementara dalam periode yang sama produksi kedelai juga mengalami fluktuasi, tatapi produksi kedelai di Tahun terakhir yakni tahun 2018 lebih tinggi sebesar 2.684 ton dari tahun 2017 sebesar 2.039 ton. Walaupun perkembangan terakhir meningkat, tetapi capaian produksi kedelai di tahun 2017 masih rendah dibawah capaian produksi tahun 2015 sebesar 3.544 ton, tahun 2014 sebesar 5.570 ton dan tahun 2013 sebesar 4.972.

Jenis tanaman hortikultura meliputi bawang merah, cabe besar, nanas, mangga dan durian. Produksi tanaman hortikultura didominasi oleh jenis buah mangga dengan produksi pada tahun 2018 sebesar 512.710 kwintal dan cabe yang mencapai 79.693 kwintal. Produksi hasil perkebunan terdiri dari tebu, tembakau dan kelapa dalam. Dari hasil perkebunan, produksi paling tinggi dihasilkan dari tebu yang mencapai 31.388 ton pada tahun 2018. Data perkembangan produksi pertanian/perkebunan Tahun 2013-2018 di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.66**  
**Perkembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

Tahun	Jenis Komoditas		
	Padi (ton)	Jagung (ton)	Kedelai (ton)
2018	220.444	110.912	2.684

Tahun	Jenis Komoditas		
	Padi (ton)	Jagung (ton)	Kedelai (ton)
2017	240.374	143.692	2.039
2016	152.822	119.348	1.620
2015	256.211	111.145	3.544
2014	183.002	128.389	5.570
2013	227.890	124.214	4.972

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang tahun 2018

**Tabel 2.67**  
Perkembangan Produksi Hortikultura di Kabupaten Rembang  
Tahun 2013-2018

Tahun	Jenis Komoditas		
	Bawang Merah (Kw)	Cabe (Kw)	Mangga (Kw)
2018	13.719	79.693	512.710
2017	20.654	156.061	874.177
2016	18.803	58.567	1.136.034
2015	25.378	265.172	661.802
2014	12.838	121.951	1.244.061
2013	7.658	28.138	1.036.686

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang tahun 2018

**Tabel 2.68**  
Perkembangan Produksi Perkebunan di Kabupaten Rembang  
Tahun 2013- 2018

Kecamatan	Jenis Komoditas		
	Tebu Gula Kristal (Ton)	Tembakau (Ton)	Kelapa (Ton)
2018	31.388	14.032	4.207,18
2017	28.778	6.763	3.659
2016	29.648	5.100	4.214
2015	28.816	2.804	4.039
2014	27.444	3.000	4.012
2013	29.400	2.365	4.012

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang tahun 2018

Dalam rangka meningkatkan hasil jual pertanian dan peternakan, peningkatan pemasaran produk pertanian di Kabupaten Rembang dilakukan melalui promosi produk. Tercatat selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, promosi produk pertanian/perkebunan dilakukan 3 kali setiap tahunnya, tetapi di tahun 2016, 2017 dan 2018 pelaksanaan promosi hasil pertanian dan perkebunan dilaksanakan 4 empat event (di Kabupaten Rembang sendiri dan event di kabupaten sekitar maupun di tingkat Provinsi/ Nasional. Sedangkan untuk promosi produk peternakan dilaksanakan 2 kali setiap tahun pada tahun 2017 dan 2018. Perkembangan Upaya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.69**  
Perkembangan Proosi Hasil Produksi Pertanian Kabupaten Rembang  
Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Promosi hasil produksi pertanian/ perkebunan	3	3	3	4	4	4
2	Promosi produk peternakan (event)	1	1	1	2	2	2

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Peningkatan produksi pertanian juga dilaksanakan melalui pembinaan kelompok tani dan penggunaan teknologi dan alat mesin pertanian, Alat

mesin pertanian di tahun 2016 bertambah sangat banyak sejumlah 12.331 alat, karena ada pengadaan mesin perontok padi manual, dibandingkan dengan pengadaan alat pertanian di tahun 2015 hanya sejumlah 220 alat mesin. Sedangkan di tahun terakhir (2017) pengadaan alat mesin pertanian oleh dintanpan berjumlah 724 alat.

Perkembangan Urusan Pertanian dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabelberikut:

**Tabel 2.70**  
**Perkembangan Urusan Pertanian dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Produktivitas padi (ton/ha)	5,06	4,61	6,10	4,02	4,47	5,51
2.	Bertambahnya plk usaha pertanian,perkebunan, peternakan (plk usaha)	113	115	158	560	632	648
3.	Peningkatan luas lahan pertanian yang teraliri Irigasi (Ha)	3.910	1.850	5.500	15.865	18.815	16.935
4.	Bertambahnya alat mesin pertanian tuk kelompok tani (Unit)		107	220	12.331	724	
5.	Bertambahnya jalan pertanian dalam kondisi baik (Km)	30	60	28	38,74	54,82	50,48

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2019

### 1) Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan utama Kabupaten Rembang yaitu padi sawah, jagung dan kedelai. Jumlah produksi padi sawah, jagung dan kedelai dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018) menunjukkan angka yang berfluktuasi. Sedangkan produksi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami fluktuasi namun cenderung menurun selama kurun waktu 2013-2018. Produksi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.71**  
**Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Komoditas	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kacang tanah (ton)	5.783	3.234	2.303	1.672	1.442	530
2	Kacang hijau (ton)	3.619	2.977	2.238	1.393	924	1.005
3	Ubi kayu (ton)	89.558	129.330	106.296	116.272	97.152	43.383
4	Ubi jalar (ton)	5.836	6.569	2.219	1.480	3.138	1.051

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2018

### 2) Perkebunan

Terdapat kurang lebih 20 jenis komoditi perkebunan di Kabupaten Rembang. Dari 20 jenis tersebut terdapat beberapa komoditi yang memberikan sumbangan cukup signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Rembang. Produk-produk perkebunan tersebut antara lain Tebu, Kelapa, Wijen dan Mete. Produksi hasil perkebunan yang disebutkan tadi memberikan kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.72**  
**Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Komoditas	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tebu (ton)	40.624	40.897	41.039	44.055	43.778,4	45.420
2	Kelapa (ton)	4.012	4.021	4.039	4.213,98	3.658,96	4.207,18

No	Komoditas	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Wijen (ton)	45,90	48,98	49,23	35	45	37,66
4	Mete (ton)	108,26	109,75	112,28	398,79	190,36	190,34

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2018

### 3) Peternakan

Dalam upaya pengembangan usaha peternakan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan di masing-masing daerah. Peluang pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Rembang masih terbuka lebar apabila dikaitkan dengan perkiraan (estimasi) peningkatan kebutuhan konsumsi hasil ternak seiring dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi dan taraf hidup masyarakat.

Jenis ternak di Kabupaten Rembang terdiri dari Sapi potong, Kuda, Kambing, Domba, Babi dan Kelinci. Populasi Komoditas peternakan selama lima tahun terakhir (2013-2018) mengalami fluktuasi. Jenis ternak yang mengalami kenaikan dari tahun 2013-2018 yaitu sapi potong. Kabupaten Rembang merupakan salah satu sentra produksi sapi potong di Jawa Tengah, populasi sapi potong pada tahun 2018 mencapai 134.602 ekor dan menempati urutan keempat diJateng.

Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.73**  
**Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Populasi komoditas peternakan utama (ekor)						
	- Sapi potong	117.179	120.934	128.123	130.610	132.388	134.602
	- Kambing	144.290	150.062	158.990	162.091	161.794	163.894
	- Domba	120.386	123.999	156.725	157.771	157.680	160.368
2.	produksi daging (kg)						
	- Sapi	1.189.020	1.215.270	917.007	864.415	777.031	700.990
	- Kambing	133.035	135.585	146.433	171.310	169.805	169.573
	- Domba	57.015	58.560	76.832	83.946	110.512	92.554
3.	Jumlah produksi Telur						
	- Ayam (kg)	606.656	618.780	1.468.689	552.969	990.444	1.147.650
	- Itik (kg)	894.717	914.784	855.849	910.659	893.628	893.628

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2018

#### g. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang tahun 2017 adalah sebesar 13,5%, dan merupakan kontributor terbesar ke 3, setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Rembang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013–2017, yaitu 13,85% (tahun 2013), dan 13,83% (tahun 2014 dan 2015), 13,5% (tahun 2016 dan 2017). Walaupun nilai ekspor yang semakin naik dari tahun ke tahun tapi belum mampu menaikkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang. Nilai ekspor Kabupaten Rembang selama kurun waktu lima tahun 2013–2017, yaitu sebesar \$12.205.493,30 (tahun 2013), meningkat menjadi \$\$48.785.451,29 (tahun 2017). Disamping itu ketersediaan pasar sebagai tempat untuk melakukan transaksi yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Perkembangan sektor perdagangan dilihat dari beberapa indikator sektor perdagangan menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2013–2018.

Adapun perkembangan sektor perdagangan tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.74**  
**Perkembangan Sektor Perdagangan Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jml sidang tera ulang (kss)	39	44	44	72	77	80
2	Jumlah pasar (tradisional dan modern) yang diawasi (unit)	47	52	52	60	65	68
3	%kssyg diselesaikan mllunit yan pngduan konsumen (%)	NA	2	2	4	4	5
4	Ketersediaan info pantauan hrg pokmas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Jml promosi dagang yang diikuti (kali)	1	1	1	1	1	1
6	Nilai Ekspor	\$12.205.493,30	\$18.983.364,60	\$18.983.364,60	\$37.190.000,00	\$48.785.451,29	\$62.142.857,14
7	Kntribusi sektor dagangthdp PDRB (%)	13,83%	13,68%	13,68%	13,5%	13,5%	NA
8	Jumlah kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina (kelompok)	15	16	16	17	19	20
9	Jml pasar daerah (unit)	11	12	12	12	13	15
10	Jml pasar daerah yg memenuhi kriteria pasar sehat (uni)	11	12	12	12	13	15
11	Lokasi PKL yg tertata (lokasi)	2	3	3	3	3	3

Sumber: Dinindagkop dan UKM Tahun 2018

#### **h. Perindustrian**

Sektor industri merupakan kontributor terbesar ke dua terhadap PDRB Kabupaten Rembang sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, yaitu berturut-turut sebesar 19,05%, 20,84%, 20,84%, 21,27% dan 21,8%. Kondisi ini menunjukkan semakin berperannya sektor industri terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Rembang. Semakin berperannya sektor industri ini dapat ditunjukkan pula dari capaian kinerja industri, dimana indikator-indikator yang ada cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian Kabupaten Rembang belum memiliki kawasan industri terpadu yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta.

Kabupaten Rembang memiliki industri besar yang bergerak pada sektor makanan dan minuman, Industri kimia-bahan bangunan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan dan umum. Kabupaten Rembang juga memiliki potensi industri menengah dan kecil lainnya yang berbasis pada sumberdaya alam, antara lain garam rakyat, pengolahan ikan, mebel antik, batik, bordir, kuningan, kerajinan kerang, terasi, genteng, industri pembuatan tas dan dompet, sabuk dan lain-lain.

Secara rinci perkembangan sektor industri di Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.75**  
**Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan IKM yang dibina (%)	1,5	1,1	1,1	4	5	2,53
2	Cakupan klp IKM ygmdpt bantuan (%)	100	100	100	0,15	1	2,55
3	Kontribusi sektor Industri thdp PDRB (%)	19,05	20,84	20,84	21,27	21,8	NA
4	% industri kecil & menengah thd total jml industri (besar, menengah & kecil)	99	99	99	99	98	98,20
5	Jml IKM yg dpt fasilitasi Perijinan	40	25	25	15	15	9
6	Jml IKM yg tlh mengikuti pameran promosi produk	25	12	12	15	260	280
7	Pertumbuhan IKM (%)	2,08	2,76	1	1,17	0,66	2,14
8	Jml fasilitas peningkatan kemampuan teknologi industri	18	13	13	9	10	2,14
9	Jumlah klaster industri	8	8	9	9	9	9
10	Jumlah sentra industri	35	37	37	33	40	9

*Sumber Data : Dinindagkop dan UMKM Tahun 2018*

### **i. Transmigrasi**

Transmigrasi merupakan program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (*human rights*), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya, serta hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

Banyaknya transmigran pada tahun 2011-2014 dari 10 KK (35 jiwa) menjadi 3 KK (11 jiwa). Rendahnya jumlah transmigran di Kabupaten Rembang, karena ketersediaan kuota transmigrasi yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat) sedikit. Transmigran yang berangkat semua berprofesi sebagai petani, karena di daerah tujuan transmigrasi ketrampilan yang dibutuhkan di bidang pertanian atau perkebunan.

#### **2.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan**

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tidak lagi disebutkan urusan perencanaan pembangunan dan urusan otonomi daerah. Institusi atau lembaga yang saat ini melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam kategori unsur penunjang pemerintahan. Unsur penunjang pemerintahan adalah Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

#### **a. Kepegawaian**

Peningkatan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Kebijakan

tersebut merupakan amanat Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 yang perlu dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik Pusat dan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan pemberian kesempatan studi lanjut (melalui pendidikan diploma, sarjana, pasca sarjana, pendidikan spesialis dan profesi), pendidikan non formal (melalui pelatihan teknik, kursus, semiloka dan lain-lain) serta diklat fungsional dan diklat teknis. Sedangkan responsibilitas dan akuntabilitas dengan mewujudkan budaya organisasi, peningkatan tanggung jawab dan keterbukaan terhadap masyarakat dan dunia usaha.

Aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang tahun 2015 tercatat sebanyak 8.271 orang yang terdistribusi pada 39 unit badan/dinas/lembaga termasuk di dalamnya instansi vertikal. Perincian data aparatur pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin terdiri atas laki-laki 5.034 orang (57,25%) dan perempuan sebanyak 3.759 orang (42,75%). Berdasarkan pengelompokan golongan diketahui sebagian besar Golongan III sebesar 38,54%, Golongan IV sebanyak 34,93% sa Golongan I sebesar 3,33% dan Golongan II sebesar 23,20%. Kualitas sumberdaya aparatur dapat dilihat dari rata-rata pendidikan yang ditamatkan dimana (72,8%) aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang berpendidikan perguruan tinggi, dengan perincian lulusan program diploma sebesar 25,68%; pendidikan sarjana sebesar 45,55% dan sebanyak 1,57% telah menyelesaikan pendidikan magister (S-2). Sementara itu, aparat pemerintah yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 27,2% saja. Dengan demikian maka diharapkan pendidikan aparatur akan mempengaruhi kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat serta kalangan dunia usaha. Upaya peningkatan pelayanan publik secara akuntabel dan responsif merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selengkapnya Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.76**  
**Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013–2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>						
1	Jml Apratur yg mengikuti Diklat Pim II	3	1	2	8	-	-
2	Jml Aparatur yg mengikuti Diklat Pim III	3	1	-	11	8	7
3	Jml Aparatur yg mengikuti Diklat Pim IV	40	40	40	1	4	2
4	Jml PNS mengikuti Diklat Teknis tiaph	100	82	192	264	129	93
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>						
1	% PNS yg kenaikan pangkatnya tepat waktu	99.38%	99.56%	94.70%	99%	99%	100%
2	jml PNS Pensiun setiap tahun	281	136	136	-	-	304
3	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	9.09	9.09	75	14	3	14

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018

Gambaran kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang dapat dilihat dari pelaksanaan program-program peningkatan dan

pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, adalah sebagai berikut:

- 1) Program pendidikan kedinasan;
- 2) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- 3) Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Salah satu upaya peningkatan kinerja aparatur adalah dengan melalui berbagai diklat. Kegiatan Diklat Aparatur rata-rata mencapai 336 orang aparatur yang telah memenuhi kualifikasi dan prosedur pengajuan. Diklat aparatur terbagi menjadi diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Diklat dalam jabatan terbagi lagi menjadi diklat struktural, diklat teknis dan fungsional. Naik turunnya jumlah peserta diklat dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia dan penawaran diklat dari instansi yang lebih tinggi pusat maupun provinsi.

Selain menyelenggarakan diklat, dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai BKD bertugas untuk menyusun regulasi standar kompetensi pegawai dan manajemen talenta. Standar Kompetensi pegawai meliputi penyusunan regulasi standar kompetensi pegawai, standar kompetensi jabatan dan standar kompetensi managerial. Manajemen talenta meliputi Assessment Pegawai, pemetaan assessment pejabat Eselon II dan III dan tindak lanjut assessment. Kedua hal tersebut akan diupayakan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang.

#### **b. Perencanaan Pembangunan Daerah**

Berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, turut berimplikasi pada perubahan kaidah penyusunan rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan batas-batas kewenangan pemerintah daerah yang diatur di dalamnya. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk perencanaan jangka panjang, RPJMD untuk perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka tahunan. Dalam rangka tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang baik perlu ditunjang dengan kelengkapan data yang obyektif, akurat dan komprehensif, didukung peningkatan sumberdaya aparatur perencana di setiap Perangkat Daerah yang semakin baik serta mekanisme perencanaan yang sesuai kaidah. Demikian pula penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus bersifat terpadu dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten sekitar, kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah serta arahan kebijakan Pemerintah Pusat.

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang telah diupayakan terpadu dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai perwujudan komitmen daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar terdapat sinergitas perencanaan pembangunan secara nasional. Dokumen perencanaan di Kabupaten Rembang secara teknis disusun berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

Mengacu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka pemerintah Kabupaten Rembang wajib menyusun dokumen perencanaan, terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rembang wajib mengakomodasi

kebijakan-kebijakan strategis dalam rencana pembangunan daerah seperti: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); RAD Pengurangan Resiko Bencana serta berbagai kebijakan lain yang penting dan relevan dalam pembangunan daerah.

Terdapat empat indikator kunci yang berpengaruh pada keberhasilan perkembangan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah, diantaranya meliputi: 1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025; 2) tersedianya Perencanaan RPJMD 2016-2021; 3) tersedianya dokumen RKPD tiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan 4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada setiap tahun anggaran untuk mengetahui capaian kinerja per tahun. Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut telah diupayakan dengan baik dan didukung oleh sistem informasi perencanaan yang akan terus disempurnakan implementasinya.

Secara lengkap Perkembangan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.77**  
**Perkembangan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013–2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dg Perda	1	1	1	1	1	1
b) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dg Perda	1	1	1	1	1	1
c) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dg Perbup	1	1	1	1	1	1
d) %Penjabaran Program RPJMD dlm RKPD	75	78	80	78	88	87

Sumber: Bappeda Kabupaten Rembang, 2018

### c. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (Litbang) memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun corporate. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, perlu adanya mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), serta pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan (Litbang) yang telah dilaksanakan diantaranya adalah Perencanaan Kelitbangan, Jurnal Penelitian, Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan, Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Rembang, Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Kabupaten Inovasi dan Daya Saing Daerah, serta Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat. Hal-hal yang menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah. Kinerja penelitian dan pengembangan ditunjukkan dengan pemanfaatan hasil Litbang dan Inovasi dalam perencanaan, kebijakan, pembangunan maupun peningkatan perekonomian masyarakat.

### d. Pengawasan

Terbitnya Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan birokrasi bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik Pusat dan Daerah. Oleh karena itu semakin strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dalam koridor reformasi birokrasi.

Profesionalisme aparatur pemerintah daerah diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan

akuntabilitas dalam pelayanan publik serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Upaya peningkatan akuntabilitas dan responsibilitas kepada masyarakat sangat tergantung pada hasil pengawasan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah. Disamping itu, Inspektorat secara sinergis menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Provinsi Jawa Tengah agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semakin baik hasilnya.

Sebagai gambaran kinerja Inspektorat Kabupaten Rembang telah melaksanakan dua (2) program yang terkait dengan sistem pengawasan internal dan peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan, yaitu:

- 1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- 2) Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.78**  
**Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2013–2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jml Laporan hsl Pemeriksaan (LHP) Reguler	240	240	100	144	240	136
2.	Jumlah LHP Khusus/Kasus	37	93	63	141	101	97
3.	Jml laphsl tindak lanjut temuan hsl pengawasan yg telah disusun	240	240	160	160	180	192
4.	% Rekomendasi Hsl Pemeriksaan ygsdh selesai ditindaklanjuti	82	81,3	80	92	83,9	52,9
5.	Lap hsl Monitoring Penyelenggaraan Urusan pemdes	96	96	84	13	-	-
6.	Laporan Hasil Reviu LKPD	1	1	1	1	1	1
7.	Laporan Reviu LKJIP Kabupaten	1	1	1	1	1	1
8.	Laporan Evaluasi LKJIP PD	12	12	24	-	16	16
9.	Koordinasi Pengawasan Secara komprehensif di Kabupaten Rembang	1	1	1	1	1	1
10.	Jml tenaga pemeriksa yg menguasai teknik was&penilaian akuntabilitas kinerja (sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) & Pengawas Penyeleng Urusan Pem di Daerah (P2UPD)):						
	a. JFA	4	-	8	7	7	8
	b. P2UPD	6	-	6	6	5	5
11.	Level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Rembang	1	1	1	1	2	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2018

#### e. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan good governance telah disusun Road Map.Reformasi Birokrasi 2015-2019 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih

baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang mencakup beberapa area perubahan yaitu:

- 1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.
- 2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Rembang, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
- 4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
- 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 7) Penataan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan tabelberikut ini.

**Tabel 2.79**  
**Nilai AKIP Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2016-2018**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018
1	Perencanaan Kinerja	30	18,92	19,59	19,91
2	Pengukuran Kinerja	25	10,02	11,47	14,11
3	Pelaporan Kinerja	15	10,26	10,15	10,20
4	Evaluasi Kinerja	10	4,78	5,09	5,29
5	Capaian Kinerja	20	8,50	8,75	9,12
	Nilai AKIP	100	52,49	55,04	58,64
			CC	CC	CC

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2018

#### **f. Sekretariat DPRD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang yang berasal dari 7 partai politik, dengan perincian berdasarkan jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut: Fraksi PPP sebanyak 10 anggota; Fraksi Partai Demokrat sebanyak 8 anggota; Fraksi PDIP dan Nasdem sebanyak 8 anggota; Fraksi PKB sebanyak 6 anggota; Fraksi Gerindra sebanyak 5 anggota; Fraksi Karya Sejahtera sebanyak 4 anggota dan Fraksi Harapan sebanyak 4 anggota.

Dalam rangka menunjang tugas-tugas anggota DPRD Kabupaten Rembang maka Sekretariat DPRD memberikan pelayanan dan dukungan pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD, terutama fasilitasi penyelenggaraan rapat dewan, kunjungan kerja, reses dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota dewan. Adapun program-program yang dilaksanakan pada tahun 2010–2015, adalah sebagai berikut:

- a. Program penyusunan peraturan perundangan;
- b. Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD;
- c. Program fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD;
- d. Program konsultasi publik.

Perkembangan Pelaksanaan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.80**  
**Perkembangan Pelaksanaan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2018**

No	Program / Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Perda yang ditetapkan	9	9	8	9	16	9
2	Perda yang disetujui DPRD	9	9	8	9	16	9
3	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	4	3	16	11	16	9
4	% Capaian Prolegda (%)	100	100	100	100	100	100
5	Terselenggaranya fungsi Pengawasan DPRD ( kali )	30	30	30	57	120	110
6	Tersedianya Tenaga Ahli untuk DPRD	7	7	7	7	8	9
7	Terselenggaranya rapat- rapat DPRD diluar pembahasan perda ( kali )	86	64	100	153	123	105
8	Terselenggaranya pendalaman tugas, orientasi dan pengembangan SDM ( kali )	9	9	8	7	8	6

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019

## 2.4. Aspek daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional.

### 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

#### a. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan atau *Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan suatu ukuran untuk menilai daya beli relatif suatu wilayah dengan wilayah lainnya dengan asumsi barang-barang dan jasa-jasa di kedua wilayah tersebut berbiaya sama. Dalam penghitungan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan digunakan teknik penyesuaian terhadap pengeluaran perkapita. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

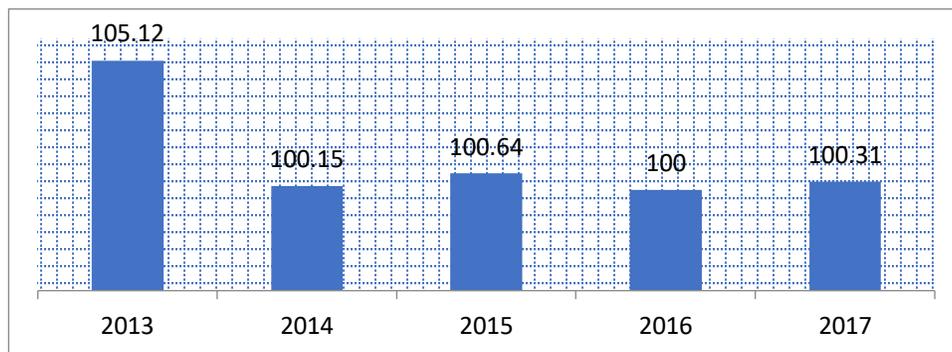
**Tabel 2.81**  
**Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2013-2017**

Indikator	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Rembang	9.013	9.122	9.453	9.736	10.191

Sumber: BPS 2018

### b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari tahun 2016, NTP rata-rata sebesar 100 menjadi 101,31 pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh naik-turunnya indeks yang diterima petani (indeks harga hasil produksi pertanian) sedangkan indeks yang dibayar petani (indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian) juga mengalami hal yang sama. NTP Kabupaten Rembang tahun 2013-2017 secara lengkap dijelaskan pada grafik dibawah ini:



**Grafik 2.21**

**Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017**

*Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2018*

## 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

### a. Perhubungan

#### 1) Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 hektar dan terbagi ke dalam 14 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 642,75 km ruas jalan kabupaten dan 238.600 km jalan poros desa. Jumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 pada tahun 2018 sebanyak 181.371 unit. Perkembangan jumlah kendaraan di kabupaten Rembang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.82**

**Jumlah Kendaraan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018**

No	Jenis Kendaraan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mobil Penumpang	5.787	6.703	7.615	8.642	9.819
2	Bus	988	1.139	1.213	1.238	1.387
3	Mobil Barang	2.741	2.988	3.107	3.454	3.592
4	Sepeda Motor	115.472	123.502	148.877	157.145	166.573

*Sumber: SIPD, 2018*

#### 2) Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa Tengah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Tersedia 7 terminal tipe C di wilayah Kabupaten Rembang yang melayani transportasi baik dalam kota maupun ke luar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah orang yang dapat diangkut sebanyak 492.267 orang, sedangkan jumlah barang yang terangkut pada tahun 2018 sebanyak 265.864 ton.

Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas, Dinhubkominfo Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Satlantas Polres Rembang secara rutin memberikan penyuluhan dan pembinaan berlalu lintas

yang berkeselamatan kepada pemilik, pengemudi kendaraan angkutan umum barang maupun orang.

**b. Penataan Ruang****1) Ketaatan Terhadap RTRW**

Saat ini Kabupaten Rembang telah memiliki payung hukum terkait dengan tata ruang dan rencana pengembangannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. Sejak terbitnya Perda RTRW maka seluruh perijinan pemanfaatan ruang harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), namun demikian sampai saat ini belum tersedia data terkait persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di masa mendatang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2016 dilaksanakan evaluasi Perda RTRW guna mengevaluasi kesesuaian dengan kebijakan seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah yang begitu cepat. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang pada tahun 2017. Selanjutnya sebagai persyaratan proses legislasi Revisi RTRW Kabupaten Rembang disusun dokumen naskah akademis dan kajian lingkungan hidup strategis perubahan RTRW Kabupaten Rembang.

**2) Luas Wilayah Industri**

Luas kawasan industri di Kabupaten Rembang diwujudkan dalam pola ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rembang. Kawasan peruntukan industri dalam RTRW terbagi menjadi tiga yaitu kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil. Kawasan peruntukan industri besar seluas 869 hektar ke depan diarahkan untuk dikelola menjadi kawasan industri. Adapun rencana peruntukan kawasan industri besar tersebut terletak di Kecamatan Rembang, Sluke dan Gunem. Sementara itu kawasan peruntukan industri menengah terletak di sepanjang koridor pantura yaitu Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang.

**3) Luas Wilayah Kebanjiran**

Kondisi Kabupaten Rembang yang berada di kawasan dataran rendah dan merupakan hilir dari aliran air maka banjir merupakan permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Rembang. Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir memang belum tersedia. Berdasarkan Pasal 18 Perda Nomor.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Kragan, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Sumber.

**4) Luas Wilayah Kekeringan**

Selain banjir, Kabupaten Rembang juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah daerah tengah misalnya Gunem, Pancur, Kaliori, Rembang, Sarang, Kragan, Lasem. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan.

**5) Luas Wilayah Perkotaan**

Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama di luar fungsi pertanian. Fungsi tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa, maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Oleh karena itu, permukiman yang dikembangkan mengacu pada fungsi yang mendukung aktivitas non pertanian yang memiliki karakteristik pola perkembangan

menyebarkan, kompleksitas dan mobilitas tinggi. Di Kabupaten Rembang berdasarkan lampiran permukiman Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, luas kawasan permukiman perkotaan sebesar 3.214 hektar yang tersebar di ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan.

### c. Pariwisata

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa ruang lingkup usaha pariwisata meliputi 13 usaha yang terdiri dari Usaha Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata, Jasa Transportasi Wisata, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Makanan dan Minuman, Penyediaan Akomodasi, Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Penyelenggaraan MICE, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Konsultan Pariwisata, Jasa Pramuwisata, Wisata Tirta, dan Usaha Spa.

Usaha-usaha pariwisata yang ada belum semuanya terdata dan memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), sedang yang sudah terdata masing-masing daya tarik wisata alam/ budaya/ buatan ada 38 buah, Jasa Transportasi Wisata 7 buah, Jasa Perjalanan Wisata 7 buah, Jasa Makanan dan Minuman 34 buah, Jasa Penyediaan Akomodasi ada 18 buah (hanya hotel bintang dan non bintang, sedangkan homestay Desa Wisata dan Bumu Perkemahan belum terdata), Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi ada 2 buah, Jasa Informasi Pariwisata 2 buah, Jasa Pramuwisata 4 orang, Wisata Tirta 11 buah, Usaha Spa 3 buah.

#### 1) Jumlah Rumah Makan dan Tenaga Kerja

Jumlah rumah makan di Kabupaten Rembang dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Tahun 2014 rumah makan di Kabupaten Rembang berjumlah 23 buah, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu berjumlah 31 buah tenaga kerja di rumah makan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 230 orang.

#### 2) Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah hotel bintang dan non bintang ada 21 buah. Terdiri dari 1 hotel bintang dan 20 hotel non bintang dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan 167 orang. Hotel tersebut terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Lasem.

### d. Utilitas Publik

Sejalan dengan perwujudan struktur ruang RTRWK maka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Rembang seyogyanya terus melanjutkan mendorong peningkatan layanan air bersih dan irigasi, program pembangunan sungai terpadu, pembangunan embung-embung, serta peningkatan prasarana sarana drainase dan air limbah. Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.83**  
**Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018**

No.	Item	2014	2015	2016	2017	2018
1	Air minum %	70	80,34	84,27	84,68	85,66
2	Sanitasi (dasar) %	71,25	77,42	79,98	80,64	100,00*)
3	Persampahan %	20,4	20,7	21,2	21,9	14,75**)

\*) Capaian sanitasi dasar berdasarkan cakupan desa ODF versi STBM

\*\*) Capaian sampah di tahun 2018 dihitung dari timbulan sampah seluruh kabupaten baik perdesan maupun perkotaan. Tahun sebelumnya hanya dihitung dari timbulan sampah perkotaan.

Sumber: DPKP Tahun 2018

## e. Fokus Iklim Investasi

### 1) Angka Kriminalitas

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan cukup baik, meskipun demikian data Polres Rembang tahun 2018 masih mencatat laporan kasus pidana sejumlah 96 kasus. Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Rasio penanganan kasus tindak kriminal mencapai angka 90,6 Hal ini menunjukkan kesigapan dan komitmen seluruh pihak dalam penanganan tindak kriminal guna mewujudkan kondusivitas dan keamanan daerah. Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.84**  
**Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana**  
**di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Jumlah Tindak Kriminal		
		Kasus	Tertangani	Rasio
1	2014	52	32	61,5
2	2015	84	81	96,4
3	2016	21	19	90,4
4	2017	96	87	90,6
5	2018	57	57	100

Sumber: Polres Rembang 2018(data diolah)

Kemudian dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diupayakan melalui pembangunan di bidang politik, keamanan dan ketentraman lingkungan. Dalam hal Keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Rembang relatif stabil dan terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang.

### 2) Kemudahan Perijinan

Pelayanan perijinan di Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kabupaten Rembang. Pelayanan perijinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Rembang meliputi semua ijin berusaha/investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 atau sesuai yang ada dalam Sistem OSS, serta fasilitasi pelayanan diluar OSS seperti fasilitasi ijin pertambangan, ijin trayek, ijin penyelenggaraan reklame, ijin penyelenggaraan satuan pendidikan usia dini, ijin alih fungsi lahan, dan lain-lain, dengan jumlah total pelayanan sekitar <150 jenis pelayanan perijinan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan dengan syarat apabila persyaratan telah lengkap, mulai dari 5 s.d. 10 hari. Adapun jenis fasilitasi pelayanan perijinan di Kabupaten Rembang berdasarkan sektor usaha, diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.85**  
**Jenis Fasilitasi Pelayanan Perijinan Berdasarkan Sektor Usaha**  
**di Kabupaten Rembang**

No	Jenis Fasilitasi Pelayanan Perijinan
1.	Perijinan Berusaha Sektor Pertanian
2.	Perijinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup
3.	Perijinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum

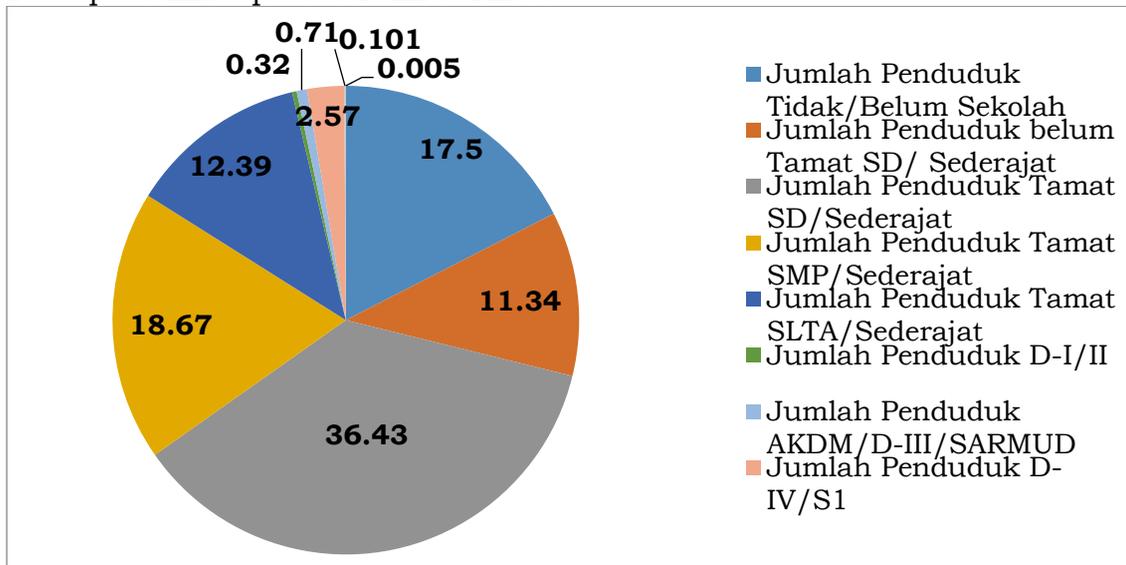
No	Jenis Fasilitas Pelayanan Perijinan
4.	Perijinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
5.	Perijinan Berusaha Sektor Kesehatan
6.	Perijinan Berusaha Sektor Obat dan Makanan
7.	Perijinan Berusaha Sektor Perindustrian
8.	Perijinan Berusaha Sektor Perdagangan
9.	Perijinan Berusaha Sektor Perhubungan
10.	Perijinan Berusaha Sektor Komunikasi dan Informatika
11.	Perijinan Berusaha Sektor Keuangan
12.	Perijinan Berusaha Sektor Pariwisata
13.	Perijinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber: DPM PTSP NAKER Kabupaten Rembang Tahun 2019

**f. Fokus Sumber Daya Manusia**

**1) Persentase Penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi**

Grafik Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada Grafik berikut :



**Grafik 2.22**  
**Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2018**

Sumber Dindukcapil Kab.Rembang Tahun 2018

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Rembang berpendidikan tamat SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah penduduk tidak tamat SD, berikutnya adalah kelompok penduduk tamat SLTP sederajat, kelompok penduduk tamat SLTA sederajat serta yang terakhir kelompok penduduk taatan Perguruan Tinggi mulai jenjang diploma hingga starta 3.

**2) Rasio ketergantungan**

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Rembang tahun 2017 sebanyak 627.714, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 312.868 jiwa dan perempuan sebanyak 314.846 jiwa . Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 440.331 . sedangkan umur yang tidak produktif yaitu pada usia 0-14 th sebesar 140.302 jiwa dan pada usia 65+ sebesar 47.081 jiwa.

Apabila di dibandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 42,56 artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 4,56 orang usia tidak produktif,

dengan kata lain setiap 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh 2 orang usia produktif. Banyaknya penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan proporsi hampir dua kali lipat disebut dengan bonus demografi.

#### **2.4.3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Iptek, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah atau SIDA, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Rembang terus meningkatkan inovasi daerah yang bersifat pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah terutama diantaranya inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Inovasi daerah tersebut meliputi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah Lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sistem Inovasi Daerah atau SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Sedangkan inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut Kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Pengembangan daerah/kabupaten inovatif merupakan suatu model pendekatan yang perlu didorong untuk mempercepat dan meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah.

#### **2.4.4. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah merumuskan kebijakan inovasi dengan mengacu kepada peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang bertujuan membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan perbaikan kualitas pelayanan kerja aparatur, sehingga proses yang dilakukan menjadi lebih efisien dan berkualitas.

Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari 32 sistem yang eksisting sampai akhir 2018, yang terdiri dari 15 SIM Tata Kelola Pemerintahan dan 10 SIM Pelayanan Publik.

**Tabel 2.86**  
**Kondisi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2018**

No.	Inovasi	Instansi
1.	JDIH	Bag. Hukum
2.	Produk Hukum	Bag. Hukum
3.	SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Daerah)	Dinarpus
4.	E-Retribusi Pasar	Dinindagkop&UKM
5.	Sistem Penataan naskah dinas & arsip sekretariat DPRD	Setwan
6.	SIP@NDU (Sistem Informasi Perencanaan Terpadu)	Bappeda
7.	E-Budgeting	Bappeda
8.	E-presensi	BKD
9.	SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	BPPKAD
10.	SIMKEUDA	BPPKAD
11.	SIMDABMD	BPPKAD
12.	SIMGAJI	BPPKAD
13.	MAPATDA	BPPKAD
14.	SISMIOP	BPPKAD
15.	MAPINFO	BPPKAD

Sumber : BAPPEDA dan Dinas terkait, 2018

#### 2.4.5. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemerintah wajib menyediakan pelayanan publik yang mumpuni bagi warganya. Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan inovasi pelayanan publik yang bertujuan memudahkan pelayanan umum yang cepat dan efisien. Selain untuk meningkatkan efisiensi, pelayanan publik tersebut dimaksudkan mencapai tujuan seperti meningkatkan daya saing dan berorientasi pada kepentingan umum.

Inovasi pelayanan publik juga dilakukan pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka membantu masyarakat dan pengembangan potensi-potensi khas yang daerah dan masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki website sendiri, masyarakat dapat melihat langsung hasil pembangunan Kabupaten Rembang melalui website Kabupaten Rembang [rembangkab.go.id](http://rembangkab.go.id).

**Tabel 2.87**  
**Kondisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2018**

No.	Inovasi	Instansi/Keterangan
1.	SI LINCAH (Sistem Layanan Informasi Nyaman Cepat Akuntabel dan Hemat)	Dinkominfo, SIM Layanan informasi keterbukaan publik yang lebih cepat.
2.	ARJUNO (Aplikasi Rujukan ke RSUD dr. R. Soetrasno)	RSUD, SIM layanan rujukan pasien dari puskesmas ke RSUD dr. R. Soetrasno.
3.	E-KIR (Elektronik KIR)	Dinhub, SIM layanan KIR kendaraan.
4.	BKO (Bursa Kerja Online) Job Fair	DPMPTSP&Naker, SIM layanan pencari kerja ke perusahaan.
5.	Enjoy Rembang	Dinbudpar, SIM-aplikasi layanan informasi tentang promosi pariwisata Kabupaten Rembang.
6.	Kresno (sistem nomor antrian online)	RSUD, SIM layanan antrian pasien secara online di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.
7.	Pulang Gratis	RSUD, pelayanan antar pasien pulang gratis.
8.	<a href="http://rembangkab.go.id">rembangkab.go.id</a>	Dinkominfo, SIM-Website Kabupaten Rembang
9.	Website perizinan	DPMPTSPNaker, SIM SIPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik) Pelayanan Perizinan Pusat yg terintegrasi dg Daerah, ygdpt dilakukan pendaftarannya scr online terdiri dr 100 jenis perizinan & fasilitas yan lainnya.
10.	KIARA (Klinik Pelayanan Perencanaan)	Bappeda, pelayanan konsultasi perencanaan
11.	SIM Litbang	Bappeda, SIM Kelitbangan yang terintegrasi dengan Kesbangpolinmas dan DPMPTSPNaker
12.	SIM Ketenagakerjaan	DPMPTSPNaker, SIM Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan Dindukcapil dan Kecamatan.

No.	Inovasi	Instansi/Keterangan
13.	BAPER (Mobil Ambulan Pencari Riak)	UPT Puskesmas Pamotan, upaya pemberantasan penyakit TBC, dimana salah satu upaya nya adalah dengan memeriksa riak warga yang sakit batuk.
14.	GREMET (Program Gerakan Ngrumat Wong Meteng)	UPT Puskesmas Pancur, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memenuhi hak sehingga ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terpadu sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.
15.	KELONI (Cekel Lan Openi)	UPT Puskesmas Gunem, menurunkan angka kematian Ibu dan bayi di wilayah kecamatan Gunem sebagai wujud dari Gerakan Sayang Ibu dan anak.
16.	Ante Natal Care (ANC) Mobile	UPT Puskesmas Kaliori, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan kemudahan mengakses fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standart.

Sumber : BAPPEDA dan Dinas terkait, 2019

#### 2.4.6. Inovasi Daerah Lainnya

Inovasi Daerah Lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang dimiliki Kabupaten Rembang adalah inovasi yang bersifat eksternal. Dalam rangka menampung, mengolah dan mempublikasikan kepada publik sehingga hasilnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Inovasi ini berisikan hasil karya pembangunan Kabupaten Rembang baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten maupun swasta. Berikut kondisi perkembangan Inovasi yang telah dicapai sampai akhir tahun 2018 seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.88**  
**Kondisi Inovasi Daerah Lainnya Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2018**

No.	Inovasi	Instansi/Keterangan
1.	KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)	Bappeda, diselenggarakan dlm rangka menggali dan melakukan pembinaan terhadap produk krenova yg berbasis ilmu pengetahuan & teknologi masyarakat
2.	BID (Bursa Inovasi Desa)	Dinpermades, diselenggarakan dlm rangka menggali potensi inovasi pd tiap desa di Kabupaten Rembang
3.	Kamalia Merekaah (Koin Amal Lansia Bagi Mereka Menjadi Berkah)	Bappeda, kegiatan pengumpulan koin tuk memberikan santunan pd lansia terlantar, dlm rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan
4.	Istri Mantab (Industri Rumahan Mantab)	Bappeda dan DinsosPPKB, kegiatan untuk menggali dan menumbuhkembangkan industri rumahan rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan
5.	Desa Inovasi	Bappeda & Dinpermades, kegiatan pembinaan & pemberian penghargaan terhadap desa yg telah melakukan inovasi
6.	Klinik TTG (Teknologi Tepat Guna)	Dinpermades dan masyarakat, forum konsultasi dan pembinaan inovasi masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
7.	Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi)	Dinpermades dan masyarakat, lembaga masyg menangani inovasi-inovasi yg ada di masyarakat berbasis TTG.
8.	Microlite (menciptakan insan yang cakap dan ramah mengolah literasi)	Dinarpus, meningkatkan kunjungan perpustakaan dengan memberikan pelatihan.

Sumber : BAPPEDA dan Dinas terkait, 2019

#### 2.4.7. Daya Dukung Inovasi Daerah

Daya dukung inovasi Kabupaten Rembang tidak hanya berasal dari pemerintahan daerah. Para stakeholder dituntut meningkatkan kapasitasnya sebagai bagian dari pelayanan publik. Salah satunya adalah adanya perguruan tinggi yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya secara berkelanjutan.

**Tabel 2.89**  
**Daya Dukung Inovasi Kabupaten Rembang Tahun 2018**

No.	Daya Dukung Inovasi - Perguruan Tinggi	Keterangan
1.	STIE YPPI	Menginduk LPPM, KCU (Kuliah Kerja Usaha)
2.	STAI Al ANWAR	Menginduk LPPM
3.	STAI Al Akmal	Menginduk LPPM
4.	AKSI	Akademi Komunitas Semen Indonesia merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi diploma dua di Kabupaten Rembang yang dimiliki PT. Semen Indonesia Tbk. yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyalurkan potensi dan menggali pengalaman di BUMN
5.	PSDKU UNDIP	Menginduk LPPM
6.	DRD (Dewan Riset Daerah)	Sekretariat di Bappeda Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Bappeda bekerja sama dengan Perguruan Tinggi membentuk DRD Kabupaten Rembang yang merupakan Dewan Riset sebagai lembaga non struktural yang beranggotakan para Dosen perguruan Tinggi yang mempunyai tugas memberikan masukan dan arah kebijakan serta mendukung Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (P3IPTEK)
7.	ARD (Agenda Riset Daerah)	ARD merupakan produk yang dihasilkan DRD Kabupaten Rembang berupa agenda Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan dan disusun dalam dokumen sebagai acuan dan masukan yang dipakai Kepala Daerah dalam arah kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. ARD disusun berdasarkan masa bakti/periode DRD
8.	Jurnal Litbang Rembang (JLR)	JLR adalah media informasi penelitian dan pengembangan yang dikelola oleh Bappeda Kabupaten Rembang bersama DRD, sumber JLR dari masyarakat, perguruan tinggi, lembaga serta pemerintah dengan lokus litbang wilayah Kabupaten Rembang. JLR bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas, inovasi, kemajuan pembangunan berkelanjutan berbagai bidang serta peningkatan daya saing daerah Kabuapten Rembang
9.	BKK (Bursa Kerja Khusus) SMK	BKK-SMK merupakan salah satu unit yang membantu Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dan menempatkan lulusan SMK yang berprestasi di Perusahaan-perusahaan
10.	RCCN (Rembang Creative Community Network)	Sebuah komunitas untuk mewadai penggiat ekonomi kreatif di Kabupaten Rembang

Sumber : Kabupaten Rembang diolah, Tahun 2019

## 2.5. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018

### 2.5.1. Capaian target Kinerja SPM

Jika dievaluasi dari pencapaian terhadap standar pelayanan minimal pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.90**  
**Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2018**

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	Satuan	Capai Capaian	
					SPM	(%)
1.	Tersedia satuan pendidikan dlm jarak yg terjangkau dg berjalan kaki yimaksimal 3 km ntk SD/MI & 6 km untSMP/MTsdari klpkpermukimanpermanen di daerah terpencil	SD	374	Permukiman	374	100%
		MI	40	Pemukiman	40	100%
		SMP	54	Permukiman	54	100%
		MTs	41	Pemukiman	41	100%
2.	Jmlpsrtdidik dlmtiaprombel utk SD/MI tdklebih 32 org&unt SMP/ MTstdklebih 36 orgutk tiap klsyg dilengkapi dg meja & kursiyg cukup tukpsrt didik & guru,papan tulis.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
3.	tiap SMP & MTs tersedia ruangan labIPA yglengkapdg meja kursi yg cukup utk 36 siswa & minimal 1 set peralatan praktek IPA utk demonstrasi & eksperimen pst didik	SMP	54	Sekolah	44	81,49%
		MTs	41	Sekolah	23	58,98%
4.	setiap SD/MI & SMP/MTs tersedia 1 ruang guru, kepala sekolah & staf kependidikan lainnya; & disetiap SMP& MTs tersedia ruang kepala sekolah ygterpisah dari ruang guru.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
5.	setiap SD & MI tersedia 1 orgguru utk setiap 32 psrt didik & 6 org guru utk setiap satuanpendidikan &utk daerah khusus 4oranggurusetiapsatuanpendidikan.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
6.	setiap SMP & MTs tersedia 1orang guru utk setiap mata pelajaran, &utk setiap rumpun mata pelajaran.	SMP	54	Sekolah	53	98,15%
		MTs	41	Sekolah	40	97,56%
7.	setiap SD & MI tersedia 2 orgguru yg memenuhi kualifikasi akademikS1 atau D-IV & 2 (dua) orang guru yangtelah memiliki sertifikat pendidik.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
8.	setiap SMP/MTs tersedia guru dg kualifikasi akademik S-1 atau D-IVsebanyak 70% & separuh diantaranya(35% dari keseluruhan guru) telah memilikisertifikat pendidik,utk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% & 20%.	SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
9.	setiap SMP & MTs tersedia gurudg kualifikasi akademik S-1 atau D-IV& telah memiliki sertifikat pendidikmasing-masing 1org untuk matapelajaranMatematika,IPA, bahasa Indonesia & Bahasa Inggris.	SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
10.	setiap kab/Kota semua kepala SD& MI berkualifikasi akademik S-1/D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
11.	setiapkab/Kotasemua kepalaSMP & MTs berkualifikasi akademik S-1/ D-IV & telah memiliki sertifikatpendidik.	SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
12.	setiap kab/Kota semua pengawas sekolah & madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV & telah memilikisertifikat pendidik.		1	Kab/Kota	1	100%
13.	Pemkab/Kotamemilikirencana & melaksanakan kegiatan untukmembantusatuanpendidikandlmme ngembangkan kurikulum& proses		1	Kab/Kota	1	100%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	Satuan	Capai Capaian	
					SPM	(%)
	pembelajaran yg efektif.					
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1x/bulan & setiap kunjungan dilakukan slm 3 jam utk melakukan supervisi & pembinaan.	SD	374	Sekolah	369	98,66%
		MI	40	Sekolah	36	90%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	30	73,17%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Dari hasil perhitungan pencapaian pelayanan pendidikan dasar pada tingkat kabupaten, secara umum hampir semua indikator standar pelayanan minimal tercapai 100%, hanya pada SMP dan MTs ketersediaan ruangan laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 siswadan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik jumlahnya masih perlu ditingkatkan, karena capaiannya masih 58,98%.

**Tabel 2.91**  
**Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2018**

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	Satuan	Capai Capaian	
					SPM	(%)
1.	Setiap SD & MI menyediakan buku teks yg sudah ditetapkan kelayakan oleh pemkab mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA, IPS & Pkn dg perbandingan 1 (satu) set utk setiap peserta didik.	SD	374	Sekolah	365	97,33%
		MI	40	Sekolah	38	95%
2.	Setiap SMP & MTs menyediakan buku teks yg sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemkab mencakup semua mata pljrn dg perbandingan 1 set setiap prt didik.	SMP	54	Sekolah	50	92,59%
		MTs	41	Sekolah	34	87,18%
3.	Setiap SD & MI menyediakan 1 set peraga IPA & bahan yg terdiri dr model kerangkamanusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), cth peralatan optik, KIT IPA utk eksperimen dasar & poster/carta IPA	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
4.	Setiap SD dan MI memiliki 100 judul bukupengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul bukupengayaan dan 20 buku referensi.	SD	374	Sekolah	352	94,12%
		MI	40	Sekolah	29	72,5%
		SMP	54	Sekolah	47	87,04%
		MTs	41	Sekolah	36	87,8%
5.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
6.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut: Kelas 1- 2: 18 jam per minggu Kelas 3: 24 jam per minggu Kelas 4 - 6: 27 jam per minggu Kelas 7 - 9: 27 jam per minggu	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	Satuan	Capai Capaian	
					SPM	(%)
7.	Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
8.	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yg disusun berdasarkan silabus utk setiap mata pljrnygdiampunya.	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
9.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan Program penilaian untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
10.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
11.	Setiap guru menyampaikan laporan hsl evaluasi mata pelajaran serta hsl penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dlmbentuk laporan hsl belajar	SD	374	Sekolah	365	97,33%
		MI	40	Sekolah	34	85%
		SMP	54	Sekolah	51	94,44%
		MTs	41	Sekolah	37	90,24%
12.	Kepala Sekolah/Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN)	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%
13.	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	SD	374	Sekolah	374	100%
		MI	40	Sekolah	40	100%
		SMP	54	Sekolah	54	100%
		MTs	41	Sekolah	41	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Pada tingkat satuan pendidikan, dari hasil perhitungan pencapaian pelayanan pendidikan dasar, secara umum juga mempunyai kecenderungan semua indikator standar pelayanan minimal tercapai 100%. Akan tetapi masih terdapat beberapa indikator yang masih cukup rendah pencapaiannya yaitu indikator nomor 1, 2, dan 4.

Pencapaian indikator tersebut berkaitan dengan pemenuhan buku baik buku teks pelajaran, buku pengayaan maupun buku referensi. Pencapaian indikator tersebut berkisar antara 72.5% sampai dengan 97.33% (belum memenuhi 100%). Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang belum memenuhi SPM untuk pemenuhan buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku referensi. Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pemenuhan buku-buku tersebut dapat dipenuhi melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemetaan prioritas penggunaan dana BOS perlu kembali dilakukan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan Dasar.

Pelayanan minimal bidang kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Rembang maka capaian SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.92**  
**Hasil pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan**  
**Kabupaten Rembang tahun 2018**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerimaan Layanan Dasar	Program/kegiatan yang Mendukung	Tahun 2018		Pencapaian	
				Target	Capaian	Tercapai	Tidak Tercapai
1	2	3	4	7	8	9	10
1	pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100	90,69	√	
2	pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100	100	√	
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100	98	√	
4	pelayanan kesehatan balita	Balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	100	95,08	√	
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar (kelas 1 dan 7)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100	99,98	√	
6	pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara pada usia 15 s.d 59 tahun	Program pencegahan & penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	100	63		√
7	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara pada usia 60 tahun ke atas	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	100	100	√	
8	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular	100	37,15		√
9	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Penderita diabetes melitus	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular	80	31		√
10	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100	81,83		√
11	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang terduga tuberkulosis	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	100	29,8		√
12	Yankes orgdg risiko ternfksi virus yg melemahkan daya tahan tubuh	Orang dengan resiko terindikasi Human Immunodeficie	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	100	99,2	√	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerimaan Layanan Dasar	Program/kegiatan yang Mendukung	Tahun 2018		Pencapaian	
				Target	Capaian	Tercapai	Tidak Tercapai
	man (Human Immunodeficiency Virus	ncy Virus					

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Pada tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dari semua indikator SPM Bidang Kesehatan sebanyak 12 Indikator, yang telah tercapai 100% sebanyak 2 indikator, yang tercapai 90-99% sebanyak 5 indikator, 60-82% sebanyak 2 indikator dan belum tercapai atau kurang dari 50% ada 3 indikator, yaitu pada pelayanan hipertensi, diabetes dan TB. Hal ini menunjukkan perlunya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan capaian pelayanan pada indikator tersebut.

Perubahan RPJMD Rembang Tahun 2016 - 2021 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2018. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari beberapa kategori status, yaitu:

- Sangat rendah untuk capaian nilai 50% kebawah, ( $X \leq 50\%$ );
- Rendah untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% ( $65\% \geq X > 50\%$ );
- Sedang untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% ( $75\% \geq X > 65\%$ );
- Tinggi untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% ( $90\% \geq X > 75\%$ );
- Sangat tinggi untuk capaian diatas 90% ( $X > 90\%$ ).

Kkk

Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD pada tahun 2018 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rembang pada tabel 2.93.

**Tabel 2.93**  
**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018**

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
	<b>Indikator Makro dan Agregat</b>						
	1) Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,64	-		5,90
	2) Peningkatan PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp.Ribu	21.326	22,5	-		24
	3) Laju Inflasi	%	2,66	3,33	2,64	Tinggi	3,23
	4) Indeks Gini	Indeks	0,32	0,29	-		0,26
	5) Persentase Penduduk Miskin	%	18,90	14,97	15,41		11,55
	6) Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	%	11,86	13,47	-		13,64
	7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	67,4	68,5	69,46		69,8
	8) Indeks Pembangunan Gender	Skor	86,30	86,9	-		87,5
	9) Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	66,43	68	-		69,5
1. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan							
a. Terwujudnya <i>Good Governance</i>	9) Nilai PMPRB	Nilai	60	64	-	-	67
	10) Rata-rata Nilai SKP	Skor	84	87	-		90
	11) Tingkat maturitas SPIP	Nilai	1	2	2.736	Sangat Tinggi	4
	12) Tingkat kapabilitas APIP	Level	1	3	3	Sangat Tinggi	4
	13) Opini Laporan Keuangan BPK	Opini	WDP	WTP	WDP	Sedang	WTP
	14) Nilai SAKIP	Nilai	50,59	62	-	-	68
	15) Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Skor	2.43	3.01	22.24	Sangat Tinggi	3,50

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam pembangunan							
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi	16) Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	45	60	66	Sangat Tinggi	75
	17) Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	70	85	87.19	Sangat Tinggi	100
c. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	18) Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD	%	70	85	99.47	Sangat Tinggi	100
d. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	19) Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	85	100	100	Sangat Tinggi	100
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif							
e. Terciptanya pelayanan Publik yang cepat tanggap dan Prima	20) Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	Skor	73,58	77	-	-	80
	21) Persentase PD telah memiliki website aktif	%	86,97	100	100	Sangat Tinggi	100
	22) Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	%	85	100	100	Sangat Tinggi	100
	23) Ketersediaan Data Pembangunan Daerah	%	60,3	80	95	Sangat Tinggi	100
	24) Persentase Surat/Santel yang dikelola	%	100	100	100	Sangat Tinggi	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
1. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah							
a. Meningkatnya kinerja sektor pertanian	25) Indeks Produksi Padi	Skor	1,04	1,09	-	-	1,14
	26) NTP	Skor	100,38	100,68	-	-	100,98
	27) Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian	Skor	1.31	1.45	1.14	Tinggi	1,60
	28) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%/th	5	5	-	-	5
b. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI	29) Produksi ikan	Ton	4.04	12,120	6,455	Rendah	6,716
	30) Usaha produktif keluarga nelayan	Unit	2.769	2,789	2,770	Sangat Tinggi	2,819
c. Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	31) Persentase pertumbuhan ekspor	%/Tahun	3	4	129.46	Sangat Tinggi	4
	32) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	13.87	14.50	13.55	Sangat Tinggi	14,80
	33) Kontribusi sektor industri pengolahan	%	20.9	21.4	21.83	Sangat Tinggi	22
2. Menurunkan angka pengangguran							
d. Menurunnya angka pengangguran	34) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,51	4.10	2.87	Sedang	3,90
3. Menurunkan angka kemiskinan							
e. Menurunnya angka kemiskinan	35) Persentase penduduk miskin	%	18.90	14.97	15.41	Sangat Tinggi	11,55

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup							
f. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	36) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Indeks	63.30	66.5	50	Tinggi	68
1. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan							
a. Meningkatnya Nilai Investasi	37) Realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta Rp/tahun	3.478.718	4,521,408	7,173,000	Sangat Tinggi	5.259.020
2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif							
a. Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif	38) Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk	%	6.35	8.25	6.28	Tinggi	10
	39) Presentase koperasi aktif	%	79	86	90.40	Sangat Tinggi	100
	40) Persentase KSP/USP dan koperasi sehat	%	35	39	69.59	Sangat Tinggi	53,00
b. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	41) Persentase Pertumbuhan Pendapatan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)	%/th	5	5	178.29	Sangat Tinggi	5
	42) Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	1.97	2.2	2.12	Sangat Tinggi	2,5
1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur.							

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
a. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan.	43) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.	%	48,98	66.01	67.91	Sangat Tinggi	85,00
	44) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.	%	73,02	82.54	89.68	Sangat Tinggi	92,06
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.	45) Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.	%	77,88	86.34	87	Sangat Tinggi	98,12
c. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	46) persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani	%	5,87	8,49	7,74	Sedang	11,07
d. Berkurangnya luas kawasan kumuh	47) Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	7,8	2,80	2,12	Sedang	0
e. Meningkatnya cakupan akses air minum	48) Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum	%	80,34	95,00	85,66	Sedang	100,00
f. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	49) Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	%	77,42	83,50	100	Sangat Tinggi	100,00
g. Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	50) Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	%	11,74	16,34	3,68	rendah	20
h. Meningkatnya ketersediaan air baku	51) Persentase cakupan Air baku	%	64	76	75	Sangat Tinggi	88
2. Meningkatkan kawasan Pusat Pertumbuhan dengan Dukungan Infrastruktur Yang Memadai							
i. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	52) Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai	Kawasan	0	3	3	Sangat Tinggi	6
	53) Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	85,00	90	92	Sangat Tinggi	90,00
	54) Persentase ketersediaan angkutan pedesaan	%	56,50	70	72	Sangat Tinggi	85,00

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat							
a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	55) AKI (Angka Kematian Ibu)	Kasus	8	7	9	Sangat Tinggi	5
	56) AKB (Angka Kematian Bayi)	Kasus	134	120	149	Sangat Tinggi	105
	57) Akaba (Angka Kematian Balita)	Kasus	164	135	170	Sangat Tinggi	105
	58) Prevalensi Gizi Buruk	%	0.21	0.16	0.11	Sedang	0,10
2. Membangun Sistem Pendidikan yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan.							
b. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	59) Rata-rata lama sekolah	Tahun	6.9	7.5	6.94	Sangat Tinggi	7,8
	60) Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.46	12	12.04	Sangat Tinggi	12,6
c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif	61) APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 7 – 12 tahun	%	99.69	99.78	95.38	Sangat Tinggi	99,87

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
	62) APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 13 – 15 tahun	%	100	100	91.38	Sangat Tinggi	100
	63) APK PAUD (umur 3-6 tahun)	%	72.36	84	87.76	Sangat Tinggi	96
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan	64) Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik	%	26.12	61.87	100	Sangat Tinggi	90
3. Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga							
e. Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga	65) Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional	Jumlah	18	35	46	Sangat Tinggi	50
	66) Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	%	100	100	19	Sangat Tinggi	100
1. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat							
a. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	67) Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	97.34	97.93	89	Sangat Tinggi	98.10
	68) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100	100	Sangat Tinggi	100
b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	69) Persentase Pemilih dalam menggunakan hal pilih melalui pemilu Pilpres dan Pileg Pilgub	%	73,67	75	65.2	Tinggi	85,00

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat							
a. Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS	70) Persentase PMKS yang ditangani	%	40,20	55	58.67	Sangat Tinggi	70
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak							
a. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	71) Rasio KDRT	Ratio	14/178.53	8/178.53	0.002	Rendah	6/178.53
	72) Cakupan desa ramah anak	%	35,00	65	65	Sangat Tinggi	95,00
	73) Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	45,00	60	70	Sangat Tinggi	75,00
	74) Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah	%	27.97	31	27.68	Tinggi	34,00
	75) Posyandu aktif	Jumlah	1.225	1.225	1.228	Sangat Tinggi	1.225
	76) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0.3	1.1	1.3	Sangat Tinggi	1,6
	77) Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Sistem Informasi Desa	%	40	70	80	Sangat Tinggi	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
4. Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu							
a. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal	78) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	6,3	14	17	Sangat Tinggi	20
5. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan							
a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	79) Cakupan peserta KB aktif	%	100	100	123.04	Sangat Tinggi	100
	80) Persentase pertumbuhan penduduk	%	0.86	0.71	0.69	Sangat Tinggi	0,53
	81) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	6,93	6.67	9.81	Sangat Tinggi	6,5
	82) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 19-49	%	83,57	83.64	80.02	Sangat Tinggi	83,70
	83) Persentase Droup Out (DO) Keluarga Berencana	%	13,62	11.31	7.27	Rendah	9,00
	84) Cakupan PUS pesera KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	92,12	92.9	100	Sangat Tinggi	93,72
	85) Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	org	10	10	-	-	10
b. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	86) Persentase penduduk ber KTP per satuan Penduduk (%)	%	87,52	100	100	Sangat Tinggi	100
	87) Persentase bayi ber-akte kelahiran	%	96,45	100	100	Sangat Tinggi	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Saat Ini (2015)	2018		Status Capaian	Kondisi Akhir Perencanaan 2021
				Target	Capaian		
1. Mewujudkan kedaulatan pangan							
a. Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah	88) Skor PPH	Skor	86.8	87.7	86.8	Sangat Tinggi	88,3
	89) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	k/kal/ka pita	5.28	6.71	5.044	Tinggi	7.33
2. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan							
a. Meningkatnya daya beli masyarakat	90) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. (000)	9.013	10	893,475	Sangat Tinggi	10.75
b. Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga	91) Indeks Produksi pertanian	(kw/ha)	6,1	6,4	-		6,7
	92) Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun	%/th	2	2	1.4	Sedang	2%

## BAB III

### GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2013-2018

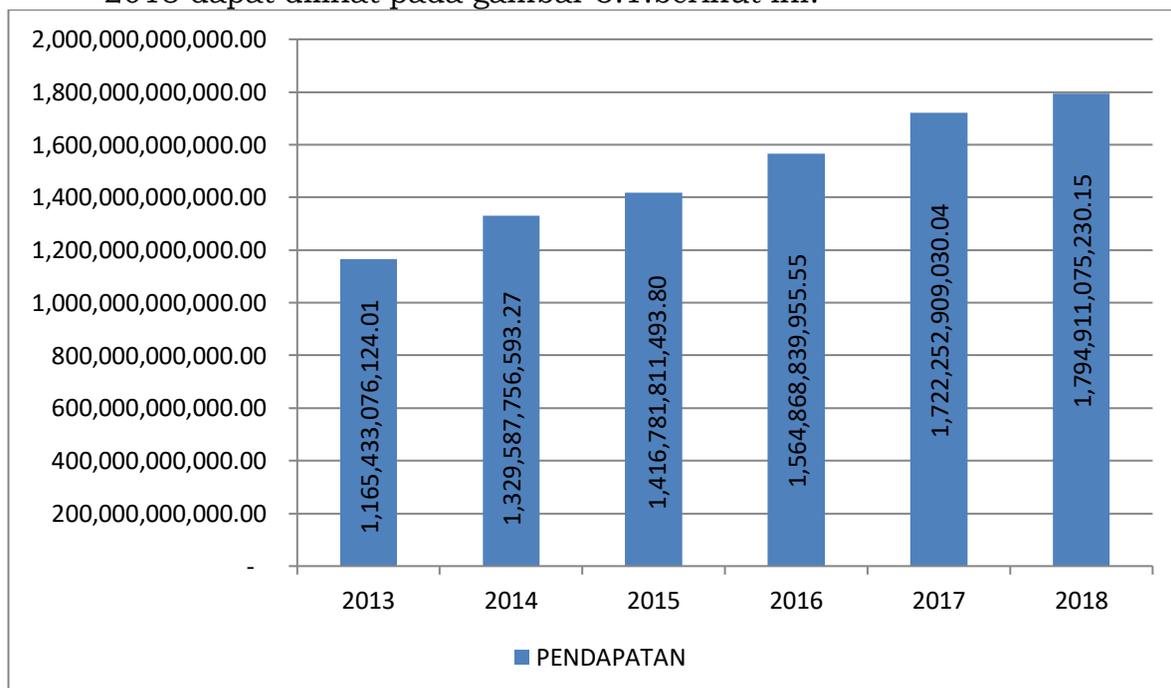
##### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Data realisasi keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 perlu disampaikan untuk memberikan gambaran kinerja realisasi APBD tahun 2013-2018 dan dapat dipergunakan sebagai dasar analisis, mencakup analisis kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang periode 2013 sampai dengan 2018 dilihat dari berbagai sudut pandang diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan

Pendapatan daerah selama tahun 2013 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 pendapatan daerah Kabupaten Rembang sebesar Rp 1.165.433.076.124,00,-. Pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1.329.587.756.593,27,-, selanjutnya pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan yaitu menjadi Rp 1.416.781.811,493,80,-. Pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp 1.564.868.839.955,55,- pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 1.722.252.909.030,04,- dan selanjutnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 1.794.911.075.230,15,-

Grafik Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.1. berikut ini:

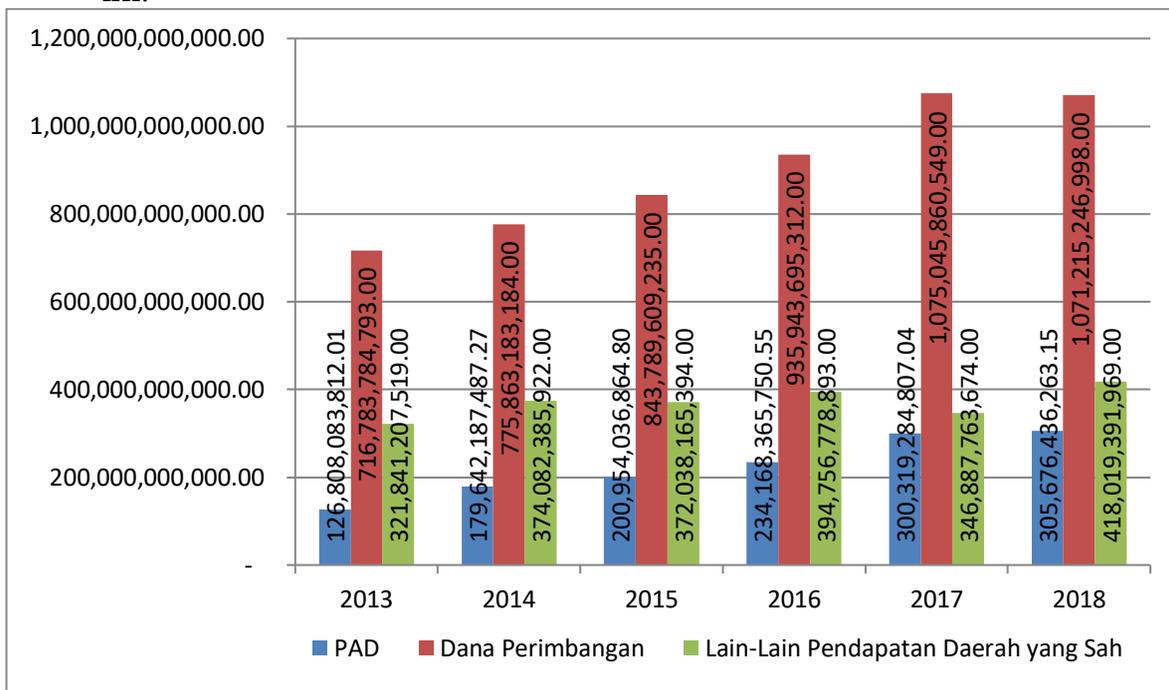


**Grafik 3.1**  
**Perkembangan Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2013-2018**

*Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang 2018*

Gambaran perkembangan secara nominal masing-masing sumber pendapatan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PAD sebesar Rp. 126.808.083.812,01,-, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 179.642.187.487,27,-, pada tahun 2015 PAD mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 200.954.036.864,80,-. Pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 234.168.365.750,55,-, pada tahun 2017 menjadi Rp. 300.319.284.807,04,- dan pada tahun 2018 menjadi Rp. 305.676.436.263,15,-. Sementara itu peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan tidak begitu besar secara nominal.

Grafik Perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah selama tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.2. berikut ini.

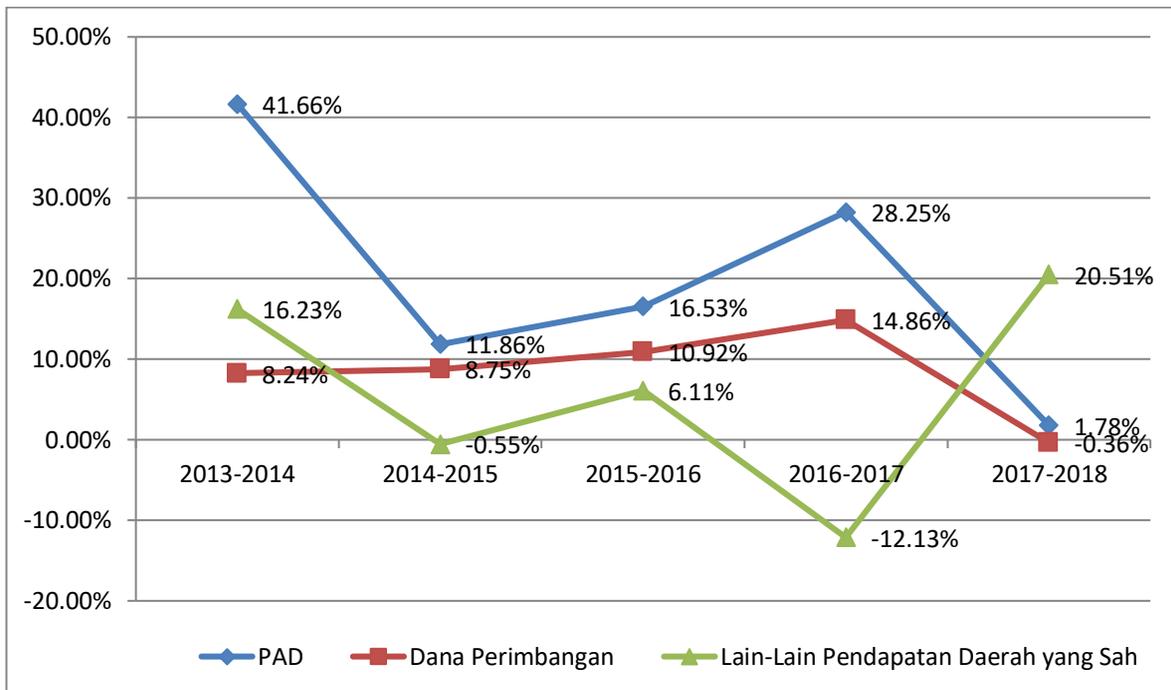


**Grafik 3.2**  
**Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang 2018

Berdasarkan data di atas masing-masing sumber pendapatan daerah dalam APBD selama enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup stabil. Sumber pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan selama kurun waktu 2013-2018 rata-rata tumbuh sebesar 20,02%, dengan persentase pertumbuhan cenderung meningkat. Sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan selama kurun waktu 2013-2018 juga mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,48%. Sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami peningkatan. Secara rata-rata sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,03%. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 41,66%. Kinerja pertumbuhan sumber pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah selama tahun 2013-2018 fluktuatif.

Grafik pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan terlihat pada Gambar 3.3 berikut:



**Grafik 3.3**  
**Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan**  
**Tahun 2013-2018 (%)**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang 2018

Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1.**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

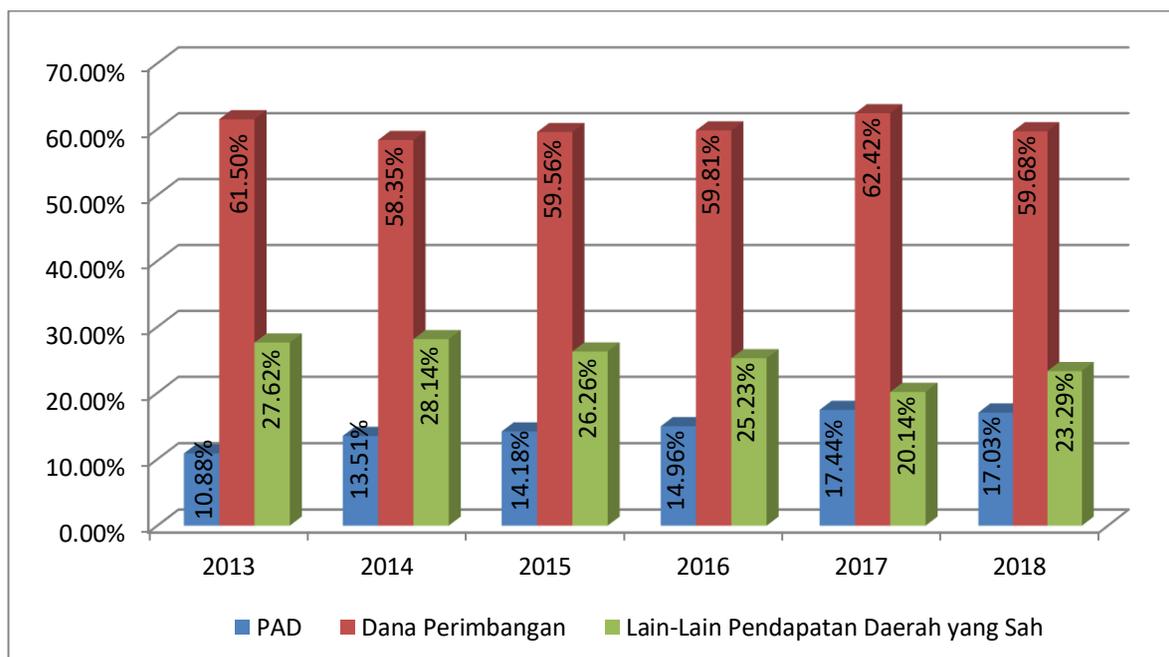
No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited	% R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,165,433,076,124.01</b>	<b>1,329,587,756,593.27</b>	<b>1,416,781,811,493.80</b>	<b>1,564,868,839,955.55</b>	<b>1,722,252,909,030.04</b>	<b>1,794,911,075,230.15</b>	<b>9.07%</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>126,808,083,812.01</b>	<b>179,642,187,487.27</b>	<b>200,954,036,864.80</b>	<b>234,168,365,750.55</b>	<b>300,319,284,807.04</b>	<b>305,676,436,263.15</b>	<b>20.02%</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	34,067,851,784.00	38,643,241,316.00	42,306,265,606.00	48,420,954,850.00	59,734,946,872.00	100,438,352,553.00	25.77%
	Hasil Retribusi Daerah	30,924,102,833.00	41,529,546,666.00	32,230,052,368.00	23,985,514,302.50	20,730,064,301.00	21,441,590,432.00	-4.76%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,277,635,260.00	6,183,205,661.00	4,447,117,385.00	6,564,459,237.00	9,212,738,532.00	18,775,303,058.00	50.46%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58,538,493,935.01	93,286,193,844.27	121,970,601,505.80	155,197,437,361.05	210,641,535,102.04	165,021,190,220.15	26.28%
<b>2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>716,783,784,793.00</b>	<b>775,863,183,184.00</b>	<b>843,789,609,235.00</b>	<b>935,943,695,312.00</b>	<b>1,075,045,860,549.00</b>	<b>1,071,215,246,998.00</b>	<b>8.48%</b>
	Dana Transfer Umum	674,684,874,793.00	729,657,183,184.00	745,370,201,235.00	828,385,043,312.00	816,948,229,807.00	812,596,054,494.00	3.91%
	Dana Transfer Khusus	42,098,910,000.00	46,206,000,000.00	98,419,408,000.00	107,558,652,000.00	258,097,630,742.00	258,619,192,504.00	54.44%
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>321,841,207,519.00</b>	<b>374,082,385,922.00</b>	<b>372,038,165,394.00</b>	<b>394,756,778,893.00</b>	<b>346,887,763,674.00</b>	<b>418,019,391,969.00</b>	<b>6.03%</b>
	Pendapatan Hibah	74,995,000.00	541,721,500.00	138,351,272.00	1,488,856,904.00	1,711,800,674.00	56,967,950,020.00	953.39%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55,168,716,988.00	72,995,869,203.00	93,284,137,342.00	81,133,459,989.00	92,803,709,000.00	105,216,144,949.00	14.97%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	150,500,902,000.00	172,399,233,000.00	268,241,945,000.00	286,903,900,000.00	228,013,715,000.00	229,010,130,000.00	11.40%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	116,096,593,531.00	128,145,562,219.00	10,373,731,780.00	25,230,562,000.00	24,358,539,000.00	26,825,167,000.00	13.67%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Pada tahun 2015, pendapatan dari pos Retribusi Daerah mengalami penurunan karena ada pengalihan pendapatan dari PPK BLUD Puskesmas yaitu berupa Kapitasi dari Jaminan Kesehatan Nasional masuk pada pos pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pendapatan tersebut sebelumnya merupakan pos retribusi daerah. Pada tahun 2016 dan 2017 pos retribusi mengalami penurunan cukup tajam dan pos pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2013 s/d tahun 2017 mengalami pertumbuhan sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang tajam dikarenakan pada tahun 2017 Pendapatan Hibah Dari Dana BOS yang semula berada pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada tahun 2018 dipindah pada pos Pendapatan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Proporsi masing-masing sumber pendapatan terhadap total APBD dapat dijelaskan bahwa untuk PAD, proporsi PAD terhadap total APBD dari tahun 2013-2018 meningkat. Pada tahun 2013 proporsi PAD terhadap total APBD sebesar 10,88% dan pada tahun 2018 proporsi PAD terhadap total APBD sebesar 17,03%. Sedangkan untuk proporsi pendapatan dari Dana Perimbangan selama kurun waktu 2013-2018 grafik peningkatannya mengalami penurunan walaupun secara nominal meningkat. Pada tahun 2013 proporsi Dana Perimbangan terhadap total APBD sebesar 61,50% dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 59,68%, Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sedikit berkurang. Demikian juga untuk pendapatan yang bersumber dari lain-lain Pendapatan yang Sah, Proporsi sumber pendapatan dari Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total APBD pada tahun 2013 sebesar 27,62%, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 23,29%.

Secara rinci Grafik perkembangan proporsi masing-masing sumber pendapatan selama tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut ini:



**Grafik 3.4**  
**Perkembangan Proporsi Masing-Masing Unsur Pendapatan**  
**Terhadap Total Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2013-2018 (%)**

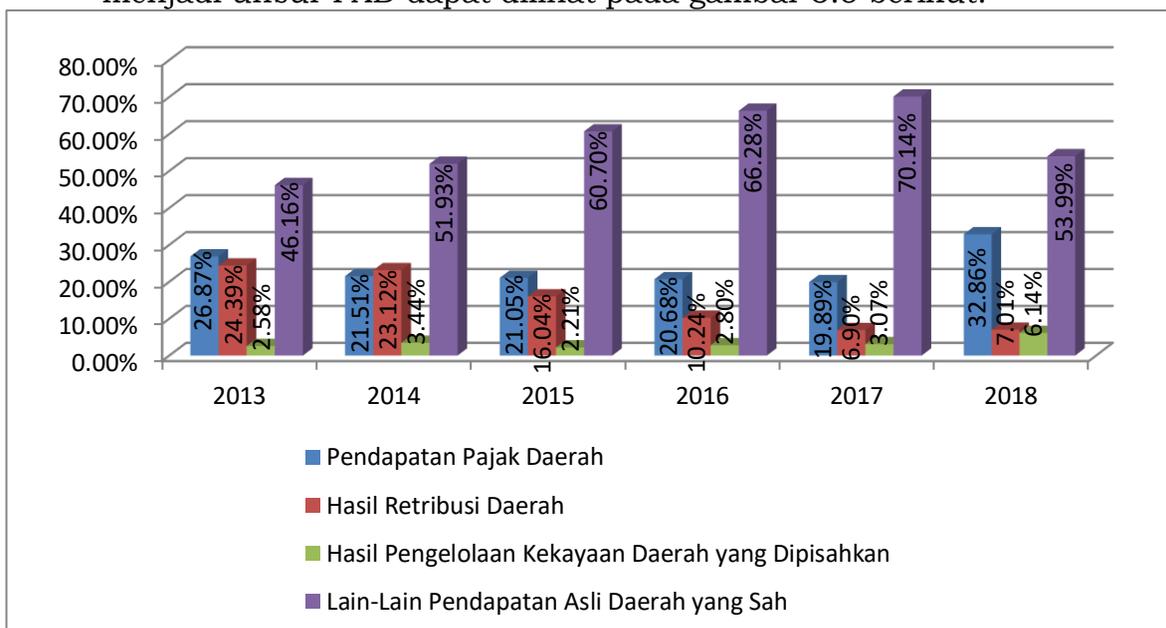
Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat sumber pendapatan yaitu (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hingga saat ini PAD Kabupaten Rembang sebagian besar berasal dari pos Lain-lain PAD yang sah. Rata-rata proporsi Lain-lain PAD yang sah selama enam tahun terakhir sebesar 58,20% dari total PAD. Pos PAD terbesar kedua adalah Pendapatan Pajak Daerah, proporsi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Rembang rata-rata selama enam tahun sebesar 23,81% dari PAD.

Selanjutnya pos pendapatan PAD terbesar ketiga adalah Pendapatan Retribusi Daerah, rata-rata proporsi sumber pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah selama enam tahun terakhir sebesar 14,62%. Selama tahun 2013-2018, proporsi Pajak Daerah terhadap total PAD mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 proporsi Pajak Daerah adalah sebesar 26,87% dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 32,86%.

Komponen PAD yang mempunyai kontribusi paling rendah terhadap PAD di Kabupaten Rembang adalah Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen ini juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 komponen Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai proporsi terhadap PAD sebesar 2,58%, kemudian semakin meningkat menjadi 6,14% pada tahun 2018. Secara rata-rata proporsi Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD adalah sebesar 3,38% per tahun.

Grafik Perkembangan proporsi masing-masing pos yang menjadi unsur PAD dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut:



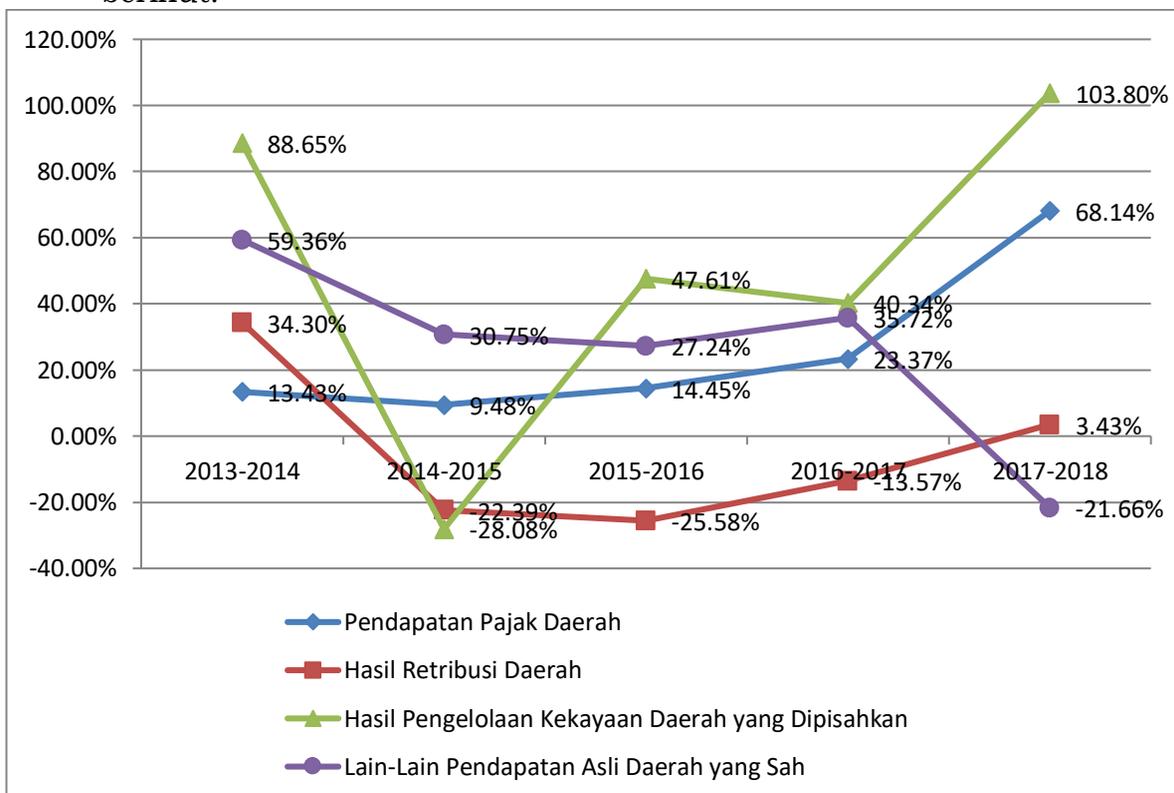
**Grafik 3.5**  
**Proporsi Masing-Masing Unsur PAD**  
**Tahun 2013-2018 (%)**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Pertumbuhan masing-masing komponen dalam Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 fluktuatif. Dari keempat komponen PAD yang terdiri dari (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, menunjukkan bahwa pertumbuhan Rata-rata Pendapatan pajak daerah selama enam tahun terakhir sebesar 25,77% per tahun. Rata-rata pertumbuhan komponen Retribusi Daerah menurun sebesar -4,76%.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempunyai nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 50,46% per tahun Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mempunyai nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 26,28%.

Pertumbuhan komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2014 mempunyai pertumbuhan paling tinggi sebesar 88,65%. Secara rinci Grafik pertumbuhan masing-masing komponen PAD terlihat pada Gambar 3.6 berikut:



**Grafik 3.6**  
**Pertumbuhan Masing-Masing Komponen PAD**  
**Tahun 2013-2018 (%)**

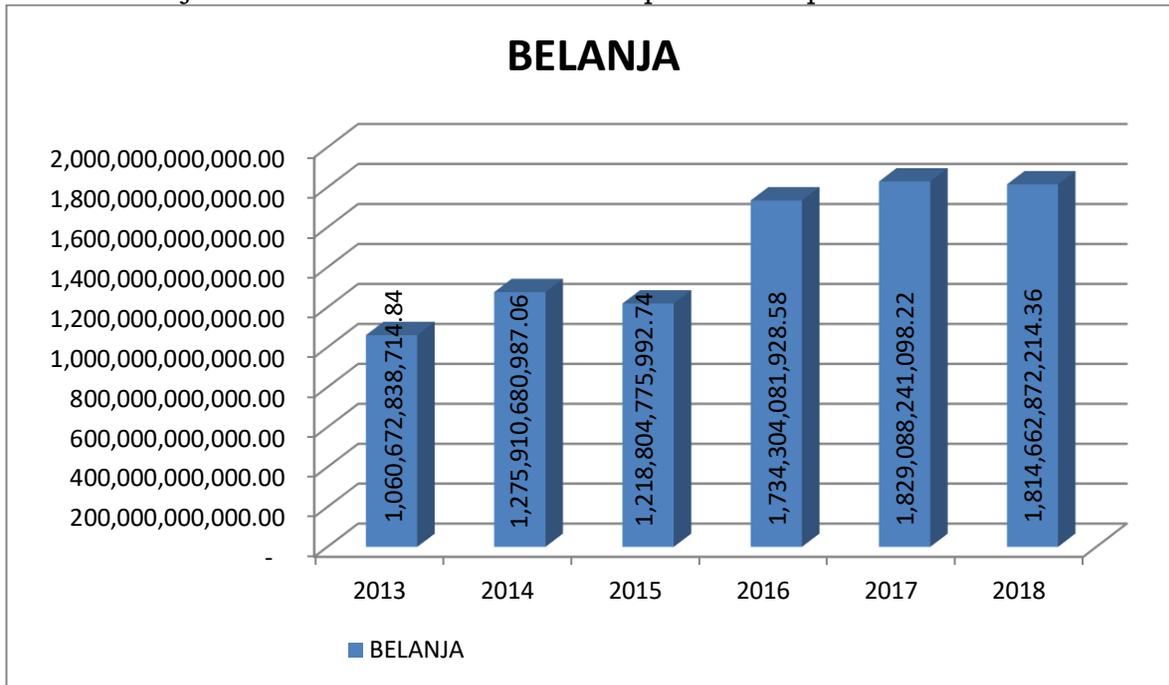
Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

## 2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu komponen kebijakan keuangan daerah dalam alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat mengarah pada skala prioritas diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi daerah. Kebijakan dalam penetapan alokasi belanja pembangunan tidak bisa terlepas dari perhitungan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi, meliputi belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja operasional.

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Rembang selama enam tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013

besarnya belanja sebesar Rp. 1.060.672.838.714,84, pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 1.814.662.872.214,36,- Apabila dikaitkan dengan Tabel 3.1 tentang Besarnya Pendapatan, maka pada tahun 2013 sampai dengan 2015 belanja lebih kecil dari totalpendapatan sehingga selalu terjadi surplus. Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2018, terjadi defisit anggaran. Selengkapnya grafik perkembangan belanja daerah tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:



**Grafik 3.7**  
**Perkembangan Belanja Daerah**  
**Tahun 2013-2018 (Rupiah)**

*Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018*

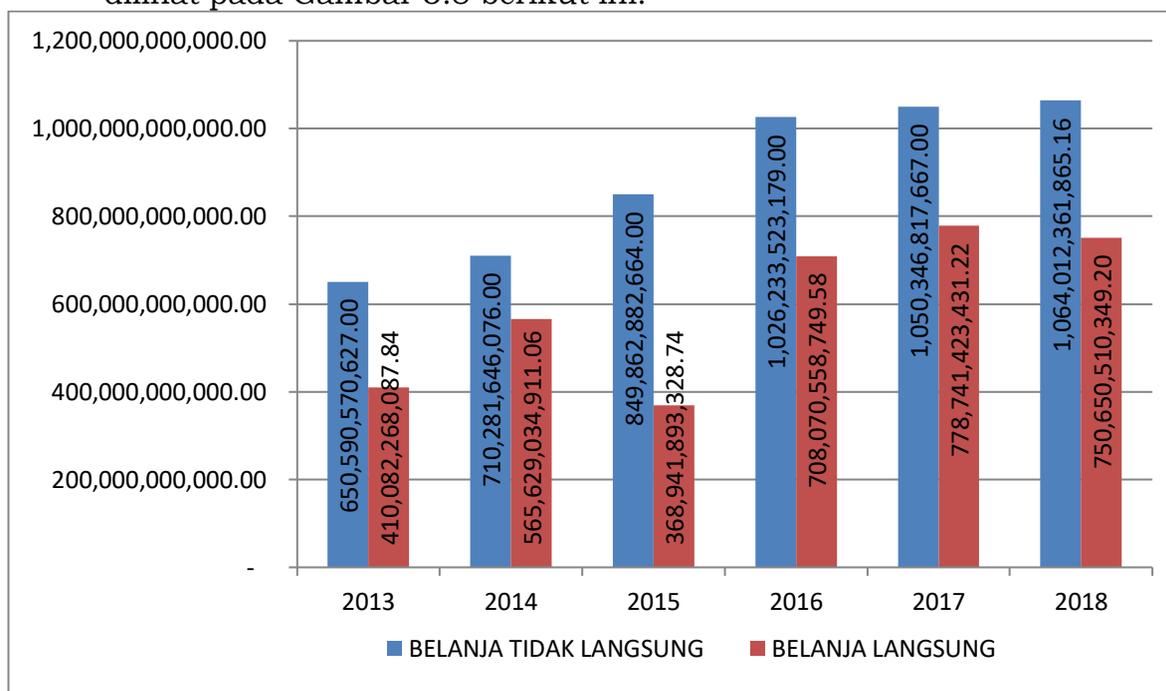
Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2.**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited	% R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,060,672,838,714.84</b>	<b>1,275,910,680,987.06</b>	<b>1,218,804,775,992.74</b>	<b>1,734,304,081,928.58</b>	<b>1,829,088,241,098.22</b>	<b>1,814,662,872,214.36</b>	<b>12.56%</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>650,590,570,627.00</b>	<b>710,281,646,076.00</b>	<b>849,862,882,664.00</b>	<b>1,026,233,523,179.00</b>	<b>1,050,346,817,667.00</b>	<b>1,064,012,361,865.16</b>	<b>10.65%</b>
	Belanja Pegawai	572,841,155,868.00	632,727,603,459.00	661,607,200,077.00	695,202,128,818.00	622,547,261,167.00	648,104,050,822.16	2.75%
	Belanja bunga	20,708,119.00	14,340,417.00	7,985,987.00	1,605,011.00	-	1,468,870,443.00	-63.74%
	Belanja Hibah	42,862,476,900.00	39,727,269,200.00	23,873,745,800.00	27,269,005,350.00	46,450,880,000.00	55,764,388,000.00	11.48%
	Belanja Bantuan Sosial	1,800,500,000.00	2,552,273,000.00	2,714,000,000.00	7,446,000,000.00	8,927,000,000.00	8,333,700,000.00	47.14%
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	6,157,224,400.00	6,455,961,000.00	6,437,223,500.00	10,765,819,900.00	23.93%
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	32,688,824,740.00	35,163,035,000.00	155,502,726,400.00	289,842,093,000.00	365,168,845,000.00	339,575,532,700.00	91.03%
	Belanja Tidak Terduga	376,905,000.00	97,125,000.00	-	16,730,000.00	815,608,000.00		1125.22%
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>410,082,268,087.84</b>	<b>565,629,034,911.06</b>	<b>368,941,893,328.74</b>	<b>708,070,558,749.58</b>	<b>778,741,423,431.22</b>	<b>750,650,510,349.20</b>	<b>20.29%</b>
	Belanja Pegawai	61,041,654,893.00	86,882,064,160.00	113,995,499,657.00	144,564,120,169.00	174,582,051,301.00	177,564,307,707.00	24.57%
	Belanja Barang dan Jasa	213,592,815,850.84	327,292,056,989.06	202,965,666,652.74	217,960,717,279.58	250,388,658,063.00	263,637,696,747.20	8.56%
	Belanja Modal	135,447,797,344.00	151,454,913,762.00	51,980,727,019.00	345,545,721,301.00	353,770,714,067.22	309,448,505,895.00	100.15%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Selanjutnya untuk Grafik Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut ini:

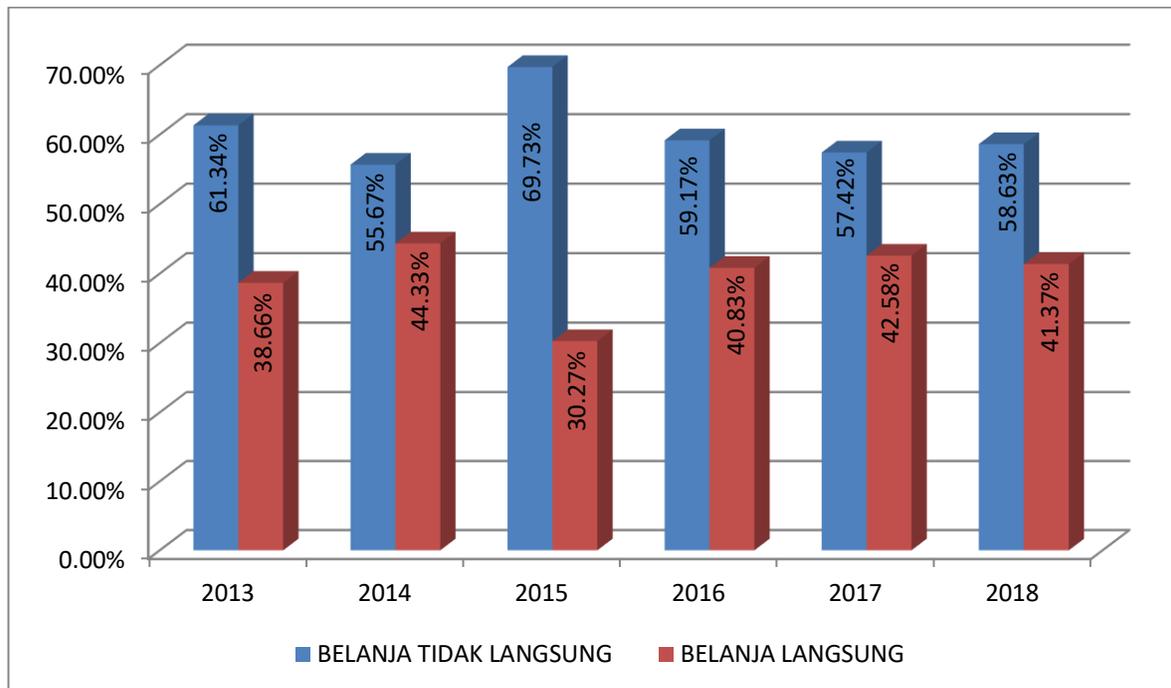


**Grafik 3.8**  
**Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (Rupiah)**

*Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018*

Dilihat dari proporsinya, Belanja Daerah selama kurun waktu tahun 2013-2018 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belanja daerah. Proporsi belanja Langsung terhadap total belanja daerah fluktuatif dari sebesar 38,66% pada tahun 2013 menjadi sebesar 41,37% pada tahun 2018. Angka proporsi tertinggi belanja langsung terhadap total belanja terjadi pada tahun 2014 sebesar 44,33%. Kecenderungan peningkatan proporsi Belanja Langsung menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.

Secara rinci Grafik proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah dapat dilihat pada gambar 3.9.



**Grafik 3.9**  
**Perkembangan Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Rembang terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (%)**

*Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018*

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensipenerimaan daerah yang baru. Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja Langsung, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

### 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara itu pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2013-2018 penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan fluktuatif. Dari sebesar Rp.67.555.128.713,17,-

pada tahun 2013 menjadi Rp.108.161.445.444,40,- pada tahun 2018. Pengeluaran pembiayaan daerah menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2013 Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.5.253.450.842,00,- menjadi sebesar Rp.12.717.627.920,00,- pada tahun 2018. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurun dari sebesar Rp.167.061.915.280,34,- pada tahun 2013 menjadi Rp.75.692.020.540,19,- pada tahun 2018.

Secara rinci rata-rata perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

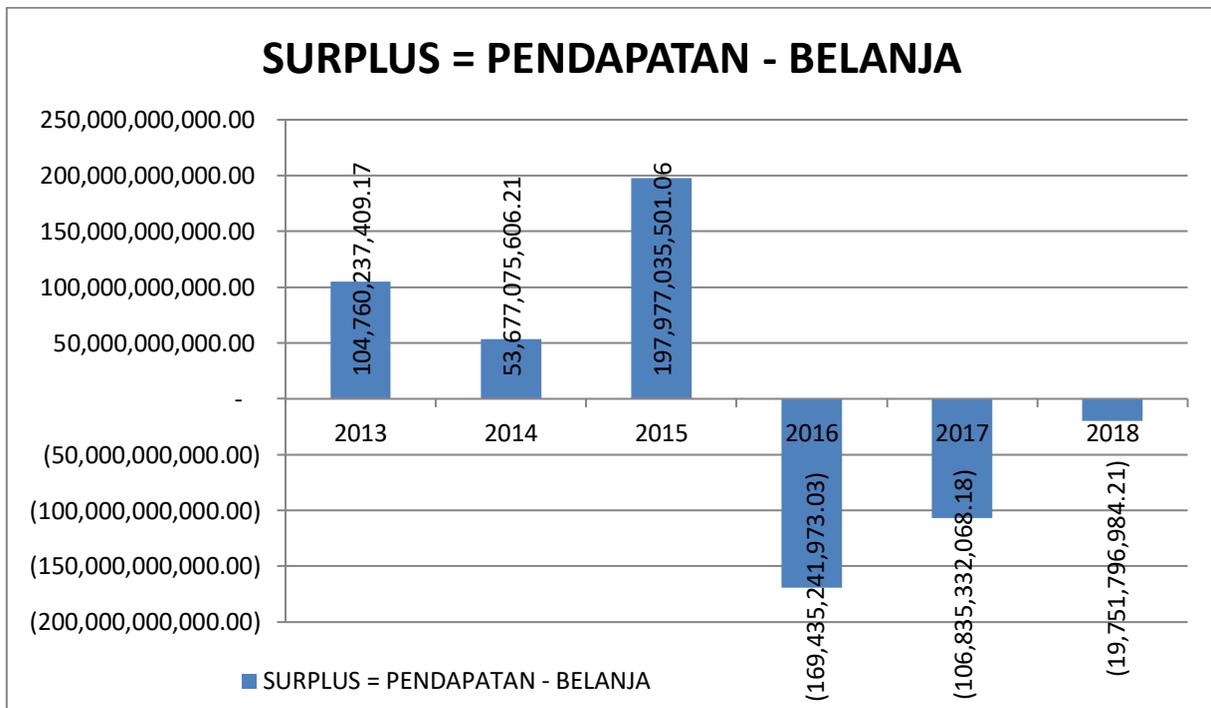
**Tabel 3.3.**  
**Rata-Rata Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited	% R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>							
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>67,555,128,713.17</b>	<b>167,066,868,874.34</b>	<b>209,301,180,147.55</b>	<b>396,607,873,805.61</b>	<b>232,225,166,662.58</b>	<b>108,161,445,444.40</b>	<b>33.44%</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	67,555,128,713.17	167,066,868,874.34	209,301,180,147.55	396,607,873,805.61	214,495,185,982.58	108,161,445,444.40	33.32%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	17,729,980,680.00	-	
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5,253,450,842.00</b>	<b>11,162,450,842.00</b>	<b>10,670,450,843.00</b>	<b>12,296,725,422.00</b>	<b>8,228,389,150.00</b>	<b>12,717,627,920.00</b>	<b>28.96%</b>
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,200,000,000.00	11,109,000,000.00	10,617,000,000.00	12,270,000,000.00	8,189,000,000.00	10,422,000,000.00	23.76%
	Pembayaran Pokok Utang	53,450,842.00	53,450,842.00	53,450,843.00	26,725,422.00	39,389,150.00	2,256,548,000.00	1125.25%
	Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	-	-	-	-	-	39,079,920.00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>62,301,677,871.17</b>	<b>155,904,418,032.34</b>	<b>198,630,729,304.55</b>	<b>384,311,148,383.61</b>	<b>223,996,777,512.58</b>	<b>95,443,817,524.40</b>	<b>34.40%</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN</b>	<b>167,061,915,280.34</b>	<b>209,581,493,638.55</b>	<b>396,607,764,805.61</b>	<b>214,875,906,410.58</b>	<b>117,161,445,444.40</b>	<b>75,692,020,540.19</b>	<b>-2.40%</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Dalam Kurun tahun 2013-2018 defisit terjadi pada tahun 2016-2018, sedangkan surplus terjadi pada tahun 2013-2015. Ada kecenderungan peningkatan surplus APBD dari sebesar Rp. 104.760.237.409,17,- pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 197.977.035.501,06,- pada tahun 2015.

Selengkapnya Grafik Selisih Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.10 berikut:



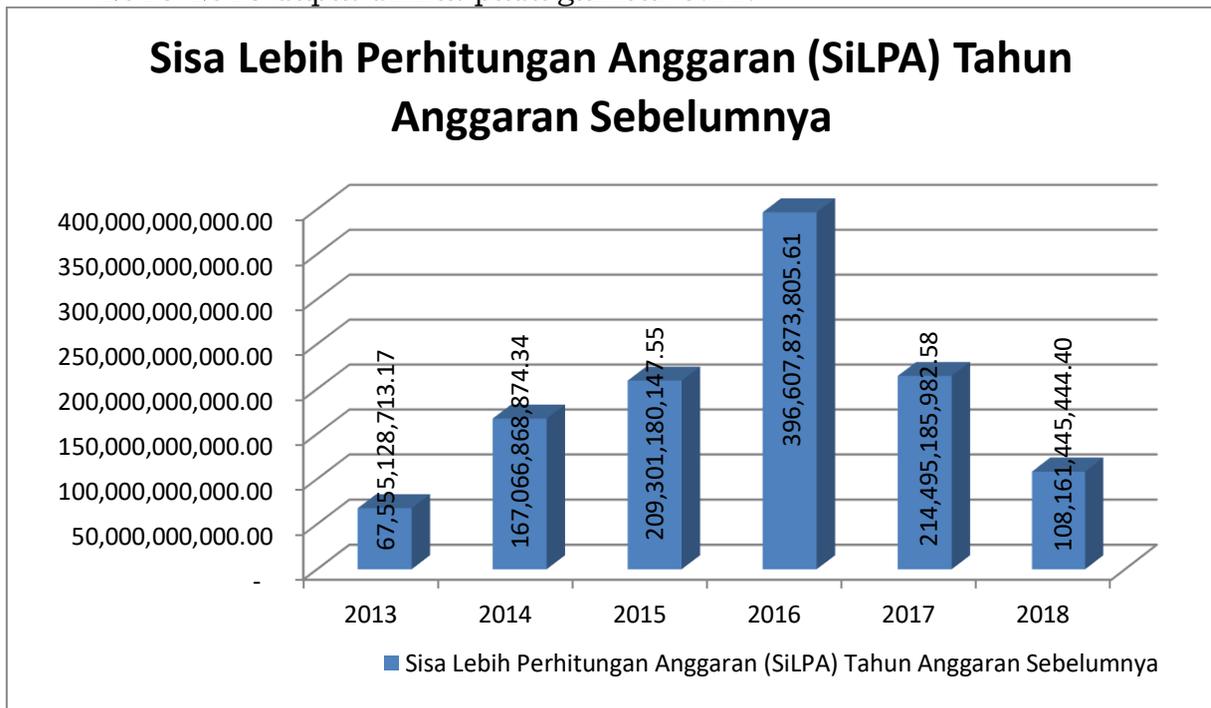
**Grafik 3.10**  
**Selisih Pendapatan dan Belanja**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (Rp.)**

*Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018*

Pelampauan Pendapatan atau penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA. Namun demikian, mengingat bahwa APBD dibuat sebelum berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBD merupakan nilai estimasi.

Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat SiLPA sebesar Rp. 67.523.259.013,17,- dan meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp. 108.161.445.444,40,- Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata selama enam tahun terakhir terjadi pertumbuhan SiLPA sebesar 33,32%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang masih banyak dana publik yang belum digunakan dalam belanja maupun pengeluaran yang lain. Sehingga masih ada dana yang mengendap di kas daerah atau tidak terserap.

Grafik Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.11.



**Grafik 3.11**  
**Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**  
**Tahun 2013-2018 (Rp)**

*Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018*

Besarnya SILPA Tahun Berkenaan pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio ini diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SILPA Tahun Berkenaan yang terjadi bisa ditengarai oleh karena rendahnya penyerapan belanja daerah, yang pada dasarnya mengindikasikan kurang efisien dan efektifnya perencanaan kegiatan. Sumber SILPA Tahun Berkenaan selain itu adalah adanya dana dari pusat yang tidak terserap. Sehingga rasio ini juga perlu dicermati oleh pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan transfer ke daerah yang efisien dan efektif.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa Rasio SILPA Tahun Berkenaan terhadap Anggaran Belanja fluktuatif. Dengan kondisi ini maka dapat disampaikan bahwa terjadi penyerapan belanja yang kurang optimal dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Meningkatnya rasio SILPA Tahun Berkenaan terhadap anggaran belanja ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Rembang harus siap dalam membiayai belanjanya. Grafik Rasio SILPA Tahun Berkenaan terhadap belanja tahun 2013-2018 dapat dilihat terlihat pada gambar 3.12 di bawah ini:



**Grafik 3.12**  
**Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja**  
**Tahun 2013-2018 (%)**

*Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018*

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Gambar 3.13 menunjukkan bahwa rasio kemampuan Kabupaten Rembang mendanai belanja daerah selama enam tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2013 terjadi surplus sebesar 9,88%, pada tahun 2016 mulai terjadi defisit sebesar 9,77% dan pada tahun 2018 terjadi defisit sebesar 1,09%.

Namun demikian secara rata-rata dari Tahun 2013-2018 Rasio Kemampuan Kabupaten Rembang dalam mendanai Belanja Daerah masih surplus sebesar 2,27%.

Grafik Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.13 berikut:



**Grafik 3.13**  
**Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah**  
**Tahun 2013-2018(%)**

*Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018*

### 3.1.2. Neraca Daerah

Gambaran tentang posisi keuangan daerah berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana tertuang dalam Neraca Daerah. Laporan Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah. Neraca Daerah mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Gambaran neraca daerah Kabupaten Rembang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Neraca Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>1,720,547,288,999.81</b>	<b>1,450,840,887,158.30</b>	<b>1,632,557,326,614.45</b>	<b>1,799,809,861,544.76</b>	<b>1,699,744,280,051.09</b>	<b>1,968,165,614,970.41</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>204,738,774,831.69</b>	<b>233,956,464,422.83</b>	<b>428,810,406,991.65</b>	<b>251,807,596,007.98</b>	<b>165,782,551,429.16</b>	<b>139,294,327,401.79</b>
1.1.1	Kas	167,186,629,790.34	199,588,570,530.55	388,577,907,010.61	216,326,775,373.58	117,163,608,804.40	75,423,575,248.19
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	-	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-	-
1.1.3	Piutang Pajak dan Retribusi	18,870,899,017.00	5,248,387,153.53	5,100,006,106.90	3,267,254,902.27	6,303,695,143.93	13,203,667,921.77
1.1.4	Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Piutang Lainnya	10,692,439,751.83	1,159,489,466.25	884,707,385.45	313,622,592.50	1,017,741,666.00	1,023,080,180.14
1.1.6	Penyisihan Piutang	-	7,951,221,736.04	11,296,479,912.31	15,759,397,110.50	23,798,368,120.49	33,015,965,912.59
1.1.7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
1.1.8	Beban Dibayar Dimuka	299,690,887.12	366,968,797.24	143,453,211.44	158,041,882.44	34,792,876.21	150,967,733.05
1.1.9	Persediaan	7,689,115,385.40	9,641,826,739.22	12,807,853,364.94	15,982,504,146.69	17,464,344,818.13	16,477,070,406.05
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>60,169,735,278.12</b>	<b>77,842,155,672.75</b>	<b>92,758,541,479.61</b>	<b>111,960,651,436.44</b>	<b>122,554,385,567.37</b>	<b>133,906,740,820.87</b>
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3,221,157,177.00	3,221,157,177.00	3,221,157,177.00	3,221,157,177.00	3,221,157,177.00	2,538,888,320.00
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	56,948,578,101.12	74,620,998,495.75	89,537,384,302.61	108,739,494,259.44	119,333,228,390.37	131,367,852,500.87
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>1,433,385,135,718.00</b>	<b>1,116,135,722,538.72</b>	<b>1,087,049,287,902.19</b>	<b>1,405,833,671,818.65</b>	<b>1,380,362,930,754.66</b>	<b>1,605,766,345,508.22</b>
1.3.1	Tanah	140,402,081,758.00	250,814,959,708.00	250,814,959,708.00	263,145,115,908.00	281,687,526,125.00	231,400,719,485.00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	225,453,122,372.00	248,289,944,682.50	275,523,105,697.28	309,114,005,321.08	352,394,182,719.87	380,854,499,849.53
1.3.3	Gedung dan Bangunan	400,474,125,644.00	443,559,645,670.00	450,977,211,621.22	576,928,698,661.42	679,120,962,967.61	722,431,257,971.61
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	612,710,025,493.00	691,612,662,174.00	704,407,543,123.00	880,239,900,523.00	1,058,220,140,070.00	1,084,492,825,378.00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	49,586,780,451.00	55,287,097,954.00	57,964,262,191.00	59,370,886,427.00	67,931,644,685.00	56,826,686,595.08
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	4,759,000,000.00	4,759,000,000.00	4,955,950,750.00	512,336,000.00	614,277,300.00	32,923,391,761.00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	(578,187,587,649.78)	(657,593,745,188.31)	(683,477,271,021.85)	(1,059,605,803,112.82)	(903,163,035,532.00)
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>22,253,643,172.00</b>	<b>22,906,544,524.00</b>	<b>23,939,090,241.00</b>	<b>30,207,942,281.69</b>	<b>31,044,412,299.90</b>	<b>89,198,201,239.53</b>
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
1.5.2	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
1.5.3	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2,995,405,000.00	2,995,405,000.00	2,995,405,000.00	2,995,405,000.00	2,995,405,000.00	3,272,269,623.00
1.5.4	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2,978,202,500.00	2,978,202,500.00	2,978,202,500.00	2,978,202,500.00	2,978,202,500.00	-
1.5.5	Aset Tidak Berwujud	3,484,490,234.00	3,930,230,657.00	3,965,230,657.00	1,339,506,112.69	1,093,681,693.40	1,247,867,554.56
1.5.6	Aset Lain-lain	12,795,545,438.00	13,002,706,367.00	14,000,252,084.00	22,894,828,669.00	23,977,123,106.50	84,678,064,061.97
1.5.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>26,271,878,264.91</b>	<b>29,535,045,722.93</b>	<b>21,077,397,345.77</b>	<b>14,549,067,299.67</b>	<b>38,778,353,764.93</b>	<b>57,702,152,300.27</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>26,188,491,981.68</b>	<b>29,506,715,291.70</b>	<b>21,077,397,345.77</b>	<b>13,292,228,598.67</b>	<b>23,018,371,084.93</b>	<b>46,097,087,620.27</b>
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	3,816,018.00	5,075,660.00	-	2,163,360.00	8,419,331.00
2.1.2	Utang Bunga	-	7,972,714.25	-	-	-	-
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	74,158,961.00	53,450,839.75	28,330,427.98	-	1,969,998,000.00	3,868,368,000.00
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	-	621,746,256.86	1,098,904,321.38	1,611,315,926.01	1,358,495,277.93	1,089,557,125.55
2.1.5	Utang Beban	-	2,790,849,552.00	2,609,487,608.92	1,288,871,930.00	1,380,927,435.00	1,697,796,357.00
2.1.6	Utang kepada pihak ketiga	26,114,333,020.68	26,028,879,910.84	17,335,599,327.49	10,392,040,742.66	18,306,787,012.00	39,432,946,806.72
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>83,386,283.23</b>	<b>28,330,431.23</b>	<b>-</b>	<b>1,256,838,701.00</b>	<b>15,759,982,680.00</b>	<b>11,605,064,680.00</b>
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	15,759,982,680.00	11,605,064,680.00
2.2.2	Utang Luar Negeri	83,386,283.23	28,330,431.23	-	1,256,838,701.00	-	-
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>1,694,275,410,734.90</b>	<b>1,421,305,841,435.37</b>	<b>1,611,479,929,268.68</b>	<b>1,785,260,794,245.09</b>	<b>1,660,965,926,286.16</b>	<b>1,910,463,462,670.14</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1,720,547,288,999.81</b>	<b>1,450,840,887,158.30</b>	<b>1,632,557,326,614.45</b>	<b>1,799,809,861,544.76</b>	<b>1,699,744,280,051.09</b>	<b>1,968,165,614,970.41</b>

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Berdasarkan neraca daerah tersebut di atas, dapat diperoleh beberapa informasi berkaitan dengan beberapa hal yaitu rasio lancar, rasio cair (quick rasio), rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal. Uraian masing-masing rasio adalah sebagai berikut:

**a. Rasio Lancar**

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

(*Current Ratio*)

**b. Rasio Cair**

Rasio Cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan/penerimaan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

$$\text{Rasio Cair} = \frac{\text{(Aset Lancar - Persediaan)}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

(*Quick Ratio*)

**c. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*)**

Rasio hutang terhadap aset adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Aset} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

(*Debt Ratio*)

**d. Rasio Hutang terhadap Modal**

Rasio hutang terhadap Modal adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan modal yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap modal dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jumlah modal. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga.

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Modal} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

**Tabel 3.5.**  
**Perkembangan Penghitungan Neraca Daerah**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

No	Uraian	Tahun						R
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>							
1	Rasio Lancar (Kas/Hutang Jangka Pendek)	6,38	6,76	18,44	16,27	5,09	1,64	9,10
2	Rasio Cair ((Aset Lancar-Persediaan)/Hutang Jangka Pendek)	7,52	7,60	19,74	17,74	6,44	2,66	10,29
<b>B</b>	<b>Rasio Solvabilitas</b>							
1	Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio) (Total Kewajiban/Total Aset)	0,015	0,020	0,013	0,008	0,023	0,029	0,02
2	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,016	0,021	0,013	0,008	0,023	0,030	0,02

*Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun2018(data diolah)*

Dari Tabel 3.5 di atas secara ringkas dapat dilakukan analisis atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut:

- Rasio Lancar (*Current Ratio*) fluktuatif dari tahun 2013 sebesar 6,38 menjadi 1,64 pada tahun 2018 dengan rata-rata Rasio Lancar (*Current Ratio*) sebesar 9,10. Hal ini mengindasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya cukup baik, karena Pemerintah Kabupaten Rembang menerapkan kebijakan pinjaman daerah dilakukan dengan sangat hati-hati.
- Rasio Cair (*Quick Ratio*) fluktuatif pada tahun 2013 sebesar 7,52 menjadi sebesar 2,66 pada tahun 2018 dengan rata-rata Rasio Cair (*Quick Ratio*) sebesar 10,29. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya dalam kondisi baik karena berada diatas angka 1. Idealnya, rasio lancar berada pada angka 1:1 atau minimal 0,8:1 karena apabila kurang dari itu, pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan.
- Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Pemerintah Kabupaten Rembang cenderung rendah sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, yaitu sebesar 0,015 pada tahun 2013 dan naik menjadi 0,029 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam keadaan yang sehat, yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan adalah rendah.
- Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Rembang cenderung rendah sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, yaitu sebesar 0,016 pada tahun 2013 dan naik menjadi 0,030 pada tahun 2018. Hal tersebut berarti bahwa jumlah dana yang disediakan dalam

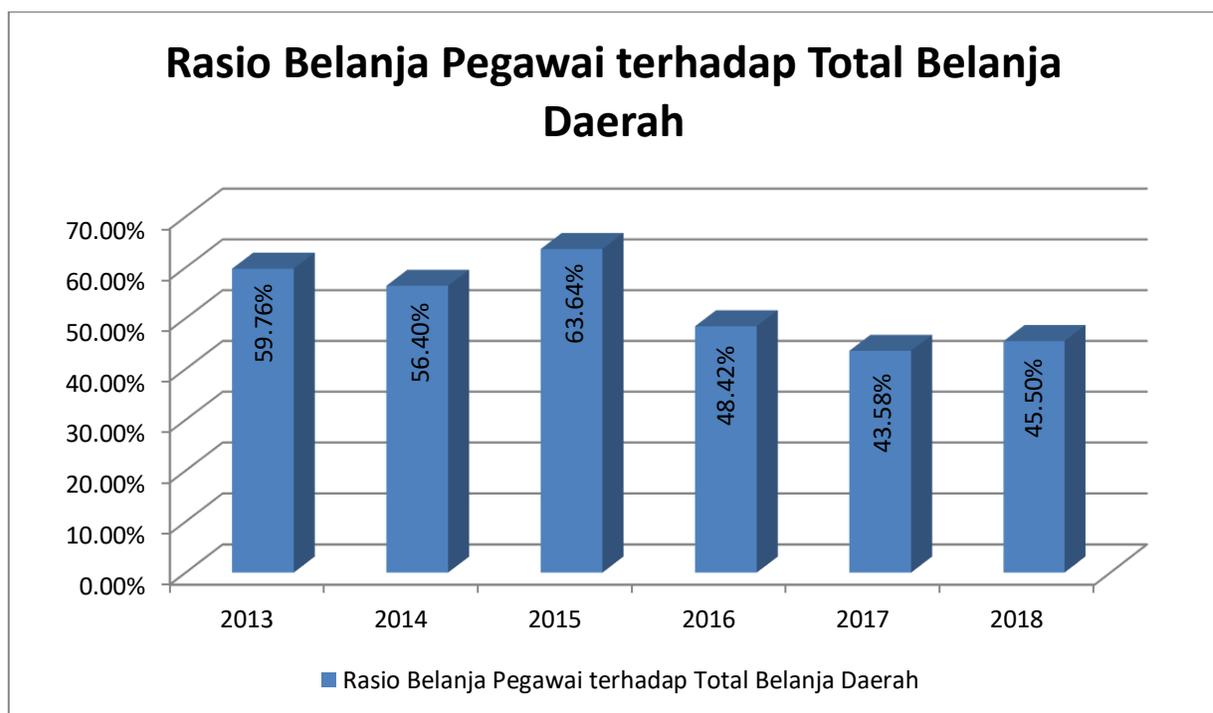
membayai pembangunan sebagian besar bersumber dari kemampuan keuangan sendiri, bukan berasal dari pinjaman kreditor/donatur/pihak ketiga.

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2018

#### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Grafik Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013-2018 seperti diperlihatkan oleh gambar 3.14 berikut ini.



**Grafik 3.14**  
**Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah**  
**Tahun 2013-2018 (%)**

*Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018*

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa selama enam tahun terakhir Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah cenderung menurun. Dengan demikian maka kabupaten Rembang mempunyai kesempatan dalam mendorong roda perekonomian melalui perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang

positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensipenerimaan daerah yang baru. Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja Langsung, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri, oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan Analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.6.**

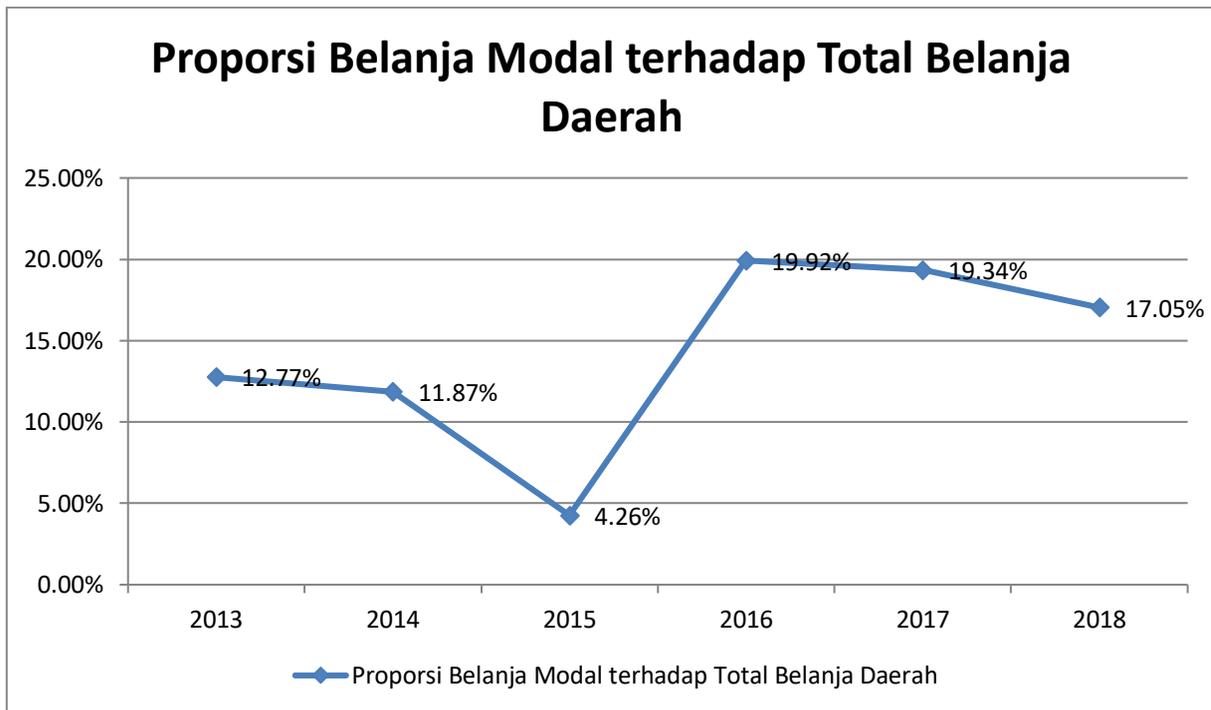
**Perkembangan Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	633,882,810,761.00	719,609,667,619.00	775,602,699,734.00	839,766,248,987.00	797,129,312,468.00	825,668,358,529.16
2	Total Belanja Daerah	1,060,672,838,714.84	1,275,910,680,987.06	1,218,804,775,992.74	1,734,304,081,928.58	1,829,088,241,098.22	1,814,662,872,214.36
3	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	59.76%	56.40%	63.64%	48.42%	43.58%	45.50%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Grafik Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 terlihat pada grafik 3.15 berikut:



**Grafik 3.15**  
**Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012-2018(%)**

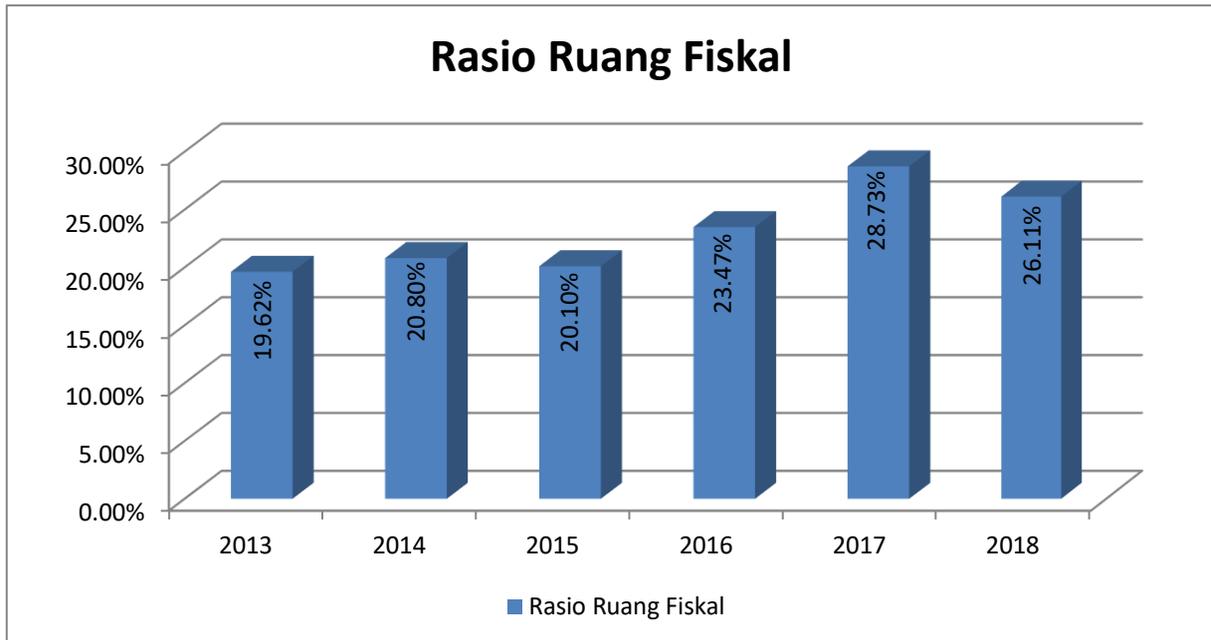
*Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah)*

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu juga dapat dilihat dari ruang fiskal. Peter Heller dalam tulisan yang dipublikasikan IMF memberikan definisi bahwa ruang fiskal adalah ruang dalam anggaran pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan sumberdaya untuk suatu tujuan tanpa membahayakan kesinambungan posisi keuangan atau stabilisasi ekonomi negara (daerah). Dari definisi di atas tampak bahwa ruang fiskal adalah “sisa” setelah rencana pengeluaran pemerintah dirinci dan diputuskan.

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan ruang fiskal daerah, yaitu total Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*), dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.

Indikator ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat *earmarked* (ditentukan penggunaannya). Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin

besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar. Grafik Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.16 berikut:



**Grafik 3.16**  
**Rasio Ruang Fiskal**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (%)**

*Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018*

Berdasarkan Gambar 3.16 terlihat bahwa ruang fiskal di Kabupaten Rembang juga mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2013 ruang fiskal yang tersedia sebesar 19,62% dari total Pendapatan meningkat pada tahun 2018 ruang fiskal di Kabupaten Rembang telah mampu mencapai sebesar 26,11% dari total pendapatan. Tentu saja kondisi ini sangat dipengaruhi dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah selama enam tahun terakhir.

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapat daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD. Kondisi defisit riil APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.

## Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,165,433,076,124.01	1,329,587,756,593.27	1,416,781,811,493.80	1,564,868,839,955.55	1,722,252,909,030.04	1,794,911,075,230.15
2	Realisasi Belanja Daerah	1,060,672,838,714.84	1,275,910,680,987.06	1,218,804,775,992.74	1,734,304,081,928.58	1,829,088,241,098.22	1,814,662,872,214.36
3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5,253,450,842.00	11,162,450,842.00	10,670,450,843.00	12,296,725,422.00	8,228,389,150.00	12,717,627,920.00
4	Defisit riil	99,506,786,567.17	42,514,624,764.21	187,306,584,658.06	(181,731,967,395.03)	(115,063,721,218.18)	(32,469,424,904.21)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.8.

## Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Unaudited
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	67,555,128,713.17	167,066,868,874.34	209,301,180,147.55	396,607,873,805.61	214,495,185,982.58	108,161,445,444.40
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	17,729,980,680.00	-

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah)

Besarnya SILPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SILPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SILPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SILPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SILPA terhadap total belanja di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2015, dengan kontribusi sebesar 32,54%. Secara umum rasio dan kontribusi SILPA terhadap Total Belanja Daerah fluktuatif. Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 3.9.

**Tabel 3.9.**  
**Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018**

Tahun	SILPA	Total Belanja	Rasio SILPA terhadap Belanja Daerah
2013	167,061,915,280.34	1,060,672,838,714.84	15.75%
2014	209,581,493,638.55	1,275,910,680,987.06	16.43%
2015	396,607,764,805.61	1,218,804,775,992.74	32.54%
2016	214,875,906,410.58	1,734,304,081,928.58	12.39%
2017	117,161,445,444.40	1,829,088,241,098.22	6.41%
2018 Unaudited	75,692,020,540.19	1,814,662,872,214.36	4.17%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah)

## BAB IV

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan kondisi Kabupaten Rembang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka masih terdapat persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan. Permasalahan pembangunan daerah tersebut tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional.

#### 4.1 Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut.

##### 4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

###### 1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Rembang tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

- a. Masih kurangnya pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan;
- b. Masih perlunya peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus;
- c. Perlunya penguatan keluarga di dalam penerapan pendidikan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan spiritualisme.

###### 2. Kesehatan

Disamping pendidikan, pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:

- a. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, serta gizi buruk;
- b. Masih ditemukannya kasus penyakit menular;
- c. Perlunya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan;
- d. Perlunya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
- e. Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan;
- f. Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan lebih proaktif atau dengan metode “jemput bola”.

###### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

###### a. Prasarana Jalan

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk

menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rembang terus dilaksanakan, namun masih terdapat permasalahan yaitu masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten Rembang yang dalam kondisi tidak baik, antara lain disebabkan:

- 1) Pada ruas jalan tertentu setiap hari selalu terjadi kelebihan beban muatan kendaraan (*tonase*) terutama jalur wilayah penambangan di kecamatan Sale, Sedan dan Gunem. Kerusakan jalan terutama terjadi pada jalur jalan kewenangan propinsi Lasem – Jatirogo terutama di sekitar kecamatan Sedan dan Sale serta jalur jalan kewenangan kabupaten di Kecamatan Sale, Sedan dan Gunem.
- 2) Mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa hutan maka banyak jalan dan jembatan penghubung antar desa / kecamatan yang berada di lahan hutan sehingga pembangunannya harus melalui prosedur kerjasama.
- 3) Banyak jalan kabupaten yang belum memenuhi standar lebar dan kelengkapan jalan lokal primer maupun sekunder sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.
- 5) Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan.

*b. Prasarana Sumber Daya Air*

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku, pengairan lahan pertanian dan air industri. Seiring pertumbuhan penduduk dan kompleksitas aktivitas masyarakat akan semakin meningkatkan kebutuhan air, beberapa permasalahan dalam upaya pemenuhan sumber daya air sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak;
- 2) Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku;
- 3) Kurang terpadunya pengeleloaan sumber daya air dari hulu hingga hilir sehingga ketika musim penghujan terjadi banjir di daerah hilir sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan;
- 4) Keterbatasan lahan yang dapat dijadikan tampungan air di wilayah tengah hingga hilir di Kabupaten Rembang.

*c. Air Minum dan Sanitasi*

Ketersediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi yaitu :

- 1) Keterbatasan air baku sebagai bahan baku air minum;
- 2) Kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah desa dalam pengembangan SPAM di wilayahnya;
- 3) Sulitnya merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat terkait pelayanan sanitasi;
- 4) Capaian sanitasi masih merupakan akses dasar belum memenuhi standar kelayakan;
- 5) Keterbatasan lahan yang tersedia untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) baik setempat di desa/ kelurahan maupun terpusat di kecamatan / kabupaten.

- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses pelayanan air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d. *Penataan Ruang*

Penataan ruang menjadi hal strategis dalam pembangunan terutama sebagai matra spasial pembangunan. Untuk itu, diperlukan perhatian pada permasalahan-permasalahan di sektor penataan ruang yaitu : kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada penyediaan RTH perkotaan, pengelolaan dan pelestarian kawasan dengan fungsi lindung, pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan percepatan perwujudan kawasan industri sebagai salah satu kawasan strategis provinsi.

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Permasalahan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

- 1) Masih ada kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang terutama di wilayah pesisir. Kekumuhan itu terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang umumnya rendah, juga adanya ancaman abrasi dan akresi, serta kondisi lahan pantai yang sulit untuk dikembangkan sistem drainase yang memadai;
- 2) Masih terdapat selisih antara jumlah keluarga dengan jumlah rumah / kekurangan rumah (backlog);
- 3) Masih banyak rumah yang tidak layak huni;
- 4) Penataan dan pengembangan kawasan permukiman tradisional belum dilakukan secara optimal salah satunya di kawasan Kota Lasem;
- 5) Kurang optimalnya pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan.

**5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Guna meningkatkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Rembang, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta penanggulangan bencana. Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di jalur utara Pulau Jawa merupakan wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Rembang ini dilewati jalur utama perekonomian di Jawa Tengah dan juga Pulau Jawa bagian utara sehingga tingkat mobilitas transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan ancaman gangguan ketertiban dan keamanan.

Salah satu amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bencana merupakan salah satu indikator dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara umum Indonesia berada di kawasan rawan bencana dalam garis cincin api (*ring of fire*) dan berada di daerah patahan yang rawan terjadi gempa bumi. Begitu pula di Kabupaten Rembang yang teridentifikasi adanya Patahan Lasem sehingga rawan terjadi gempa bumi. Selain itu banyak bencana lain yang terjadi meliputi tanah longsor, abrasi, angin putting beliung dan banjir.

Tantangan dan permasalahan terkait urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu perhatian adalah

- 1) Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama terkait pemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikan

masalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;

- 2) Belum adanya kajian pemetaan resiko bencana yang merupakan dasar penanganan bencana di Kabupaten;
- 3) Kurangnya pelibatan masyarakat sebagai agen utama dalam penanggulangan bencana.

## 6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Rembang senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

- a. Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor;
- b. Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya;
- c. Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial;

### 4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Rembang telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian kedepan antara lain:

- a. Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah termasuk pekerja rumahan;
- b. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;
- c. Masih terdapatnya anak putus sekolah yang terpaksa harus bekerja.

#### 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian yaitu belum optimalnya kesetaraan gender di berbagai bidang;

#### 3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu: Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);

#### 4. **Pertanahan**

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan aset tanah kas desa. Terkait hal tersebut permasalahan pertanahan yang muncul diantaranya:

- a. Belum optimalnya pengelolaan pertanahan;
- b. Belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik kabupaten, propinsi maupun pusat. Salah satunya pembangunan embung, pembangunan sarana prasarana permukiman, pasar hewan dan reaktifasi kereta api.
- c. Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

#### 5. **Lingkungan Hidup**

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan meliputi:

- a. Meningkatnya jumlah timbunan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan;
- b. Kurang optimalnya pengelolaan / pemilahan sampah pada sumbernya sehingga sampah yang terangkut ke TPA masih cukup besar.
- c. Masih tingginya pencemaran lingkungan sebagai dampak aktivitas industri pengolahan hasil perikanan dan industri batik.
- d. Penanganan konservasi lahan kritis belum optimal sehingga kualitas sumber daya air semakin menurun karena berkurangnya area resapan air.
- e. Masih rendahnya capaian luasan Ruang Terbuka Hijau Publik yang tersedia.
- f. Keterbatasan ketersediaan lahan pemerintah untuk RTH Publik.

#### 6. **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, masih dihadapkan permasalahan meliputi:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik diantaranya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian;
- b. Rendahnya konsistensi penggunaan data kependudukan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan.

#### 7. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum semua masyarakat dan desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap manfaat aset milik negara, pengetahuan, teknologi, alat produksi, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber daya keuangan;
- b. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi

dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;

- c. Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa yang masih perlu ditingkatkan.

#### **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian adalah penggerakan masyarakat untuk sadar ber-KB dan perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

#### **9. Perhubungan**

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Rembang. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a. Belum optimalnya fungsi terminal;
- b. Potensi kerawanan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan nasional masih perlu diminimalisir;
- c. Belum adanya pemantauan lalu lintas secara otomatis untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi;
- d. Keterbatasan pengembangan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi salah satunya adalah Pelabuhan Rembang serta belum terpenuhinya kelengkapan jalan di jalan kewenangan pusat dan propinsi;
- e. Belum terkoneksi dan terintegrasinya moda angkutan penumpang terutama dalam menyambut reaktifasi kereta api yang diperkirakan sebagian besar akan memanfaatkan lahan baru.

#### **10. Komunikasi dan Informatika**

Pemanfaatan aplikasi informatika dan website harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya:

- a. Masih rendahnya penggunaan sistem informasi pembangunan e-Government secara lengkap, aman, terintegrasi, dan terkelola dengan baik serta akuntabel;
- b. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet.

#### **11. Koperasi dan UKM**

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

- a. Tingkat produktifitas koperasi dan UMKM belum maksimal;
- b. Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM.

#### **12. Penanaman Modal**

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu:

- a. Belum optimalnya realisasi penanaman modal;
- b. Rendahnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Rembang.

**13. Kepemudaan dan Olahraga**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Rembang, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat provinsi, nasional dan internasional;
- b. Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar;
- c. Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta rendahnya kemitraan dengan stakeholder.

**14. Statistik**

Penyediaan data dan informasi yang reliable, up to date, dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa permasalahan yang kerap dihadapi terkait dengan data dan informasi antara lain validitas data dan informasi, belum link and match antara data yang tersedia dengan dinamika kebutuhan pembangunan, serta belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

**15. Persandian**

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem.

**16. Kebudayaan**

Nilai-nilai budaya Kabupaten Rembang merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya menjumpai berbagai persoalan antara lain adanya indikasi yang mengarah pada melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda, terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan, serta didukung kondisi sarana prasarana dan pengelolaan cagar budaya yang belum optimal untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal.

**17. Perpustakaan**

Guna mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Rembang, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat, terbatasnya jumlah perpustakaan, dan tenaga keperustakaan.

**18. Kearsipan**

Salah satu pendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Rembang, penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya

peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sarana prasarana yang belum memadai.

#### **4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

##### **1. Kelautan dan Perikanan**

Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjaga produksi perikanan dan garam, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui usaha pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
- b. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan;
- c. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap akibat adanya regulasi pemerintah yang sulit diterapkan di daerah.

##### **2. Pariwisata**

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, yaitu:

- a. Belum optimalnya pengembangan DTW;
- b. Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.

##### **3. Pertanian**

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi off-farm upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- a. Rendahnya curah hujan di kabupaten Rembang mengakibatkan ketersediaan air untuk usaha pertanian kurang;
- b. Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian;
- c. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;

##### **4. Perdagangan**

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu: rendahnya daya saing pasar, serta sarana prasarana pusat perdagangan;

## 5. Industri

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi;
- b. Belum optimalnya inovasi teknologi industri;

## 6. Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Masalah utama urusan transmigrasi yaitu terbatasnya kuota dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding dengan animo calon transmigran.

### 4.1.4. Fungsi Penunjang Pemerintahan

#### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi awal dalam proses pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, unpredictable dan unbounderless menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan. Sejalan dengan hal tersebut terdapat permasalahan meliputi:

- a. Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;
- b. Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;
- c. Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai *feed back* dalam proses pembangunan daerah.

#### 2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjawab beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain: belum optimalnya inventarisasi asset daerah dan pemanfaatan asset dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

#### 3. Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN Pemerintah Provinsi Kabupaten Rembang yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN;
- b. Sistem penilaian kinerja ASN yang belum terlalu akurat.

#### 4. Pengawasan

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Permasalahan lain yang dihadapi antara lain tentang bagaimana kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus selalu dapat meningkat, dan bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap terselenggara dengan baik dalam dinamika pergantian ASN.

##### 4.1.5. Fungsi lain

Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum cukup untuk menjawab tantangan kinerja pemerintahan kedepan. Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Perbaiki nilai pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal;
2. Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP;
3. Perlu peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### 4.2 Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kabupaten Rembang yakni “Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang”. Masalah utama tersebut dirumuskan menjadi 5 (lima) masalah pembangunan Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1. Tingginya Angka Kemiskinan;
2. Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan;
3. Rendahnya Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
4. Kurangnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; dan
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Untuk lebih memahami secara mendalam maka keterkaitan antar permasalahan utama tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar 4.1



**Gambar 4.1**  
**Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan**  
**Kabupaten Rembang**

Berikut penjabaran permasalahan utama pembangunan Kabupaten Rembang berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kabupaten Rembang:

#### 4.2.1 Tingginya Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidak-mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga secara mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Berdasarkan rilis BPS, Kabupaten Rembang merupakan salah satu Kabupaten di Kabupaten Rembang dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi, di mana persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang tahun 2017 sebesar 18,35%, Jumlah penduduk miskin sebanyak 115.190 jiwa. Capaian tersebut turun 0,19% bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 18,54% dengan jumlah penduduk miskin 115,490 jiwa. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Kabupaten Rembang, Kabupaten Rembang menempati posisi ke lima terbawah setelah Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga. Posisi ini juga tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya (Kab. Pati, Kudus, Jepara, Blora dan Grobogan). Capaian angka kemiskinan Kabupaten Rembang tahun 2017 sebesar 18,35% masih dibawah dari target RPJMD Kabupaten Rembang sebesar 16,11%. Angka Garis kemiskinan Kabupaten Rembang tahun 2017 sebesar Rp. 354.440,- lebih tinggi dari Provinsi Kabupaten Rembang.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan tingginya angka kemiskinan dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.1.**  
**Rumusan Permasalahan: Tingginya Angka Kemiskinan**

<b>Permasalahan</b>	<b>Akar Masalah</b>
1. Kualitas & kompetensi tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja dan rendahnya kemampuan wirausaha masyarakat	Kurangnya fasilitas dan pelayanan kebutuhan pelatihan dan tenaga kerja
	Kurangnya keterampilan dan kemampuan wirausaha masyarakat
2. Belum optimalnya penanganan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum optimalnya peran serta pemangku kepentingan dalam penanganan PMKS
	Belum optimalnya layanan perlindungan, penanganan PMKS
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses terhadap peluang kerja	Kurangnya kemampuan dan kesempatan berusaha bagi keluarga miskin
4. Belum optimalnya perkembangan lembaga ekonomi desa	Kurangnya fasilitasi terhadap layanan lembaga ekonomi desa
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi desa

#### 4.2.2 Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dalam perwujudan *good government* di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa

penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Pembangunan berkelanjutan menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang belum optimal, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rembang yang belum pernah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat yang diperoleh masih sebatas Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan Daerah lebih baik. Apabila pemerintah bisa mencapai predikat WTP berarti good dan clean government dapat terwujud. Oleh karena itu pengelolaan tata pemerintahan perlu terus ditingkatkan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.2.**

**Rumusan Permasalahan: Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

<b>Permasalahan</b>	<b>Akar Masalah</b>
1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, SP dan SPM
	Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
	Belum optimalnya budaya kerja aparatur
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan
	Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan OPD
	Belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur
	Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP
	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
3. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan perundangan
	Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman

**4.2.3 Rendahnya Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian**

Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat kehidupan

masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu problem yang menghambat percepatan kemajuan di Kabupaten Rembang adalah masih belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro. Selain itu masih belum optimalnya inovasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing. Secara teori, variabel daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan Kabupaten dalam menarik investasi untuk meningkatkan struktur perekonomian.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Dengan begitu inovasi akan tumbuh sehingga meningkatkan produktivitas perekonomian dan daya saing daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kabupaten Rembang dan kota/kabupaten lain di sekitarnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang di tahun 2017 sebesar 6,18%, angka ini lebih tinggi dari LPE tahun 2016 yaitu sebesar 5,23%. Angka ini lebih tinggi dari LPE Provinsi Kabupaten Rembang (5,27%) dan Nasional (5,07%). Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3.**

**Rumusan Permasalahan : Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan**

<b>Permasalahan</b>	<b>Akar Masalah</b>
(1) Belum optimalnya kontribusi sektor-sektor potensial perekonomian daerah	Belum optimalnya pengelolaan sektor-sektor potensial perekonomian daerah
(2) Belum optimalnya penanganan kemudahan berinvestasi	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan iklim investasi
(3) Belum optimalnya Kontribusi kategori pada sektor perdagangan dan jasa	Distribusi produk belum efektif dan efisien
	Masih kurangnya sentra usaha / produk ekonomi lokal
	Akses permodalan dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM) masih terbatas
	Belum optimalnya hubungan kerjasama usaha antara IKM dengan industri besar
(4) Belum berkembangnya Industri ekonomi kreatif	Belum tertatanya Industri ekonomi kreatif

**4.2.4 Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya hampir mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kabupaten Rembang akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif dan berkelanjutan. Belum optimalnya kinerja pelayanan infrastruktur menjadi permasalahan di Kabupaten Rembang.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Ketaatan pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Rembang adalah lingkungan pemukiman. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah Pusat mencanangkan program 100-0-100 yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh Kabupaten pada tahun 2019. Kabupaten Rembang memiliki persentase rumah tangga kumuh yang cukup tinggi. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk mencapai target Nasional 0% kawasan kumuh.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum optimalnya pengendalian tata ruang dan penyediaan Infrastruktur dasar dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4.**

**Rumusan Permasalahan : Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar**

<b>Permasalahan</b>	<b>Akar Masalah</b>
1. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan tata ruang	Belum optimalnya penerapan tata ruang di masyarakat.
2. Belum seluruh permukiman memiliki sarana dan prasarana dasar yang berkualitas	Ketersediaan lahan untuk instalasi sanitasi komunal di kawasan pesisir Kabupaten Rembang sangat sulit didapatkan.
	Masih terdapat kondisi lingkungan permukiman yang masih buruk terutama di kawasan pesisir.
	Masih banyak rumah masyarakat yang belum memenuhi standar kelayakan bangunan.
	Kurangnya kualitas dan kuantitas air baku untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.
	Kurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan akibat minimnya lahan yang tersedia.
	Masih perlunya pengoptimalan upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah
3. Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang masih belum optimal	Masih terjadi pencemaran air dan udara
	Penanganan hutan dan lahan kritis belum optimal
4. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas kawasan-kawasan strategis	Masih perlunya pengoptimalan Integrasi jaringan jalan dan fasilitas jalan
	Perlunya peningkatan standar jalan sesuai dengan kelas jalan terutama jalan kolektor dan jalan lokal di kawasan pertambangan

Permasalahan	Akar Masalah
	Masih perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum masal Masih adanya pengusaha yang tidak mengindahkan tonase sehingga perlu dibangun jembatan timbang terutama di kawasan pertambangan serta penindakan pengusaha secara tegas Masih perlunya penambahan dan pengoptimalan Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi

#### 4.2.5 Rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Rembang berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain belum optimalnya akses dan mutu pendidikan, belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh sektor ekstratif skala besar. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan.

Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi SDM yang belum berkualitas adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya.

Permasalahan terkait pendidikan dan kesehatan tersebut terangkum dalam sebuah indikator impact yakni Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Rembang mencapai nilai 68,95. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Kabupaten Rembang yang sebesar 70,52.

Capaian indikator komposit IPM Kabupaten Rembang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: (1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 74,32; (2) Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling) sebesar 12,04 tahun; serta (3) Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling) sebesar 6,94 tahun; dan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan yang didekati dengan indikator Paritas Daya Beli (PPP) yang sebesar Rp. 9.736,- (ribu rupiah per tahun). Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Perlu Ditingkatkan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut.

**Tabel 4.5.**

#### **Rumusan Permasalahan : Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Permasalahan	Akar Masalah
1. Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan	Rendahnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
	Belum optimalnya kualitas sarana prasarana pendidikan
	Belum meratanya akses layanan pendidikan

2. Rendahnya keberdayaan gender serta perlindungan anak	Kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
3. Rendahnya tingkat derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pergerakan peran serta masyarakat dalam budaya hidup sehat
	Rendahnya standar kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	Belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis

### 4.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

#### 4.3.1 Lingkungan Strategis

##### 1. Lingkungan Global

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarui yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Sebagai kabupaten yang telah dan didorong untuk menjadi Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Rembang antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/MDGs), kondisi perekonomian global yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (global warning/climate change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

##### a. Sustainable Development Goals (SDG's)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni Millenium Development Goals (MDGs). Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. Millenium Development Goals (MDGs) memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia

pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, Amerika Serikat. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap

keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Rembang, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah.

#### **b. Ancaman krisis ekonomi global**

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan pertengahan tahun 2016, tak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena “Brexit” atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Rembang yang berpengaruh pada perlambatan pemulihan ekonomi.

#### **c. Antisipasi perubahan iklim global (*global warming/climate change*)**

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

#### **d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat**

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang

mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

## 2. *Lingkungan Nasional*

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang juga harus memperhatikan lingkungan strategis nasional selama lima tahun kedepan, antara lain:

- a. Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut dijadikan sebagai satu pondasi penguat bangunan bangsa. Namun disisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa potensi kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa.
- b. Kebijakan pembangunan nasional di Kabupaten Rembang. Kebijakan tersebut yaitu pembangunan infrastruktur strategis berupa rencana penghidupan kembali jalur perkeretaapian lintas Pantura Jawa Tengah. Pembangunan infrastruktur strategis ini memberikan peluang bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Rembang.
- c. Bonus demografi, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati manfaat bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan bergesernya struktur umur penduduk dimana penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Perubahan struktur tersebut memungkinkan meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*). Apabila dibarengi dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, serta didukung dengan kebijakan menjaga penurunan fertilitas, dan peningkatan literasi tentang tabungan (*saving*) maka manfaat adanya bonus demografi akan dapat terwujud.

Selain memperhatikan lingkungan strategis, dalam penentuan isu strategis pembangunan daerah dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu global, nasional, maupun regional yang teridentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 4.6.**  
**Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah**

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN 2014-2019)	Isu Daerah (RPJPD 2005-2025)
1. Kemiskinan	1. Stabilitas politik dan keamanan	1. Kemiskinan, pengangguran dan rendahnya kualitas SDM
2. Pangan dan Gizi	2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien	2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Alam
3. Kesehatan	3. Pemberantasan korupsi	3. Kualitas dan kuantitas infrastruktur belum memadai
4. Pendidikan	4. Pertumbuhan ekonomi	4. Rendahnya minat investasi
5. Gender	5. Percepatan pemerataan dan keadilan	5. Globalisasi dan Perdagangan Bebas
6. Air bersih dan sanitasi	6. Keberlanjutan pembangunan	6. Krisis Energi
7. Energi	7. Peningkatan kualitas SDM	7. Degradasi Lingkungan
8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	8. Kesenjangan antar wilayah	
9. Infrastruktur	9. Percepatan pembangunan kelautan	
10. Kesenjangan		
11. Kota dan Permukiman		
12. Produksi & konsumsi berkelanjutan		
13. Perubahan iklim		
14. Sumberdaya kelautan		
15. Ekosistem daratan		
16. Masyarakat inklusif & damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan		
17. Kemitraan global		

### 3. Hasil Telaahan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

Skenario rekomendasi penyempurnaan KLHS merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Rembang, serta indikator kinerja daerah maupun indikator dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021.

Secara rinci rekomendasi KLHS untuk dokumen RPJMD sebagai berikut :

1. BAB I : menambahkan dasar dan uraian korelasi antara KLHS dan SDGs. (Halaman 6)
2. BAB II : menambahkan data kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta menambahkan data capaian indikator SDGs yang sesuai dengan kondisi daerah diutamakan untuk indikator yang tidak masuk dalam Indikator Makro, Indikator *Outcome*/Program dan Indikator Renstra.
3. BAB III : menambahkan analisis *share* Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi untuk melihat tingkat kemandirian daerah.

Terkait dengan analisis tersebut maka perlu dilakukan beberapa hal, antara lain: (1) Evaluasi kualitas *spending* dari APBD dapat dideteksi dengan menggunakan analisis penandaan anggaran (*budget tagging*) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat, (2) Evaluasi secara menyeluruh berbagai kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD yang selama ini dilakukan oleh OPD yang terkait dan (3) mencari sumber pendanaan lain.

4. BAB IV : melengkapi isu strategis dari hasil KLHS.
5. BAB V, VI, VII dan VIII :
  - a. Bab V : indikator yang sifatnya makro daerah dan Bab VI, VII : indikator yang sifatnya outcome program.
  - b. Indikator SDGs selain point 5.a maka akan dimasukkan dalam Renstra.

### 4.3.2 Isu Strategis Kabupaten Rembang

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan Provinsi Kabupaten Rembang, perbandingan dengan Kabupaten sekitar, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Rembang, maka isu dan kebijakan serta permasalahan pembangunan yang ada selama beberapa periode pembangunan perlu dikaji kembali untuk penetapan isu strategis Kabupaten Rembang pada pelaksanaan pembangunan periode 2016-2021 sebagai berikut:

#### 1. Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di Kabupaten Rembang mengingat terdapat 15,41% penduduk Kabupaten Rembang yang terkategori miskin pada tahun 2018. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial, yang akan dilaksanakan melalui Misi II RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup, dengan tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup. Pembangunan penanganan kemiskinan dilakukan dengan:

- a. mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

#### 2. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* melalui reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan optimal di Kabupaten Rembang. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan *E-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sudah banyak dilakukan namun belum optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Beberapa pelayanan publik berbasis IT belum semuanya dapat diakses masyarakat. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan *E-government* ini cukup besar, mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi IT terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pada sisi perencanaan pembangunan daerah, implementasi proses perencanaan tahunan dan 5 tahunan belum berjalan optimal, termasuk ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan.

#### 3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Struktur perekonomian daerah Kabupaten Rembang yang didominasi oleh sektor pertanian dan industri pengolahan, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain perekonomian yang didominasi oleh sektor industri pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi

kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal berupa usaha mikro dan koperasi harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah.

Isu Strategis Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah akan dijawab melalui Misi II RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.

Namun harus diakui bahwa karakter dan kontribusi nyata sektor ekonomi kreatif belum secara optimal diberdayakan. Untuk itu, ke depan keterlibatan pemerintah Kabupaten Rembang, baik secara finansial melalui anggaran, maupun secara peran fasilitator dan kontributor pendukung harus lebih ditingkatkan. Dukungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui pembangunan pusat kreatif (creative center), pengembangan kawasan kreatif, pemberian penghargaan di bidang kreatif dan inovasi, dukungan riset & pengembangan bagi produk lokal Kabupaten Rembang yang memiliki kreasi unik, dan lain sebagainya. Selain itu, sektor pariwisata terkait dengan ekonomi kreatif juga mulai tumbuh di Kabupaten Rembang. Munculnya kawasan wisata bahari, wisata religi, dan wisata alam semakin diakui oleh masyarakat Rembang dan sekitarnya. Tumbuhnya hotel berbintang juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Rembang. Potensi creative tourism ini patut untuk diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah. Isu Strategis berkaitan dengan Ekonomi Kreatif, Iklim Usaha, dan Pariwisata sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- a. Peningkatan Investasi daerah;
  - b. Peningkatan Kinerja ekonomi kreatif
  - c. Peningkatan Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah.
4. **Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar**

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan daerah diperlukan keterpaduan dan keserasian pembangunan wilayah. Instrument utama yang menjadi pedoman dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan wilayah tersebut adalah tata ruang. Tata Ruang sebagai matra ruang pembangunan menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan. Pembangunan daerah yang berpedoman pada rencana tata ruang akan mewujudkan keseimbangan ruang sekaligus mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas.

Tata ruang sendiri menyangkut dua muatan utama yaitu struktur ruang dan pola ruang. Pola ruang mengatur alokasi peruntukan ruang untuk menyeimbangkan fungsi lindung dan fungsi budidaya. Sedangkan struktur ruang mengatur mengenai simpul simpul kegiatan wilayah yang memacu perkembangan ekonomi serta jaringan-jaringan penghubung antar simpul. Yang perlu diperhatikan di Kabupaten Rembang adalah implementasi dari peraturan tata ruang. Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang banyak menimbulkan dampak lingkungan misalnya terjadinya pencemaran air dan udara serta terjadinya banjir.

Sementara itu untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas simpul-simpul yang di Kabupaten Rembang membutuhkan

infrastruktur jalan yang memadai. Capaian infrastruktur jalan kewenangan kabupaten yang berada dalam kondisi baik baru mencapai 67,9 % pada tahun 2018. Untuk semakin menggairahkan perekonomian di Kabupaten Rembang perlu peningkatan dan penambahan infrastruktur jalan. Selain itu untuk memperlancar arus barang dan orang di Kabupaten Rembang juga perlu ditingkatkan kondisi sarana dan prasarana perhubungan terutama terkait dengan penyediaan angkutan masal intermoda yang terkoneksi dengan kabupaten sekitar. Hal ini selaras dengan akan dilakukannya reaktivasi jalur kereta api Rembang-Pati-Kudus-Semarang.

Permasalahan utama yang berkaitan dengan pelayanan infrastruktur prasarana dasar di Kabupaten Rembang adalah penyediaan air baku. Penyediaan baku merupakan kunci dari terwujudnya amanah Sustainable Development Goals (SDGs) terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak. Akses air minum di Kabupaten Rembang sudah mencapai 84,9 % pada tahun 2018 namun secara kuantitas yang memenuhi standar layak baru sebagian kecil. Minimnya debit air baku serta kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diiringi dengan reklamasi menyebabkan penurunan debit air baku di Kabupaten Rembang. Perlu mengoptimalkan potensi air baku di Kabupaten Rembang dengan pembangunan-pembangunan embung dan penampung air permukaan lainnya dalam skala besar.

Sementara itu peningkatan akses sanitasi dan pemenuhan ruang terbuka hijau sebagai salah satu jalan peningkatan infrastruktur permukiman terhambat penyediaan lahan. Kondisi sanitasi di wilayah pesisir Kabupaten Rembang sangat memprihatinkan namun lahan yang tersedia untuk pembangunan instalasi pengolahan limbah secara komunal terhambat akibat tidak tersedianya lahan. Masyarakat juga sulit untuk merubah perilakunya yang tidak hygiene. Penyediaan ruang terbuka hijau sebagai area rekreatif masyarakat sekaligus resapan air masyarakat juga terhambat ketersediaan lahan.

Isu strategis yang berkaitan dengan pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar antara lain:

- a. Pengembangan jaringan jalan sesuai dengan standar kelas jalan
- b. Penataan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Rembang, Lasem, Kragan dan Pamotan
- c. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman
- d. Pengembangan sarana dan prasarana kelengkapan keselamatan lalu lintas jalan
- e. Pengembangan jaringan prasarana perkereta-apian sesuai dengan kewenangan.
- f. Pembangunan embung dan penampungan air permukaan
- g. Pengembangan ruang terbuka hijau terutama di kawasan perkotaan Rembang dan Lasem

##### 5. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran. Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan pelayanan dasar SDM. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana sesuai standar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan karakter, pengembangan nasionalisme substansi, dan pendidikan inklusi.

Pendidikan sebagai modal pembangunan jangka panjang bagi pembangunan suatu daerah. Tingkat pendidikan yang belum sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, yakni 9 (sembilan) tahun, tercermin dari lamanya rata-rata anak sekolah di Kabupaten Rembang yakni 6,94 tahun (2017). Masih lemahnya ekosistem pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan lain di bidang pendidikan antara lain rendahnya tingkat pemerataan pelayanan pendidikan, ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan, keteterjangkauan pelayanan pendidikan, belum optimalnya kualitas pendidikan dan belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan non formal serta PAUD.

Isu Strategis berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- c. Peningkatan keberdayaan gender dan perlindungan anak

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. VISI**

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kabupaten Rembang untuk tahun 2016-2021. Visi tersebut merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur untuk menggambarkan agenda yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator sehingga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”**

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawahini:

##### **5.1.1 Masyarakat sejahtera**

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan, selain itu terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Disisi lain dapat diwujudkan melalui sistem hukum, politik, sosial dan budaya.

##### **5.1.2 Semangat Kebersamaan**

Semangat adalah keadaan pikiran batin tergerak untuk melakukan suatu tindakan (kekuatan/dorongan dari dalam) (Kamus besar Bahasa Indonesia). Jadi semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Apabila kita memiliki semangat bagus maka sikap dan perilakunya biasanya terlihat dinamis.

Sedangkan kebersamaan adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional saja. Sehingga semangat kebersamaan disini mengandung semangat bersama dalam harmoni kerja membangun kabupaten rembang.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan, dengan membentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang demokratis dan beradab serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu maka diperlukan kebersamaan sikap kegotongroyongan (kerjasama), keterbukaan dan saling menghargai (toleransi) yang selalu ditumbuhkembangkan. Pembangunan itu mempunyai semangat pembangunan menuju Rembang yang “*madani*”. dalam Falsafah **Rembang Madani** menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan karakter baik dalam kerangka pendidikan formal maupun pendidikan nonformal (dalam keluarga)

### 5.1.3 Pemberdayaan Masyarakat

Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri. Membangun masyarakat bukan semata mata mengintroduksi dan mengimplementasikan permasalahan ekonomi dan teknologi tetapi lebih pada persoalan harkat martabat manusia. Membangun masyarakat terkait dengan memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadi prioritas yaitu bentuk kontribusi riil untuk pelayanan dasar, aspirasi masyarakat yang terefleksi pada prioritas program pembangunan daerah, dan keterkaitan dalam perekonomian dan politik. Yang mana kesemuanya diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat terutama kaum miskin menjadi lebih baik.

### 5.1.4 Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan suatu yang baru dengan cara kreatif dan atau penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memberikan nilai tambah. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya dan juga resiko. Disini diperlukan suatu keberanian dalam diri individu untuk melakukan tindakan membangun usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

Untuk menjawab pembangunan kewirausahaan adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, dinamis, serta memiliki integritas dan komitmen terhadap kemajuan. Pembangunan kewirausahaan sebagai motor penggerak untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat lingkungannya, memajukan perekonomian daerah, memenuhi macam macam produk dan adanya jasa.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri-ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

## **5.2. MISI**

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.  
Tujuan dari misi satu ini adalah mewujudkan Good Governance  
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.  
Tujuan dari misi ke dua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.  
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Menurunnya angka pengangguran, Meningkatnya kesejahteraan sosial, Meningkatnya usaha industri rumahan keluarga miskin.  
Selain itu juga mempunyai tujuan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut dengan sasaran Meningkatnya kualitas air dan udara dan Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.  
Tujuan dari misi ke tiga adalah meningkatkan perekonomian daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut melalui sasaran sebagai berikut : Meningkatkan Investasi daerah, Meningkatkan Kinerja ekonomi kreatif, Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.

Tujuan dari misi ke empat adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan, Meningkatkan kuantitas dan kualitas air baku, Meningkatkan akses layanan dasar, Meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.

Tujuan misi ke lima adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas Pendidikan, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Meningkatkan keberdayaan gender dan perlindungan anak.

6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.

Tujuan misi ke enam adalah Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, Meningkatkan rasa aman masyarakat.

Selain itu juga untuk Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan tertib administrasi kependudukan

7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Tujuan misi ke tujuh adalah Mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah dengan meningkatnya ketahanan pangan

Upaya untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten Rembang melalui ketujuh misi, pada dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian sistem pembangunan. Ke tujuh misi berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian jbaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang.

Kondisi Kabupaten Rembang yang lebih sejahtera akan dilihat dari kemandirian ekonomi yang meningkat, indeks reformasi birokrasi semakin membaik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat.

Kemandirian ekonomi dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Pada saat sekarang ini angka kemiskinan Kabupaten Rembang menunjukkan penurunan secara signifikan yaitu pada tahun 2015 sebesar

19,28% menurun menjadi 15,41% pada tahun 2018. Target penurunan angka kemiskinan tahun 2021 pada kisaran 12,5% - 11,5%. Selain itu, dapat dilihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,5% meningkat menjadi 6,18% pada tahun 2017. Target yang akan dicapai pada tahun 2021 pada kisaran 5,5% - 6,5%.

Nilai investasi daerah sebesar 3,478 triliun pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 5,722 triliun pada tahun 2017. Target nilai investasi yang akan dicapai pada tahun 2021 sebesar 10 triliun atau pada kisaran pertumbuhan nilai investasi sebesar 6% - 6,5%.

Skor PPH pada tahun 2015 sebesar 85,9% meningkat menjadi sebesar 87,58% pada tahun 2017. Target skor PPH pada tahun 2021 pada kisaran 87% - 88,3%.

Untuk mengukur atau mengklasifikasikan suatu daerah apakah suatu daerah itu maju, berkembang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup maka dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Rembang pada tahun 2015 dengan capaian sebesar 68,18% meningkat menjadi sebesar 68,95% pada tahun 2017. Sedangkan target capaian IPM pada tahun 2021 pada kisaran 69,8%.

Selain melihat Kemandirian suatu daerah, kabupaten Rembang juga membangun semangat kebersamaan dengan membangun kemauan untuk berjuang dan bekerja dengan kesatuan tekad guna mencapai tujuan bersama. Semua itu dapat dilihat dari kepekerintahan yang baik, yang diukur dari Indeks reformasi birokrasi suatu daerah, target nilai indeks reformasi birokrasi tahun 2021 sebesar 78-80 poin dengan kriteria B. Untuk itu keberhasilan yang lain dapat dilihat dari nilai Sakip. Kabupaten Rembang pada tahun 2015 mendapatkan nilai sakip 54 poin dengan kriteria C. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan skor 58,64 poin dengan kriteria CC. Sedangkan target tahun 2021 nilai Sakip pada kisaran 70 - 80 poin dengan kriteria B.

Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam menanggulangi kemiskinan selama ini telah dilakukan secara bersama sama dari berbagai stakeholders baik pemerintah, dunia usaha melalui CSR nya dan personal melalui BAZNAS. Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri.

### **5.3. Program Unggulan**

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 yang harus diimplementasikan yaitu :

1. Reformasi birokrasi yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
2. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja melalui metode training unit, bursa tenaga kerja dan pengembangan wirausaha muda.
3. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan  
Penanggulangan kemiskinan secara terpadu

Yang mana program ini penanganannya dimulai dari Regulasi, kelembagaan, pendataan, intervensi kegiatan, kemitraan dan pendampingan.

Regulasi sebagai upaya untuk mengatur dan mengendalikan ketentuan yang dilaksanakan semua pihak. Kelembagaan dibentuk untuk memudahkan koordinasi dan penanganan kemiskinan, dalam pengelolaan data, perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat serta pelaporan.. Kelembagaan ini dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa dan kelurahan.

Sedangkan pendataan untuk dibutuhkan untuk mengetahui penduduk yang miskin dikabupaten rembang secara pasti, sehingga intervensi penanganan sesuai dengan kebutuhan. Intervensi kegiatan dilakukan secara spesifik sesuai dengan tingkat kemiskinannya. Tingkat Miskin absolut individu dengan intervensi perlindungan sosial maupun pengurangan beban hidup dan jaminan kesehatan. Sedangkan keluarga miskin absolut intervensinya dengan meningkatkan pendapatan keluarga.

Selain itu juga memberikan bantuan keuangan desa sesuai dengan tingkat kemiskinnnya, rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; Pemberian beasiswa anak berprestasi keluarga miskin dari sekolah Dasar sampai jenjang perguruan tinggi, Penumbuhan Bumdes sesuai potensi lokal, baik untuk pengelolaan wisata desa, usaha ekonomi desa.

4. Pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.

Program pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan merupakan upaya yang dicanangkan dalam rangka menghadapi arus globalisasi melalui pembangunan potensi kewilayahan. Potensi unggulan merupakan potensi yang cukup strategis dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian daerah secara menyeluruh.

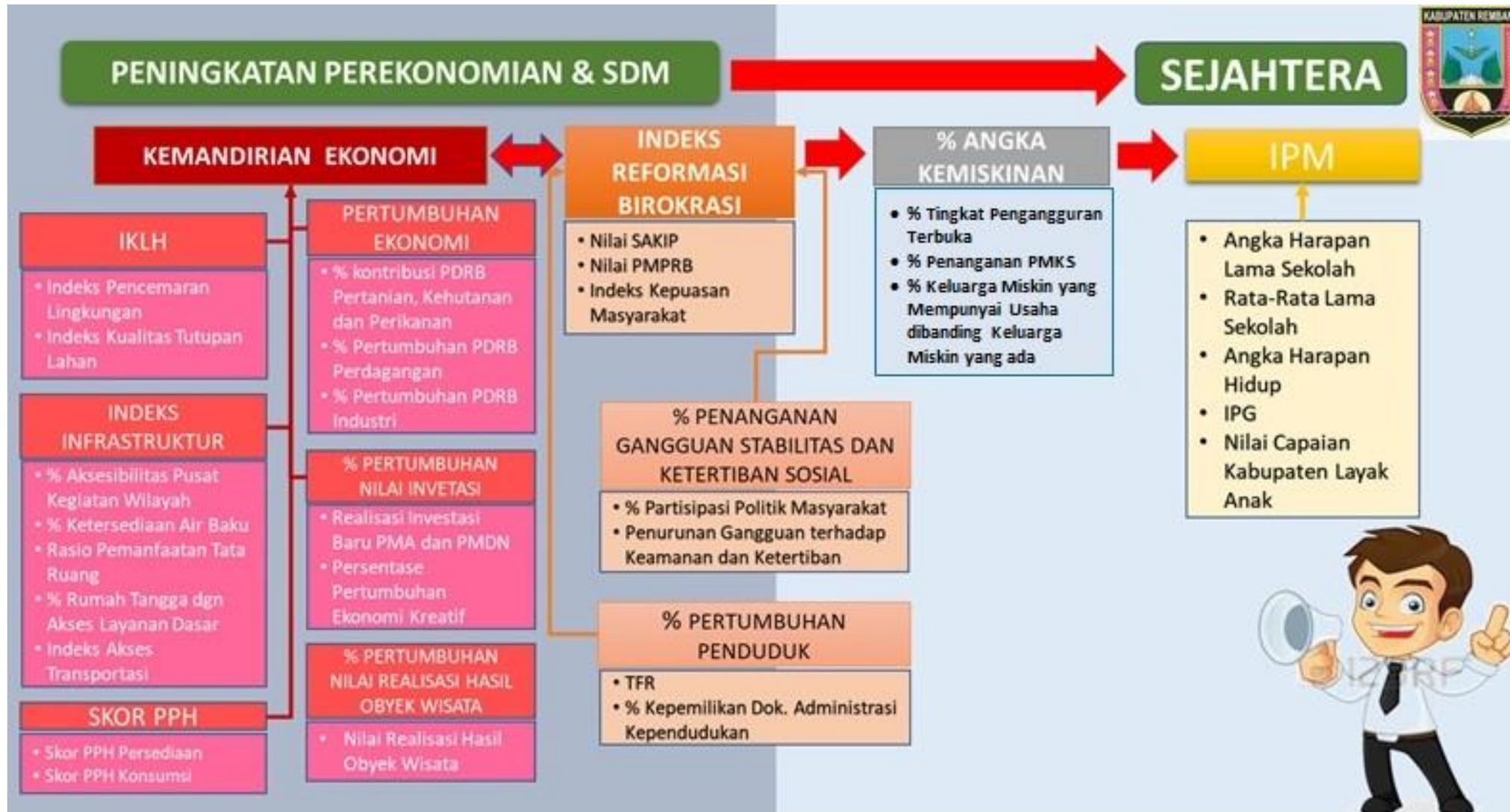
Pembangunan perekonomian berbasis potensi unggulan ditempuh melalui peningkatan ekonomi kreatif dan pertumbuhan nilai investasi. Peningkatan ekonomi kreatif dilakukan melalui pemasaran sektor pariwisata, dengan mengembangkan desa eco wisata dan daya tarik wisata serta pengembangan nilai budaya melalui kegiatan kesenian yang diwujudkan melalui penyelenggaraan festival seni dan kebudayaan. Sedangkan pertumbuhan nilai investasi dilakukan dengan meningkatkan iklim investasi melalui perbaikan sistem dan pelayanan ijin yang mudah, murah, cepat melalui mall pelayanan.

5. Pengembangan infrastruktur daerah dan kawasan strategis.

Program pengembangan infrastruktur daerah merupakan upaya terpadu untuk menciptakan kemudahan akses bagi peningkatan perekomian. Pengembangan infrastruktur daerah dilakukan melalui upaya pemerataan pembangunan. Melalui skala pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses, keterjangkauan, serta meminimalisir ketimpangan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Sedangkan, pengembangan kawasan strategis merupakan wujud kesinambungan dari upaya menciptakan pengembangan infrastruktur yang ditempuh melalui pemberian ruang, khususnya bagi pengembangan sektor pariwisata dan kawasan perdesaan. Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan perdesaan

- dikembangkan untuk mendorong kegiatan non-pertanian yang kedepannya diharapkan dapat mendukung diversifikasi pertanian. Kawasan strategis banglor merupakan salah satu pengembangan sektor kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan nilai eksteralitas baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
6. Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku.  
Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku merupakan salah satu wujud peningkatan pembangunan infrastruktur. Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku ditempuh melalui pemanenan air hujan. Pemanenan air hujan dilakukan dengan cara menanampung dan menyimpan air melalui alternatif berupa waduk, embung ataupun bendungan. Proses memanen air hujan merupakan upaya yang ditempuh untuk meningkatkan akses terhadap persediaan air yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih. Disisi lain peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses pengawasan dan akses layanan irigasi.
  7. Pengembangan layanan pendidikan yang berkualitas.  
Dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, maka pendidikan merupakan sektor yang tidak dapat dipisahkan. Keterjangkauan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang berkualitas pula. Upaya pengembangan pendidikan di Kabupaten Rembang ditempuh melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemenuhan standar isi, proses dan penilaian keberhasilan, serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.  
Disisi lain pengembangan layanan pendidikan berkualitas juga ditempuh melalui pendidikan berbasis keluarga. Pengembangan ini ditempuh melalui keikutsertaan keluarga (khususnya orang tua) untuk ikut aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran siswa di lingkungan keluarga. Disatu sisi melalui Pendidikan berbasis keluarga juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya Pendidikan seksual komprehensif, mengingat jika dibandingkan dengan lingkungan yang lain, lingkungan keluarga merupakan lingkungan terdekat yang banyak memberikan dampak pada pengembangan Pendidikan.  
Pengembangan pelayanan pendidikan berbasis keluarga juga melibatkan peran dari kelompok 'puspaga samara' (pusat pembelajaran keluarga sakinah mawwadah warahmah) untuk mencapai sasaran pendidikan yang berkualitas.
  8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan.  
Program peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan ditempuh melalui peningkatan kesadaran pentingnya kesehatan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta masih banyaknya kasus akibat buruknya pemahaman dan kualitas kesehatan di kalangan masyarakat dan keluarga. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan kesehatan, peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang kesehatan serta peningkatan keberdayaan gender.



Gambar 5.1 Kerangka Logis Pencapaian Visi

**Tabel 5.1.**  
**Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021**  
**Tahun 2020-2021**

**Visi:**

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”**

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”</b>													
1	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	1. Indeks Reformasi Birokrasi		Angka	NA	NA	NA	50-60	60-70	70-80	70-80		
		1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh	1)	Nilai SAKIP	Angka	52	55,04	58,64	50-60	60-70	70-80	70-80
				2)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Angka	62	57	NA	45-50	50-60	60-70	60-70
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3)	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	73,12	76,86	77,81	78,5	78,5-82,25)	82,26-88,30	82,26-88,30		
<b>Misi II : “Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”</b>													
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2. Persentase angka kemiskinan		%	18,54	18,35	15,41	14,5	12,18-13,18	11,07-12,07	11,07-12,07		
		3	Menurunnya angka pengangguran	4)	Persentase Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,3	3,19	2,87	2,8	2,7-2,6	2,6-2,5	2,6-2,5
				5)	Persentase penanganan PMKS	%	NA	NA	20	25	27	30	30

Tujuan	Indikator	Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi			Target			Kinerja
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		5	Meningkatnya usaha industri rumahan keluarga miskin	6)	Persentase keluarga miskin yang mempunyai usaha	%	NA	NA	55	60	65	75	75
		3. Pertumbuhan Ekonomi				%	5,23	6,18	NA	5,5-6,0	5,5-6,0	6,0-6,5	6,0-6,5
		6	Meningkatnya keberdayaan petani dan nelayan	7)	Persentase kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	27,75	27,15	NA	23-24	24-25	25-26	25-26
		7	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan	8)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,28	6,56	NA	6-6,6	6,63	6,65	6,65
		8	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	9)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	7,86	6,34	NA	6-6,4	6,45	6,5	6,5
3	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				Angka	63,65	66	46,61	46,61	58,9	61,26	61,26
		9	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	10)	Indeks pencemaran lingkungan	Angka	36,3	36,3	26,85	26,85	43,26	44,99	44,99
		10	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	11)	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	65	65	69	69	74,63	77,62	77,62

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Misi III : “Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif”													
4	Meningkatkan perekonomian daerah	5. Persentase pertumbuhan nilai Investasi		%	48,71	2,09	46,02	3-5	5-7	7-10	7-10		
		11	Meningkatnya Investasi daerah	12	Realisasi investasi baru PMA dan PMDN	Rp	5,17 Triliun	5,28 Triliun	7,71 Triliun	8 Triliun	9 Triliun	10 Triliun	10 Triliun
						%	na	na	na	na	12,5	13	13
		6. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata		%	7,68	9,76	10,67	3-5	5-10	10-15	10-15		
		13	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	14)	Nilai Realisai hasil obyek wisata	Rp	3,92 milyar	5,84 milyar	6,46 milyar	6 Milyar	7,04 Milyar	7,55 Milyar	7,55 Milyar
%													
Misi IV : Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan													
5	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah	7. Indeks infrastruktur		Angka	59,45	63,39	65,96	67,51	69,26	76,23	76,23		
		14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	15)	Persentase aksesibilitas pusat kegiatan wilayah	%	50	62	67,9	68	70	75	75
						%	37,46	33,87	30,64	32	35	40	40
						%	75	80	87	93	80	100	100
15	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku	16)	Persentase ketersediaan air baku	%	37,46	33,87	30,64	32	35	40	40		
16	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang	17)	Rasio pemanfaatan tata ruang	%	75	80	87	93	80	100	100		

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kinerja
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		17) Meningkatnya akses layanan dasar	18) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar	%	76,53	81,24	84,83	86	90	93,35	93,35
		18) Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	19) Indeks akses transportasi	Angka	57,48	59,20	60,52	62,04	66,30	76,13	76,13
Misi V : “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”											
6	Meningkatkan kualitas SDM	8. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)		Angka	68,60	68,95	69,46	70	70,96	71,18	71,18
		19) Meningkatnya kualitas pendidikan	20) Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,02	12,04	12,05	12,2	12,4	12,6	12,6
			21) Rata-rata Lama Sekolah	Angka	6,92	6,97	6,95	7,3	7,7	7,8	7,8
		20) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	22) Angka Harapan Hidup	Angka	74,27	74,32	74,39	72-73	73-74	74-75	74-75
		21) Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak	23) IPG	Angka	86,5	86,59	86,49	87,1	87,3	87,5	87,5
			24) Nilai Capaian kabupaten Layak anak	Angka	650	700	700	700	725-760	760-800	760-800
Misi VI: “Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan”											
7	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban	9. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial		%	NA	NA	NA	40-50	50-60	60-70	60-70
		22) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	25) Persentase Partisipasi politik masyarakat	%	NA	73,3	NA	74	74	74	74

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Target			Kinerja
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat		23) Meningkatnya rasa aman masyarakat	26) Persentase Penurunan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	%	NA	NA	20	20	15	10	10
8) Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	10. Persentase pertumbuhan penduduk			%	0,81	0,81	NA	0,8	0,79	0,78	0,78
		24) Menurunnya pertumbuhan penduduk	27) TFR	Angka	2,07	2,07	NA	2,05	1,97-2,00	2,00-2,03	2,00-2,03
		25) Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	28) Persentase efektifitas penyelesaian layanan administrasi dukcapil	%	NA	NA	NA	97-98	98-99	99-100	99-100
Misi VII: “Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan”											
9) Mewujudkan kedaulatan pangan	11. Skor PPH			Skor	85,4	87,58	86,8	85	86-87	87-88,3	87-88,3
		26) Meningkatnya ketahanan pangan	29) Skor PPH Ketersediaan	Skor	86,93	87,43	87,93	88	88,93	89,43	89,43
			30) Skor PPH Konsumsi	Skor	87,8	88,3	85,4	86	86,8	87,3	87,3

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran di pisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya, sasaran secara spesifik terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja “*impact*” yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Bupati Rembang pada tahun 2021. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kabupaten Rembang.

**Tabel 5.2**  
**Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021**

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU Kabupaten)	Tujuan OPD	Indikator Perangkat Daerah	OPD	
Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”					
1. Mewujudkan <i>Good Governance</i>	1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1) Nilai SAKIP	Setda (Bag. Organisasi)	
			2) Nilai PMPRB meliputi : a. Indeks kualitas perencanaan b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah c. Nilai Maturitas SPIP d. Nilai kualitas ASN	BAPPEDA	
				BPPKAD	
				Inspektorat	
				BKD	
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3) Indeks kepuasan masyarakat	Semua OPD (Koordinator : Bag. Organisasi)			
Misi II : “Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”					
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2. Persentase angka kemiskinan	3. Menurunkan angka pengangguran	4) Persentase Pertumbuhan Partisipasi angkatan kerja	DPMPPTSP Naker	
			4) Meningkatkan kesejahteraan sosial	5) Persentase PMKS yang tertangani	DINSOSPPKB
			5) Meningkatkan usaha industri rumahan keluarga miskin	6) Persentase Industri Rumahan Perempuan yg mandiri	
				7) Pertumbuhan kelas kelompok tani	Dinlutkan
				8) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	DPMPPTSP Naker
			9) Persentase Partisipasi angkatan kerja		

Tujuan		Indikator Tujuan (IKU Kabupaten)	Tujuan OPD	Indikator Perangkat Daerah	OPD	
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3. Pertumbuhan Ekonomi				
		6	Meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan	10)	Persentase peningkatan produksitanaman pertanian	Dintanpan
				11)	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Dinlutkan
		7	Meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan	12)	Persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Dinperindagkop UKM
8	Meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri	13)	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan			
3	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				
		9	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	14)	Indeks kualitas air	DLH
				15)	Indek kualitas udara	
10	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	16)	Luas tutupan hutan			
Misi III : “Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif”						
4	Meningkatkan perekonomian daerah	5. Persentase pertumbuhan nilai Investasi				
		11	Meningkatkan Investasi daerah	17)	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang terserap pada Penanaman Modal	DPMPTSP Naker
				18)	Persentase Peningkatan klaster usaha Industri Kreatif	Dinindagkop UKM
		6. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata				
		13	Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	19)	Persentase destinasi wisata yang menumbuhkan perekonomian lokal	Dinbudpar
20)	Persentase budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata					
Misi IV : Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan						
5	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	7. Indeks infrastruktur				
		14	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	21)	Persentase pertumbuhan kemantapan jalan	DPU Taru

Tujuan		Indikator Tujuan (IKU Kabupaten)	Tujuan OPD		Indikator Perangkat Daerah	OPD		
daerah				22)	Persentase pertumbuhan Jembatan dalam kondisi baik			
				15	Meningkatkan kualitas dan kuantitas air baku		23)	Pertumbuhan bangunan air/irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik
				16	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang		24)	Pertumbuhan Rasio kesesuaian tata ruang
				17	Meningkatkan akses layanan dasar		25)	Persentase perkembangan akses sanitasi layak
			26)			Persentase perkembangan akses air minum layak		
			27)			Persentase perkembangan pengurangan kawasan permukiman kumuh		
			28)			Persentase perkembangan penurunan rumah tidak layak huni		
			18	Meningkatkan keselamatan berlalu lintas	29)	Indeks Peningkatan Pengembangan dan keselamatan perhubungan	Dinhub	
					30)	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan		
			Misi V : “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”					
6	Meningkatkan kualitas SDM	8. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	19	Meningkatkan kualitas pendidikan	31)	Angka Partisipasi Sekolah pada Seluruh Kelompok Usia Sekolah	Dindikpora	
					32)	Level Standar Nasional Pendidikan		
			20	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	33)	AKI	Dinkes	
					34)	AKB		
					35)	AKABA		
			21	Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	36)	Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	DINSOSPPKB	
					37)	Persentase Desa Ramah Anak		

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU Kabupaten)		Tujuan OPD		Indikator Perangkat Daerah	OPD
Misi VI: "Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan"						
7	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat	9. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial				
		22	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	38)	Persentase Pertumbuhan Partisipasi Politik Masyarakat	Kesbangpol
		23	Meningkatkan rasa aman masyarakat	39)	Persentase Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
40)	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah					
8	Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	10. Persentase pertumbuhan penduduk				
		24	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	41)	CPR	DINSOSPPKB
		25	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	42)	Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
Misi VII: "Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan"						
9	Mewujudkan kedaulatan pangan	11. Skor PPH				
		26	Meningkatkan ketahanan pangan	43)	Pertumbuhan Skor PPH	Dintanpan
44)	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan			Dinlutkan		

## BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perumusan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021, juga mempertimbangkan kebijakan dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yaitu: membangun basis data, menyusun regulasi, mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif, menguatkan jejaring antar pemangku kepentingan, membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan, menumbuhkan prakarsa kreativitas penemuan baru melalui pendidikan formal dan informal, membangun sistem apresiasi kreativitas yang inovatif, membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga, meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik yang berstandar internasional, meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan pengetahuan yang mendukung perdagangan dan jasa.

### 6.1. Strategi

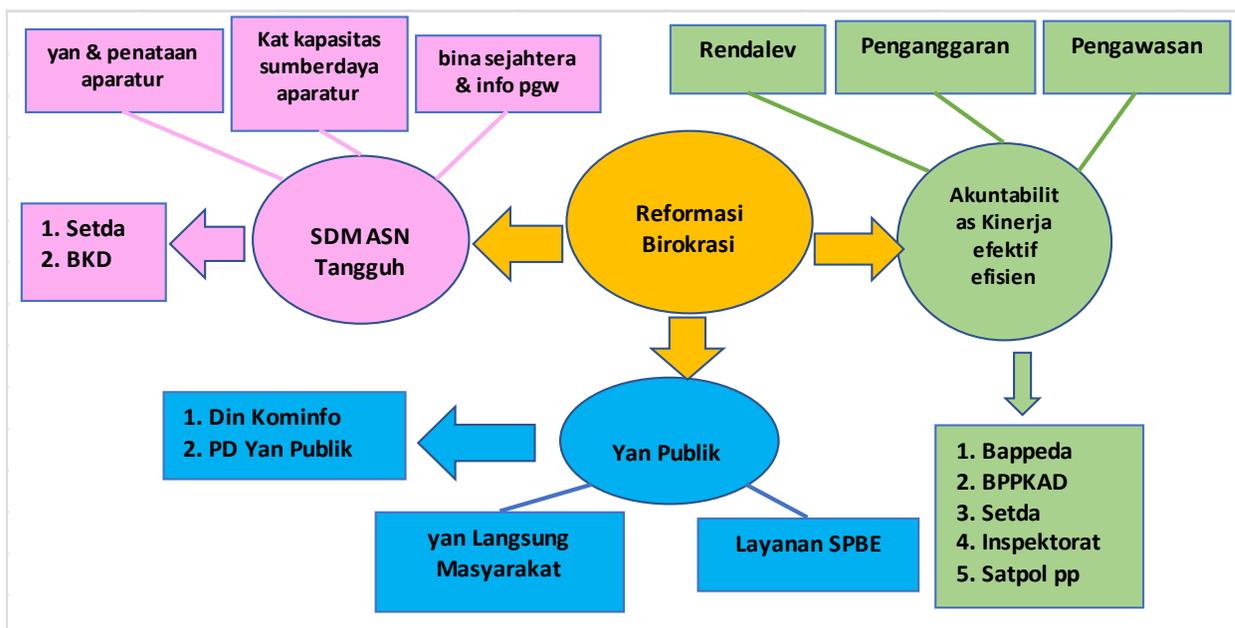
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, yang mempunyai semangat pembangunan menuju Rembang "*madani*", yang diarahkan dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan transparan, demokratis, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses yang dilakukan lembaga pemerintahan ini diarahkan untuk pelayanan yang cepat tanggap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah untuk melayani pihak yang membutuhkan, mudah diakses masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan memberikan kesempatan yang sama. Tata kelola pemerintahan yang diharapkan nantinya utamanya adalah pelayanan publik yang semakin dinamis dan terbuka, efektif, efisien yang mana prosedur kerja pengelolaan birokrasi diarahkan melalui e-government.

Misi ke satu bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung dengan SDM yang tangguh; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

- a. Pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan penganggaran secara terpadu (SiPandu), pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik perkuat kapabilitas APIP. Pengendalian produk hukum pengendalian produk hukum daerah.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya ASN melalui pelayanan penataan aparatur (pengelolaan dan fasilitasi pelayanan jenjang karir ASN), peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (pengembangan kompetensi ASN dan seleksi dan pengembangan karir), pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai (fasilitasi kesejahteraan aparatur).
- c. Peningkatan sistem pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, dengan sistem kunjungan lapangan (road show) dengan maksud pendekatan layanan. Peningkatan keterbukaan informasi publik (transparansi dan partisipasi) melalui komunikasi dan serapan aspirasi langsung dengan menggunakan media elektronik, media sosial dan jaringan masyarakat (dinamika pembangunan). Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi berbasis elektronik (e-government) dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan layanan tata kelola sistem pemerintahan berbasis IT.



**Gambar 6.1**  
**Skema Strategi Pencapaian Misi 1**

- 2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup  
 Pada misi ke 2 (dua) ini terdapat dua tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Rembang. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat didukung dari penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif stabil. Penurunan angka kemiskinan dalam penanganannya dengan sasaran 1. Penurunan tenaga pengangguran terbuka, 2. Peningkatan kesejahteraan sosial, 3. Meningkatnya usaha industri keluarga miskin. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan keluarga diperlukan beberapa strategi sebagai berikut :
  - a. Strategi penurunan tenaga pengangguran dilakukan dengan perluasan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan pengembangan kesempatan kerja melalui pengembangan wirausaha muda pengadaan bursa tenaga kerja, program

tenaga kerja untuk fasilitasi jejaring, penanggulangan kemiskinan dan peran lembaga non pemerintahan (seperti BAZDA); peningkatan kegiatan padat karya melalui penegasan dalam regulasi petunjuk pelaksanaan kegiatan dana desa yang harus dilaksanakan secara swakelola dan tenaga kerja dianjurkan menggunakan tenaga kerja lokal desa. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, melalui metode pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi di Balai latihan kerja. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dilakukan melalui pengawasan kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan pengupahan, jaminan kesehatan, sosial ketenagakerjaan dan LPKS yang memenuhi SOP.

- b. Strategi peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan dengan menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diwujudkan antara lain melalui pemberian bantuan jaminan kebutuhan dasar bagi lansia terlantar dan disabilitas terlantar yaitu biaya hidup dan jaminan kesehatan. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial pemberian bantuan jaminan sosial (JKRS), penyiapan bimbingan sosial bagi fakir miskin. Pemberian bantuan rumah tidak layak huni dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh, serta Peningkatan peran serta pemangku kepentingan yaitu melibatkan dunia usaha dengan dana CSR dan Basnaz dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk membangkitkan lagi kegotongroyongan dan kebersamaan.

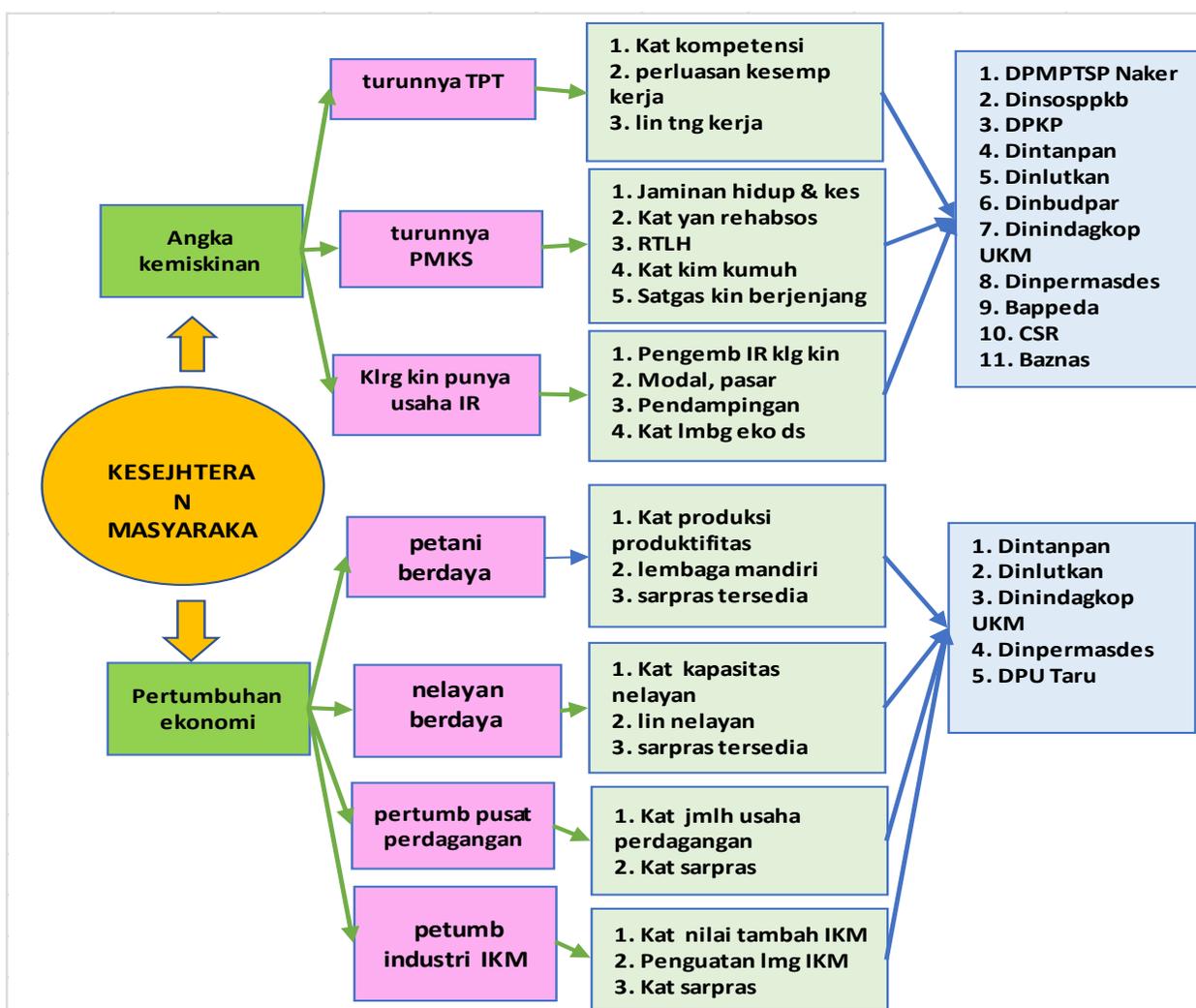
Strategi selanjutnya adalah dengan membentuk kelembagaan penangan kemiskinan secara berjenjang dari kabupaten, kecamatan sampai desa. Lembaga ini nanti bertugas dalam perbaikan data kemiskinan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kemiskinan, pendampingan.

- c. Strategi peningkatan usaha industri keluarga miskin dilakukan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha industri ekonomi perempuan keluarga miskin (industri rumahan) sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, industri usaha kecil; pendampingan secara kontinyu. Peningkatan peran lembaga ekonomi pedesaan (Bumdes); Perluasan akses permodalan bagi keluarga miskin, akses pasar, dan manajemen usaha.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang didukung dari pertumbuhan ekonomi daerah dengan sasaran 1. Meningkatnya keberdayaan petani dan nelayan; 2. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan; 3. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan strategi sebagai berikut :

- a. Strategi untuk meningkatnya keberdayaan petani adalah dengan mengoptimalkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan melalui upaya meningkatnya pendapatan usaha tani yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuluh pertanian, sehingga petani meningkat dalam penerapan teknologi budidaya maupun pengolahan pasca panen serta penguatan kelembagaan bisa lebih mandiri. Peningkatan kualitas bahan baku tembakau melalui pembinaan dan pemberian alsintan untuk produksi. Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, embung dan tampungan air lainnya, alsintan sampai pengawasan pupuk dan pestisida. Strategi keberdayaan nelayan melalui pengembangan perikanan tangkap dengan melakukan pengembangan sarpras kenelayanan dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan; Pengembangan perikanan budidaya dan garam dengan melakukan pembinaan pelaku usaha budidaya perikanan dan garam serta pengembangan sarpras budidaya. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan.
- b. Strategi Meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan dengan, peningkatan pengembangan usaha perdagangan, pengembangan promosi perdagangan, pengembangan pengawasan peredaran barang dan jasa; pengembangan sarana prasarana distribusi perdagangan, melalui

- pengembangan pusat pusat perdagangan baru maupun penataan/rehab, penguatan lembaga dengan penertiban alat ukur pasar.
- c. Strategi Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri melalui pemberdayaan dan pengembangan industri pembinaan usaha mikro, kecil, menengah dengan peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri kecil, menengah yang mencakup, aspek permodalan dan pemasaran; penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi untuk mencapai peningkatan perputaran omset koperasi.

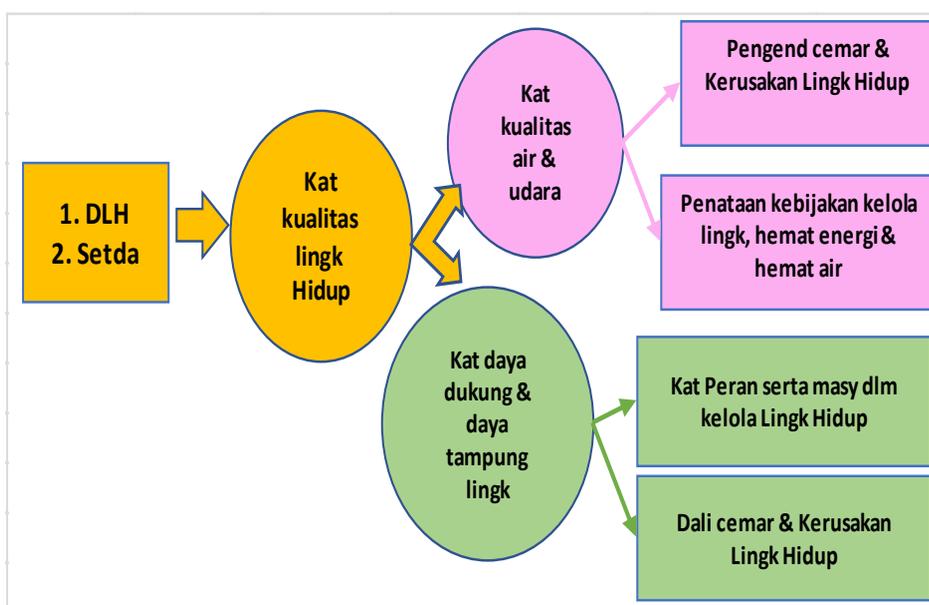


**Gambar 6.2**  
**Skema Strategi Pencapaian Misi 2 Tujuan 1**

Sedangkan Tujuan kedua dalam misi ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup didukung indek kualitas lingkungan hidup. sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas air, udara, Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan :

- a. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui 1. Pencegahan, Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan; 2. Perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam; Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; 3. Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan,
- b. Penatan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengembangan budaya hemat energi dan hemat air melalui Pengendalian Kerusakan Lingkungan (luas lahan yang direhabilitasi, rasio luasan RTH); 6. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan

- Hidup,
- c. Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Operasional Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun, Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
  - d. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup



**Gambar 6.3**  
**Skema Strategi Pencapaian Misi 2 Tujuan 2**

3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif

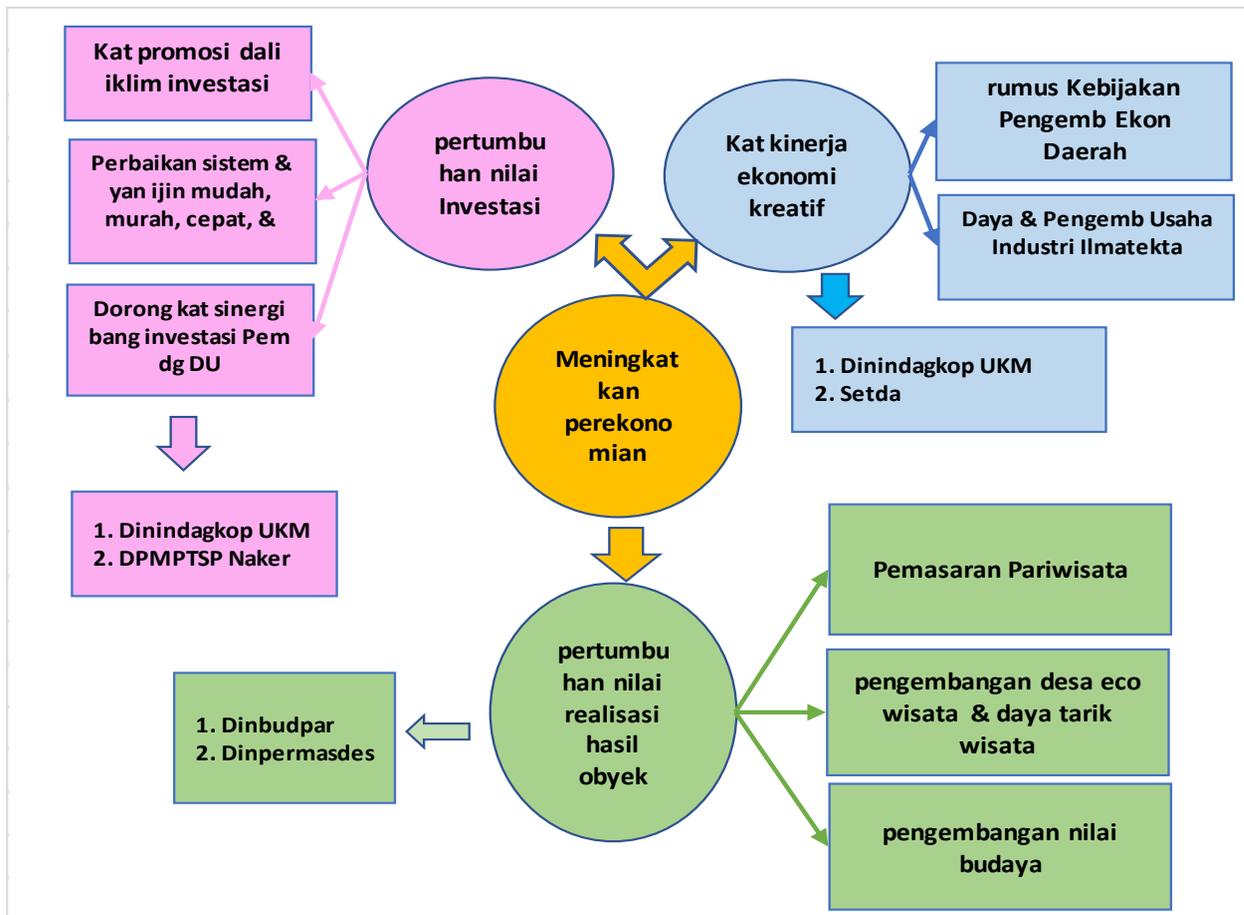
Misi ke III ini dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, keberhasilannya diukur dengan pertumbuhan nilai Investasi dan pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata.

Strategi yang dibutuhkan untuk Meningkatnya Investasi daerah dengan dua sasaran yaitu meningkatnya investasi daerah dan Meningkatnya kinerja ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan promosi pengendalian iklim investasi yang semakin kondusif melalui pomosi dan kerjasama invstasi dengan mendorong peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usaha dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pemantauan dan pendampingan pada perusahaan serta peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan.
- b. Peningkatan kinerja ekonomi kreatif salah satu sektor ekonomi yang harus terus dikembangkan karena sektor tersebut mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Pengembangan ekonomi lokal yang berbasis industri kreatif dikembangkan melalui Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah dan pengembangan industri kreatif. dan ekonomi kreatif pariwisata.

Strategi Meningkatnya pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata adalah Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah, melalui Pengembangan Pemasaran Pariwisata, promosi lewat event dan pengembangan warung informasi wisata, Pengembangan Destinasi (pengembangan obyek daya tarik wisata desa dan pengembangan SDM dan ekonomi kreatif pariwisata), Pengembangan nilai budaya (pengembangan seni, budaya, dan tradisi masyarakat serta pelestarian dan pengembangan

museum, sejarah dan kepurbakalaan).



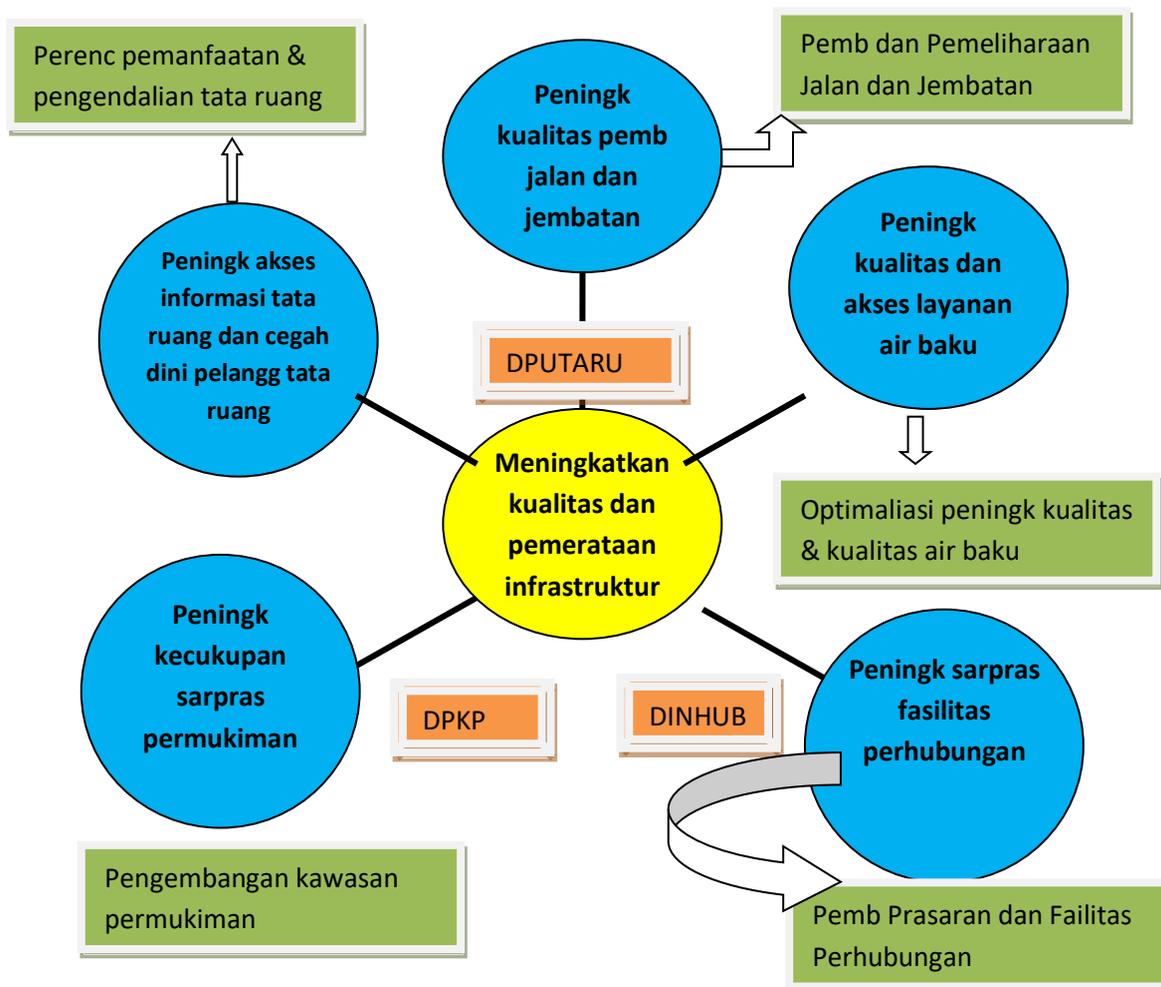
**Gambar 6.4**  
**Skema Strategi Pencapaian Misi 3**

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan

Tujuan pembangunan dalam rangka untuk melaksanakan Misi yang ke IV yaitu untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah, yang keberhasilannya dapat diukur dengan besaran indeks infrastruktur daerah.

Strategi yang dibutuhkan untuk meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah dengan lima sasaran yaitu meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan; Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku; Meningkatnya akses layanan dasar; Meningkatnya keselamatan berlalu lintas; dan Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pembangunan jalan dan jembatan yang semakin merata melalui Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- b. Peningkatan kualitas dan akses layanan air baku yang semakin baik melalui Optimalisasi peningkatan kuantitas dan kualitas air baku di Kabupaten Rembang.
- c. Peningkatan akses informasi tata ruang dan cegah dini pelanggaran tata ruang melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Peningkatan kecukupan sarana prasarana permukiman melalui pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan perumahan dan bangunan gedung.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan melalui pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dan peningkatan pelayanan angkutan.



**Gambar 6.5**  
**Skema Strategi Pencapaian Misi 4**

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan

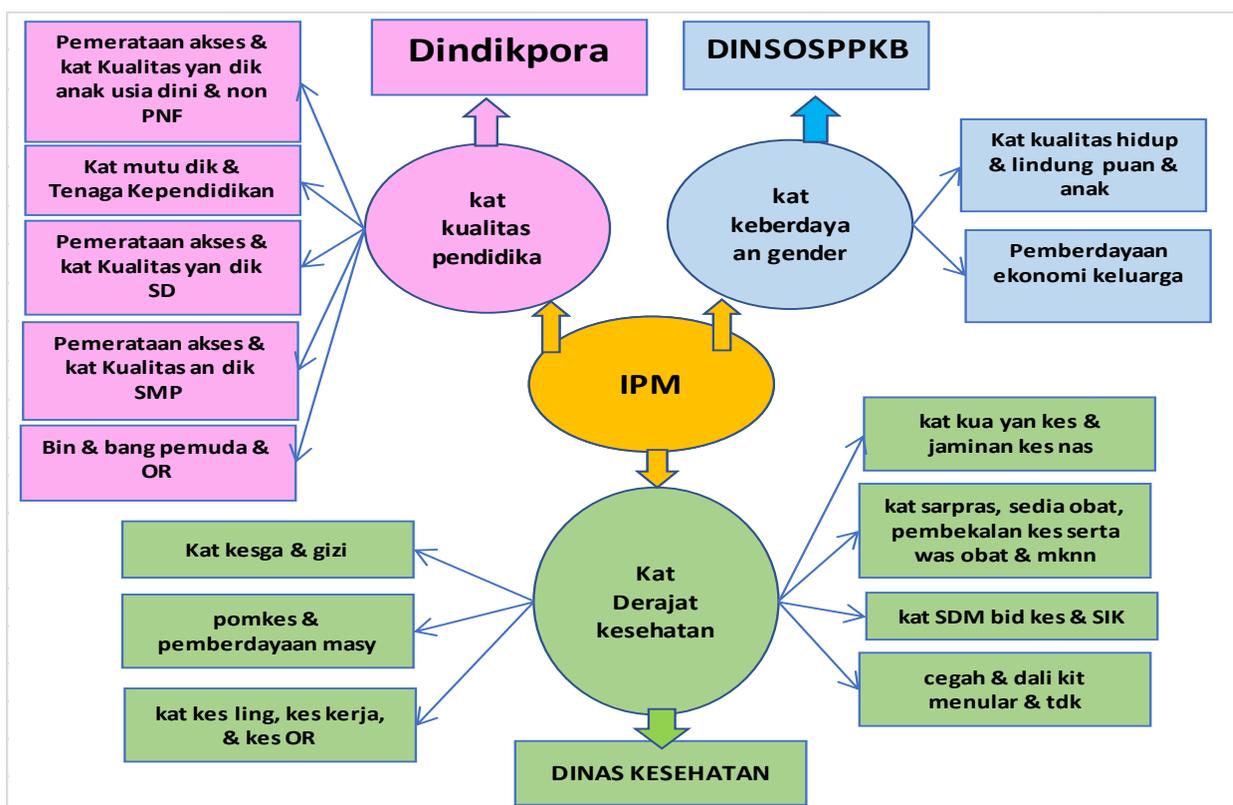
Misi ke III dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, yang mana sarannya ada 3 yaitu Meningkatnya kualitas pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak.

Strategi yang dibutuhkan untuk Meningkatkan tiga sasaran tadi adalah sebagai berikut

- a. Strategi untuk Meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan:
  1. Pemerataan akses dan Peningkatan Kualitas Layanan pendidikan Anak Usia Dini, SD, dan SMP serta non formal secara luas melalui a. Peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak sekolah berupa bantuan operasional pendidikan, beasiswa untuk siswa prestasi dari keluarga miskin sampai perguruan tinggi, b. Pemenuhan standar isi, proses dan penilaian pendidikan sesuai tingkatan dan termasuk pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning dengan menambah materi pendidikan keluarga untuk semua dan peningkatan literasi;
  2. Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru;
  3. pemenuhan standar sarana prasarannya;
  4. Pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah raga.
- b. Untuk Meningkatkan derajat kesehatan sarannya adalah sebagai berikut:
  1. Meningkatnya status kesehatan keluarga upaya yang dilakukan dengan melalui peningkatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  2. Meningkatnya upaya promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan upaya

yang dilakukan adalah dengan melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga; 3. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan serta layanan perijinan upaya yang dilakukan adalah dengan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional, peningkatan sarana prasarana, penyediaan obat, pembekalan kesehatan serta pengawasan obat dan makanan, peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan dan sistem informasi kesehatan; 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan penanggulangan KLB, upayanya adalah dengan penanganannya melalui pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

- c. Strategi Meningkatkan keberdayaan gender dan perlindungan anak adalah peningkatan akses dan kualitas hidup dan perlindungan anak melalui Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan yaitu pengurangan resiko kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, peningkatan kapasitas SDM & kelembagaan PUG, Pemenuhan & perlindungan anak.



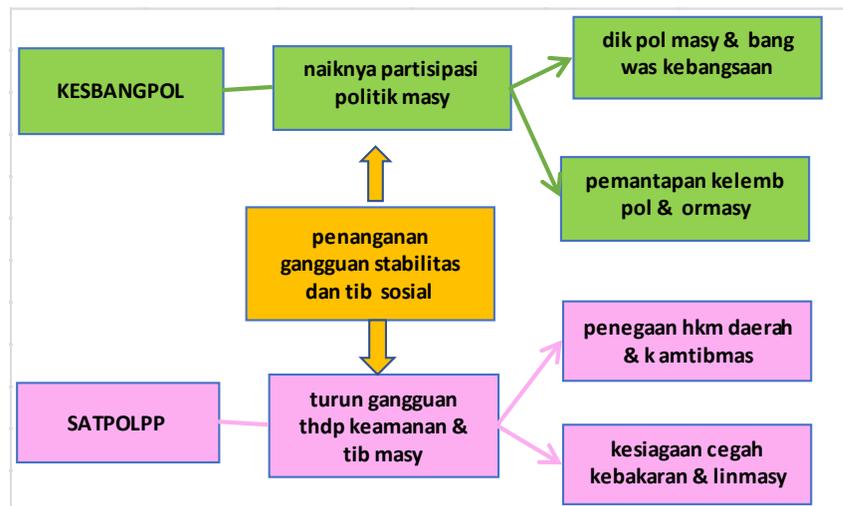
**Gambar 6.6**  
**Skema Strategi Pencapaian Misi 5**

- 6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi

Pada misi ke VI (enam) ini terdapat dua tujuan yaitu Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat dan Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.

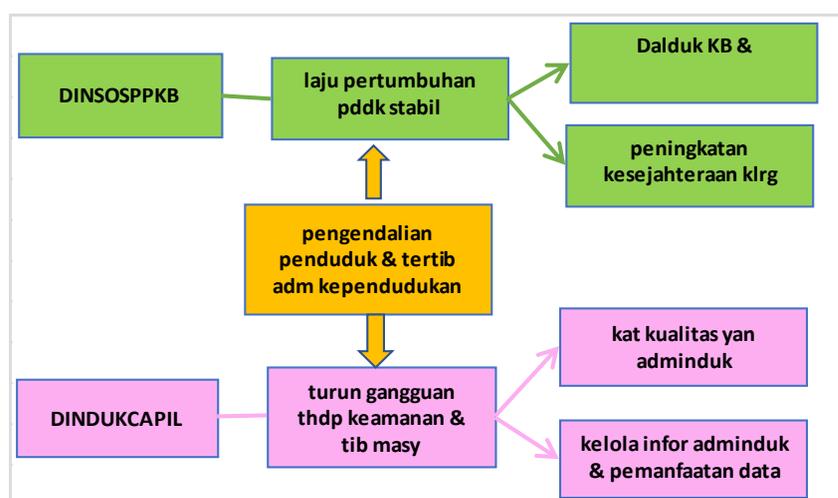
Pada Tujuan Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik mempunyai sasaran Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dan Meningkatnya rasa aman masyarakat. Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk sasaran partisipasi politik masyarakat melalui Pendidikan Politik Masyarakat dan pengembangan wawasan kebangsaan melalui peningkatan pendidikan politik masyarakat ( pendidikan politik pada pemilih pemula/milenial, penanganan konflik sosial, pembinaan ormas lembaga politik), pemantapan kelembagaan politik dan organisasi masyarakat. Sedangkan meningkatnya rasa aman melalui kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran dan perlindungan masyarakat dan penganan hukum daerah dan pemeliharaan kamtibmas.



**Gambar 6.7**  
**Skema Strategi Pencapaian Misi 6 Tujuan 1**

- b. Pada Tujuan Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan dengan Sasaran sebagai berikut : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan peningkatan keluarga sejahtera. Sedangkan sasaran meningkatnya tertib administrasi kependudukan adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan pelayanan pencatatan sipil dengan melakukan penerbitan akta kematian dan fasilitasi pernikahan dan perceraian masyarakat secara tertib. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data.

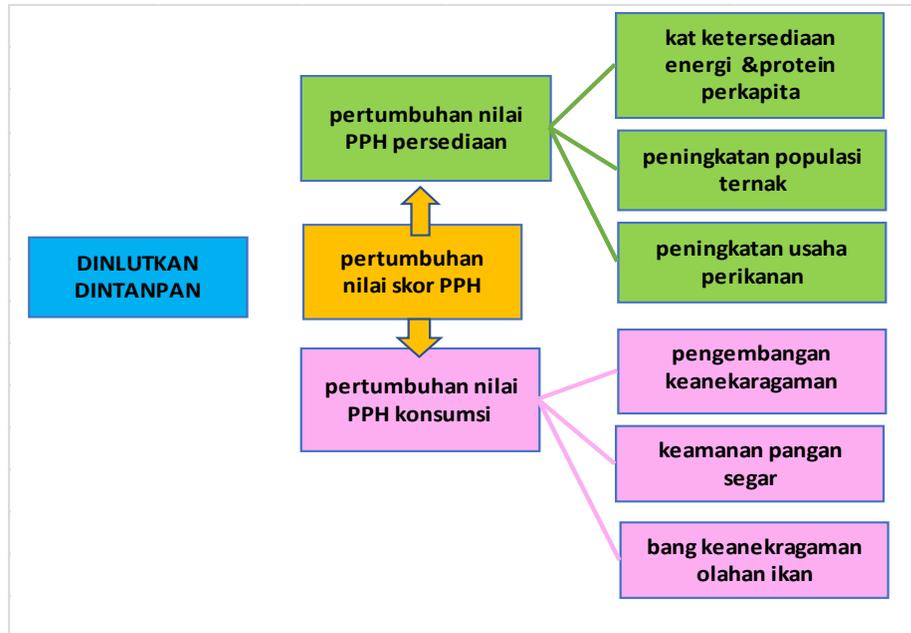


**Gambar 6.8**  
**Skema Strategi Pencapaian Misi 6 Tujuan 2**

7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan  
Misi ke VII ini dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan kedaulatan pangan, yang mana sasarannya adalah meningkatnya ketahanan pangan. Strategi yang akan dilakukan dalam rangka Perwujudan ketahanan pangan

tersebut dilakukan melalui :

- a. Peningkatan ketersediaan energi dan protein perkapita dan peningkatan populasi ternak; melalui pengembangan agribisnis pertanian tanaman pangan, pengembangan agribisnis peternakan dan pengembangan agribisnis perkebunan serta pengembangan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan segar.
- b. Peningkatan pelaku dan jenis usaha perikanan; melalui bina usaha dan peningkatan daya saing perikanan dengan melakukan pengolahan produk perikanan dan peningkatan daya saing serta menjalin kemitraan dan pemasaran produk perikanan.



**Gambar 6.9**  
**Skema Strategi Pencapaian Misi 7**

Keterkaitan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Jawa Tengah tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tahun 2016-2021**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
<b>I Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah</b>					
1	Mewujudkan Good Governance	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung dengan SDM yang tangguh.	1	Peningkatan manajemen pemerintahan yang akuntabel melalui, pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, secara terpadu; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP
				2	Pembentukan SDM yang tangguh melalui pelayanan penataan aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kesejateraan dan informasi pegawai

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI				
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, membangun keterbukaan pemerintahan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik			
				2	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada birokrasi			
<b>II Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup</b>								
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Menurunnya angka pengangguran	1	Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha, melalui metode training unit, bursa tenaga kerja, Pengembangan wirausaha muda			
				2	Peningkatan kompetensi (keahlian) tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Fasilitasi tenaga kerja ke perusahaan perusahaan. peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja			
		4	Meningkatnya kesejahteraan sosial	1	Penguatan kelembagaan, basis data, Pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut (Lansia terlantar dan disabilitas terlantar) dengan pemberian jaminan hidup sebesar diatas angka garis kemiskinan kabupaten rembang dan pemberian jaminan kesehatan. Pemenuhan alat bantu pada disabilitas serta mengkonsolidasikan dan mensinergikan program kerja seluruh pemangku kepentingan dengan pembentukan Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan secara berjenjang			
					5	Meningkatnya usaha industri rumahan keluarga miskin	1	Peningkatan kemampuan pengembangan industri rumahan, pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, pendampingan
							2	Perluasan akses permodalan bagi keluarga miskin, akses pasar, dan manajemen usaha
							3	Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa/kelurahan
					6	Meningkatnya keberdayaan petani dan nelayan	1	Peningkatan sarana prasarana dan teknologi pasca panen pertanian dan perikanan diikuti dengan penguatan kemitraan pemasaran
7	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan	1	Peningkatan jaringan distribusi perdagangan eceran, kecil dan besar					

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		8	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	1	Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro
3	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	9	Meningkatnya kualitas air dan udara	1	Peningkatan pengawasan dan penindakan sumber pencemaran air dan udara
		10	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	1	Peningkatan kelestarian SDA dan lingkungan melalui penghijauan, resapan dan penampungan air
<b>III Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif</b>					
4	Meningkatkan perekonomian daerah	11	Meningkatnya Investasi daerah	1	Peningkatan kemudahan perizinan dan iklim investasi
		12	Meningkatnya Kinerja ekonomi kreatif	1	penataan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif
		13	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	1	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang menumbuhkan perekonomian lokal
<b>IV Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan</b>					
5	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah	14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	1	Peningkatan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
		15	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku	1	Peningkatan pengawasan dan akses layanan irigasi
		16	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang	1	Peningkatan akses informasi tata ruang dan cegah dini pelanggaran tata ruang melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
		17	Meningkatnya akses layanan dasar	1	Peningkatan kecukupan sarana prasarana permukiman
		18	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	1	Peningkatan kesadaran, kedisiplinan dan pemahaman berlalu lintas
<b>V Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan</b>					
6	Meningkatkan kualitas SDM	19	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
				2	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan
				3	Penciptaan layanan pendidikan yang berkualitas
		20	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta penggerakan peran serta masyarakat
				2	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
		21	Meningkatnya keberdayaan gender serta perlindungan anak	1	Penguatan dan pengawasan regulasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
<b>VI Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi</b>					

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
7	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat	22	Meningkatnya stabilitas politik masyarakat	1	Peningkatan partisipasi politik masyarakat Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
		23	Meningkatnya rasa aman masyarakat	1	Penurunan kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
8	Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	24	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1	Penggerakan dan KIE KB KR yang merata dan berkualitas dan peningkatan keluarga sejahtera
		25	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
				2	Peningkatan kepedulian aparat desa dan masyarakat pentingnya dokumen kependudukan
<b>VII Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan</b>					
9	Mewujudkan kedaulatan pangan	26	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Peningkatan ketersediaan energi dan protein perkapita dan peningkatan populasi ternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat
				2	pengembangan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan segar
				3	Peningkatan indeks pertanaman
				4	Peningkatan daya saing perikanan, pengolahan jenis usaha perikanan

## 6.2. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema tahunan pembangunan merupakan penekanan fokus perhatian berupa kebijakan/rencana/program pembangunan tiap tahunnya yang ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap pencapaian visi dan misi dengan tetap memperhatikan keterpaduan pembangunan multisektor. Pentahapan Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah:

### 1. Tema Tahun I (2016)

#### **Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan**

Peningkatan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi IV yaitu

“Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang akan menghubungkan wilayah hingga tingkat desa di Kabupaten Rembang. Mengurangi kesenjangan pembangunan, dengan membangun pusat/ kawasan pertumbuhan perekonomian baru yang didukung oleh sarana perhubungan yang baik guna menunjang mobilitas barang dan masyarakat Kabupaten Rembang.

## **2. Tema Tahun II (2017)**

### **Memperkuat sinergitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk pengembangan potensi wilayah, serta Perwujudan Pemerintahan yang Amanah**

Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk melanjutkan pencapaian Misi IV yaitu “Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan”, dan Misi I yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi, sanitasi layak serta melanjutkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan dukungan infrastruktur yang memadai dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada tahap ini juga difokuskan pada penguatan pondasi pemerintahan yang amanah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang. Pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan *Good Governance*, peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif.

## **3. Tema Tahun III (2018)**

### **Penguatan pembangunan potensi ekonomi unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Kemandirian Daerah**

Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi III yaitu “Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada kemudahan investasi dan optimalisasi potensi investasi yang ada di Kabupaten Rembang. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pasar tradisional dan UMKM, optimalisasi peran koperasi, serta pengembangan sentra sentra ekonomi kreatif. Pembangunan juga difokuskan pada pengembangan dan peningkatan promosi sektor pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Rembang.

## **4. Tema Tahun IV (2019)**

### **Pemberdayaan dan pengembangan SDM menuju masyarakat yang berdaya saing, inovatif dan kreatif**

Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi V yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”,

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan membangun pendidikan yang mudah diakses seluruh masyarakat Kabupaten Rembang dengan menekankan pendidikan karakter, mewujudkan insan terdidik yang cerdas, trampil, mandiri, dan berwawasan kebangsaan.

Peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan kepastian pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rembang. Penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial masyarakat dan peningkatan keberdayaan masyarakat Rembang.

## 5. Tema Tahun V (2020)

### **Pengembangan Kewirausahaan dan penguatan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan**

Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi II yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”, dan Misi VII yaitu “Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.”,

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

Pembangunan juga difokuskan pada perwujudan kedaulatan pangan, peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Rembang serta penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga.

## 6. Tema Tahun VI (2021)

### **Penguatan kebersamaan masyarakat dan kondusifitas daerah menuju kestabilan dan kelestarian pembangunan**

Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi VI yaitu “Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan”.

Pada tahap ini pembangunan difokuskan untuk peningkatan kondusivitas dan stabilitas politik, ketenteraman serta ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang. Peningkatan aspek nilai budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

### **6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Rembang**

Pembangunan wilayah memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan daerah agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Rembang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 adalah untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan wilayah memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan daerah agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Rembang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 adalah untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan.

1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah  
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan RTRW Rembang Tahun 2011-2031 meliputi:
  - a. pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian selatan;
  - b. pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
  - c. pengembangan potensi sektor pertambangan;
  - d. pengembangan potensi sektor industri;
  - e. pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
  - f. pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
  - g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
2. Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah  
Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan RTRW Rembang Tahun 2011-2031 meliputi:
  - a. Strategi pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian selatan meliputi:
    - a) mengembangkan kawasan produksi pertanian;
    - b) mengembangkan kawasan agropolitan;
    - c) mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
    - d) mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
  - b. Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
    - a) mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
    - b) mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
    - c) mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
    - d) mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
    - e) mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
    - f) mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
    - g) menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
    - h) mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
    - i) mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
    - j) mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi.
  - c. Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi:
    - a) mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
    - b) membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
    - c) mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
  - d. Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi:
    - a) mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
    - b) mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
    - c) mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
    - d) mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;

- e) mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
- f) mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- e. Strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan meliputi:
  - a) melestarikan kawasan hutan lindung;
  - b) melestarikan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
  - c) melestarikan kawasan perlindungan setempat; dan
  - d) mengelola kawasan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- f. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi:
  - a) mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
  - b) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
  - c) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - d) turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Pertanian masih menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kabupaten Rembang walaupun kecenderungannya semakin menurun. Potensi pertanian di Kabupaten Rembang terletak di wilayah tengah dan selatan yaitu Kecamatan Sulang, Kecamatan Sumber, Kecamatan Bulu, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sale dan Kecamatan Sedan. Semua kecamatan tersebut pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten. Sebagian kecamatan tingkat kemiskinan dan PDRB per kapitanya lebih tinggi dari kabupaten, hal tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Sumber, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Pancur. Untuk mengoptimalkan sektor pertanian tersebut perlu ditempuh strategi pengembangan wilayah yang berbasis desa yaitu dengan pengembangan produk unggulan desa. Sedangkan untuk peningkatan pemasaran hasil pertanian maka perlu dikembangkan kawasan agropolitan dengan pusat kawasan agropolitan sebagaimana rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang ada di Kecamatan Sulang dan Kecamatan Pamotan.

Selain pengembangan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan juga perlu di dukung pengembangan perekonomiannya dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Di lihat dari kondisi pengembangan wilayah pada subbab sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menambah kesempatan kerja masyarakat. Dari hasil analisa data ditemukan bahwa jumlah Kepala Keluarga yang tidak bekerja di Kecamatan Rembang sangat tinggi. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Rembang terutama kaitannya dengan menarik minat investor untuk berusaha di Kabupaten Rembang. Salah satunya dengan pembangunan Kawasan Industri Rembang yang juga termasuk dalam rencana strategis Propinsi Jawa Tengah. Pengembangan industri tersebut diharapkan yang berbasis padat karya sehingga dapat memberdayakan masyarakat Rembang secara optimal.

Program strategis nasional berupa reaktifasi kereta api pada koridor Semarang – Kudus – Rembang akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian kabupaten Rembang. Secara eksplisit rencana tersebut telah tertuang dalam struktur ruang RTRW Kabupaten Rembang namun belum ada antisipasi mengenai perubahan guna lahan serta perubahan manajemen transportasi dengan hadirnya kereta api. Sehingga untuk mengantisipasi perubahan manajemen transportasi tersebut dalam perubahan RPJMD ini akan dilakukan review terhadap tataran transportasi lokal.

Diharapkan review tersebut dapat mengintegrasikan dan mengkoneksikan berbagai moda transportasi di Kabupaten Rembang.

### 6.3.1. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Rembang

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pengembangan wilayah ditetapkan kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut ditetapkan berdasarkan pengaruhnya dalam lingkup wilayah dan mempunyai nilai eksternalitas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis tersebut juga harus memperhatikan penetapan kawasan strategis nasional maupun propinsi. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

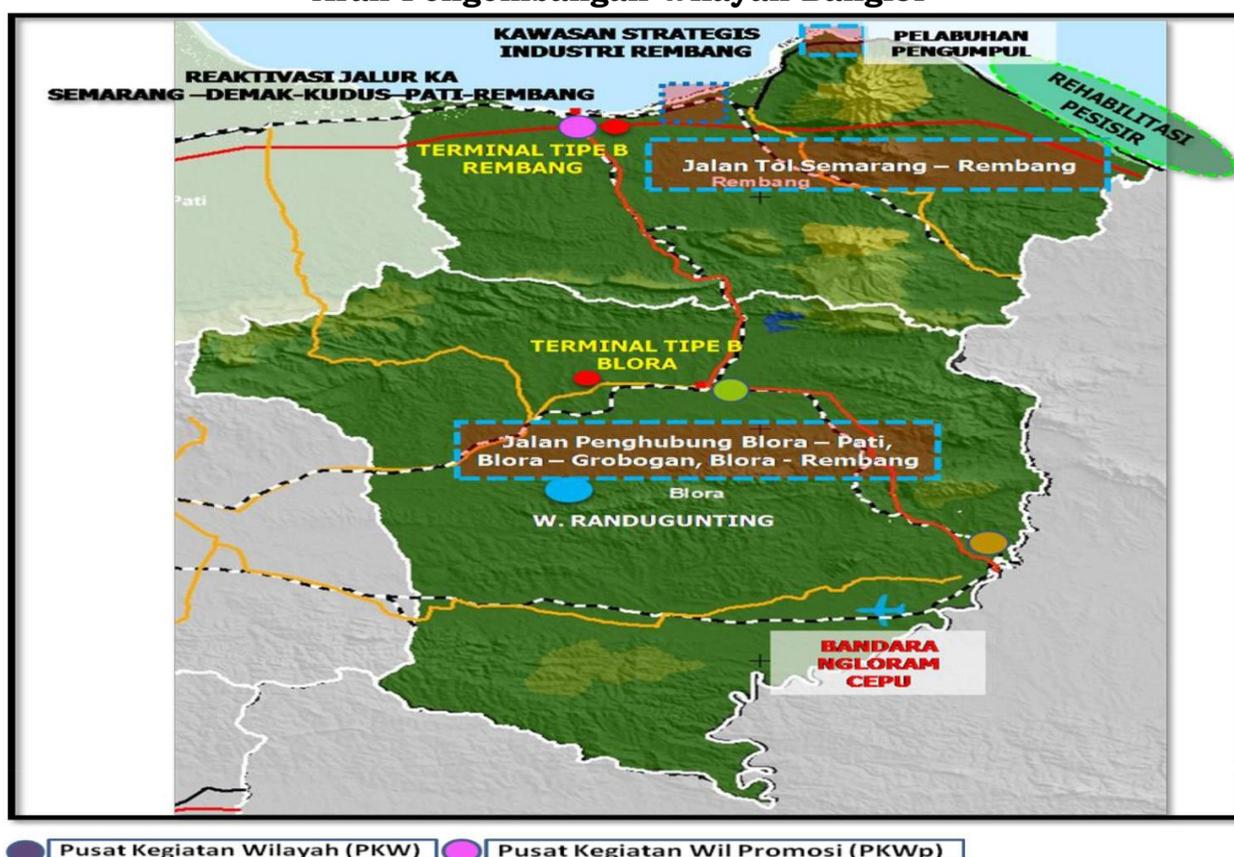
- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi :
  1. Kawasan strategis propinsi berupa Kawasan Koridor Perbatasan Blora - Tuban - Rembang – Bojonegoro.
  2. Kawasan strategis kabupaten berupa Kawasan Bahari Terpadu, Kawasan Bonang-Binangun-Sluke Zona I dan Zona II, Kawasan Pertanian Terpadu, Kawasan Agropolitan, Kawasan Pelabuhan dan sekitarnya, Kawasan Tumbuh Cepat Koridor Jalur Pantura, Kawasan Kota Pantai Unggulan, Kawasan Minapolitan, PKLp Lasem, PKLp Pamotan, dan PKLp Kragan.
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang berupa kawasan strategis kabupaten yaitu Kawasan Lindung Gunung Lasem dan Kawasan Mangrove Pasarbanggi.
- c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan strategis propinsi yaitu Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Rembang.

### 6.3.2. Arah Pengembangan Wilayah Banglor

Wilayah Banglor merupakan salah satu wilayah pengembangan Propinsi Jawa Tengah yang terletak di sebelah timur – utara Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur. Hierarki pelayanan perkotaan di kawasan Banglor difokuskan pada perkotaan Cepu sebagai PKW serta perkotaan Rembang sebagai PKW promosi. Kedua PKW tersebut didukung oleh Perkotaan Lasem dan Perkotaan Blora sebagai PKL. Pengembangan kawasan ini difokuskan sesuai dengan potensi wilayah yaitu pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan dan pertanian yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Melihat potensi tersebut maka arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor adalah ***“Pembangunan Wilayah Banglor Berbasis Perindustrian dan Agroforestri yang Didukung Pariwisata Terpadu Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”***.

Potensi Kabupaten Rembang dalam pengembangan wilayah Banglor ini meliputi pertambangan mineral, perikanan, pariwisata dan perhubungan. Di sektor pertambangan mineral dapat dilihat salah satunya dengan berdirinya PT. Semen Gresik, Tbk di Kabupaten Rembang. Pada sektor perikanan dapat dilihat hasil perikanan dan kelautan di Kabupaten Rembang yang merupakan ke dua terbesar di Jawa Tengah. Pada sektor perhubungan selain bandara Ngloram di Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang mempunyai Pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang diarahkan sebagai pelabuhan pengumpul.

### Arah Pengembangan Wilayah Banglor



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

**Gambar 6.10**  
**Peta Pengembangan Kawasan Banglor**

Sebagaimana dokumen RPJMD Propinsi Jawa Tengah, pengembangan wilayah di wilayah Banglor diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Propinsi Jawa Tengah. Salah satunya dengan pembangunan kawasan industri baru di Rembang dan Pengembangan Bandara Ngloram. Pembangunan tersebut diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan akan mendorong perekonomian wilayah Banglor. Struktur ruang wilayah Banglor akan didukung pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai yaitu Pembangunan Terminal Tipe B di Kabupaten Rembang, Fasilitas Revitalisasi/Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati - Rembang; Fasilitas Peningkatan Jalan Nasional Kabupaten Rembang - Kabupaten Blora - Batas Jatim, Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Blora - Kabupaten Pati dan Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Blora - Kabupaten Grobogan.

Arahan pengembangan wilayah Banglor tersebut sejalan dengan RTRW Kabupaten Rembang dimana pengembangan kawasan industri juga menjadi salah satu fokus peningkatan ekonomi di Kabupaten Rembang. Hadirnya terminal sluke merupakan salah satu daya tarik investasi yang semakin meningkatkan asesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten Rembang. Prospek perikanan di Kabupaten Rembang juga cukup menjanjikan dengan adanya Pelabuhan Tasikagung yang sesuai dengan rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Rembang ke depan diarahkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nausantara. Untuk mewujudkan berbagai rencana yang tertuang dalam rencana tata ruang baik kabupaten maupun propinsi perlu usaha bersama dan sinergitas antara propinsi dan kabupaten terutama berkaitan dengan penyediaan air baku di Kabupaten Rembang. Upaya pengelolaan lingkungan dengan konservasi wilayah pesisir, pengendalian kawasan CAT serta alternative desalinasi air laut perlu ditindaklanjuti secara serius untuk pengembangan kawasan Banglor kedepan.

#### **6.4. Program Pembangunan Daerah**

Mendasari pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka dirumuskan 8 (Delapan) Program Pembangunan Daerah sebagai jabaran operasional, yaitu :

1. Program Reformasi Birokrasi
2. Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
4. Program Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi Unggulan Daerah
5. Program Pengembangan Infrastruktur Daerah dan kawasan strategis
6. Program Peningkatan Optimalisasi Kuantitas dan Kualitas Air Baku
7. Program Pengembangan Layanan Pendidikan yang bermutu
8. Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Program Pembangunan Daerah dicapai dengan sekumpulan Program Perangkat Daerah sebagai fokus dan penjabaran yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

**Tabel 6.2**  
**Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2020 – 2021**

No	Program kerja (Program Unggulan)	Definisi Operasional	Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021)		Keterangan	
			Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur)	Perangkat Daerah Pelaksana		
1	2	3	4	5	6	
1	1.	Program Reformasi Birokrasi.	Peningkatan pelayanan birokrasi, melalui Teknologi Informasi pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.	1. Pengembangan dan integrasi perencanaan dan penganggaran secara terpadu (SiPandu) 2. Pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah 3. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik perkuatan kapabilitas APIP 4. Layanan pengadaan barang dan jasa secara online (LPSE) 5. Pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja	Bappeda,  BPPKAD Inspektorat  Bagian Adpem BKD, Orpeg	
		Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi berbasis elektronik (e-government)	Memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan layanan tata kelola sistem pemerintahan berbasis IT	Dinkominfo, Orpeg		
		Pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat dengan maksud pendekatan layanan dengan peningkatan keterbukaan informasi publik untuk penyerapan aspirasi	1. Sistem kunjungan langsung kepada masyarakat secara road show (dinamika pembangunan, kunjungan langsung sesuai teknis) 2. Komunikasi dan serapan aspirasi langsung dengan menggunakan media elektronik, media sosial dan	Semua OPD  Humas, Dinkominfo		

No	Program kerja (Program Unggulan)	Definisi Operasional	Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021)		Keterangan	
			Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur)	Perangkat Daerah Pelaksana		
1	2	3	4	5	6	
			jalinan masyarakat ( kerjasama dengan Radio dengan siaran “Halo Bupati”, dengan akun medsos)			
		Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan aturan yang ada	Penyelenggaraan proses pelayanan perizinan sesuai SOP	DPMPPTSP Naker		
			Evaluasi dan Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Bagian Tapem Kecamatan		
	2.	Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan ketrampilan bagi masyarakat penganggur serta menciptakan kesempatan kerja	Pelatihan dengan metode training unit, bursa tenaga kerja dan pengembangan wirausaha muda, fasilitasi tenaga kerja ke perusahaan perusahaan	DPMPPTSP NAKER	
	3.	Pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Penguatan lembaga satgas kemiskinan	1. Pembentukan TKPK Kabupaten dan kecamatan, satgas kemiskinan desa/kelurahan 2. Koordinasi, sinergitas penanggulangan kemiskinan sampai tingkat desa 3. Validasi data kemiskinan	Bappeda, Dinsos, Kecamatan, Desa, kelurahan	
			Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	untuk peningkatan sarana dan prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Dinpermasdes, BPPKAD	Besar anggaran sesuai level tingkat kemiskinan desa
			Bantuan Sosial stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin	Bantuan Keuangan untuk Stimulan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	DPKP, BPPKAD	
			Bantuan sosial terpadu	1. Berbasis Individu diberikan kepada	Bappeda,Dinkes,	Jaminan hidup

No	Program kerja (Program Unggulan)	Definisi Operasional	Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021)		Keterangan
			Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur)	Perangkat Daerah Pelaksana	
1	2	3	4	5	6
		berbasis individu dan keluarga	<p>lansia terlantar dan disabilitas berat dengan layanan jaminan hidup dan kesehatan. Melalui kegiatan “kamalia merakah” dan jaminan kesehatan</p> <p>2. Berbasis keluarga diberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, peningkatan kemampuan kesejahteraan keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan potensi diri, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha</p> <p>3. Kemampuan kesejahteraan keluarga dengan pengembangan industri rumahan berbahan baku lokal (akses pelatihan, bantuan peralatan, kemudahan akses permodalan, pendampingan)</p>	<p>DinsosPPKB, CSR, Baznas, personal responsibility</p> <p>DPMPTSPNaker, Dinsospkb, DinindakopUKM, Dintanpan, Dinlutkan, Dinpermasdes, Dinkes, Dinbudpar, Dindikpora</p>	diberikan dengan nominal diatas garis kemiskinan kabupaten
	4. Pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah	Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pertanian, industri dan pariwisata didukung dengan akses permodalan dan jejaring pasar	<p>1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelauatan</p> <p>2. Pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja</p> <p>3. Kemudahan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan kredit modal, teknologi, pasar dan manajemen usaha</p> <p>4. Pengembangan destinasi wisata serta sarpras wisata unggulan daerah</p>	<p>Dintanpan, Dinlutkan, DinindagkopUMK M, Dinbudpar, Bappeda</p>	

No	Program kerja (Program Unggulan)	Definisi Operasional	Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021)		Keterangan	
			Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur)	Perangkat Daerah Pelaksana		
1	2	3	4	5	6	
			5. Riset-litbang tentang desain pengelolaan industri masyarakat bersama produk unggulan daerah (PUD) seperti garam, pengolahan ikan, dan komoditas pertaian 6. Riset-litbang tentang diversifikasi produk tanaman pangan dan hortikultura			
	5.	Pengembangan infrastruktur daerah dan kawasan strategis	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar kawasan untuk meningkatkan pengaruh eksternalitas kawasan strategis	1. Pengembangan moda transportasi massal yang terkoneksi dan terintegrasi antar kawasan dengan pengembangan angkutan perbatasan dan mendukung reaktifasi kereta api. Pada tahap ini akan disusun review terhadap tataran transportasi lokal menyesuaikan dengan program reaktifasi kereta api. 2. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten sesuai dengan standar jalan lokal 3. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi wisata 4. Peningkatan keselamatan berlalu lintas melalui pengembangan sistem pemantau lalu lintas otomatis (automated traffic control system)	DPUTaru, Dinhub	
			Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pemukiman 2. Penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan		

No	Program kerja (Program Unggulan)	Definisi Operasional	Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021)		Keterangan
			Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur)	Perangkat Daerah Pelaksana	
1	2	3	4	5	6
			3. Pengembangan rumah deret maupun rumah susun sebagai salah satu kelengkapan kawasan pertumbuhan ekonomi		
6.	Peningkatan kuantitas dan kualitas air baku	Pembangunan tampungan air (Waduk/embung) dalam rangka menciptakan ketahanan air serta pembangunan/rehab jaringan irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey potensi sumber air baku</li> <li>2. Pembangunan dan rehab embung</li> <li>3. Perbaikan jaringan irigasi</li> <li>4. Pembebasan lahan potensial untuk pembangunan embung /waduk di Kecamatan Sulang dan Kecamatan Bulu</li> <li>5. Riset-litbang tentang sanitasi lingkungan dan kualitas potensi air baku</li> </ol>	DPUTaru, Bappeda	
7.	Pengembangan layanan pendidikan yang berkualitas	Pemberian Stimulan pada lembaga pendidikan dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Operasional lembaga PAUD dan PNF</li> <li>2. Bantuan kesejahteraan pada pendidik PAUD dan pengelola PKBM</li> <li>3. Bantuan kesejahteraan Guru Wiyata bakti</li> <li>4. Bantuan kesejahteraan guru madin</li> </ol>		
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Hibah Sarpras Keagamaan</li> <li>2. Bantuan Hibah Sarpras Pendidikan Keagamaan</li> <li>3. Bantuan Hibah Lembaga Keagamaan</li> </ol>	Bagian Kesra	
		Darmasiswa	Pemberian beasiswa pada siswa berprestasi bagi keluarga miskin dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi	Dindikpora	
		Layanan pendidikan yang dikembangkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sekolah ramah anak</li> </ol>	Dindikpora	

No	Program kerja (Program Unggulan)	Definisi Operasional	Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021)		Keterangan
			Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur)	Perangkat Daerah Pelaksana	
1	2	3	4	5	6
			2. Pendidikan berbasis keluarga melibatkan orangtua dalam proses pembelajaran untuk tingkat SMP		
	8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan Layanan Kesehatan	1. Puskesmas Ramah Anak 2. Puskesmas Ramah lansia 3. Posyandu Remaja 4. Pendaftaran Online RSUD R. Soetrasno 5. Pasien rawat inap pulang diantar sampai rumah dengan gratis	Dinkes	

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **7.1. Kerangka Pendanaan**

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah yang tersisa selama dua tahun ke depan.

Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2013-2018, Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang diproyeksikan mengalami peningkatan, dari sebesar Rp. 1,785,139,506,071.00 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1,963,618,225,990.26 pada tahun 2021 dengan proyeksi peningkatan sebesar 7.12%.

Belanja daerah diproyeksikan meningkat dari sebesar Rp. 1,827,508,350,914.00 pada tahun 2019 menjadi Rp. 2,004,521,104,972.12 pada tahun 2021. Adapun penerimaan Pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), direncanakan Rp. 49,237,212,843.00 pada tahun 2019, Rp. 47,700,726,056.38 pada tahun 2020 dan Rp. 45,203,835,981.86 pada tahun 2021.

Secara rinci realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2016-2017, realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2018 (*unaudited*), APBD 2019 dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2020-2021 disajikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 7.1.**  
**Realisasi dan Proyeksi**  
**Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2016 – 2021**

NOMOR URUT	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018 UNAUDITED	APBD TAHUN 2019	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,564,868,839,955.55</b>	<b>1,722,252,909,030.04</b>	<b>1,794,911,075,230.15</b>	<b>1,785,139,506,071.00</b>	<b>1,912,305,783,279.64</b>	<b>1,963,618,225,990.26</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>234,168,365,750.55</b>	<b>300,319,284,807.04</b>	<b>305,676,436,263.15</b>	<b>291,855,438,071.00</b>	<b>305,414,677,453.41</b>	<b>315,873,079,631.46</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	48,420,954,850.00	59,734,946,872.00	100,438,352,553.00	96,850,500,000.00	105,140,902,800.00	111,358,704,900.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23,985,514,302.50	20,730,064,301.00	21,441,590,432.00	23,158,499,000.00	23,462,436,266.40	23,690,389,216.19
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,564,459,237.00	9,212,738,532.00	18,775,303,058.00	10,030,000,000.00	11,635,072,876.37	13,075,529,623.75
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155,197,437,361.05	210,641,535,102.04	165,021,190,220.15	161,816,439,071.00	165,176,265,510.64	167,748,455,891.52
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>935,943,695,312.00</b>	<b>1,075,045,860,549.00</b>	<b>1,071,215,246,998.00</b>	<b>1,086,414,856,000.00</b>	<b>1,125,318,615,921.90</b>	<b>1,143,358,802,808.79</b>
1.2.1	Dana Transfer Umum	828,385,043,312.00	816,948,229,807.00	812,596,054,494.00	842,646,897,000.00	866,176,807,687.79	883,824,240,703.63
1.2.2	Dana Transfer Khusus	107,558,652,000.00	258,097,630,742.00	258,619,192,504.00	243,767,959,000.00	259,141,808,234.11	259,534,562,105.16
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>394,756,778,893.00</b>	<b>346,887,763,674.00</b>	<b>418,019,391,969.00</b>	<b>406,869,212,000.00</b>	<b>481,572,489,904.34</b>	<b>504,386,343,550.01</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,488,856,904.00	1,711,800,674.00	56,967,950,020.00	58,432,800,000.00	59,935,316,518.17	61,091,180,216.60
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	81,133,459,989.00	92,803,709,000.00	105,216,144,949.00	90,000,000,000.00	113,499,344,896.80	121,466,998,908.56
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	286,903,900,000.00	228,013,715,000.00	229,010,130,000.00	258,436,412,000.00	275,604,774,746.25	288,481,046,805.93
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25,230,562,000.00	24,358,539,000.00	26,825,167,000.00		32,533,053,743.12	33,347,117,618.92
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,734,304,081,928.58</b>	<b>1,829,088,241,098.22</b>	<b>1,814,662,872,214.36</b>	<b>1,827,508,350,914.00</b>	<b>1,954,605,233,336.03</b>	<b>2,004,521,104,972.12</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,026,233,523,179.00</b>	<b>1,050,346,817,667.00</b>	<b>1,064,012,361,865.16</b>	<b>1,144,037,719,205.00</b>	<b>1,193,249,349,430.65</b>	<b>1,176,071,738,359.27</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	695,202,128,818.00	622,547,261,167.00	648,104,050,822.16	693,272,542,605.00	708,276,936,800.18	718,029,793,027.05
2.1.2	Belanja Bunga	1,605,011.00	-	1,468,870,443.00	1,131,632,000.00	971,733,613.33	811,835,226.65
2.1.4	Belanja Hibah	27,269,005,350.00	46,450,880,000.00	55,764,388,000.00	48,064,900,000.00	79,411,467,487.68	50,421,393,103.44
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7,446,000,000.00	8,927,000,000.00	8,333,700,000.00	7,284,660,000.00	7,409,006,585.94	7,502,266,525.40
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6,455,961,000.00	6,437,223,500.00	10,765,819,900.00	11,944,474,900.00	12,862,869,388.65	13,505,745,530.70

NOMOR URUT	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018 UNAUDITED	APBD TAHUN 2019	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	289,842,093,000.00	365,168,845,000.00	339,575,532,700.00	381,339,509,700.00	383,317,335,554.87	384,800,704,946.03
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	16,730,000.00	815,608,000.00	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>708,070,558,749.58</b>	<b>778,741,423,431.22</b>	<b>750,650,510,349.20</b>	<b>683,470,631,709.00</b>	<b>761,355,883,905.38</b>	<b>828,449,366,612.86</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	144,564,120,169.00	174,582,051,301.00	177,564,307,707.00	179,311,949,050.00	165,526,459,903.01	181,437,343,042.76
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	217,960,717,279.58	250,388,658,063.00	263,637,696,747.20	310,601,673,112.00	307,560,368,688.24	325,550,042,582.29
2.2.3	Belanja Modal	345,545,721,301.00	353,770,714,067.22	309,448,505,895.00	193,557,009,547.00	288,269,055,314.13	321,461,980,987.80
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(169,435,241,973.03)</b>	<b>(106,835,332,068.18)</b>	<b>(19,751,796,984.21)</b>	<b>(42,368,844,843.00)</b>	<b>(42,299,450,056.38)</b>	<b>(40,902,878,981.86)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>396,607,873,805.61</b>	<b>232,225,166,662.58</b>	<b>108,161,445,444.40</b>	<b>49,237,212,843.00</b>	<b>47,700,726,056.38</b>	<b>45,203,835,981.86</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	396,607,873,805.61	214,495,185,982.58	108,161,445,444.40	49,237,212,843.00	47,700,726,056.38	45,203,835,981.86
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	17,729,980,680.00	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>12,296,725,422.00</b>	<b>8,228,389,150.00</b>	<b>12,717,627,920.00</b>	<b>6,868,368,000.00</b>	<b>5,401,276,000.00</b>	<b>4,300,957,000.00</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12,270,000,000.00	8,189,000,000.00	10,422,000,000.00	3,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,125,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	26,725,422.00	39,389,150.00	2,256,548,000.00	3,868,368,000.00	2,901,276,000.00	2,175,957,000.00
3.2.5	Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	-	-	39,079,920.00	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>384,311,148,383.61</b>	<b>223,996,777,512.58</b>	<b>95,443,817,524.40</b>	<b>42,368,844,843.00</b>	<b>42,299,450,056.38</b>	<b>40,902,878,981.86</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>214,875,906,410.58</b>	<b>117,161,445,444.40</b>	<b>75,692,020,540.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Di atas telah disampaikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2016-2017, realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2018 (*unaudited*), APBD 2019 dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2020-2021 yang akan datang.

Kenaikan Pajak Daerah pada Tahun 2020 ditargetkan meningkat sebesar Rp. 105,140,902,800.00 dengan persentase proyeksi peningkatan sebesar 8.56%. Adapun persentase proyeksi peningkatan Pajak Daerah tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata persentase kenaikan Pajak Daerah pada tahun 2016 - 2018 dikarenakan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang semula harga patokan penjualan batu gamping untuk semen dan industri adalah sebesar Rp. 70.000/m<sup>3</sup> turun menjadi Rp. 50.800/m<sup>3</sup> dan harga patokan penjualan batu gamping semula sebesar Rp. 45.000/m<sup>3</sup> turun menjadi 32.000/m<sup>3</sup>. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap rencana penerimaan pajak daerah tahun 2019 dan Proyeksi tahun 2020 dan 2021 dimana pada realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Kapur (Batu Gamping) pada tahun 2018 mencapai Rp. 36.495.488.880,- dimana proporsi Pajak dari Kapur sendiri pada realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2019 memiliki proporsi sebesar 36.34%.

Rencana Penerimaan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk APBD tahun 2019 sebesar Rp. 10,030,000,000.00 dan proyeksi pada tahun 2020 sebesar Rp. 11,635,072,876.37 dan 2021 Rp. 13,075,529,623.75 lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 18,775,303,058.00 dikarenakan pada tahun 2018 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terdapat penerimaan berupa Aset Management Unit (AMU) dari Bank Jateng sebesar Rp. 8,422,000,000.00 yang sifatnya tidak rutin setiap tahun yang diperkirakan sampai dengan tahun 2021 pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak ada penerimaan dari Aset Management Unit (AMU) dari Bank Jateng tersebut. Adapun penerimaan berupa Aset Management Unit (AMU) dari Bank Jateng sebesar Rp. 8,422,000,000.00 sifatnya adalah *Cash In Cash Out* dimana *Cash In* nya masuk pada Pendapatan Hibah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan *Cash Out* nya pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pada Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sedangkan pada Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2020 Kenaikannya sangat sedikit dibandingkan realisasi pada tahun 2018, hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Penerimaan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Setoran dari Bendahara PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp. 9,000,000,000.00 yang pada target APBD Tahun Anggaran 2018 dimana penerimaan tersebut yang tidak setiap tahun rutin ada dan pos Setoran dari Bendahara PPK-BLUD Puskesmas tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang pada Tahun Anggaran 2018 pos Setoran dari Bendahara PPK-BLUD Puskesmas tersebut digeser pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sehingga sangat mendongkrak Realisasi penerimaan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berkaitan dengan pos Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung dengan proyeksi kenaikan sebesar 2.16%, kenaikan tersebut memang dirasakan masih sedikit. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten telah memperhitungkan dengan adanya Jumlah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Tahun Anggaran 2020 sehingga dapat mengurangi beban Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung. Pemerintah Kabupaten Rembang juga mempertimbangkan akan realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Pada Tahun Anggaran 2018 yang serapannya adalah sebesar 96.97% sehingga diperhitungkan dapat untuk membiayai Belanja Pegawai apabila terdapat penerimaan CPNS atau PPPK baru. Sedangkan Apabila pemerintah pusat terdapat kebijakan menaikkan Gaji Pegawai sebesar 5-6% maka Pemerintah Pusat juga akan memperhitungkan kenaikan

tersebut dan menambahkannya pada Pos Dana Transfer Umum atau Dana Alokasi Umum sehingga dapat mencukupi kebutuhan Belanja Pegawai tersebut.

Berkaitan dengan proporsi Belanja Modal terhadap Total belanja memang pada proyeksi tersebut memang masih kurang terhadap proporsi ideal yang pada Tahun Anggaran 2019 berada pada angka 19.26%. Akan tetapi terhadap Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2019 telah mengalokasikan proporsinya lebih dari 25% terhadap total belanja. Adapun Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari Belanja Modal setelah ditambah dengan Belanja Pemeliharaan, Belanja Hibah, Belanja Bansos dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang peruntukannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu : Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam Proyeksi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Rembang masih mengklasifikasikan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Rembang masih menunggu regulasi atau Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Peraturan Menteri Dalam Negeri) sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang masih berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan Pemerintah Daerah dimana Aplikasi Perencanaan dan Aplikasi Penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2020 masih mengklasifikasikan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung. Namun Demikian Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Kabupaten Batang dan BPKP Jawa Tengah sebagai Pengembang Aplikasi Perencanaan dan Aplikasi Penganggaran akan Kesiapan Pengklasifikasian Belanja Daerah yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu : Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Selanjutnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 7.2, kemudian Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2021 secara rinci tercantum pada Tabel 7.3 berikut ini:

**Tabel 7.2**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2020 – 2021**

NO	URAIAN	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,912,305,783,279.64</b>	<b>1,963,618,225,990.26</b>
<b>2.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>47,700,726,056.38</b>	<b>45,203,835,981.86</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	47,700,726,056.38	45,203,835,981.86
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
		<b>1,960,006,509,336.02</b>	<b>2,008,822,061,972.12</b>
<b>3.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG (Selain Belanja Hibah dan Bantuan Sosial)</b>	<b>1,106,428,875,357.02</b>	<b>1,118,148,078,730.42</b>
	Belanja Pegawai	708,276,936,800.18	718,029,793,027.05
	Belanja Bunga	971,733,613.33	811,835,226.65
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12,862,869,388.65	13,505,745,530.70
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	383,317,335,554.87	384,800,704,946.03
	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
<b>4.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH (Selain Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah)</b>	<b>2,901,276,000.00</b>	<b>2,175,957,000.00</b>
	Pembayaran Pokok Utang	2,901,276,000.00	2,175,957,000.00
	Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	-	-
	<b>KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN</b>	<b>850,676,357,978.99</b>	<b>888,498,026,241.70</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah)

**Tabel 7.3**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2021**

NO	URAIAN	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021
1	2	3	4
	<b>KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN</b>	<b>850,676,357,978.99</b>	<b>888,498,026,241.70</b>
1.	PRIORITAS I (belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar)	558,311,729,405.37	562,132,485,395.06
2.	PRIORITAS II (belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah)	203,044,154,500.00	266,316,881,217.80
3.	PRIORITAS III (belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya : belanja hibah, belanja bansos, penyertaan modal)	89,320,474,073.62	60,048,659,628.84

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah)

## 7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Rembang berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan adalah sebagai berikut :

### 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### a. Urusan Pendidikan

- 1) Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 2) Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar;
- 3) Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

#### b. Urusan Kesehatan

- 1) Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- 2) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
- 5) Program Peningkatan Sarana Prasarana, Peyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan;
- 6) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan;
- 7) Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
- 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang;
- 9) Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;

#### c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- 3) Program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

#### d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Program pengelolaan RTH dan areal pemakaman;
- 2) Program pengembangan kawasan permukiman;
- 3) Program pengembangan perumahan dan bangunan gedung.

#### e. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas;

- 2) Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
  - 3) Program Pendidikan Politik Masyarakat dan pengembangan wawasan kebangsaan;
  - 4) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
  - 5) Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana;
  - 6) Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana.
- f. Urusan Sosial
- 1) Program Pemberdayaan FM, PSKS, dan Kepahlawanan;
  - 2) Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
- a. Urusan Tenaga Kerja
- 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
  - 2) Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
  - 2) Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
- c. Urusan Pangan
- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- d. Urusan Pertanahan
- 1) Program Fasilitasi pertanahan.
- e. Urusan Lingkungan Hidup
- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - 2) Program Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 3) Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas.
- f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil
- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  - 2) Program pelayanan pendaftaran penduduk;
  - 3) Program Pelayanan Pencacatan Sipil;
  - 4) Program pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data.
- g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
  - 2) Program Penguatan Kelembagaan desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3) Program Penyelenggaraan pemberdayaan pemerintah desa.
- h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 1) Program Keluarga Sejahtera;
  - 2) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- i. Urusan Perhubungan
- 1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
  - 2) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
  - 3) Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan.
- j. Urusan Komunikasi dan Informatika
- 1) Program Pengembangan informasi dan pengelolaan Informasi Publik;
  - 2) Program Pengembangan E-Government.
- k. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 1) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;
  - 2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM
- l. Urusan Penanaman Modal
- 1) Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan;

- 2) Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi.
- m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
  - 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga.
- n. Urusan Statistik
  - 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- o. Urusan Persandian
  - 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah.
- p. Urusan Kebudayaan
  - 1) Program pengembangan nilai budaya.
- q. Urusan Perpustakaan
  - 1) Program pelayanan perpustakaan.
- r. Urusan Kearsipan
  - 1) Program Pengelolaan kearsipan.
- 3. Urusan Pilihan
  - a. Urusan Kelautan dan Perikanan
    - 1) Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing perikanan;
    - 2) Program Pengembangan Perikanan budidaya dan garam;
    - 3) Program Pengembangan Perikanan tangkap.
  - b. Urusan Pariwisata
    - 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
    - 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
  - c. Urusan Pertanian
    - 1) Program pengembangan agribisnis perkebunan;
    - 2) Program pengembangan agribisnis pertanian;
    - 3) Program pengembangan agribisnis peternakan;
    - 4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian;
    - 5) Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian;
    - 6) Program peningkatan kualitas bahan baku.
  - d. Urusan Perdagangan
    - 1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan;
    - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
  - e. Urusan Perindustrian
    - 1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri;
    - 2) Program Pengembangan Industri Kreatif.
- 4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
  - a. Sekretariat Daerah
    - 1) Program peningkatan pelayanan kebijakan kehidupan mental spiritual/Kemasyarakatan;
    - 2) Program Peningkatan Kebijakan Bidang Pemerintahan;
    - 3) Program Peningkatan kualitas layanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Kelembagaan;
    - 4) Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan;
    - 5) Program Penyusunan Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum;
    - 6) Program Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah;
    - 7) Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah;
    - 8) Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitasi Layanan Pengadaan;
  - b. Kepegawaian Daerah
    - 1) Program Pelayanan dan Penataan Aparatur;
    - 2) Program Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian;
    - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah.
  - c. Sekretariat DPRD
    - 1) Program Legislasi Daerah;
    - 2) Program Peningkatan Pengawasan & Penganggaran Pembangunan Daerah.

- d. Pengawasan
  - 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
  - 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apatur Pengawasan.
- e. Keuangan Daerah
  - 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - 4) Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan.
- f. Perencanaan Pembangunan
  - 1) Program Penelitian dan pengembangan serta penerapan IPTEK;
  - 2) Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
  - 3) Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
  - 4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  - 5) Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- g. Penunjang Pemerintahan Kecamatan
  - 1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat

Terdapat 2 tabel yang menjelaskan perubahan program pada tahun 2016-2019 dan program pada tahun 2020-2021.

Tabel 7.4.  
Realisasi dan Penetapan Program Prioritas dan Pendanaan (Tahun 2016-2019)

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET		Rp	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			<b>849,862,882,664</b>			<b>1,026,233,523,179</b>			<b>1,050,346,817,667</b>		<b>1,091,881,145,441</b>		<b>1,144,037,719,205</b>	
	Belanja Pegawai			661,607,200,077			695,202,128,818			622,547,261,167		668,354,042,426		693,272,542,605	seluruh PD
	Belanja Bunga			7,985,987			1,605,011			-		1,451,355,415		1,131,632,000	
	Belanja Hibah			23,873,745,800			27,269,005,350			46,450,880,000		61,787,200,000		48,064,900,000	PPKD
	Belanja Bantuan Sosial			2,714,000,000			7,446,000,000			8,927,000,000		8,980,000,000		7,284,660,000	PPKD
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota			6,157,224,400			6,455,961,000			6,437,223,500		10,765,819,900		11,944,474,900	PPKD
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemdes			155,502,726,400			289,842,093,000			365,168,845,000		340,042,727,700		381,339,509,700	PPKD
	Belanja Tidak Terduga						16,730,000			815,608,000		500,000,000		1,000,000,000	PPKD
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			<b>368,941,893,329</b>			<b>708,070,558,749</b>			<b>778,741,423,431</b>		<b>820,471,694,176</b>		<b>683,470,631,709</b>	
	<b>Urusan Umum</b>														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		%				<b>22.743.927.281</b>			<b>42,106,589,600</b>		<b>40,830,161,872</b>		<b>49,399,672,940</b>	Seluruh PD
		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100			100	100		100		100		Seluruh PD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%				<b>44.649.264.314</b>			<b>15,114,089,358</b>		<b>13,735,418,814</b>		<b>12,311,727,750</b>	Seluruh PD
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	60			65	65		70		75		Seluruh PD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%				<b>1.854.632.844</b>			<b>1,954,386,993</b>		<b>3,105,537,373</b>		<b>2,289,220,000</b>	Seluruh PD
		Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	75			80	80		85		90		Seluruh PD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		%				<b>1.483.221.721</b>			<b>2,669,104,002</b>		<b>6,454,466,553</b>		<b>2,353,740,000</b>	Seluruh PD
		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	%	75	75			80	80		85		90		Seluruh PD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		%				<b>1.223.429.150</b>			<b>4,800,624,302</b>		<b>483,495,500</b>		<b>193,420,000</b>	
		Persentase kehadiran ASN tepat waktu	%	70	70			75			77		80		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah					4,100,000,000			3,449,453,685		3,837,064,426		111,000,000	Seluruh PD	
		Persentase Barang Inventarisasi dalam kondisi baik	%	80	80		82			85		87		Seluruh PD	
	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			<b>358,512,582,432</b>											
<b>1</b>	<b>Urusan Pendidikan</b>			<b>71,985,391,000</b>		<b>49.589.390.695</b>			<b>134,661,450,459</b>		<b>110,375,396,101</b>		<b>93,441,315,350</b>	PD yang menanganinya	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini					1,663,051,432			1,066,719,452		917,151,985		3,606,530,000		
		APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0-6 tahun	%	72	76	90,95	80	86,78		84		88			
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi cukup dan baik	%	30	32	0,03	35	5,1		37		39			
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Program Pendidikan Dasar)					24,768,699,859			69,105,351,636		53,772,920,066		47,404,018,000		
		Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	Skor	78	78.50	77,53	78.75	77,52		79.00		79.25			
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP	Skor	55	55.00	49,59	55.25	51,75		55.50		56.00			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	87	88	99,44	90	100,05		92		94			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	77	78	101,69	80	98,19		82		84			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	0	0.02	86,48	0.015	0,05		0.01		0.005			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	0	0.17	75,91	0.15	0,27		0.13		0.11			
	Program Pendidikan Menengah					12,749,781,206			0		0		0		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	%	73	80	81,47		0							
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	45	55	51,74		0							
	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal					3.835.563.430			576.083.531		2.783.977.415		2.812.878.000		
		Persentase kelulusan kejar paket A, B, C	%	100	100		100	100		100		100			
		Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin	%	2	2.8		3.8	100		4.8		4.8			
		Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)	%	98	99.03		99.04	83,42		99.05		99.06			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		penduduk usia 15 tahun ke atas													
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4.583.928.900			17,236,546,400		3,859,525,291		25,624,100,000		
		Guru Persentase yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	72	75		77	90,89		80.00		82.00			
		Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	26	28		29	65,41		31		33			
		Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	83	84		85	51,11		87		89			
		Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	94	95		96	52,61		97		98			
		Persentase Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	49	54		59	0		63		67			
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				1.988.365.868			2,971,452,581		1,975,011,930		13,993,789,350		
		Persentase capaian SPM pendidikan dasar pada tingkat kabupaten	%	86	87.00		90.00	97		92.00		94.00			
		Persentas pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS)	%	86	88		93	100		98		100			
		Persentase sekolah yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	77	77.1		100	97,4		100		100			
		Cakupan pelayanan penerbitan izin pendidikan	%	100	100		100	100		100		100			
		Program Peyusunan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sastra Daerah				0			0		500,565,930		557,063,333		
		Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang tertangani	%	n.a	10		15	100		20		25			
		Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus				0			0		444,947,493		495,167,407		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SD	%	1	10			20	64,71		30		35		
		Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SMP	%	8	10			20	20,33		30		35		
		Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal					0			0		222,473,747		247,583,704	
		Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal pendidikan karakter dan budi pekerti	%	26				40	57,24		50		60		
<b>2</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>			<b>124,899,070,362</b>			<b>182.262.256.111</b>			<b>215,752,728,588</b>		<b>147,748,477,391</b>		<b>185,962,115,600</b>	PD yang menanganinya
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					12.291.456.239			5,945,397,652		11,986,796,231		4,329,305,000	
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	98	98			98.7	98.18		98.8		99		
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat					9.674.757.477			13,241,085,720		6,702,977,205		29,569,715,000	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	75	75			75	100		75		75		
		Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	%	60	60			75	83		80		90		
		Persentase penurunan AKI	skor	8	6			6	14		6		5		
		Persentase penurunan AKB	skor	134	130			125	135		120		115		
		Persentase Desa stop buang air besar sembarangan (BABS)	%	60	70			80	81,9		90		100		
		Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	5	10			15	3,7		20		25		
		Program Pengawasan Obat dan Makanan					997.109.446			118,304,850		1,098,383,089		1,222,354,355	
		Persentase kasus keracunan makanan yang ditangani	%	97	97.00			98.00	98		99.00		100.00		
		Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga	%	97	97.5			98	98		98		98.5		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat													
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					461.813.000			39,800,000		514,868,535		572,980,231		
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	77.1	80			82	72,55		85		87		
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100			100	41,84		100		100		
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					263.185.000			128,320,000		257,256,452		286,292,231		
		Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	%	10	9.50			9.00	9.1		8,7		8,5		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100			100	100		100		100		
		Rasio posyandu per satuan balita	%	10	10.09			11.01	35.99		11.13		11.24		
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					246.540.000			49,920,000		233,967,343		260,374,548		
		Cakupan rumah sehat	%	67	70			73	74		75		77		
		Cakupan rumah bebas jentik	%	67	67.24			75	81.5		80		85		
		Persentase Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat	%	80	80.34			90	83.9		95		100		
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat	%	95.76	95.76			80	73.54		90		100		
		Cakupan jamban Keluarga (JAGA) yang memenuhi syarat	%	47.23	47.23			70	87.2		75		80		
		Cakupan Sanitasi dan Air Bersih (SAB) yang memenuhi syarat	%	63	63			75	78.01		80		85		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					2.322.383.793			1,067,885,590		2,301,770,721		2,561,564,807		
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam	%	100	100			100	100		100		100		
		Cakupan Desa / kelurahan Univer- sal Child Immunization (UCI)	%	100	100			100	100		100		100		
		Cakupan penemuan dan	%	100	100			100	47.3		100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		penanganan penderita penyakit TBC BTA													
		Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang tertangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase penanganan kasus diare per 1000 penduduk yang tertangani	%	9080	9080			100	100		100		100		
		Persentase kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani	%	90	95			100	100		100		100		
		Persentase ODHA terdata yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ATR)	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase kasus Filariasis (kaki gajah) yang ditangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase penanganan penderita malaria	%	n.a	100			100	100		100		100		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular						0			0		1,841,416,577		2,049,251,845	
		Prevalensi tekanan darah tinggi	%	2	2.11			< 5	8.2		< 5		< 5		
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	%	1	1.2			< 1.5	0.74		< 1.5		< 1.5		
		Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun	%	n.a	< 7			< 7	N/A		< 7		< 7		
		Persentase Desa/Kel yang melaksanakan kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	n.a	15			20	22.8		25		30		
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						2.829.996.229			372,008,199		2,965,465,883		3,300,169,288	
		Persentase Puskesmas yg telah memiliki Standar Plyn Publik (SPP)	%	18	30			40	100		50		60		
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus disediakan oleh RSUD	%	100	100			100	100		100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		Prosentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	%	100	100			100	100		100		100		
		Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin Operasional	%	90	100			100	100		100		100		
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya					37.823.920.978				23,684,995,310		33,908,279,140		3,842,640,320	
		Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	%	0	0.26			0.26	0.81		0.26		0.26		
		Ratio bed rawat inap per 10.000 penduduk	skor	78%	82			83	84		83		85		
		Persentase puskesmas, Puskesmas pembantu dan Pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	70	80			90	92		100		100		
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan					141.897.750				0		93,586,937		104,149,819	
		Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan	%	67	70.00			80.00	82		90.00		100.00		
		Rasio dokter per satuan penduduk (10.000 penduduk)	skor	34	36			38	0.88		42		46		
		Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	%	31	40			60	11.76		70		80		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita					82.150.000				35,550,000		89,408,280		99,499,530	
		Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia					83.657.000				6,400,000		98,266,284		109,357,310	
		Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	%	80	80			80	73.3		80		80		
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak					453.258.000				566,062,600		390,224,773		434,268,294	
		Cakupan pertolongan	%	92	93			94	99.8		95		96		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp		TARGET
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan													
		Cakupan kunjungan bayi	%	100	90			91	94.5			92		93	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	70			72	90.4			75		78	
		Cakupan pelayanan nifas	%	100	85			87	96.5			89		90	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100			100	100			100		100	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100			100	100			100		100	
		Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	100	100			100	100			100		100	
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan						54.850.000				46,441,425		51,659,989		57,490,700
		Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kualitas SDM Kesehatan	%	100	100			100	100			100		100	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada PPK-BLUD Puskesmas						31.738.585.717				56,095,000		35,449,216,321		49,040,767,600
		Persentase peningkatan fasilitas kesehatan terakreditasi	%	70	80			90	93.75			100		100	
	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata						82.796.695.482				129,310,839,819		65,565,598,216		100,719,696,000
		Skor Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat (I/SKM) RSUD	Skor	76	77.00			80.00	78,26			80.00		80.00	
		BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	81	80			80	78,10			80		80	
		AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	%	3.72	4			4	3,44			4		4	
		TOI (Turn Over Interval)	%	1	2			2	0,94			2		2	
		BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	%	79	50			50	84,83			50		50	
		NDR (Net Death Rate)	%	21	20			20	17,88			20		20	
		Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan	%	68	68.3			72.64	76,3			76.98		81.32	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB			
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14		
		Kesehatan Rawat Jalan														
		Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	%	84	83.5		84.8	79,54			86.1		87.4			
		Angka Kematian BBLR (1.500gr - 2.500 gr) di Rumah Sakit	%	5	4.5		4.1	2,14			3.7		3.3			
		Ketersediaan Obat di Rumah Sakit	%	98	98		98.2	98,6			98.4		98.6			
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin							0			0		0			
		Cakupan jaminan kesehatan penduduk miskin	%	88	89.72		91.04	75			92.3		93.08			
<b>3.</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>			<b>151,201,368,270</b>				<b>160.565.952.872</b>			<b>133,567,305,658</b>		<b>137,883,395,756</b>		<b>77,764,762,000</b>	PD yang menanganinya
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							93.435.641.128			80,995,703,900		97,874,902,577		48,922,607,000	
		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	49	54.2		60.98	62			66.01		78			
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	%	73	75		78	79			81		84			
		Tingkat aksesibilitas (panjang jalan/luas wilayah)	%	79	80		82	82			85		87			
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan							29.861.816.000			25,967,848,950		41,065,676,698		13,600,000,000	
		Persentase panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan per tahun	%	37	42		48	47			55		60			
		Persentase jembatan dalam kondisi baik yang direhabilitasi per tahun	%	78	80		85	79			90		95			
	Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan										0		842,282,435		937,348,374	
		Pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur	%	n.a	100		100	100			100		100			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan							4.587.139.148			597,188,545		4,757,117,606		650,000,000	
		proporsi sarana	%	87	90		92	92			94		96			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAAN	Rp	TARGET	CAPAAN	Rp	TARGET		Rp	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik													
	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong					889.592.000			757,197,150		842,282,435		937,348,374		
		persentase drainase jalan dalam kondisi baik	%					0.2							
		persentase drainase lingkungan pemukiman dalam kondisi baik	%	n.a	0.1			0.2		0.3		0.4			
	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong					9.685.688.150			4,322,032,400		1,310,217,121		600,000,000		
		Persentase luapan limpasan saluran air jalan protokol yang tertangani	%	91	100			100	-		100		100		
	Program pembangunan sistem informasi irigasi					0			0		842,282,435		100,000,000		
		Pemanfaatan sistem informasi irigasi dalam perumusan kebijakan	%	n.a	100			100	-		100		100		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					4.742.466.044			12,825,119,463		6,346,979,983		2,807,155,000		
		Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	77,88	81.00			84.24	81.00		87.60		91.11		
		rasio ketersediaan air irigasi untuk pertaian rakyat	%	1	0.68			0.7	-		0.72		0.75		
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya					5.612.714.000			7,025,023,650		8,171,075,489		3,170,000,000		
		persentase embung dan sungai kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	74	78			81	-		83		85		
	Program penyediaan dan pengolahan air baku								0		250,000,000		278,216,764		
		Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan industri serta kebutuhan pokok sehari-hari	%	64	66			72	65		76		80		
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah								0		300,000,000		333,860,117		
		Cakupan akses air		80	89.00			92.00		95.00		100.00			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		Minum													
		Persentase kondisi IPAL terpusat dalam kondisi baik	%	3	2.89			3	-		3.2		3.5		
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh									0	300,000,000		333,860,117		
		Pusat pertumbuhan	kawasan	-	1			2	1		3		4		
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan					11.750.896.402				530,216,300		21,705,399,357		0	
		persentase infrastruktur pedesaan (air bersih) dalam kondisi baik	%	59	61			65	-		67		69		
	Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah									0	500,000,000		556,433,528		
		persentase kondisi gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	81	83			85	-		87		89		
	Program pembinaan jasa konstruksi									94,823,400		400,000,000		445,146,823	
		persentase peserta pembinaan yang lulus uji kompetensi	%	73	80			90	-		100		100		
	Program perencanaan tata ruang									525,985,050		350,000,000		389,503,470	
		persentase penetapan rencana detil tata ruang menjadi peraturan daerah	%	n.a	n.a			50	-		60		70		
	Program pengendalian pemanfaatan ruang									0	350,000,000		389,503,470		
		persentase pengawasan ijin pemanfaatan ruang	%	40	50			60	-		70		80		
<b>4.</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman</b>					<b>1.551.138.030</b>				<b>33,761,399,750</b>		<b>11,049,066,718</b>		<b>14,844,682,000</b>	PD yang menangan
	Program lingkungan sehat perumahan									2,858,874,500		5,419,134,550		6,401,447,000	
		Cakupan sanitasi layak	%	77,42	79.6			81.3			83.5		100		
	Program pengembangan perumahan									29,871,466,900		3,010,167,954		7,623,235,000	
		Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani	%	77	80			82			85		87		
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan					363.645.030				235,572,447		89,343,100		291,619,494	
		Persentase kawasan permukiman kumuh	%	8	4.8			3.8			2.8		0.0		
	Program pengelolaan areal pemakaman					1.187.493.000				478,364,500		598,146,200		416,599,277	
		persentase ketersediaan	%	10	15			20			25		30		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		tempat pemakaman umum													
<b>5.</b>	<b>Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>9,817,652,800</b>			<b>8.675.749.350</b>			<b>10,429,912,300</b>		<b>6,141,217,050</b>		<b>10,668,356,000</b>	PD yang menanganinya
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					1.454.869.450			1,494,968,350		1,296,179,081		1,063,100,000		
		persentase konflik sosial yang tertangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	88	100			100	100		100		100		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan					2.131.829.100			910,890,000		1,209,611,164		1,346,136,415		
		Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	%	8	10			10	89		11		12		
		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)					642.720.400			0		416,461,871		463,466,696		
		Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	%	80	100			100	90		100		100		
	Program Pendidikan Politik Masyarakat					58.359.200			59,944,000		56,152,162		62,489,892		
		Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih yang menggunakan hak pilihnya	%	48	50			55	73,3		60		65		
		Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan pendidikan politik	%	60	70			80	33		90		100		
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					245.653.700			245,050,000		56,152,162		62,489,892		
		Persentase kriminalitas yang tertangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	85	90			100	87.66		100		100		
	Program Penegakan Peraturan Daerah					920.961.500			679,276,500		832,923,741		926,933,392		
		persentase pelanggaran Perda yang ditangani	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan					1.291.654.000			840,992,850		116,983,672		130,187,274		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		rasio poskamling per 10.000 penduduk	%	49	55			65	21		75		85		
		cakupan petugas Linmas di masing-masing Desa	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana							100		166,815,600	100	3,607,242,500	100	2,215,000,000	
		Persentase rumah korban bencana yang rehabilitasi	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase Sarpras sanitasi di daerah bencana	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran									1,087,887,700		2,749,584,216		141,000,000	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	%	100	100			100	100		100	3,751,532,200.00	100		
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit	45	<11			<11	<11-15		<11		<11		
		persentase pasar tradisional yang terpasang sistem pemadam kebakaran	%	10	20			40	60		60		80		
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana					1,929.702.000				4,991,469,400		2,749,584,216		305,000,000	
		Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	50	55	60	65	94.56			70	3,751,532,200.00	75		
<b>6.</b>	<b>Urusan Sosial</b>			<b>609,100,000</b>			<b>2.075.105.860</b>			<b>1,546,770,284</b>		<b>1,969,574,852</b>		<b>2,292,374,000</b>	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					405.700.840				258,998,517		444,537,952		494,711,642	
		Pertumbuhan KUBE-FM	kelompok	34	45			60	45		79		106		
		Persentase PMKS yang ditangani	%	45	50			55	49,83		60		65		
		Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	82	85			90	85		95		100		
		Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	40	40			45	49,83		45		45		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Kerja (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	60	58			60	50		60		60		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					418.523.121			518,346,175		350,951,015		390,561,823		
		Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tinggal darurat	%	72	75			84	80		84		84		
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	75	85			90	80		95		100		
		Persentase penanganan warga negara Migran korban tindak kekerasan	%	n.a	100			100	100		100		100		
		Persentase PMKS yang mendapatkan bansos	%	15	20			30	49,83		60		80		
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma					23.125.000			143,486,000		46,793,469		52,074,910		
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	20	30			40	35		50		60		
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo					40.920.000			38,290,000		46,793,469		52,074,910		
		Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam kondisi baik	%	63	65			70	70		70		70		
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)					273.382.000			98,636,500		140,380,406		156,224,729		
		Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan	%	60	70			75	100		80		85		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		penyakit sosial lainnya yang telah terbina													
		persentase napi, pengguna narkoba, dan penderita penyakit sosial lainnya serta generasi muda yang memanfaatkan hasil pembinaan	%	40	50		60	80		70		80			
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					913.454.899			489.013.092		1.085.608.472		1.208.137.904		
		Persentase Peningkatan Kemitraan pelaku usaha kesejahteraan sosial	%	50	55		60	60		65		70			
		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	48	50		60	22		70		80			
		Persentase lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) telah dibina	%	65	70		80	100		90		100			
	Program Penanganan Anak Terlantar								0		250.000.000		278.216.764		
		Persentase penanganan anak-anak terlantar	%	60	65		70	73		75		80			
	Program Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.								0		200.000.000		222.573.411		
		Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik	%	70	80		85	100		90		95			
	Program Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin								0		150.000.000		166.930.058		
		Persentase validasi data kemiskinan makro dan mikro	%	70	70		75	90		90		85			
	Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat								0		250.000.000		278.216.764		
		Persentase Peningkatan pelayanan sosial masyarakat	%	70	73		76	87		80		82			
	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>34.829.465.822</b>			<b>36.840.471.273</b>		<b>45.451.156.576</b>		<b>49.756.142.596</b>		
<b>1</b>	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>			<b>1.667.469.000</b>		<b>2.796.990.840</b>			<b>1.884.331.500</b>		<b>1.458.939.250</b>		<b>1.974.000.000</b>	PD yang menanganinya	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					1.906.005.086			1.420.440.000		1.861.444.181		1.269.000.000		
		Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	320	336		376	224		421		472			
		persentase fasilitas pelatihan yang bersertifikat	%	75	80		90	59,57		100		100			
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					374.467.000			172.700.000		402.423.830		447.844.223		
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	54	56.36		61.44	60		66.97		72.99			
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	67	77.8		80.2	80		82.6		85			
		Rasio penduduk yang bekerja	%	95	95.7		95.8	75		95.9		96			
		Tingkat pengangguran terbuka	%	45	43		42	5,91		41		40			
		Rasio ketergantungan	%	47.07	46		45	43,1		44		43			
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					516.518.754			291.191.500		734.657.457		255.000.000		
		persentase lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional	%	75	80		90	70		100		100			
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja								0		200.000.000		222.573.411		
		persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100	100		100	100		100		100			
		persentase keikutsertaan pekerja dalam BPJS ketenagakerjaan	%	80	90		100	80		100		100			
<b>2.</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			<b>1.067.500.000</b>		<b>3.171.581.748</b>			<b>2.519.889.929</b>		<b>2.391.266.819</b>		<b>1.770.000.000</b>	PD yang menanganinya	
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan					145.000.000			0		135.701.059		100.000.000		
		Persentase APBDes Responsife gender dan perlindungan anak	%	50	60		70	70		80		90			
		Persentase OPD yang memiliki anggaran responsif anak	%	15	30		46	51		61		79			
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan								74.951.791		200.000.000		400.000.000		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase lembaga layanan perlindungan yang aktif di Desa	%	40	50			60	89		70		80		
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan						127.432.940			0		56,152,162		460,000,000	
		persentase perempuan sebagai tenaga profesional	%	17	20			25	35,8		30		35		
		persentase keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD	%	10	15			20	22,22		25		30		
		persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	6	8			8	44,15		10		20		
	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan						149.864.500			84,947,900		514,728,155		90,000,000	
		Persentase perempuan yang memiliki jabatan eksekutif dilingkungan pemerintah daerah	%	28	28			29	28		30		30		
		Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan	%	100	100			100	100		100		100		
	Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak						570.000.000			522,399,450		533,445,542		420,000,000	
		Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melaporkan	%	100	100			100	100		100		100		
		Rasio SDM yang memiliki sertifikasi mengelola ABK terhadap ABK	%	10	10			20	15		35		40		
		Cakupan tingkat pembinaan terhadap forum anak	%	20	20.0			45	55		55		70		
		Rasio ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan anak terhadap jumlah anak	%	10	10			20	20		30		40		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp		TARGET
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Rasio kegiatan / event dengan kelompok anak	%	10	20			25	30		35		40		
		Program Pemberdayaan Perempuan anak					570.000.000			384,513,450		533,445,542		295,000,000	
		Persentase perlindungan khusus terhadap anak	%	100	100			100	100		100		100		
		Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	45	50			55	55		60		65		
		Program Sistem Data Gender dan AnakProgram Pemberdayaan Perempuan anak					1.609.284.308			1,528,029,129		533,445,542		5,000,000	
		Presentase program, anggaran dan kegiatan yang memecahkan isu gender dan anak	%	30	40			50	50		70		80		
		Rasio SKPD yang sudah menyusun PPRG/A	%	70	75			80	82		85		90		
<b>3</b>	<b>Urusan Pangan</b>			<b>3,947,074,200</b>			<b>4.370.500.000</b>			<b>782,713,900</b>		<b>1,223,410,000</b>		<b>3,307,539,346</b>	PD yang menangani
		Program penguatan lembaga ketahanan pangan daerah					150.000.000			0		140,380,406		156,224,729	
		Jumlah regulasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah	jumlah	2	4			6	1		7		8		
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan					905.000.000			508,713,900		846,961,782		942,555,865	
		Rata-rata konsumsi pangan per kapita	skor	2,226	2228			2229	1976,90		2230		2231		
		Rata-rata konsumsi protein nabati	%	61	60			55	61,9		55		55		
		Rata-rata konsumsi protein hewani	%	39	40			45			45		45		
		Rata-rata konsumsi ikan per kapita	%	13	20			21	20		22		23		
		Persentase lumbung pangan yang mendapat pendampingan	%	35	40			45			50		55		
		Persentase pengembangan Desa Mandiri Pangan	%	20											
		Program Pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan					659.000.000			0		616,737,916		686,347,309	
		persentase ketersediaan bahan pangan utama	%	94	95			97	6,318		98		99		
		Program Peningkatan Mutu dan keamanan pangan					329.500.000		4	0		308,368,958		343,173,655	
		cakupan pembinaan dan	%	70	80			90			100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		pengawasan keamanan pangan													
		Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan					659.000.000		1,3	274.000,000		616,737,916		686,347,309	
		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	kkal/kapita/hari	5,280	6325			6515	0,6		6710		6912		
		Persentase Penurunan tingkat rawan pangan	%	9	8			7	33		6		5.5		
		persentase ketersediaan cadangan pangan di daerah rawan pangan	%	60	70			80	43		90		100		
		Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan					659.000.000			0		616,737,916		686,347,309	
		Nilai ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	nilai	47	50.00			55.00	20		60.00		65.00		
		persentase Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang dibina	%	55	60			70			80		90		
		persentase pengembangan model pemantauan, distribusi, harga dan cadangan pangan	%	70	75			80	10		85		90		
		Program pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar					659.000.000		10	0		616,737,916		686,347,309	
		Skor PPH	skor	87	87.20			87.50			87.70		87.90		
		persentase pemanfaatan hasil pendampingan dalam upaya penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar	%	n.a	100			100	50		100		100		
		Program Desa Mandiri Pangan					350.000.000					327,554,280		364,524,368	
		Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya tanaman pangan, horikultura dan peternakan skala kecil	%	2	4.00			6.00	10	0	8.00		10.00		
<b>4.</b>	<b>Urusan Pertanahan</b>						<b>1.115.000.000</b>			<b>44,415,500</b>		<b>82,406,000</b>		<b>130,000,000</b>	PD yang menangan
	Program Pengembangan Sistem						375.000.000			0		0		80,000,000	ni

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
	Informasi Pertanahan														
		persentase pemanfaatan sistem informasi spasial aset daerah	%	n.a	50				100				100		100
		persentase pemanfaatan sistem informasi di tingkat Desa/Kelurahan	%	n.a	60				100				100		100
	Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						370.000.000				44,415,500		82,406,000		0
		persentase lahan tanah aset daerah yang bersertifikat	%	44	47				50				70		80
	Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan						370.000.000				0		0		50,000,000
		persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100				100				100		100
		persentase penyelesaian izin lokasi	%	100	100				100				100		100
<b>5.</b>	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>			<b>3,249,324,200</b>			<b>9.990.092.500</b>				<b>5,254,812,310</b>		<b>10,089,296,178</b>		<b>5,715,376,000</b>
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						3.438.382.050				3,323,682,310		8,216,586,518		3,758,376,000
		Persentase sampah terangkut	%	20	23.98				28.53	61			33.96		40.41
		Persentase penanganan sampah	%	70	75				80	83			90		100
		rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%	4	5				6	9,8			8		10
		persentase komunitas yang menerapkan asas zero waste dalam menyelenggarakan event publik	%	n.a	30				40	41			50		60
		persentase RT yang melakukan pemilahan sampah	%	n.a	10				20	24			30		50
		Persentase bank sampah aktif	%	10	20				30	33			40		50
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						740.480.000				381,187,000		697,222,682		775,916,154
		Persentase penanganan kasus pencemaran/kerusakan LH	%	100	100				100	100			100		100
		indeks kualitas air	skor		73%				80%	65			90%		100

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019			
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14		
						kelas A				kelas A						
		indeks kualitas udara	skor	n.a		diatas baku mutu				56			diatas baku mutu			
		indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	skor	n.a		60.15				62.15			64.15		66.15	
		persentase usaha yang berdampak besar dan harus diawasi	%	n.a		10				15			2		30	40
		persentase industri rumah tangga polutan yang memiliki IPAL	%	n.a		20				25			0		35	45
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								710.252.000				555,620,000		678,505,295	755,086,190
		Luasan kawasan konservasi	Ha	145		147				150			0		152	154
		persentase luas lahan dan hutan kritis	%	70		60				50			20		40	30
		persentase luasan lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung di luar hutan	%	37		35				33			20		30	28
		persentase sumber air dalam kondisi baik	%	70		80				80			80		80	80
		daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	skor	n.a		DDL ≤ 1				DDL ≤ 1			0		DDL ≤ 1	DDL ≤ 1
		persentase tutupan vegetasi	%	75		75				75			65		75	75
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam												0		46,793,469	52,074,910
		Persentase rehabilitasi SDA	%	30		38				45			25		48	52
		persentase pemanfaatan hasil kajian pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	n.a		100				100			0		100	100
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								29.199.000				36,410,000		28,076,081	31,244,946
		Persentase validasi data dan informasi SLHD	%	70		75				80			100		83	75
		Pemanfaatan data informasi lingkungan hidup	%	100		100				100			100		100	100
		persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100		100				100			100		100	100

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi					15.590.000			32,350,000		18,717,387		20,829,964		
		Indeks kualitas LH	indeks	67	67.00		67.50	66		68.00		68.50			
		persentase pemanfaatan hasil pembinaan dalam rangka pengendalian polusi	%	100	100		100	100		100		100			
	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut					123.612.500			81,330,000		116,983,672		130,187,274		
		Cakupan luasan rehabilitasi ekosistem pesisir	Ha	4	4		6	6		7		8			
		Persentase ekosistem pesisir dan laut yang terehabilitasi	%	22	30		40	40		50		60			
		Persentase pemanfaatan kawasan pesisir dan laut untuk kegiatan produktif	%	n.a	10		20	30		30		40			
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					4.735.738.950			844,233,000		513,660,000		336,091,467		
		Rasio luasan RTH	Rasio	0	0.15		0.17	60		0.20		0.23			
		Persentase Luas RTH Perkotaan Publik	%	12	13.25		14.76	40		16.34		17.89			
	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan					146.838.000			0		140,380,406		156,224,729		
		Lokasi pengembangan ekowisata	Lokasi	3	3		4	6		5		6			
		persentase ODTW berbasis ecowisata dan jasa lingkungan	%	n.a	10		20	30		30	0	40	0		
		NSPK pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan	%	n.a	10		20	30		30	0	40	0		
	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					50.000.000			0		46,793,469		52,074,910		
		Peran serta masyarakat dalam konservasi	pokmas	10	15		20	0		23		25			
		Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kapasitas SDA dan LH	%	100	100		100	0		100		100			
<b>6.</b>	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil</b>			<b>2,628,770,800</b>		<b>1.986.939.051</b>			<b>2,082,215,014</b>		<b>3,077,225,872</b>		<b>2,556,537,250</b>	PD yang menanganinya	
	Program penataan Administrasi Kependudukan					1.986.939.051			2,082,215,014		3,077,225,872		2,541,537,250		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase penduduk ber KTP	%	88	100			100	98,4		100		100		
		rasio kepemilikan KTP elektronik	%	100	100			100	98,4		100		100		
		rasio kepemilikan akta kelahiran bayi (0-1 tahun)	%	100	100			100	95,6		100		100		
		rasio kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk	%	82	85			87	31		90		92		
		rasio kepemilikan akta kematian	%	23	30			35	25		40		50		
		rasio kepemilikan kartu identitas anak (1-10 tahun)	%	n.a	20			30	0		40		60		
	Program pengembangan data dan informasi kependudukan						0			0		0		15,000,000	
		persentase pemanfaatan database dan profil penduduk dalam perumusan kebijakan	%	n.a	100			100	0		100		100		
<b>7.</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			<b>1,441,138,000</b>			<b>1.926.579.975</b>			<b>4,163,314,442</b>		<b>3,784,983,557</b>		<b>3,585,000,000</b>	PD yang menanganinya
	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat						278.185.620			747,585,230		383,706,443		1,522,500,000	
		Rata-rata Persentase kesesuaian Program RPJMDesa dengan Program Pemerintah Daerah	%	20	35			50	90		65		80		
		Rata-rata persentase fokus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMDes	%	5	8			10	96		13		16		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat yang telah diberdayakan	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan	%	50	53			56	70		59		72		
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah						410.000.000			0		383,706,443		427,014,259	
		persentase aparatur pemerintah desa yang	%	100	100			100	92		100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB			
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14		
		mengikuti pelatihan														
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum					0			0		383,706,443		427,014,259			
		Persentase sarpras Paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan	%	2.59	4.54				13.63	72		22.72		31.81		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa										286,363,687		577,541,846		642,727,294	
		Persentase Desa yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	%	100	100				100	100		100		100		
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat					300.000.000					1,321,157,575		280,760,812		312,449,458	
		Persentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar	%	6	8				10	30		12		14		
		Persentase Penyaluran modal usaha UP2K-PKK	%	10	15				20	9		30		40		
		Persentase Kader Pembangunan Masyarakat yang terlatih	%	60	65				70	96		75		80		
	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Desa					200.000.000					155,813,260		187,173,874		208,299,639	
		Persentase desa yang membentuk BUMdes	%		6				10	15		15		20		
		Persentase BUM Desa yang didampingi	%	80	85				90	91		95		100		
		Persentase BKAD yang didampingi	%	60	70				80	100		85		90		
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa					466.354.105					961,748,900		357,502,100		397,852,310	
		persentase penduduk miskin yang diantarkan	%	11	12				13	13		20		25		
		persentase keaktifan tim penanggulangan kemiskinan desa	%	-	10				20	20		30		40		
	Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan					0					389,400,000		433,156,385		482,045,471	
		persentase PUS yang menjadi anggota UPPKS	%	87	88.2				88.5	89		88.6		88.9		
	Program Penanggulangan kemiskinan					272.040.250					231,365,796		257,364,077		286,412,003	
		Persentase pelaksanaan regulasi TKPKD	%	50	60				65	65		70		75		
<b>8.</b>	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan</b>			<b>4,232,321,000</b>			<b>2.443.042.079</b>				<b>4,050782,029</b>		<b>6,845,349,376</b>		<b>7,710,190,000</b>	PD yang

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAAN	Rp	TARGET	CAPAAN	Rp	TARGET	Rp		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>Keluarga Berencana</b>														menangani
	Program Keluarga Berencana					2.443.042.079			2.328.671.879		5.083.032.329		6.285.190.000		
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2	2.06			2.05	2,07		2.04		2.03		
		Cakupan peserta KB aktif	%	100	100			100	120,89		100		100		
		Rasio akseptor KB	%	835	837.04			837.05	841,11		837.06		838.87		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	4	3.45			3.22	1,56		3		2.75		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmen Need)	%	7	6.79			6.73	6,94		6.67		6.61		
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	%	35	35			34	32		33		32		
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	84	83.67			83.61	84,11		83.64		83.66		
		Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	1	0.8			0.79	0,79		0.77		0.74		
		Total Fertility Rate (TFR)	%	2	2.06			2.05	2,07		2.04		2.03		
	Program Pelayanan Kontrasepsi									0		667,421,240		742,751,111	
		Angka Drop ut KB	%	14	12.85			12.08	8,72		11.31		10.54		
		Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri									0		1,183,702,850		836,499,335	
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100			100	100		100		100		
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja									0		333,710,620		371,375,555	
		Presentase kecamatan	%	100	100			100	100		100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET		Rp	TARGET
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja													
	Program Ketahanan Keluarga									1,722,110,150		389,329,057		433,271,481	
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	87	87.54			87.8	89,89			88		88.33	
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	78	78.5			78.76	88,79			79.02		79.27	
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	91	91.38			91.64	92,47			91.9		92.17	
	Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui Kelompok Bina keluarga dan Bina balita									0		389,329,057		433,271,481	
		Cakupan anggota bina keluarga baita (BKB) ber-KB	%	92	92.38			92.64	89,89			92.9		93.17	
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD									0		444,947,493		495,167,407	
		Cakupan kelompok Bina keluarga balita (BKB) yang terintegrasi	%	48	55			60	59			65		70	
<b>9.</b>	<b>Urusan Perhubungan</b>			<b>3,096,564,800</b>			<b>1.793.056.042</b>			<b>3,935,458,964</b>		<b>9,858,376,392</b>		<b>5,417,580,000</b>	PD yang menangan
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						218.796.000			1,284,492,500		2,152,499,560		2,372,580,000	
		Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	71,42	71,42%			80	80			80		90	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						256.691.950			276,920,650		651,611,000		338,486,913	
		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	85	0.85			0.9	90			0.9		0.9	
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan						53.000.000			269,041,300		70,190,203		78,112,365	
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	%	408	420			400	303			400		350	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan						30.325.000			0		32,755,428		36,452,437	
		Persentase ketersediaan	%	74	75			76	76			78		80	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		sarana dan prasarana perhubungan													
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					592.364.000			533,254,000		946,297,500		675,234,524	
		Persentase kondisi fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	67	72			76	76		80		85		
		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					10.000.000			15,000,000		9,358,694		10,414,982	
		Persentase kendaraan bermotor umum (KBU) yang lolos uji	%	92	100			100	98		100		100		
		Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas					408.560.248			362,100,626		327,554,280		364,524,368	
		Persentase kendaraan umum yang berada dalam kondisi laik jalan	%	94	0.95			0.96	96		0.97		0.97		
		Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran					223.318.844			264,278,388		196,886,000		150,000,000	
		Persentase rambu - rambu laut yang terpasang dalam kondisi baik	%	67	70			80	80		90		100		
		Persentase Peralatan SAR dalam kondisi baik	%	80	90			100	90		100		100		
<b>10.</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>			<b>774,141,200</b>		<b>660.541.207</b>			<b>679,350,278</b>		<b>975,122,660</b>		<b>4,486,000,000</b>	PD yang menanganinya	
		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa					566.581.207			587,219,278		234,773,000		442,636,732	
		Persentase peningkatan update konten pada website www.rembangkab.go.id	%	85	87			92	100		94		96		
		Penerapan Sistem Informasi Manajemen pemerintah	%	40	50			60	60		65		70		
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet	%	87	90			100	100		100		100		
		Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	%	65	75			85	100		90		100		
		Persentase PD telah memiliki website ( % )	%	87	90			100	100		100		100		
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi	%	22	22			25	88		30		35		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAAN Rp	TARGET	CAPAAN Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		Masyarakat di tingkat Kecamatan													
		Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi					93.960.000			92,131,000		129,700,497		104,149,819	
		Cakupan pengawasan menara BTS	nilai	131	145				150	100		160		165	
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi									0	472,736,588		2,570,000,000	
		Presentase Layanan Publik berbasis TIK	%		40				50	78		60		65	
		persentase perangkat daerah yang menerapkan e-government	%	20	25				50	100		60		80	
		persentase interkoneksi internet dan jaringan intranet kabupaten, kecamatan, desa dan perangkat daerah	%	30	40				45	27		50		55	
		persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	%	38	50				100	...		100		100	
		Program kerjasama informasi dan media massa									0	46,500,000		278,216,764	
		Rata-rata berita yang dipublikasikan tiap bulan	%	30	32				35	100		37		40	
		persentase expo skala nasional yang diikuti dalam satu tahun	%	100	100				100	100		100		100	
		Program peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi									0	91,412,575		389,503,470	
		persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi TIK	%	25	30				35	0		40		45	
<b>11.</b>	<b>Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>			<b>2,338,614,800</b>			<b>771.187.000</b>			<b>1,069,466,140</b>		<b>473,413,673</b>		<b>782,000,000</b>	PD yang menanganinya
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi						85.805.000			0		5,000,000		93,734,837	
	Persentase KSP / USP sehat	%	35	37					40	67.57		42		46	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						240.000.000			0		0		0	
	Persentase koperasi aktif	%	84	86					88	90,31		90		92	
	Persentase koperasi dalam kondisi sehat	%	36	36					37	67.57		39		42	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					82.816.000			74,480,000		106,950,000		104,149,819		
		Persentase UMKM yang mengikuti pameran / promosi	%	5	6		7	7		8		9			
		persentase aksesibilitas UMKM	%	43	50		60	63		70		80			
	Program Fasilitas Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha								0		62,863,673		104,149,819		
		Persentase peningkatan pnyaluran Modal LKM koperasi dan UKM	%	10	15		17	9,4		20		22			
	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					100.916.000			278,735,000		197,200,000		114,564,801		
		Persentase UMKM kreatif	%	0	0.5		0.6	24.24		0.7		0.8			
		Persentase peningkatan skala usaha UMKM	%	5	6		7	1.16		8		9			
		Prosentase pertumbuhan Usaha Mikro dan kecil terhadap total UKM	%	5	5		5	1.16		5		5			
		Produktivitas UMKM	%	8	10		11	11		12		13			
		Persentase pertumbuhan koperasi terhadap total UKM	%	2	2		2	2		2		2			
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah					211.650.000			222,040,000		364,989,055		406,184,295		
		Rasio UMKM dengan peningkatan skala usaha	%	≤ 2	≥ 5		≥ 5	1.16		≥ 5		≥ 5			
	Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru					50.000.000			99,796,000		46,793,469		52,074,910		
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	17	22.62		29.41	1.16		38.23		49.70			
<b>12.</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>			<b>791,520,000</b>		<b>799.420.000</b>			<b>946,629,801</b>		<b>595,105,882</b>		<b>1,107,720,000</b>	PD yang menangan	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					205.000.000			334,101,501		109,275,600		213,507,130	ni	
		Persentase prospektus investasi yang mendapat LOI	%	20	30		40	60		45		50			
		Proporsi investor sektor prioritas terhadap keseluruhan sektor	%	67	70		80	80		80		80			
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					110.000.000			110,000,000		169,407,472		114,564,801		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET		Rp	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		Peningkatan Nilai investasi	Rp. tri lyun	3	3.721				3.982	5,288		4.261		4.559	
		Proporsi investor PMDN terhadap total investasi	%	20	20				30	97		35		40	
		Persentase komplain terhadap Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang ditangani	%	n.a	100				100	100		100		100	
		Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana	%	65	70				75	90		80		85	
		Persentase PMA/PMDN di Kabupaten Rembang yang taat aturan	%	65	70				80	55		85		90	
	Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal						289.000.000				220,247,000		0		300,992,978
		Persentase tindak lanjut pengaduan	%	50	60				70	80		80		90	
		persentase Pengembangan SIPM	%	70	80				90	20		100		100	
		Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti/ditangani	%	95	100				100	75		100		100	
	Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal						195.420.000				39,017,400		143,092,795		203,529,577
		Persentase penanaman modal sesuai perijinan	%	50	60				70	70		80		90	
		persentase penanaman modal yang menyerap tenaga kerja lokal > 50%	%	20	30				40	95		50		60	
		persentase pelayanan penanaman modal sesuai SOP	%	100	100				100	87		100		100	
	Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan										214.477.900		148,454,315		612,720,000
		Persentase pelayanan perijinan melalui SIPISE	%	5	10				15	80		20		30	
		Persentase pelaksanaan SOP perijinan	%	60	62				65	60		67		72	
<b>13.</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>2,460,000,000</b>			<b>1.605.000.000</b>				<b>5,857,998,800</b>		<b>2,045,741,700</b>		<b>3,480,950,000</b>
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda						130.000.000				2,400,000		741,349,650		135,394,765

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		jumlah kebijakan berkaitan dengan kepemudaan	Dok	-	0			1	1		2		3		
		Jumlah organisasi Kepemudaan yang dibina	Orga nisasi	16	17			18	10		19		20		
		Jumlah Kewirausahaan pemuda yang mandiri	Orang	24	24			24	10		24		24		
		persentase organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam bentuk pelatihan manajemen	%	10	20			30	30		40		50		
		persentase tindaklanjut dari dokumen rencana aksi pemuda daerah	%	n.a	20			30	30		40		50		
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga						50.000.000				0		8,550,000		52,074,910
		Jumlah pengurus cabor yang terlatih	Pengu rus	10	20			30	30		40		50		
		persentase tenaga pelatih bersertifikat	%	60	70			80	94		90		100		
		persentase kepengurusan organisasi cabor yang terdaftar	%	45	50			60	30		80		90		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga						925.000.000				883,111,800		880,093,250		1,365,000,000
		persentase atlet peraih medali di event tingkat Karesidenan	%	22	145			150	98		155		160		
		persentase atlet peraih medali di event tingkat provinsi	%	32	35			40	20		45		50		
		persentase atlet peraih medali di event tingkat nasional	%	-	5			7	0		7		9		
		Persentase komunitas olahraga yang aktif	%	70	75			80	100		85		90		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga						500.000.000				394,9951,000		173,066,000		1,140,950,000
		rasio gelanggang olah raga per 1000 penduduk	%	1,81	1,81			1,82	1,030		1,83		1,84		
		rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk	%	0,0024	0,0024			0,0025	0,016		0,0026		0,0027		
<b>14.</b>	<b>Urusan Statistik</b>			-			<b>500.000.000</b>				<b>84,500,000</b>		<b>124,716,682</b>		<b>135,000,000</b>
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah						500.000.000				84,500,000		124,716,682		135,000,000

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	85	87			90	90		92		95		
		persentase publikasi dokumen Rembang Dalam Angka yang diterbitkan tepat waktu	%	80	100			100	100		100		100		
		persentase publikasi dokumen NTP yang diterbitkan tepat waktu	%	70	100			100	100		100		100		
		persentase publikasi dokumen PDRB sektoral tingkat kecamatan yang diterbitkan tepat waktu	%	80	100			100	100		100		100		
		persentase publikasi dokumen statistik kemiskinan, kependudukan, pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial yang diterbitkan tepat waktu	%	80	100			100	100		100		100		
<b>15.</b>	<b>Urusan Persandian</b>			-			<b>504.535.380</b>			<b>0</b>		<b>14,715,398</b>		<b>25,000,000</b>	PD yang menangan
	Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah						<b>504.535.380</b>			0		14,715,398		25,000,000	
		persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	%	100	100			100	100		100		100		
<b>16.</b>	<b>Urusan Kebudayaan</b>			<b>495,000,000</b>			<b>45.000.000</b>			<b>1,040,467,400</b>		<b>1,241,152,697</b>		<b>1,205,000,000</b>	PD yang menangan
	Program pengembangan nilai budaya									745,738,400		162,070,000		538,000,000	
		persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	%	58	60			65	65		70		70		
	Program pengelolaan kekayaan budaya									0		0		220,000,000	
		persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	%	17	20			30	30		40		50		
	Program pengelolaan keragaman budaya									249,729,000		499,511,500		185,687,778	
		persentase pengelolaan	%	13	15			20	20		25		30		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		keragaman budaya secara profesional													
		Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya								0	48,706,947			185,687,778	
		persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya yang tertangani	%	26	30		35	20			40		45		
		Persentase cagar budaya yang direvitalisasi	%	4	5		6	5			7		8		
		Jumlah pemanfaatan cagar budaya	Jumlah	1	1		2	2			3		4		
		Program Pembinaan Kesenian Masyarakat								0	198,073,500			185,687,778	
		Perkembangan kelompok kesenian tradisional	Kelompok	311	320		330	300			350		370		
		Program Pembinaan Sejarah Lokal								0	98,314,750			185,687,778	
		Dokumentasi sejarah lokal	Dok	2	3		4	4			5		6		
		Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa				45.000.000				45.000.000		4.975.000		46.867.419	
		Cakupan fasilitasi organisasi penghayat kepercayaan	Organisasi	5	6		7	6			9		10		
<b>17.</b>	<b>Urusan Perpustakaan</b>			<b>270.000.000</b>			<b>0</b>			<b>1.752.670.175</b>		<b>985.650.065</b>		<b>440.000.000</b>	PD yang menanganinya
		Program pengembangan budaya baca								967,947,400		444,166,000		220,000,000	
		persentase minat baca masyarakat	%	56	60		62	64			64		66		
		Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan								784,722,775		312,183,000		220,000,000	
		Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	10	20		30	40			40		50		
		Persentase gedung perpustakaan dalam kondisi baik	%	80	80		90	95			95		95		
		Cakupan naskah kuno yang dilestarikan	rasio	270	280		290	295			295		300		
<b>18.</b>	<b>Urusan Kearsipan</b>			<b>1.061.507.000</b>			<b>350.000.000</b>			<b>616.493.300</b>		<b>266.690.375</b>		<b>6.058.250.000</b>	PD yang menanganinya
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				350.000.000				601,493,500		208,790,400		1,983,050,000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp		TARGET
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase arsip yang dialihmediakan	%	15	20			25	30		30		40		
		Persentase arsip yang dimusnahkan	%	n.a	30			40	50		50		60		
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan						0			14,999,800		27,999,975		1,944,800,000	
		Persentase Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku	%	52	55			60	65		65		70		
		Persentase arsiparis yang memiliki kompetensi	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya	%	15	16			17	18		18		19		
		Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	%	60	70			80	90		90		100		
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan						0			0		29,900,000		2,130,400,000	
		Persentase arsip/dokumen perangkat daerah yang terdigitasi	%	13,3	20			30	40		40		60		
		persentase pelaksanaan sistem kearsipan sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	25	30			40	50		50		60		
	<b>URUSAN PILIHAN</b>						<b>71.969.485.306</b>			<b>58.800.454.563</b>		<b>75,015,752,660</b>		<b>71,032,814,173</b>	
<b>1.</b>	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>			<b>30,221,052,600</b>			<b>24.359.552.070</b>			<b>16,602,570,784</b>		<b>18,087,137,865</b>		<b>14,285,608,000</b>	PD yang menanganinya
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan						630.000.000			1,856,087,000		589,597,705		656,143,862	
		Peningkatan Produksi ikan	ton	4,040	7,400			9,200	6,318		11,700		15,200		
		Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya ikan skala kecil	%	1	2			4	4		6		8		
		Produktivitas perikanan budidaya	ton/ha								<b>0</b>				
		-udang vaname		18	20			22	1,3		<b>0</b>	24		26	
		-bandeng		24	25			28	0,6		<b>0</b>	30		32	
		Tingkat Cakupan binaan kelompok pembudidaya	%	32	33			33	33		<b>0</b>	34		35	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		ikan													
		Tingkat Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan	%	41	42			43	43	0	44		44		
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan						60.000.000			0		56,152,162		62,489,892	
		persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna yang direkomendasikan	%	5	10			20	20	0	30		40		
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan						100.000.000			874,841,000		93,586,937		104,149,819	
		persentase peningkatan konsumsi ikan	%	10	10			10	10	0	10		10		
		persentase peningkatan produk perikanan yang bersertifikat	%	5	5			10	10	0	10		10		
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar									1,825,073,159		278,092,183		309,479,629	
		persentase terkelolanya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar secara berkelanjutan	%	35	40			50	50	0	60		70		
	Program pengembangan nelayan kecil									145,897,000		333,710,620		371,375,555	
		persentase peningkatan pendapatan nelayan kecil	%	10	10			10	10		10		10		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha									22,718,000		222,473,747		247,583,704	
		Usaha produktif keluarga nelayan	Unit	2,769	2,797			2,825	2,740		2,853		2,881		
		Persentase rata-rata peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan	%	10	15			20	15		23		25		
	Program pengelolaan TPI terpadu									11,622,240,919		16,201,948,215		11,279,848,000	
		Nilai raman	Rp.Milyar	412	420.270			432.878	410.814		450.193		472.703		
<b>2.</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>			<b>3,499,653,000</b>			<b>6.929.620.000</b>			<b>4,229,880,830</b>		<b>2,624,656,559</b>		<b>3,638,705,000</b>	PD yang menanganinya
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						1.725.000.000			934,990,700		951,178,000		765,800,000	
		persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	8	20			25	30		30		35		
		persentase peningkatan jumlah ODTW yang	%	20	50			50	50		50		50		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		dipromosikan													
		Rata-rata lama menginap	hari	1	1			1.2	1,2		1.4		1.6		
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					4.769.620.000			2,750,124,150		1,573,478,559		2,317,905,000		
		Kawasan DTW strategis	DTW	5	6			7	8		8		9		
		persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,8	5			10	10		20		30		
		Persentase pramuwisata bersertifikat	%	10	15			17	2		25		28		
		persentase pengelola Tourist Information Center bersertifikat	%	4	4			8	-		13		18		
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata					435.000.000			544,765,980		407,103,177		453,051,714		
		Peningkatan SDM pariwisata	pokda rwis	9	10			12	13		14		16		
		persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	60	70			80	85		100		100		
	Program pengembangan ekonomi kreatif								0		100,000,000		333,860,117		
		Penyediaan ruang kreatif	Ruang	1	2			3	3		4		5		
		persentase komunitas ekonomi kreatif yang dibina	%	30	40			50	50		60		70		
<b>3.</b>	<b>Urusan Pertanian</b>			<b>29,052,163,000</b>		<b>41.575.469.170</b>			<b>32,424,671,511</b>		<b>8,867,955,898</b>		<b>43,958,829,173</b>		PD yang menanganinya
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					486.000.000		2,740	624,802,790		454,832,515		2,020,085,173		
		Peningkatan kelas pelaku utama	poktan	20	30			40	15		50		60		
		cakupan pembinaan kelompok petani	%	100	100			100		0	100		100		
		persentase kelompok tani yang mendapatkan insentif pertanian	%	100	100			100	410.814	0	100		100		
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					4.135.000.000			1,490,527,840		4,729,612,000		5,342,500,000		
		Persentase peningkatan jumlah UPJA	%	7.20	8.00			8.00	7,14		9.00		9.00		
		Prosentase peningkata kelas UPJA	%	2.30	3.00			3.00	4,76		4.00		4.00		
	Program Peningkatan Produksi Pertanian					1.961.480.000			800,979,600		1,835,689,056		2042877876.39		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		Peningkatan Produktivitas tanaman padi	ton/ha	6.10	6.16			6.22	4,79	0	6.28		6.35		
		Peningkatan Produktivitas tanaman jagung	ton/ha	4.33	4.42			4.5	4,89	0	4.60		4.69		
		Peningkatan Produktivitas tanaman kedelai	ton/ha	0.96	0.98			0.99	1,40	0	1.00		1.01		
		Peningkatan Produktivitas tanaman cabe	ton/ha	6.01	6.13			6.25	3,79	0	6.32		6.44		
		Peningkatan Produktivitas tanaman bawang merah	ton/ha	7.85	7.93			8.01	6,34	0	8.09		8.17		
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan						1.307.653.000			1.447,553,500		1.223,792,000		1.361,918,000	
		Peningkatan Produktivitas tanaman kelapa	ton/ha	0.56	0.64			0.73	0,92	0	0.80		0.86		
		Peningkatan Produktivitas tanaman tebu	ton/ha	4.20	4.30			4.40	4,79	0	4.50		4.60		
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						1.700.000.000			1.138,196,000		1.590,977,933		1.202,500,000	
		Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	indeks	1.05	1.05			1.05	0,99	0	1.06		1.06		
		Indeks Peningkatan Populasi Ternak Unggas	indeks	1.01	1.04			1.04	1,09		1.05		1.05		
	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan						1.010.000.000			363,530,000		945,228,066		1,051,913,175	
		Indeks efektivitas inseminasi buatan (Service per conception)	indeks	1.60	1.58			1.56	1,98		1.54		1.52		
		Prosentase penurunan angka kesakitan ternak	%	64.00	62.00			60.00	8,62	0	58.00		56.00		
	Program Pengembangan Agribisnis						1.695.000.000			1.256,574,500		1.651,070,000		1,723,426,000	
		Indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian	indeks	1.16	1.16			1.16	1,13		1.17		1.18		
	Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian						2.010.000.000			17,023,181,554		20,739,301,000		30,773,375,000	
		Indeks pertanaman lahan sawah	indeks	1.31	1.34			1.36	1,21		1.38		1.4	2	
		Prosentase jalan pertanian dalam kondisi baik	%	50.24	55.00			60.00	50,39		65.00		70.00		
	Program Peningkatan Kualitas Bahan						2.335.000.000			6,693,778,000		2,185,254,984		4,300,000,000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
	Baku (DBHCHT)														
		Peningkatan Produktivitas tanaman tembakau	ton/ha	0.83	0.85			0.90	1,65		0.95		1.00		
<b>4</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>			<b>3,923,592,000</b>			<b>22.091.641.686</b>			<b>2,690,103,406</b>		<b>20,402,431,002</b>		<b>7,204,772,000</b>	PD yang menanganinya
	Program Peningkatan Kemetrolagian dan perlindungan Konsumen					92.990.611				59,267,880		798,266,629		171,847,202	
		persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh	%	49	50			60	67		70		80		
		persentase produk yang tidak layak dikonsumsi	%	3	2			1	1		1		1		
		Persentase cakupan sidang tera ulang	%	70	72			77	77		82		85		
		Persentase pasar/toko tertib tera	%	60	65			70	50		75		80		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor					44.723.100				29,983,500		22,925,000		46,867,419	
		Persentase peningkatan ekspor	%	10	13			17	90,63		23		31		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					7.944.214.898				770,111,067		17,355,352,363		4,151,772,000	
		Persentase kelengkapan jenis data dan informasi perdagangan	%	60	65			70	70		75		80		
		persentase pelaku usaha yang berijin	%	70	80			90	54		100		100		
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan					25.425.000				59,827,400		28,076,081		31,244,946	
		persentase PKL dan asongan yang menempati lokasi sesuai peruntukan	%	80	90			100	1		100		100		
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi					9.808.874.532				1,207,157,134		1,030,416,169		1,670,000,000	
		Persentase cakupan wilayah layanan perdagangan	%	70	75			80	80		83		85		
		persentase pasar kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	80	90			100	100		100		100		
	Program Pengembangan Sistem Distribusi					83.164.000				283,766,000		280,760,812		312,449,458	
		Persentase pelaksanaan pengembangan sistem distribusi	%	10	15			20	20		30		40		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
	Program Pembinaan Pedagang					3.625.970.000			245,208,500		240,532,500		15,000,000		
		Persentase peningkatan peran serta pedagang	%	10	20		25	25		30		35			
	Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan					0			0		14,038,041		15,622,473		
		Jumlah kemitraan usaha perdagangan	Jumlah	5	6		7	6		8		9			
		Kontribusi Sektor Perdagangan	rasio	30	30		30	13.5		30		30			
	Program Promosi Produk Unggulan Daerah					466.279.545			1,085,102,492		444,537,952		652,500,000		
		Persentase peningkatan omzet produk unggulan	%	20	25		30	30		35		40			
		persentase keikutsertaan event promosi produk unggulan daerah tingkat nasional	%	80	90		100	100		100		100			
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting					0			0		166,855,310		185,687,778		
		Persentase kecukupan stok barang	%	60	65		70	70		75		80			
<b>5</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>			<b>1,315,000,000</b>		<b>1.157.792.500</b>			<b>1,083,495,350</b>		<b>991,557,336</b>		<b>1,847,500,000</b>	PD yang menanganinya	
	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi					176.425.000			165,660,000		233,967,343		260,374,548		
		Rasio produksi dan kapasitas terpasang	Rasio	0,88	0,90		0,91	0		0,92		0,93			
		persentase industri yang menerapkan standarisasi dalam tahun berkenaan	%	7	10		20	10		30		40			
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					280.850.000			24,184,000		280,760,812		312,449,458		
		Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	1	1.25		1.50	2.7		1.75		2.00			
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					50.000.000			49,984,000		46,793,469		52,074,910		
		Persentase penerapan teknologi industri	%	40	50		55	55		60		65			
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial					100.000.000			97,310,000		93,586,937		104,149,819		
		Pertumbuhan sentra industri	Sen tra	15	20		25	30		30		35			
		persentase peningkatan sentra industri potensial yang dikukuhkan	%	10	20		20	20		20		20			
	Program Penataan Struktur Industri					48.500.000			29,983,500		46,793,469		52,074,910		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		Pertumbuhan kluster industri	kluster	3	4		5	5		6		7			
		persentase peningkatan kluster industri berbasis komoditas unggulan	%	11	15		15	0		15		15			
	Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif					171.497.500			74,968,000		227,375,000		470,000,000		
		Persentase IKM memperoleh HAKI	%	0	0.30		0.40	0.12		0.60		0.80			
	Pembinaan Lingkungan Sosial					282.080.000			428,002,000		280,760,812		312,449,458		
		Pertumbuhan pelaku industri	orang	170	175		180	80		185		190			
	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah					0			0		0		100,000,000		
		persentase produk unggulan daerah yang terdaftar	%	78	80		90	0		100		100			
	Pembinaan Industri					48.440.000			48,200,000		46,793,469		52,074,910		
		Persentase produk unggulan memenuhi SNI	%	5	10		13	1		15		17			
<b>6</b>	<b>Urusan Transmigrasi</b>			<b>56,000,000</b>		<b>107.854.000</b>			<b>127,882,185</b>		<b>142,252,145</b>		<b>97,400,000</b>	PD yang menanganinya	
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi					107.854.000			127,882,185		142,252,145		97,400,000		
		persentase peningkatan transmigran swakarasa dan umum	%	10	10		10	5		10		10			
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>53.774.724.055</b>			<b>93,538,648,079</b>		<b>60,615,667,976</b>		<b>79,962,707,300</b>		
<b>1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>			<b>25,746,611,079</b>		<b>23.800.946.133</b>			<b>30,068,375,204</b>		<b>28,335,684,210</b>		<b>26,575,680,000</b>	Setda	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					243.945.776			1,166,084,605		3,326,897,504		3,473,000,000		
		Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	%	100	100		100	100		100		100			
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					1.160.566.054			1,629,762,464		1,144,339,151		675,000,000		
		Persentase regulasi daerah yang dilakukan evaluasi	%	25	27		30	0		32		34			
		Persentase rancangan produk hukum yang ditetapkan	%	60	62		64	100		66		70			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp		TARGET
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	%	95	100			100	100		100		100		
	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan						118.817.863			127,400,598		215,249,956		1,100,780,000	
		Persentase PD yang dievaluasi serta melaksanakan analisa jabatan dan beban kerja	%	60				65	60		70		75		
		Persentase peningkatan SOP dan SPP	%	50				55	55		60		65		
		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"	%	90	100			100	84,55		100		100		
	Program pengembangan kualitas kebijakan publik									108,347,600		389,329,057		2,968,300,000	
		Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	%	15	20			25	25		30		40		
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik						215.000.000			78,376,600		201,211,915		17,698,600,000	
		Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)	%	60	70			80	80		90		100		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87	88			89	76,86		90		91		
		Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	%	100	100			100	100		100		100		
	Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat						551.006.608			0		201,211,915		223,922,112	
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	-	0			80	100		90		100		
	Program Kerjasama Pembangunan									131,845,035		389,329,057		433,271,481	
		Persentase kerjasama yang aktif	%	95	95			95	100		95		95		
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan									0		389,329,057		433,271,481	
		Persentase penanganan permasalahan di wilayah perbatasan	%	80	90			100	100		100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
	Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur					35.079.400			0		389,329,057		433,271,481		
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	%	1			1.5	0		2.1		2.5			
<b>2</b>	<b>Kepegawaian daerah</b>			<b>4,780,710,000</b>		<b>5.702.645.000</b>			<b>4,528,347,819</b>		<b>3,173,421,156</b>		<b>6,757,270,200</b>	BKD	
	Program Pendidikan Kedinasan					670.221.000			609,052,951		289,938,628		362,950,000		
		Persentase kepuasan pengguna alumni diklat	%	55	60		65	100		70		75			
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah					1.821.824.000			620,192,251		0		2,983,570,200		
		Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	8,43	12		14	1,8		16		19			
		Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	%	45	50		55	58		60		65			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					3.210.600.000			3,217,862,617		2,883,482,528		3,410,750,000		
		Persentase ASN yang mengikuti kegiatan assessment	%	46	50		54	0,77		57		60			
		Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi	%	87	90		92	97		94		95			
		Persentase pelayanan pensiun tepat waktu	%	83	90		92	98		94		96			
		Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	%	89	90		100	85		100		100			
<b>3</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>			<b>18,961,875,000</b>		<b>11.852.978.918</b>			<b>18,013,531,894</b>		<b>17,429,397,716</b>		<b>26,759,297,000</b>	Set DPRD	
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					11.852.978.918			18,013,531,894		17,429,397,716		26,759,297,000		
		persentase raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi perda	%	60	70		80	100		90		90			
<b>4</b>	<b>Pengawasan</b>			<b>4,799,000,000</b>		<b>4.518.940.000</b>			<b>5,695,464,232</b>		<b>5,422,988,080</b>		<b>4,571,930,000</b>	Inspektorat	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					4.071.520.000			5,476,046,556		5,269,757,280		4,380,455,000		
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang sudah selesai	%	80	80		80	81,87		85		85			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAAN Rp	TARGET	CAPAAN Rp	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		ditindaklanjuti													
		persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A	%	50	60		70	18,75		80		90			
		persentase OPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi yang bersih dan melayani)	%	30	40		50			60		70			
		persentase penanganan laporan gratifikasi	%	100	100		100	100		100		100			
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					150.170.000			105,183,676		118,395,300		95,200,000		
		Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersertifikat kompetensi	%	82,34			84	57,14		86		90			
		persentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS/bimtek/sertifikasi JFA/IB/TB	%	100	100		100	100		100		100			
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan					297.250.000			114,234,000		34,835,500		96,275,000		
		Persentase perangkat daerah yang dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Zona Integritas (ZI)	%	5,12	7		9	-		11		13			
		Level kapabilitas Inspektorat	level	2	2		2	2		2		3			
<b>5</b>	<b>Keuangan Daerah</b>			<b>12,046,983,100</b>		<b>10.588.259.131</b>			<b>14,254,610,371</b>		<b>9,800,797,278</b>		<b>14,058,575,000</b>		DPKAD
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					357.484.537			136,039,160		76,688,860		45,000,000		
		opini BPK	nilai	WDP	WDP		WDP	WDP		WTP		WTP			
		Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100		100	100		100		100			
		predikat SAKIP	nilai	CC	CC		B	CC		B		B			
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan					9.627.638.481			8,286,054,196		5,502,992,377		10,263,575,000		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	Daerah														
		Persentase Laporan keuangan disusun sesuai dgn standar akuntansi pemerintah (SAP) dan tepat waktu	%	70	75			80	75		85		90		
		persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2003	%	100	100			100	100		100		100		
		persentase ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	%	100	100			100	100		100		100		
		persentase OPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu	%	70	80			90	80		100		100		
		persentase Akuntabilitas pelaporan aset daerah	%	80	90			100	90		100		100		
	Program pengelolaan Pendapatan Daerah						603.136.113			1,177,469,972		4,297,804,901		3,750,000,000	
		persentase deviasi realisasi PAD terhadap target	%	7	5			5	3,06		5		5		
<b>6</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>			<b>6,801,792,800</b>			<b>8.049.220.089</b>			<b>5,056,955,202</b>		<b>3,361,204,891</b>		<b>5,756,100,000</b>	Bappeda
	Program Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan						547.321.620			312,451,650		219,289,725		384,000,000	
		Tersusunnya Sistem informasi Perencanaan Pembangunan terpadu	%	60	65			70	100		75		80		
	Program Penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek						385.326.414			287,126,290		398,449,762		793,000,000	
		persentase pemanfaatan hasil penelitian/inovasi	%	50	55			60	65		65		70		
	Program Perencanaan pembangunan daerah						2.468.477.068			1,742,883,740		1,496,918,349		1,212,500,000	
		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPd tiap tahunnya	%	70	75			80	117		85		90		
		persentase pelaksanaan dokumen perencanaan yang partisipatif dan akuntabel	%	75	78			80	60		82		85		
	Program Perencanaan pembangunan						1.969.083.633			526,640,560		310,589,188		565,000,000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	ekonomi														
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	75	78			80	90			82		85	
	Program Perencanaan pembangunan sosial budaya						671.016.290				449,438,000		458,978,300		705,000,000
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosbud	%	75	78			80	80			82		85	
	Program Kerjasama Pembangunan						911.059.898				536,672,300		355,797,775		244,100,000
		Persentase peningkatan jumlah kemitraan dengan swasta dalam pembangunan	%	30	35			40	40			45		50	
		persentase nota kesepahaman kerjasama yang ditindaklanjuti	%	77	80			83	100			86		90	
	Program Pengembangan wilayah perbatasan										0		0		0
		persentase penyelesaian masalah wilayah perbatasan	%	50	55			60	100			65		70	
	Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh						55.435.645				0		0		0
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	70	73			75	100			77		80	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam						607.081.869				707,494,472		59,827,549		610,000,000
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA	%	75	78			80	100			82		85	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana										0		0		20,000,000
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah rawan bencana	%	60	65			70	100			75		80	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah						0				20,000,000		56,152,162		500,000,000
		persentase aparatur perencana bersertifikat kompetensi	%	80	82			85	60			87	0	90	0
	Program Perencanaan Tata Ruang						0				0		0		20,000,000

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN Rp	TARGET	CAPAIAN Rp	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang	%	75	80		83	100		87	0	93	0		
	Program Pemanfaatan Ruang					24.625.000			0		0		20,000,000		
		persentase pemanfaatan data survey dan pemetaaan tata ruang	%	75	80		83	100		87	0	93	0		
	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang					385.167.652			494,248,190		398,449,762		72,500,000		
		persentase pemanfaatan rekomendasi pemanfaatan ruang	%	75	80		83	100		87	0	93	0		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya					24.625.000			0		0		50,000,000		
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	%	75	80		83	100		87	0	93	0		
	Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan								0		177,429,792		480,000,000		
		Persentase kesesuaian usulan masyarakat dengan dokumen perencanaan.	%	50	55		60	60		65		70			
		Persentase tindak lanjut hasil monev	%	75	80		83	83		87	0	93	0		
<b>7</b>	<b>penunjang pemerintah Kecamatan</b>			<b>12,076,144,620</b>			<b>13.073.480.736</b>			<b>15,921,363,357</b>		<b>11,333,228,721</b>	<b>15,918,682,100</b>	<b>Kecamatan</b>	
<b>C.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			<b>10,670,450,843</b>			<b>12.270.000.000</b>			<b>8,189,000,000</b>		<b>10,422,000,000</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>PPKD</b>	
	<b>Dana Cadangan</b>	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>													
		<b>Pemilukada</b>													
	<b>Penyertaan Modal</b>	<b>Penyertaan Modal BUMD</b>		10,617,000,000			12.270.000.000			8,189,000,000		10,422,000,000	3,000,000,000	<b>PPKD</b>	
	<b>TOTAL (A+B+C)</b>			<b>1,417,176,961,494</b>			<b>1.746.574.081.928</b>			<b>1,837,277,241,098</b>		<b>1,922,774,839,617</b>	<b>1,830,508,350,914</b>		

**Tabel 7.5.**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan (Tahun 2020-2021)**

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	2020		2021		KONDISI KINERJA RPJMD 2020 - 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>1.193.249.349.430</b>		<b>1.176.071.738.359</b>		<b>2.369.321.087.790</b>	
	Belanja Pegawai				708.276.936.800		718.029.793.027		1.426.306.729.827	seluruh PD
	Belanja Bunga				971.733.613		811.835.227		1.783.568.840	
	Belanja Hibah				79.411.467.488		50.421.393.103		129.832.860.591	PPKD
	Belanja Bantuan Sosial				7.409.006.586		7.502.266.525		14.911.273.111	PPKD
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota				12.862.869.389		13.505.745.531		26.368.614.919	PPKD
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota dan Pemdes				383.317.335.555		384.800.704.946		769.118.040.501	PPKD
	Belanja Tidak Terduga				1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000	PPKD
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>761.355.883.905</b>		<b>828.449.366.613</b>		<b>1.589.805.250.518</b>	
	<b>Urusan Umum</b>				<b>62.312.154.500</b>		<b>60.457.366.613</b>		<b>122.769.521.113</b>	
<b>I</b>	<b>URUSAN KESEKRETARIATAN</b>									
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah				56.312.154.500		54.457.366.613		110.769.521.113	Seluruh PD
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	%	90		95		95		Seluruh PD
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	90		95		95		Seluruh PD
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	%	90		95		95		Seluruh PD

		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	%	90		95		95		Seluruh PD
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000.000		3.000.000.000		6.000.000.000	Seluruh PD
		Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%	%	65		70		70		Seluruh PD
	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik				3.000.000.000		3.000.000.000		6.000.000.000	Seluruh PD
		Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100%	%	3,4		3,5		3,5		Seluruh PD
	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				<b>434.482.579.405</b>		<b>441.890.000.000</b>		<b>876.372.579.405</b>	
<b>I</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>									
	Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				4.000.000.000		4.400.000.000		8.400.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		APK PAUD 3-6 Tahun	%	89		90		90		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase Lembaga PNF dan PAUD yang terakreditasi A	%	35		40		40		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase Desa Vokasi	%	4		4		4		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar				18.000.000.000		18.500.000.000		36.500.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		APM SD/MI/ sederajat	point	94		95		95		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

		Persentase SD yang terakreditasi A	%	35		40,48		40,48		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				23.000.000.000		23.500.000.000		46.500.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		APM SMP/MTs/ sederajat	point	76		77		77		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase SMP yang terakreditasi A	%	64,29		67,86		67,86		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				30.000.000.000		31.000.000.000		61.000.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi dan berkompentensi	%	65		70		70		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
<b>II</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>									
	Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat				3.200.000.000		3.500.000.000		6.700.000.000	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90		92		92,00		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	99		100		100,0		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,0		100		100,0		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	96		97,5		97,5		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan lansia	%	75		77,5		77,5		02 Dinkes
		Prevalensi balita gizi buruk	%	0,15		0,14		0,13		02 Dinkes
		Prevalensi stunting	%	32		31		31		02 Dinkes
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.000.000.000		1.100.000.000		2.100.000.000	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	94		96		96		02 Dinkes
		Cakupan UKBM (posyandu strata mandiri)	%	20		23		23		02 Dinkes
		Cakupan desa/ kelurahan siaga aktif strata mandiri	%	25		27		27		02 Dinkes

		Cakupan rumah tangga sehat	%	76		77		77		02 Dinkes
		Jumlah komunitas masyarakat sehat yang terbentuk	skor	15		25		25		02 Dinkes
	Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga				720.000.000		770.000.000		1.490.000.000	02 Dinkes
		Cakupan desa STBM	skor	17		34		34		02 Dinkes
		Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan dan memenuhi syarat IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan)	%	77		80		80		02 Dinkes
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat - Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat IKL	%	80		82		82		02 Dinkes
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olah raga	%	100		100		100		02 Dinkes
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga	%	100		100		100		02 Dinkes
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional				75.362.579.405		80.000.000.000		155.362.579.405	02 Dinkes
		Persentase Puskesmas terakreditasi	%	100,0		100,0		100,0		02 Dinkes
		Persentase RS terakreditasi	%	33,3		67,7		67,7		02 Dinkes
		Cakupan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan	%	100,0		100,0		100,0		02 Dinkes
		Cakupan kepesertaan JKN masyarakat	%	100,0		100,0		100,0		02 Dinkes
		Tingkat kemandirian BLUD Puskesmas	%	94,0		99,0		99,0		02 Dinkes

		Indeks keluarga sehat	%	0,24		0,26		0,26		
		Program Peningkatan Sarana Prasarana, Peyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan			25.000.000.000		26.000.000.000		51.000.000.000	02 Dinkes
		Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana yang memadai	%	98		98		98		02 Dinkes
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas	%	98		98		98		02 Dinkes
		Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%	98		98		98		02 Dinkes
		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan			800.000.000		1.000.000.000		1.800.000.000	02 Dinkes
		Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	%	50		65		65		02 Dinkes
		Persentase puskesmas yang terintegrasi E-Health Rembang	%	88		94		94		02 Dinkes
		Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular			1.900.000.000		2.000.000.000		3.900.000.000	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TBC	%	58		60		60		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	80		83		83		02 Dinkes
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam	%	100		100		100		02 Dinkes

		Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100		100		100		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	%	25		35		35		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	%	35		45		45		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat Usia Produktif	%	50		55		55		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Gangguan Jiwa Berat	%	100		100		100		02 Dinkes
		% Desa/ Kelurahan Melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	74		90		90		02 Dinkes
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang				100.000.000.000		110.000.000.000		210.000.000.000	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
	Mutu Nasional	Kepatuhan identifikasi pasien	%	100		100		100		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Emergency respon time	%	100		100		100		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Waktu tunggu rawat jalan	%	100		100		100		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Penundaan operasi elektif	%	5		5		5		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan jam visite dokter spesialis	%	80		80		80		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium	%	100		100		100		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuha penggunaan formularium nasional bagi provider BPJS	%	80		80		80		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan cuci tangan	%	85		85		85		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan pencegahan resiko akibat pasien jatuh	%	100		100		100		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan terhadap	%	100		100		100		03 Rsud Dr. R.Soetrasno

		clinical pathway								
		Kepuasan pasien dan keluarganya	%	70		70		70	03 Rsud Dr. R.Soetrasno	
		Kecepatan respon terhadap komplain	%	75		75		75	03 Rsud Dr. R.Soetrasno	
	Mutu Prioritas	Persentase kehadiran dokter spesialis anak pada persalinan beresiko	%	100		100		100	03 Rsud Dr. R.Soetrasno	
		Respon time operasi cito	%	100		100		100		
		Pengka kepatuhan assesmen medis rawat inap pasien obstetri	%	100		100		100		
		Persentase kemampuan menangani bayilahir dengan asfiksia	%	100		100		100		
		Ketepatan ientifikasi bayi baru lagir di rs	%	100		100		100		
		Kepatuhan penggunaan cefazolin sebagai antibiotika profilaksis pada pasien SC	%	>80		>80		>80		
		Persentase penarapan keselamatan operasi (PKO)	%	100		100		100		
	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit				25.000.000.000		15.000.000.000		40.000.000.000	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Sesuai Standar di Rumah Sakit (80%)	%	85		90		90	03 Rsud Dr. R.Soetrasno	
<b>III</b>	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
	Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan				62.000.000.000		62.000.000.000		124.000.000.000	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase jalan dalam kondisi baik (Formulasi : panjang jalan dalam kondisi baik / panjang jalan kabupaten x 100 %)	%	70		75		75	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	70		75		75		04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya				20.000.000.000		20.000.000.000		40.000.000.000	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase bangunan air/Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik (Formulasi : jumlah bangunan air/irigasi dalam kondisi baik / total bangunan air/ irigasi x 100 %)	%	40		45		45		04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang				1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Rasio Kesesuaian Tata Ruang (Formulasi : Jumlah Rekomendasi Yang Diberikan/Jumlah Pemohon Yang Sesuai Peruntukannya X 100%)	%	80		100		100		04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>IV</b>	<b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman				12.000.000.000		12.000.000.000		24.000.000.000	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase Cakupan Sanitasi Layak (Formulasi= Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Layak/Jumlah Rumah Tangga x 100%)	%	100		100				05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase Cakupan Akses Air Minum (Formulasi = Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak/Jumlah Rumah Tangga x 100%)	%	86,1		86,7				05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

		Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh (Formulasi = Luas Pengurangan Kawasan Kumuh/Luas Kawasan Kumuh x 100%)	%	20,96		26,92		26,92		05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung				5.000.000.000		5.000.000.000		10.000.000.000	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase penurunan rumah tidak layak huni (Formulasi = jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani / jumlah rumah tidak layak huni x 100%)	%	16,7		19,74		19,74		05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Rasio kesesuaian peraturan bangunan gedung (Formulasi : Jumlah rekomendasi kelayakan bangunan gedung yang disetujui/ total jumlah permohonan x 100%)	%	100		100		100		05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan RTH dan Areal Pemakaman				10.000.000.000		10.000.000.000		20.000.000.000	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Rasio Ruang Terbuka Hijau (Formulasi = Luas RTH publik yang dipelihara/jumlah luas RTH publik x 100%)	%	2,71		3,97		3,97		05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Rasio Makam (Formulasi = Luas Makam yang tertata / total luas makam x 100%)	%	10		15		15		05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
<b>V</b>	<b>URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT</b>									
	Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas				1.500.000.000		1.800.000.000		3.300.000.000	06 Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penegakan Pelanggaran Produk	%	80		100		100		06 Satuan Polisi Pamong Praja

		Hukum Daerah (Jumlah pelanggar Prokumda yang ditangani/ Jumlah pelanggaran Prokumda yang ada ) x 100%								
		Persentase Kecamatan yang kondusif (Jumlah Kecamatan yang kondusif / jumlah Kecamatan di Kab. Rembang x 100%)	%	100		100		100		06 Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat				2.000.000.000		2.200.000.000		4.200.000.000	06 Satuan Polisi Pamong Praja
		Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk (jumlah linmas x 10.000 / jumlah penduduk)	%	89		89		89		06 Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan berdampak kebakaran di kab. Rembang dalam tingkat waktu tanggap (response tyme 15 menit / jmlh kejadian kebakaran di Kab. Rembang x 100%)	%	100		100		100		06 Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				1.500.000.000		1.750.000.000		3.250.000.000	07 Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase Lembaga politik dan Ormas yang Paham Politik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	80		80		80		07 Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Penanggulangan Bencana (Jumlah Desa Tangguh Bencana Dibanding Total Desa Rawan Bencana) X 100%	%	40		42		42		08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana				1.750.000.000		1.750.000.000		3.500.000.000	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Korban Terdampak Bencana Yang Tertangani (Jumlah Korban Terdampak Bencana Yang Ditangani Dibagi Jumlah Korban Terdampak Bencana) X 100%	%	100		100		100		08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana				2.250.000.000		2.250.000.000		4.500.000.000	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Dibanding Jumlah Masyarakat Yang Terdampak Bencana) X 100%	%	100		100		100		08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>VI</b>	<b>URUSAN SOSIAL</b>									
	Program Pemberdayaan FM, PSKS, dan Kepahlawanan				2.000.000.000		2.020.000.000		4.020.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Kemandirian FM	%	74		75		75		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

	Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial			3.500.000.000		1.350.000.000		4.850.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Persentase keberfungsian sosial PMKS	%	75		75		75		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>62.501.150.000</b>		<b>64.995.000.000</b>		<b>127.496.150.000</b>	
<b>I</b>	<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>								
	Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	%	96,00 - 96,50		96,50 - 97,00		96,50 - 97,00		10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			500.000.000		500.000.000		1.000.000.000	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	Persentase Ketaatan Badan Usaha terhadap Peraturan PerUndang-undangan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	%	100		100		100		10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan			400.000.000		460.000.000		860.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Persentase Industri Rumahan Perempuan (Industri Rumahan) Miskin Yang Mendapatkan Pendampingan Menjadi Pelaku Usaha	%	70		80		80		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak			1.700.000.000		1.850.000.000		3.550.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase PD yg menyusun PPRG/A	%	60		65		65	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Cakupan Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	rasio	0,0000 34		0,0000 34		0,0000 34	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan	%	74		75		75	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
<b>III</b>	<b>URUSAN PANGAN</b>								
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Nilai Ketersediaan Energi Perkapita	Kkal/ kapita/hr	2.500		2.500		2.500	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Nilai Ketersediaan Protein Perkapita	Kkal/ kapita/hr	60		60		60	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Nilai Konsumsi Energi Perkapita	Kkal/ kapita/hr	2.145		2.150		2.150	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Nilai Konsumsi Protein Perkapita	Kkal/ kapita/hr	57		57		57	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
<b>IV</b>	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>								
	Program Fasilitasi Pertanahan			500.000.000		500.000.000		1.000.000.000	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi (Formulasi : permasalahan pertanahan yang terfasilitasi/ jumlah permasalahan pertanahan) X 100%	%	100		100		100	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
<b>V</b>	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>								
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			1.750.000.000		1.750.000.000		1.500.000.000	12 Dinas Lingkungan Hidup

		Persentase Sampel Yang Memenuhi Baku Mutu (Jumlah Sampel Yang Memenehui Baku Mutu/Jumlah Sampel yang Diambil) X 100 %	%	55		60		60		12 Dinas Lingkungan Hidup
		Presentase Lahan Kritis yang ditangani (Jumlah Pengendalian Kerusakan dan Dampak Perubahan Iklim/Jumlah Lokasi Kerusakan Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim) X 100%	%	90		90		90		12 Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				750.000.000		750.000.000		1.500.000.000	12 Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Perusahaan Yang Memiliki Dokumen Ijin Lingkungan (Jumlah Perusahaan Yang Mempunyai Dokumen Ijin Lingkungan/Jumlah Perusahaan Yang Wajib Memiliki Ijin Lingkungan) X100%	%	60		70		70		12 Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dokumen lingkungan yang disusun	dokumen							
	Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas				6.000.000.000		6.000.000.000		12.000.000.000	12 Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Penanganan Sampah (Berat Sampah Yang Tertangani/berat Timbulan Sampah) X 100%	%	20		25		25		12 Dinas Lingkungan Hidup
<b>VI</b>	<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk				700.000.000		750.000.000		1.450.000.000	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

		Cakupan kepemilikan KTP	%	98,98		98,99		98,99		13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Cakupan kepemilikan KK	%	98,98		98,99		98,99		13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil				350.000.000		400.000.000		750.000.000	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (Jumlah Bayi yang Terlayani Penerbitan Akta Kelahiran/Jumlah Bayi yang Lahir)	%	97		99		99		13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (Jumlah Warga Masyarakat yang Terlayani Penerbitan Kutipan Akta Kematian/Jumlah Warga Masyarakat yang Meninggal Dunia)	%	100		100		100		13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data				655.000.000		700.000.000		1.355.000.000	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Ketersediaan data kependudukan	%	75		100		100		13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
<b>VII</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>									
	Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan				1.400.000.000		1.600.000.000		3.000.000.000	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	%	9,75		16		16		14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	%	75		85		85		14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa				2.000.000.000		2.200.000.000		4.200.000.000	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

		Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	%	70		80		80		14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	%	100		100		100		14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	%	90		95		95		14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Penguatan Kelembagaan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat				1.200.000.000		1.400.000.000		2.600.000.000	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Lembaga Desa aktif	%	85		90		90		14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
<b>VIII</b>	<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5.600.000.000		5.750.000.000		11.350.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24		25		25		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Unmet Need KB	%	8		8		8		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Sejahtera				400.000.000		450.000.000		850.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Kelompok Kegiatan (Tribina, UPPKS dan PIK R) yang Aktif	%	92,40		92,50		92,50		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
<b>IX</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>									
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				14.500.000.000		15.000.000.000		29.500.000.000	15 Dinas Perhubungan

		Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Jumlah Prasarana dan Fasilitas Yang Terpasang /Jumlah Kebutuhan Prasarana dan Fasilitas) X 100%	%	48,2		51				15 Dinas Perhubungan
		Persentase Kendaraan Yang Berada Dalam Kondisi Laik Jalan (Jumlah Kendaraan Yang Lolos Uji/Jumlah Kendaraan Yang Diuji) X 100%	%	100		100				15 Dinas Perhubungan
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	15 Dinas Perhubungan
		Persentase Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Jalan (Jumlah Angkutan Yang Melayani Wilayah Jaringan Jalan/Jumlah Angkutan Umum) X 100%	%	72,6		74,2		74,2		15 Dinas Perhubungan
		Persentase Pelanggaran Angkutan (Jumlah Pelanggaran Angkutan/Jumlah Angkutan Umum) X 100%	%	0,83		0,79		0,79		15 Dinas Perhubungan
		Persentase Terminal dan Perparkiran Yang Terkelola (Jumlah Terminal dan perparkiran yang dikelola /Jumlah Terminal dan Perparkiran Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten) X 100%	%	95,9		95,9		95,9		15 Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan dan Keselamatan				1.896.150.000		1.900.000.000		3.796.150.000	15 Dinas Perhubungan

	Perhubungan								
		Persentase Jumlah Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Perhubungan Yang Terlaksana (Jumlah Pengembangan Teknologi Yang Terlaksana/Yang Direncanakan) X100%	%	39		74		74	15 Dinas Perhubungan
		Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara (Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara/Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpasang) X 100%	%	75		100		100	15 Dinas Perhubungan
<b>X</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
	Program Pengembangan E-Government				4.000.000.000		4.000.000.000	8.000.000.000	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi	%	2,75		2,85		2,85	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik				600.000.000		600.000.000	1.200.000.000	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase OPD yang menyajikan data yang lengkap	%	100		100			16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
<b>XI</b>	<b>URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>								
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi				800.000.000		800.000.000	1.600.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Persentase Koperasi Aktif (Jumlah Koperasi Aktif/Jumlah Seluruh Koperasi) X100%	%	57		60		60	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan dan				1.500.000.000		1.500.000.000	3.000.000.000	20 Dinas Perindustrian,

	Pemberdayaan UMKM								Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro (Jumlah UM t - Jumlah UM t-1 / jumlah UM t-1) X 100%	%	1,25		1,23		1,23	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	
<b>XII</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>									
	Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi				800.000.000		800.000.000		1.600.000.000	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase Pertumbuhan Investor (Formulasi= {Investor t Dikurangi Investor t-1}/Investor t-1 *100%)	%	5		10		10		10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan dan Pengendalian Perijinan				1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Sesuai SOP dan Penanganan Pengaduan (Jumlah Ijin Tepat Waktu/ Jumlah Ijin Yang Dikeluarkan)X100%	%	100		100		100		10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
<b>XIII</b>	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>									
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga				3.100.000.000		3.535.000.000		6.635.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase Perolehan Medali Olahraga Unggulan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	%	36		37		37		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Cakupan prestasi kepemudaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Angka	5		6		6		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
<b>XIV</b>	<b>URUSAN STATISTIK</b>									

	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			500.000.000		500.000.000		1.000.000.000	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika	
		Persentase Data Statistik Sektoral Yang Tersusun	%	10,26		12,82		12,82	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika	
<b>XV</b>	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>									
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah				400.000.000		400.000.000		800.000.000	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	%	100		100		100		16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
<b>XVI</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>									
	Program Pengembangan Nilai Budaya				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase Perkembangan Budaya Lokal Yang Menjadi Daya Tarik Wisata (Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - 1 )/Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - 1 X100%	%	10		12		12		17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase Perkembangan Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata (Jumlah Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata Tahun n - (Tahun n - 1)/Jumlah Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata Tahun n - 1 ) X100%	%	10		15		15		17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
<b>XVII</b>	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>									
	Program Pelayanan Perpustakaan				500.000.000		700.000.000		1.200.000.000	18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

		Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif	%	90		92		92		18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
<b>XVIII</b>	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>									
	Program Pengelolaan Kearsipan				500.000.000		700.000.000		1.200.000.000	18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		Persentase OPD Yang Tertib Administrasi Kearsipan	%	90		92		92		18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	<b>URUSAN PILIHAN</b>				<b>68.100.000.000</b>		<b>122.200.000.000</b>		<b>190.300.000.000</b>	
<b>I</b>	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
	Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan				1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Nilai Raman	%	1,5		1,5		1,5		19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				15.000.000.000		15.000.000.000		30.000.000.000	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	%	10		15		15		19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam				2.600.000.000		2.600.000.000		5.200.000.000	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya	%	2		2		2		19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Volume Produksi Garam	%	5		5		5		19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
<b>II</b>	<b>URUSAN PARIWISATA</b>									
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Jumlah Wisatawan Tahun n-(Tahun n-1)/Jumlah Wisatawan Tahun n-1) X100%	%	10		12		12		17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase Layanan Pariwisata Yang Diinformasikan	%	50		60		60		17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				2.500.000.000		2.500.000.000		5.000.000.000	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

		Persentase Pengembangan Destinasi Wisata (Formulasi = jumlah destinasi wisata yang dikembangkan tahun n/jumlah destinasi wisata tahun n)*100%	%	5		5		5		17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
<b>III</b>	<b>URUSAN PERTANIAN</b>										
	Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian				1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Persentase Kenaikan Skor Kelompok Tani	%	52		54		54		11 Dinas Pertanian Dan Pangan	
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku				3.000.000.000		3.000.000.000		6.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan	
		Persentase Peningkatan Kualitas Tembakau (Formulasi {Jumlah Tembakau Dengan Kualitas Baik/Jumlah %Total Produksi Tembakau}X100%)	%	85		90		90		11 Dinas Pertanian Dan Pangan	
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian				21.000.000.000		21.000.000.000		42.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan	
		Persentase jumlah petani yang terfasilitasi pembiayaan (jumlah pembiayaan petani yang terfasilitasi/ jumlah petani*100%)	%	97		98		98		11 Dinas Pertanian Dan Pangan	
		Persentase sarpras pertanian dalam kondisi baik (jml sarpras pertanian kondisi baik/ jml sarpras pertanian*100%)	%	80		85		85		11 Dinas Pertanian Dan Pangan	
	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan	
		Indeks Populasi Ternak (Populasi Tahun t/Populasi Tahun t-1)	nilai	1,012		1,015		1,015		11 Dinas Pertanian Dan Pangan	
	Program Pengembangan Agribisnis Pertanian				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan	

		Indeks Produksi Pertanian	Angka	1,025		1,030		1,030		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan				1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Presentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Formulasi $\frac{\text{Produktivitas Tahun } t - \text{Produktivitas Tahun } t-1}{\text{Produktivitas } t-1} \times 100\%$ )	%	5		7		7		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
<b>IV</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>									
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan				10.000.000.000		64.000.000.000		74.000.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Cakupan kecamatan yang memiliki pasar daerah (formulasi = kecamatan yang memiliki pasar daerah/ jumlah kecamatan * 100%)	%	85,71		92,86		92,86		20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		cakupan pasar yang menerapkan eRetribusi pasar $\frac{\text{jumlah pasar eRetribusi } t - \text{jumlah pasar eRetribusi } t-1}{\text{jumlah pasar eRetribusi } t-1} \times 100\%$ )	%	50		100		100		20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan				3.000.000.000		3.000.000.000		6.000.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Persentase peningkatan omset usaha perdagangan (formulasi= $\frac{\text{Jumlah omset perdagangan } t - \text{jumlah omset perdagangan } t-1}{\text{jumlah omset}}$ )	%	3		3		3		20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

		perdagangan t-1 *100%)								
<b>V</b>	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>									
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri				1.150.000.000		1.200.000.000		2.350.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Persentase peningkatan usaha industri agro yang dikembangkan (formulasi= {Jumlah usaha industri agro n t- jumlah usaha industri agro t-1}/ jumlah usaha industri agro t-1 *100%)	%	1,3		1,3		1,3		20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan Industri Kreatif				350.000.000		400.000.000		750.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Persentase peningkatan usaha industri kreatif yang dikembangkan (Formulasi= {Jumlah usaha industri kreatif n t- jumlah usaha industri kreatif t-1}/ jumlah usaha industri kreatif t-1 *100%)	%	1,2		1,2		1,2		20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>133.960.000.000</b>		<b>138.907.000.000</b>		<b>272.867.000.000</b>	
<b>I</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
	Program Peningkatan Kebijakan Bidang Pemerintahan				3.500.000.000		2.500.000.000		6.000.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum Yang Ditangani	%	80		85		85		23 Sekretariat Daerah
		Persentasi MOU yang ditindaklanjuti (formulasi jumlah MOU yang ditindaklanjuti dibagi jumlah MOU)	%	70		75		75		23 Sekretariat Daerah
		Nilai LPPD	Nilai	3		3,1		3,1		23 Sekretariat Daerah
		Persentase Kebijakan di	%	60		65		65		23 Sekretariat Daerah

		Bidang Tata Pemerintahan Desa								
	Program Peningkatan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Mental Spritual/Kemasyarakatan				23.000.000.000		24.000.000.000		47.000.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Cakupan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Keagamaan (Jumlah layanan keagamaan yang dilakukan/jumlah seluruh layanan keagamaan/Kesehatan/Tansmigrasi/Pemberdayaan Pemuda/Olah Raga dan Seni Budaya)	%	100		100		100		23 Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Kelembagaan				1.110.000.000		1.500.000.000		2.610.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase OPD Yang telah Melaksanakan Evaluasi Kelembagaan	%	45		67,5		67,5		23 Sekretariat Daerah
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B		B		B		23 Sekretariat Daerah
		Nilai IKM	%	78,5-85,25		82,26-88,30		82,26-88,30		23 Sekretariat Daerah
	Program Penyusunan Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum				1.300.000.000		1.350.000.000		2.650.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Produk Hukum Yang Diterbitkan (Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan dibagi jumlah produk hukum amanat peraturan perundangan) X 100%	%	75		75		75		23 Sekretariat Daerah
	Program Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah				700.000.000		707.000.000		1.407.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Permasalahan Hukum Yang Terfasilitasi (jumlah permasalahan hukum yang terfasilitasi	%	80		95		95		23 Sekretariat Daerah

		di bagi jumlah permasalahan hukum yang masuk) X 100%								
	Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitasi Layanan Pengadaan				1.500.000.000		2.000.000.000		3.500.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (kegiatan yang memenuhi target dibagi jumlah total kegiatan dikali 100%)	%	95		100		100		23 Sekretariat Daerah
		Persentase Pencapaian Level Maturitas UKPBJ (Nilai maturitas UKPBJ)	%	80		85		85		23 Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan				4.000.000.000		4.500.000.000		8.500.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Publik Yang Menerima Informasi	%	90		95		95		23 Sekretariat Daerah
		Persentase Informasi Yang Diklarifikasi Untuk Peningkatan Citra Positif Pemerintah	%	100		100		100		23 Sekretariat Daerah
		Persentase Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100		100		100		23 Sekretariat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah				2.000.000.000		2.200.000.000		4.200.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA Yang Dilaksanakan	%	80		85		85		23 Sekretariat Daerah
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Yang Dilaksanakan	%	90		90		90		23 Sekretariat Daerah
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Yang Dilaksanakan	%	90		90		90		23 Sekretariat Daerah
<b>II</b>	<b>KEPEGAWAIAN DAERAH</b>									
	Program Pelayanan dan Penataan Aparatur				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	42 Badan Kepegawaian Daerah

		Tingkat kepuasan ASN terhadap administrasi kepegawaian (jumlah PNS yang puas terhadap layanan administrasi kepegawaian dibagi jumlah PNS yang dilayani kali 100 %)	%	95		95		95		42 Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah				6.000.000.000		6.000.000.000		12.000.000.000	42 Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang memiliki Kompetensi (Jumlah ASN yg ditingkatkan kompetensi dibagi total ASN) x 100 %	%	50		50		50		42 Badan Kepegawaian Daerah
		Prosentase pengembangan karier ASN yang terfasilitasi	%	10		15		15		42 Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian				1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000	42 Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase OPD yang kinerjanya diatas 80% (nilai seluruh OPD yang diatas 80 % dibanding jumlah OPD)	%	75		80		80		42 Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase Ketersediaan data informasi kepegawaian (Jumlah data yang tersedia dibagi jumlah data yang harus disediakan kali 100 %)	%	95		95		95		42 Badan Kepegawaian Daerah
<b>III</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									
	Program Legislasi Daerah				34.000.000.000		34.000.000.000		68.000.000.000	24 Sekretariat DPRD
		Persentase Raperda yang difasilitasi menjadi Perda	%	95		100		100		24 Sekretariat DPRD
		Informasi Legislasi yang disampaikan kepada masyarakat		95		100		100		
	Program Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				11.000.000.000		11.000.000.000		22.000.000.000	24 Sekretariat DPRD

		Persentase rekomendasi hasil pengawasan	%	90		95		95		24 Sekretariat DPRD
		Persentase pembahasan anggaran yang tepat waktu	%	95		100		100		24 Sekretariat DPRD
<b>IV</b>	<b>PENGAWASAN</b>									
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				5.000.000.000		5.050.000.000		10.050.000.000	39 Inspektorat
		% Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	87		90		90		39 Inspektorat
		% Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Wilayah I, II, III, IV	%	55		50		50		
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apatur Pengawasan				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	39 Inspektorat
		% APIP yang bersertifikat JFA dan JFPP sesuai standar	%	40,38		48,07		48,07		39 Inspektorat
<b>V</b>	<b>KEUANGAN DAERAH</b>									
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.700.000.000		3.800.000.000		7.500.000.000	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	100		100		100		41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan				1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	%	100		100		100		41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				3.500.000.000		5.050.000.000		8.550.000.000	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	%	100		100		100		41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.200.000.000		3.300.000.000		6.500.000.000	41 Badan Pendapatan,

									Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
		Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	%	70		75		75	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
<b>VI</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>									
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah				2.700.000.000		4.000.000.000		7.700.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan Tepat Waktu	%	100		100		100	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	90		95		95	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Prosentase kesesuaian capaian kinerja daerah	%	65		70		70		
	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				1.750.000.000		1.800.000.000		3.550.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	70		75		75	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	70		75		75	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				1.750.000.000		1.800.000.000		3.550.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	70		75		75	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	70		75		75	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			1.250.000.000		1.300.000.000		2.550.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Ekonomi	%	70		75		75	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Ekonomi	%	70		75		75	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan IPTEK			1.500.000.000		1.550.000.000		3.050.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	%	20		25		25	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	20		20		20	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>VII</b>	<b>PENUNJANG PEMERINTAHAN KECAMATAN</b>								
	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat			14.000.000.000		15.000.000.000		29.000.000.000	43 14 Kecamatan
		Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	nilai	6		7		7	43 14 Kecamatan
		Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	nilai	6		7		7	43 14 Kecamatan
		Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	nilai	6		7		7	43 14 Kecamatan
		Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	nilai	6		7		7	43 14 Kecamatan
<b>C.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			<b>2.500.000.000</b>		<b>2.125.000.000</b>		<b>4.625.000.000</b>	
	Dana Cadangan			-		-		-	
	Penyertaan Modal			2.500.000.000		2.125.000.000		4.625.000.000	
	<b>TOTAL (A+B+C)</b>			<b>1.957.105.233.337</b>		<b>2.006.646.104.973</b>		<b>3.963.751.338.309</b>	

## BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rembang periode tahun 2016-2021. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.

Selengkapnya, Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2019 dan Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada Tabel 8.1:

**Tabel 8.1.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2020-2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60 – 70	70-80	70-80
2	Persentase angka kemiskinan	%	12,18-13,18	11,07-12,07	11,07-12,07
3	Persentase Pertumbuhan ekonomi	%	5,5-6,0	6,0-6,5	6,0-6,5
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	58,9	61,26	61,26
5	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	5-7	7-10	7-10
6	Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata	%	5-10	10-15	10-15
7	Indeks infrastruktur	Angka	69,26	76,23	76,23
8	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	70,96	71,18	71,18
9	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	%	50-60	60-70	60-70
10	Persentase pertumbuhan penduduk	%	0,79	0,78	0,78
11	Skor PPH	Skor	86,0-87,0	87,0-88,3	87,0-88,3

**Tabel 8.2.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020	2021			
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
1)	Persentase Angka Kemiskinan	%	12,18-13,18	11,07-12,07	11,07-12,07	IKU Kab.	Kabupaten
2)	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,7-2,6	2,6-2,5	2,6-2,5	Indikator Sasaran Kab.	DPMPPTSP NAKER
3)	Persentase Penanganan PMKS	%	27	30	30	Indikator Sasaran	Dinsos PP KB
4)	Persentase Keluarga Miskin yang mempunyai usaha	%	65	75	75	Indikator Sasaran	Dinsos PP KB, Dintanpan, Dinlutkan, DPMPPTSP Naker & Dinindagkop UKM
5)	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5-6,0	6,0-6,5	6,0-6,5	IKU Kab.	Kabupaten
6)	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	24-25	25-26	25-26	Indikator Sasaran Kab.	Dintanpan, Dinlutkan
7)	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	6,63	6,65	6,65	Indikator Sasaran Kab.	Dinindagkop UKM
8)	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,45	6,5	6,5	Indikator Sasaran Kab.	Dinindagkop UKM
9)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	58,9	61,26	61,26	IKU Kab	Kabupaten
10)	Indeks Pencemaran Lingkungan	Angka	43,26	44,99	44,99	Indikator Sasaran Kab.	DLH
11)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	74,63	77,62	77,62	Indikator Sasaran Kab.	DLH
12)	Indeks Infrastruktur	Angka	69,26	76,23	76,23	IKU Kab.	Kabupaten
13)	Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah	%	70	75	75	Indikator Sasaran Kab.	DPU TARU
14)	Persentase Ketersediaan Air Baku	%	35	40	40	Indikator Sasaran Kab.	DPU TARU

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020	2021			
15)	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Layanan Dasar	%	90	93,35	93,35	Indikator Sasaran Kab.	DPKP
16)	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	70,96	71,18	71,18	IKU Kab.	Kabupaten
17)	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,4	12,6	12,6	Indikator Sasaran Kab.	Dindikpora
18)	Rata-rata Lama Sekolah	Angka	7,7	7,8	7,8	Indikator Sasaran Kab.	Dindikpora
19)	Usia Harapan Hidup	Angka	73-74	74-75	74-75	Indikator Sasaran Kab.	Dinkes/RSU dr. R. Sutrasno
20)	IPG	Angka	87,3	87,5	87,5	Indikator Sasaran Kab.	Dinsos PP KB
21)	Nilai Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Angka	725-760	760-800	760-800	Indikator Sasaran Kab.	Dinsos PP KB KB
22)	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	%	50-60	60-70	60-70	IKU Kab.	Kabupaten
23)	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	%	74	74	74	Indikator Sasaran Kab.	Kesbangpol
24)	Persentase Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	%	15	10	10	Indikator Sasaran Kab.	Satpol PP
25)	Persentase Pertumbuhan Penduduk	%	0,79	0,78	0,78	IKU Kab.	Kabupaten
26)	TFR	Angka	1,97-2,00	2,00-2,03	2,00-2,03	Indikator Sasaran Kab.	Dinsos PP KB
27)	Skor PPH	Skor	86,0-87,0	87,0-88,3	87,0-88,3	IKU Kab.	Kabupaten
28)	Skor PPH Ketersediaan	Skor	88,93	89,43	89,43	Indikator Sasaran Kab.	Dintanpan
29)	Skor PPH Konsumsi	Skor	86,8	87,3	87,3	Indikator Sasaran Kab.	Dintanpan
<b>B</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
<b>B.1.</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>1</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>						
1)	Angka Partisipasi Sekolah pada Seluruh Kelompok Usia Sekolah	%	95,32	95,92	95,92	Indikator PD	Dindikpora
2)	Level Standar Nasional Pendidikan	Skor	71,60	71,75	71,75	Indikator PD	Dindikpora

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020	2021			
<b>2</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>						
1)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	6	6	6	Indikator PD	Dinkes
2)	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	110	105	105	Indikator PD	Dinkes
3)	Angka Kematian Balita (AKABA)	Kasus	125	120	120	Indikator PD	Dinkes
4)	Persentase Tingkat kemandirian BLUD RS	%	75	75	75	Indikator PD	RSUD dr.R.Soetrasno
<b>3</b>	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1)	Persentase Pertumbuhan Kemantapan Jalan	%	4	5	5	Indikator PD	DPU TARU
2)	Persentase pertumbuhan jembatan dalam kondisi baik	%	4	5	5	Indikator PD	DPU TARU
3)	Persentase Pertumbuhan Bangunan Air/Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	5	7	7	Indikator PD	DPU TARU
4)	Persentase Pertumbuhan Rasio Kesesuaian Tata Ruang	%	15	25	25	Indikator PD	DPU TARU
<b>4</b>	<b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
1)	Persentase Perkembangan Akses Sanitasi Layak	%	0,5	0	0	Indikator PD	DPKP
2)	Persentase Perkembangan Akses Air Minum Layak	%	0,5	0,7	0,7	Indikator PD	DPKP
3)	Persentase Perkembangan Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh	%	15	28,5	28,5	Indikator PD	DPKP
4)	Persentase Perkembangan Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	15	18,2	18,2	Indikator PD	DPKP
<b>5</b>	<b>URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT</b>						
1)	Persentase Masyarakat yang menggunakan hak pilih secara aktif	%	80	80	80	Indikator PD	Kesbangpol
2)	Persentase kesiapsiagaan perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	Indikator PD	Satpol PP
3)	Persentase Penanganan pelanggaran Perda	%	80	100	100	Indikator PD	Satpol PP
4)	Indeks Penanggulangan Bencana	Angka	72	75	75	Indikator PD	BPBD
<b>6</b>	<b>URUSAN SOSIAL</b>						
1)	Persentase PMKS tertangani	%	5	10	10	Indikator PD	Dinsos PP KB

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020	2021			
<b>B.2.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>1</b>	<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>						
1)	Persentase Pertumbuhan Partisipasi Angkatan Kerja	%	10-15	15-20	15-20	Indikator Renstra	DPMPSTP Naker
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
1)	Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	%	75	80	80	Indikator PD	Dinsos PP KB
2)	Persentase Industri Rumahan Perempuan yang Mandiri	%	5	6	6	Indikator PD	Dinsos PP KB
3)	Persentase Desa Ramah Anak	%	70	75	75	Indikator PD	Dinsos PP KB
<b>3</b>	<b>URUSAN PANGAN</b>						
1)	Pertumbuhan Skor PPH	%	0,5	0,5	0,5	Indikator PD	Dintanpan
<b>4</b>	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>						
1)	Persentase Perkembangan Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	50	50	50	Indikator PD	DPKP
<b>5</b>	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						
1)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,2	55,9	55,9	Indikator PD	DLH
2)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	93	94,1	94,1	Indikator PD	DLH
3)	Luas Tutupan Lahan	Ha	36.728.337	36.800.000	36.800.000	Indikator PD	DLH
<b>6</b>	<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						
1)	Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	%	95	100	100	Indikator PD	Dindukcapil
<b>7</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>						
1)	Persentase Desa dengan Kinerja Baik	%	70	75	75	Indikator PD	Dinpermades
<b>8</b>	<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
1)	CPR	Angka	82	85	85	Indikator PD	DinsosPPKB
<b>9</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>						
1)	Indeks Peningkatan Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan	%	57	87	87	Indikator PD	Dinhub
2)	Indeks Perkembangan Fasilitas dan Prasarana Layanan Jaringan Distribusi Orang/Barang	Angka	74,1	75,5	75,5	Indikator PD	Dinhub

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020	2021			
3)	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	Angka	65,23	66,1	66,1	Indikator PD	Dinhub
<b>10</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
1)	Indeks SPBE	Angka	2,76	2,85	2,85	Indikator PD	Dinkominfo
2)	Skor KIP	Skor	70	80	80	Indikator PD	Dinkominfo
<b>11</b>	<b>URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>						
1)	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	%	1	1	1	Indikator PD	Dinindagkop UKM
<b>12</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>						
1)	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang terserap pada Penanaman Moda	%	5-15	5-15	5-15	Indikator PD	DPMPPTSPNaker
2)	Persentase Penanaman Modal yang Taat Aturan	%	100	100	100	Indikator PD	DPMPPTSPNaker
<b>13</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>						
1)	Persentase Budaya Lokal yang dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata	%	40-50	50-60	50-60	Indikator PD	Dinbudpar
<b>14</b>	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>						
1)	Persentase Cakupan Layanan Perpustakaan	%	70	75	75	Indikator PD	Dinarpus
<b>15</b>	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>						
1)	Persentase Pengelolaan Kearsipan Daerah sesuai NSPK	%	72	80	80	Indikator PD	Dinarpus
<b>16</b>	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						
1)	Persentase Cabang Olahraga yang dibina dan dikembangkan	%	21	25	25	Indikator PD	Dindikpora
2)	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina dan dikembangkan	%	50	50	50	Indikator PD	Dindikpora
<b>17</b>	<b>URUSAN STATISTIK</b>						
1)	Persentase Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tanggap dan Transparan	%	100	100	100	Indikator PD	Dinkominfo
<b>18</b>	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>						
1)	Indeks KAMI	Angka	2,75	2,85	2,85	Indikator PD	Dinkominfo
<b>B.3</b>	<b>PELAYANAN URUSAN PILIHAN</b>						
<b>1</b>	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKAN</b>						
1)	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	2	2	Indikator PD	Dinlutkan
2)	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan	%	1	2	2	Indikator PD	Dinlutkan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020	2021			
	Ikan						
3)	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	5	5	5	Indikator PD	Dinlutkan
<b>2</b>	<b>URUSAN PARIWISATA</b>						
1)	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang menumbuhkan Perekonomian Lokal	%	20 -25	25-30	25-30	Indikator PD	Dinbudpar
<b>3</b>	<b>URUSAN PERTANIAN</b>						
1)	Pertumbuhan kelas kelompok tani	%	5	5	5	Indikator Sasaran PD	Dintanpan
2)	Persentase peningkatan produksi tembakau kualitas baik	%	5	5	5	Indikator Sasaran PD	Dintanpan
3)	Indeks pertanaman	Angka	1,4	1,45	1,45	Indikator Sasaran PD	Dintanpan
4)	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1,2	1,2	1,2	Indikator Sasaran PD	Dintanpan
5)	Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	%	2,10	2,11	2,11	Indikator Sasaran PD	Dintanpan
6)	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	5	7	7	Indikator Sasaran PD	Dintanpan
<b>4</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>						
1)	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	14,7	14,8	14,8	Indikator PD	Dinindagkop UKM
2)	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	%	20-25	25-30	25-30	Indikator PD	Dinindagkop UKM
<b>5</b>	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>						
1)	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	21,8	22	22	Indikator PD	Dinindagkop UKM
2)	Persentase Peningkatan Klaster Usaha Industri Kreatif	%	25	30	30	Indikator PD	Dinindagkop UKM
<b>B.4.</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>						
1)	Indeks Kualitas Perencanaan	Angka	7	7,5	7,5	Indikator PD	Bappeda
<b>2</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					Indikator PD	
1)	Persentase Pertumbuhan Hasil Kelitbangan	%	20	20	20	Indikator PD	Bappeda
<b>3</b>	<b>KEUANGAN DAERAH</b>						
1)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah	Opini	WTP	WTP	WTP	Indikator PD	BPPKAD

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020	2021			
	Daerah						
2)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,97	16,09	16,09	Indikator PD	BPPKAD
3)	Persentase Peningkatan PAD	%	3,84	3,85	3,85	Indikator Sasaran PD	BPPKAD
4)	Persentase Petepatan Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD	BPPKAD
5)	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD	BPPKAD
<b>4</b>	<b>KEPEGAWAIAN DAERAH</b>						
1)	Nilai Kualitas ASN	Angka	80	85	85	Indikator PD	BKD
<b>5</b>	<b>PENGAWASAN</b>						
1)	Nilai Maturitas SPIP	Angka	3	3	3	Indikator PD	Inspektorat
<b>6</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						
1)	Indek Kepuasan Anggota DPRD	Angka	90	95	95	Indikator PD	Setwan
2)	Persentase Peningkatan Fasilitasi Fungsi Legislasi	%	90	95	95	Indikator PD	Setwan
3)	Persentase Peningkatan Fasilitasi fungsi Pengawasan dan Penganggaran	%	90	95	95	Indikator PD	Setwan
<b>7</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
1)	Nilai SAKIP OPD	Angka	60-70	70-80	70-80	Indikator PD	Bag. Organisasi, Setda
2)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan OPD	Angka	80	88,3	88,3	Indikator PD	Bag. Organisasi, Setda
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>						
1)	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60-70	70-80	70-80	IKU Kab.	Kabupaten
2)	Nilai SAKIP	Angka	60-70	70-80	70-80	Indikator Sasaran Kab	Bagian Organisasi Setda
3)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Angka	50-60	60-70	60-70	Indikator Sasaran Kab	Inspektorat
4)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78,5-82,25	82,26-88,30	82,26-88,30	Indikator Sasaran Kab	K Bagian Organisasi Setda
5)	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	5-7	7-10	7-10	IKU Kab.	Kabupaten
6)	Realisasi Investasi Baru PMA dan PMDN	Rp	9 trilyun	10 trilyun	10 trilyun	Indikator Sasaran Kab	DPMPPTSP Naker Kab

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020	2021			
7)	Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	%	1,2	1,2	1,2	Indikator Sasaran Kab	Bag. Adm. Perekonomian Setda & Dinindagkop UKM
8)	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	%	5-10	10-15	10-15	IKU Kab.	Kabupaten
9)	Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	Rp	7,041 Milyar	7,554 Milyar	7,554 Milyar	Indikator Sasaran Kab	Dinbudpar
10)	Rasio Pemanfaatan Tata Ruang	Angka	80	100	100	Indikator Sasaran Kab	DPU Taru
11)	Indeks Akses Transportasi	Angka	66,30	76,13	76,13	Indikator Sasaran Kab	Dinhub
12)	Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	%	95	100	100	Indikator Sasaran Kab	Dindukcapil

**Tabel 8.3.**  
**Penetapan Formulai Indikator Kinerja Daerah**

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	
1)	Persentase Angka Kemiskinan	BPS
2)	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS
3)	Persentase Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani / Jumlah PMKS yang ada x 100%
4)	Persentase Keluarga Miskin yang mempunyai usaha	Jumlah keluarga miskin yang memiliki usaha / Jumlah keluarga miskin yang ada x 100%
5)	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	BPS
6)	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	BPS
7)	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	BPS
8)	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	BPS
9)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(Indeks pencemaran air x 30%) + (Indeks pencemaran udara x 30%) + (Indeks tutupan lahan x 40%)
10)	Indeks Pencemaran Lingkungan	(Indeks Kualitas Air x 30%) + (Indeks Kualitas Udara x 30%)
11)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$100 - [(84,3 - (TH \times 100) \times 50) / 54,3]$
12)	Indeks Infrastruktur	$(0,2 \times \text{persentase aksesibilitas pusat kegiatan wilayah}) + (0,2 \times \text{persentase ketersediaan air baku}) + (0,1 \times \text{rasio pemanfaatan tata ruang}) + (0,3 \times \text{persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan dasar}) + (0,2 \times \text{indeks akses transportasi})$
13)	Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah	pusat-pusat kegiatan yang terhubung dengan baik / jumlah pusat kegiatan x 100 %
14)	Persentase Ketersediaan Air Baku	Jumlah ketersediaan air baku / kebutuhan air kabupaten x 100 %
15)	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Layanan Dasar	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar / jumlah rumah tangga x 100 %
16)	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	BPS
17)	Angka Harapan Lama Sekolah	BPS
18)	Rata-rata Lama Sekolah	BPS
19)	Usia Harapan Hidup	BPS
20)	IPG	BPS
21)	Nilai Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor dari 24 indikator Kabupaten Layak Anak
22)	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	Jumlah Gangguan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial yang ditangani / jumlah Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial x 100%
23)	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	Jumlah Partisipasi Politik Masyarakat atau Organisasi masyarakat / Jumlah Politik Masyarakat atau Organisasi masyarakat yang ada x 100%

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula
24)	Persentase Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat / jumlah Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ada x 100%
25)	Persentase Pertumbuhan Penduduk	$P_t = P_o + (B-D) + (M_i - M_o)$
26)	TFR	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i f} \times K$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total  ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</p> <p><math>b_i</math> = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur <math>i</math> pada tahun tertentu  <math>p_i</math> = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur <math>i</math> pada pertengahan tahun yang sama  <math>i</math> = kelompok umur (<math>i=1</math> untuk kelompok umur 15-19, <math>i=2</math> untuk kelompok umur 20-24,....., <math>i=7</math> untuk kelompok umur 45-49  <math>K</math> = bilangan konstanta biasanya 1000</p>
27)	Skor PPH	BPS
28)	Skor PPH Ketersediaan	Nilai ketersediaan pangan
29)	Skor PPH Konsumsi	Nilai konsumsi pangan
<b>B</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>	
<b>B.1.</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>1</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>	
1)	Angka Partisipasi Sekolah pada Seluruh Kelompok Usia Sekolah	$APS_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 1.000$ <p>dimana:  <math>h</math> = jenjang pendidikan  <math>a</math> = kelompok usia  <math>t</math> = tahun  <math>E_{h,a}^t</math> = jumlah siswa kelompok usia <math>a</math> yang bersekolah di tingkat pendidikan <math>h</math> pada tahun <math>t</math>  <math>P_{h,a}^t</math> = jumlah penduduk kelompok usia <math>a</math></p>
2)	Level Standar Nasional Pendidikan	Nilai level 8 (delapan) standar nasional
<b>2</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>	
1)	Angka Kematian Ibu (AKI)	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
2)	Angka Kematian Bayi (AKB)	$AKB = \frac{D_{0-51th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ <p>Dimana:  <math>D_{0-51th}</math> = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.  <math>\sum \text{Lahir Hidup}</math> = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.</p>
3)	Angka Kematian Balita (AKABA)	$AKB = \frac{D_{0-51th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ <p>Dimana:  <math>D_{0-51th}</math> = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.  <math>\sum \text{Lahir Hidup}</math> = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.</p>
4)	Persentase Tingkat kemandirian BLUD RS	Jumlah dana BLUD yang mandiri / total dana BLUD x 100%
<b>3</b>	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
1)	Persentase Pertumbuhan Kemantapan Jalan	(panjang jalan dalam kondisi baik tahun ini – panjang jalan dalam kondisi baik tahun lalu) / panjang jalan kondisi baik tahun lalu x 100%

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula
	Persentase pertumbuhan jembatan dalam kondisi baik	$(\text{jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun ini} - \text{jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun lalu}) / \text{jumlah jembatan kondisi baik tahun lalu} \times 100 \%$
2)	Persentase Pertumbuhan Bangunan Air/Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	$(\text{jumlah bangunan air dan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik tahun ini} - \text{jumlah bangunan air dan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik tahun lalu}) / \text{jumlah bangunan air dan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik tahun lalu} \times 100 \%$
3)	Persentase Pertumbuhan Rasio Kesesuaian Tata Ruang	$(\text{rasio kesesuaian tata ruang tahun ini} - \text{rasio kesesuaian tata ruang tahun lalu}) / \text{jumlah rasio kesesuaian tata ruang tahun lalu} \times 100 \%$
<b>4</b>	<b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
1)	Persentase Perkembangan Akses Sanitasi Layak	$(\text{Persentase akses sanitasi layak tahun ini} - \text{persentase akses sanitasi layak tahun lalu}) / \text{persentase cakupan sanitasi layak tahun lalu} \times 100 \%$
2)	Persentase Perkembangan Akses Air Minum Layak	$(\text{Persentase akses air minum layak tahun ini} - \text{persentase akses air minum layak tahun lalu}) / \text{persentase akses air minum layak tahun lalu} \times 100 \%$
3)	Persentase Perkembangan Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh	$(\text{Persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh tahun ini} - \text{persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh tahun lalu}) / \text{persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh tahun lalu} \times 100 \%$
4)	Persentase Perkembangan Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	$(\text{Persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun ini} - \text{persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun lalu}) / \text{persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun lalu} \times 100 \%$
<b>5</b>	<b>URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT</b>	
1)	Persentase Masyarakat yang menggunakan hak pilih secara aktif	$\text{Jumlah Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya} / \text{Jumlah Masyarakat yang mempunyai hak pilih} \times 100\%$
2)	Persentase kesiapsiagaan perlindungan Masyarakat	$\text{Jumlah kesiapsiagaan Linmas yang ada} / \text{Jumlah kegiatan Linmas} \times 100\%$
3)	Persentase Penanganan pelanggaran Perda	$\text{Jumlah penanganan pelanggaran perda} / \text{jumlah pelanggaran perda} \times 100\%$
4)	Indeks Penanggulangan Bencana	$(0,4 \times \text{Persentase Pencegahan Dan Kesiapsiagaan} + 0,3 \times \text{Persentase Darurat dan Logistik} + 0,3 \times \text{Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi})$
<b>6</b>	<b>URUSAN SOSIAL</b>	
1)	Persentase PMKS tertangani	$\text{Jumlah PMKS yang tertangani} / \text{jumlah PMKS yang ada} \times 100\%$
<b>B.2.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>1</b>	<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>	
1)	Persentase Pertumbuhan Partisipasi Angkatan Kerja	BPS

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
1)	Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	Perbandingan Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jumlah Perempuan dan Anak
2)	Persentase Industri Rumah Tangga Perempuan yang Mandiri	Jumlah Industri Rumah Tangga Perempuan yang Mandiri / Industri Rumah Tangga Perempuan yang ada x 100%
3)	Persentase Desa Ramah Anak	Jumlah desa yang sudah memenuhi indikator layak anak / jumlah desa yang ada x 100%
<b>3</b>	<b>URUSAN PANGAN</b>	
1)	Pertumbuhan Skor PPH	{(Skor PPH Tahun n dikurangi Skor PPH Tahun n-1 dibagi Skor PPH Tahun n-1) kali 100%}
<b>4</b>	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>	
1)	Persentase Perkembangan Penyelesaian Kasus Tanah Negara	(Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi tahun ini - Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi tahun lalu) / Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi tahun lalu x 100 %
<b>5</b>	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
1)	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})_M^2 + (C_i / L_{ij})_R^2}{2}}$
2)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	(Indeks Pencemar NO <sub>2</sub> + Indeks Pencemar SO <sub>2</sub> ) / 2
3)	Luas Tutupan Lahan	(luas lahan pada waktu pengamatan awal – luas lahan pada waktu pengamatan akhir) / (tahun pengamatan awal – tahun pengamatan akhir)
<b>6</b>	<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
1)	Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Jumlah Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan / Masyarakat yang Wajib Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan x 100%
<b>7</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	
1)	Persentase Desa dengan Kinerja Baik	Jumlah Desa dengan Kinerja Baik / Jumlah Desa dengan ada x 100%
<b>8</b>	<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
1)	CPR	Jumlah PUS yang memakai suatu cara KB / jumlah PUS x 100
<b>9</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>	
1)	Indeks Peningkatan Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan	( 0,5 x persentase perlengkapan jalan yang terpelihara) + (0,5 x Persentase jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana)
2)	Indeks Perkembangan Fasilitas dan Prasarana Layanan Jaringan	(0,5 x Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan) + (0,5 x Persentase

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula
	Distribusi Orang/Barang	kendaraan yang berada dalam kondisi laik jalan)
3)	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	(0,5 x Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan) + (0,2 x Persentase pelanggaran angkutan) + (0,3 x Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola)
<b>10</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
1)	Indeks SPBE	(nilai indikator kebijakan internal SPBE + nilai indikator internal layanan SPBE + nilai indikator tata kelola SPBE + indikator nilai layanan SPBE)
2)	Skor KIP	(30 % x hasil verifikasi <i>Self Assessment Questionnaire</i> ) + (30 % x hasil verifikasi lanjutan acak) + (40 % x hasil visitasi)
<b>11</b>	<b>URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	
1)	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	{(Jumlah koperasi aktif Tahun n dikurangi jumlah koperasi aktif Tahun n-1 dibagi jumlah koperasi aktif Tahun n-1) kali 100%}
<b>12</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>	
1)	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang terserap pada Penanaman Moda	{(Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap pada Penanaman Modal Tahun n dikurangi jumlah tenaga kerja lokal yang terserap pada Penanaman Modal Tahun n-1 dibagi jumlah tenaga kerja lokal yang terserap pada Penanaman Modal Tahun n-1) kali 100%}
2)	Persentase Penanaman Modal yang Taat Aturan	{(jumlah Penanaman Modal yang taat aturan dibagi jumlah seluruh Penanaman Modal) kali 100%}
<b>13</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>	
1)	Persentase Budaya Lokal yang dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata	{(jumlah Budaya Lokal yang dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata dibagi jumlah seluruh Budaya Lokal) kali 100%}
<b>14</b>	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>	
1)	Persentase Cakupan Layanan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang terlayani / jumlah perpustakaan yang ada x 100%
<b>15</b>	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>	
1)	Persentase Pengelolaan Kearsipan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Pengelolaan Kearsipan Daerah sesuai NSPK / jumlah Pengelolaan Kearsipan Daerah x 100%
<b>16</b>	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	
1)	Persentase Cabang Olahraga yang dibina dan dikembangkan	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina dan dikembangkan / jumlah Cabang Olahraga yang ada
2)	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina dan dikembangkan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina dan dikembangkan / jumlah Organisasi Kepemudaan yang ada x 100%
<b>17</b>	<b>URUSAN STATISTIK</b>	
1)	Persentase Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tanggap dan Transparan	(Jumlah data yang terpublikasi dibagi data yang harus tersedia) x 100 %
<b>18</b>	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula
1)	Indeks KAMI	(skor rata-rata tata kelola keamanan informasi) + (skor rata-rata pengelolaan resiko keamanan informasi) + (skor rata-rata kerangka kerja pengelolaan kemaanan informasi) + (skor rata-rata pengelolaan asset informasi) + (skor rata-rata teknologi dan keamanan informasi)
<b>B.3</b>	<b>PELAYANAN URUSAN PILIHAN</b>	
<b>1</b>	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
1)	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	$\{(Jumlah\ Produksi\ Perikanan\ Budidaya\ Tahun\ n\ dikurangi\ jumlah\ Produksi\ Perikanan\ Budidaya\ Tahun\ n-1\ dibagi\ jumlah\ Produksi\ Perikanan\ Budidaya\ Tahun\ n-1)\ kali\ 100\%\}$
2)	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan	$\{(Jumlah\ Pelaku\ Usaha\ Pengolahan\ Ikan\ Tahun\ n\ dikurangi\ jumlah\ Pelaku\ Usaha\ Pengolahan\ Ikan\ Tahun\ n-1\ dibagi\ jumlah\ Pelaku\ Usaha\ Pengolahan\ Ikan\ Tahun\ n-1)\ kali\ 100\%\}$
3)	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	$\{(Jumlah\ Produksi\ Perikanan\ Tangkap\ Tahun\ n\ dikurangi\ jumlah\ Produksi\ Perikanan\ Tangkap\ Tahun\ n-1\ dibagi\ jumlah\ Produksi\ Perikanan\ Tangkap\ Tahun\ n-1)\ kali\ 100\%\}$
<b>2</b>	<b>URUSAN PARIWISATA</b>	
1)	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang menumbuhkan Perekonomian Lokal	$\{(Jumlah\ Destinasi\ Wisata\ yang\ menumbuhkan\ perekonomian\ lokal\ Tahun\ N\ dikurangi\ jumlah\ Destinasi\ Wisata\ yang\ menumbuhkan\ perekonomian\ lokal\ Tahun\ N-1\ dibagi\ jumlah\ Destinasi\ Wisata\ yang\ menumbuhkan\ perekonomian\ lokal\ Tahun\ N-1)\ kali\ 100\%\}$
<b>3</b>	<b>URUSAN PERTANIAN</b>	
1)	Pertumbuhan kelas kelompok tani	$\{(Jumlah\ kelompok\ tani\ yang\ naik\ kelas\ Tahun\ n\ dikurangi\ Jumlah\ kelompok\ tani\ yang\ naik\ kelas\ Tahun\ n-1\ / Jumlah\ kelompok\ tani\ yang\ naik\ kelas\ Tahun\ n-1)\ kali\ 100\%\}$
2)	Persentase peningkatan produksi tembakau kualitas baik	$\{(Jumlah\ Produksi\ Tembakau\ Berkualitas\ Baik\ Tahun\ n\ dikurangi\ Jumlah\ Produksi\ Tembakau\ Berkualitas\ Baik\ Tahun\ n-1\ / Jumlah\ Produksi\ Tembakau\ Berkualitas\ Baik\ Tahun\ n-1)\ kali\ 100\%\}$
3)	Indeks pertanaman	(Luas Lahan Yang Ditanami dibagi Seluruh Luas lahan Pertanian)
4)	Persentase peningkatan populasi ternak	$\{(Jumlah\ Populasi\ Ternak\ Tahun\ n\ dikurangi\ Jumlah\ Populasi\ Ternak\ Tahun\ n-1\ / Jumlah\ Populasi\ Ternak\ Tahun\ n-1)\ kali\ 100\%\}$
5)	Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	$\{(Jumlah\ Produksi\ Tanaman\ Pertanian\ Tahun\ n\ dikurangi\ Jumlah\ Produksi\ Tanaman\ Pertanian\ Tahun\ n-1\ / Jumlah\ Produksi\ Tanaman\ Pertanian\ Tahun\ n-1)\ kali\ 100\%\}$
6)	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	$\{(Jumlah\ Produksi\ Tanaman\ Perkebunan\ Tahun\ n\ dikurangi\ Jumlah\ Produksi\ Tanaman\ Perkebunan\ Tahun\ n-1\ / Jumlah\ Produksi\ Tanaman\ Perkebunan\ Tahun\ n-1)\ kali\ 100\%\}$
<b>4</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>	
1)	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	BPS

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula
2)	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	$\{(Nilai\ Ekspor\ Tahun\ n\ dikurangi\ Nilai\ Ekspor\ Tahun\ n-1\ dibagi\ Nilai\ Ekspor\ Tahun\ n-1)\ kali\ 100\%\}$
<b>5</b>	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>	
1)	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	BPS
2)	Persentase Peningkatan Klaster Usaha Industri Kreatif	$\{(Jumlah\ Klaster\ Usaha\ Industri\ Kreatif\ Tahun\ n\ dikurangi\ jumlah\ Klaster\ Usaha\ Industri\ Kreatif\ Tahun\ n-1\ dibagi\ jumlah\ Klaster\ Usaha\ Industri\ Kreatif\ Tahun\ n-1)\ kali\ 100\%\}$
<b>B.4.</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	
1)	Indeks Kualitas Perencanaan	Total skor rata-rata (nilai proses perencanaan, nilai isi perencanaan dan nilai jaminan tindak lanjut) / total skor ideal x 10
<b>2</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
1)	Persentase Pertumbuhan Hasil Kelitbangan	$\{(Jumlah\ Hasil\ Kelitbangan\ Tahun\ n\ dikurangi\ jumlah\ Hasil\ Kelitbangan\ Tahun\ n-1\ dibagi\ jumlah\ Hasil\ Kelitbangan\ Tahun\ n-1)\ kali\ 100\%\}$
<b>3</b>	<b>KEUANGAN DAERAH</b>	
1)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Opini BPK
2)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah PAD / jumlah pendapatan daerah x 100%
3)	Persentase Peningkatan PAD	$(Jumlah\ PAD\ tahun\ n) - (Jumlah\ PAD\ tahun\ n-1) / Jumlah\ PAD\ tahun\ n-1$
4)	Persentase Petepatan Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	Jumlah penetapan Perda APBD yang tepat waktu / Jumlah penetapan Perda APBD x 100%
5)	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu / Jumlah Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ada x 100%
<b>4</b>	<b>KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
1)	Nilai Kualitas ASN	Jumlah nilai yang berasal dari dimensi nilai (kualifikasi + kompetensi + kinerja + disiplin)
<b>5</b>	<b>PENGAWASAN</b>	
1)	Nilai Maturitas SPIP	Hasil Nilai Maturitas SPIP
<b>6</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
1)	Indek Kepuasan Anggota DPRD	Nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan terhadap Anggota DPRD
2)	Persentase Peningkatan Fasilitasi Fungsi Legislasi	$(Jumlah\ Fasilitasi\ Fungsi\ Legislasi\ tahun\ n) - (Jumlah\ Fasilitasi\ Fungsi\ Legislasi\ tahun\ n-1) / Jumlah\ Fasilitasi\ Fungsi\ Legislasi\ tahun\ n-1$
3)	Persentase Peningkatan Fasilitasi fungsi Pengawasan dan Penganggaran	$(Jumlah\ Fasilitasi\ fungsi\ Pengawasan\ dan\ Penganggaran\ tahun\ n) - (Jumlah\ Fasilitasi\ fungsi\ Pengawasan\ dan\ Penganggaran\ tahun\ n-1) / Jumlah\ Fasilitasi\ fungsi\ Pengawasan\ dan\ Penganggaran\ tahun\ n-1$
<b>7</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
1)	Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian SAKIP OPD

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula
2)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan OPD	Nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan OPD terhadap masyarakat
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>	
1)	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai IRB Kemenpan
2)	Nilai SAKIP	Hasil Nilai SAKIP
3)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Hasil Nilai PMPRB
4)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM Kemenpan
5)	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	{(Nilai Investasi Tahun n dikurangi Nilai Investasi Tahun n-1 dibagi Nilai Investasi Tahun n-1) kali 100%}
6)	Realisasi Investasi Baru PMA dan PMDN	Nilai Rp.
7)	Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	{(Jumlah Usaha Industri Kreatif Tahun n dikurangi jumlah Usaha Industri Kreatif Tahun n-1 dibagi jumlah Usaha Industri Kreatif Tahun n-1) kali 100%}
8)	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	{(Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata Tahun n dikurangi Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata Tahun n-1 dibagi Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata Tahun n-1) kali 100%}
9)	Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	Nilai Rp.
10)	Rasio Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah peta analog atau digital yang tersedia / jumlah kecamatan dan kelurahan x 100%
11)	Indeks Akses Transportasi	(0,4 x Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang) + (0,3 x Indeks peningkatan pelayanan angkutan) + (0,3 x Indeks peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan)
12)	Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Jumlah Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan / Masyarakat yang Wajib Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan x 100%

## **BAB IX PENUTUP**

Perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; sinkronisasi terkait akuntabilitas kinerja daerah; serta karena penyesuaian Perangkat Daerah. Dokumen Perubahan RPJMD ini adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, Focus Group Discussion (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta dengan penyalarsan kebijakan dan program nasional dan provinsi.

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana melaksanakan RPJMD, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah, dan kolaborasinya dengan pemerintah pusat dalam koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

### **9.1. Pedoman Transisi**

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Rembang, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2020-2021  
Penyusunan RKPD Tahun 2020 s.d 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ini.
2. RKPD Tahun 2022  
Penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat, Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2022 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2022.

### **9.2. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi

efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD ini;
3. Program baru beserta indikator kinerja dan pagu indikatifnya diselaraskan dengan program pada tahun 2016 s.d 2019 beserta capaian indikator kinerjanya;
4. Penjabaran lebih lanjut Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
5. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, BAPPEDA berkewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap penjabaran Perubahan RPJMD ini ke dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
7. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi, dan program/kegiatan yang telah di susun, maka pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ini menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Rembang dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten Rembang 2016 – 2021 yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”**

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ